Kabupaten Karimun

Karimun Meloju dalam Harmoni

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

BerAKHLAK

Bevenlertini Palyjoman Alyanlabor usmpeton
Iterišerini Teyal, Adaptil Vemberself

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yangsetinggi-tingginya kita ucapkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terbatas sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian 17 sasaran strategis yang mendukung visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Karimun, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan ini juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel, sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan berwawasan dunia (*dynamic governance*).

Sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai hasil pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga mencakup evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai target tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

Semoga LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2025 yang disusun pada Tahun 2026 sampai bulan maret nanti dapat berjalan dengan lancar dan semoga bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pengambil kebijakan dalam menciptakan program yang tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kinerja di tahun- tahun berikutnya.

Tanjung Balai Karimun, 10 Maret 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi pemerintah melaporkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi *core* instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat *outcomes* menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisaterus meningkatkan kinerjanya sesuai peran yang diemban.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah dicanangkan pada tahun 2025.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Karimun tahun 2025 yang berjumlah 9 (100%), dengan kinerja yang memenuhi kriteria sangat tinggi 8 (90-99,%), kriteria tinggi 1 (89,00%) dan kriteria sedang 3 (70-78,%) serta kreteria 4 (0%) . Rincian dari capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Penduduk tercapai 234, 62%.
b. Indeks Kualitas Lahan tercapai 131,13%.
c. Indeks Kualitas Air tercapai 131,93%
d. Rasio SDM Kebudayaan berprestasi tercapai 112,50%.
e. Rasio KK yang terlayani infrastruktur dasar tercapai 111,36%
f. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tercapai 110,20%.
g. Indeks Pelayanan Publik tercapai 107,00%
h. Angka Harapan Hidup tercapai 104,97%
i. Nilai investasi tercapai 101,22 %.
j. Indeks Pembangunan Gender tercapai 99,85%.
k. Rasio Panjang Jalan dalam kondisi baik tercapai 99,33%.
l. Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 99,19%.
m. Tingkat Pengangguran Terbuka tercapai 97,08%
n. Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 94,96%.
o. Rasio konektivitas angkutan darat tercapai 93,55%.
p. Persentase PPKS Mandiri tercapai 90,73%.
q. Rata-rata lama sekolah tercapai 90,69%.

r. Indeks Pembangunan Pemuda tercapai 89,50%.
s. Nilai Manajemen Risiko Indeks tercapai 78,79%
t. Rasio konektivitas angkutan laut tercapai 78,26 %.
u. Indeks Kualitas Udara tercapai 76,72%.
v. Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercapai 00,00%.
w. Luar Ruang Terbuka Hijau tercapai 0 %.
x. Nilai LPPD tercapai 0%
y. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tercapai 0%.

Capaian kinerja pada sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator yang mencapai tingkat capaian di atas 100%, yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Laju Pertumbuhan Pendudukan mencatat capaian tertinggi sebesar 234,62%, yang menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang mengalami proyeksi awal. Selain itu, indikator lingkungan seperti Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air juga menunjukkan capaian yang sangat baik masing – masing sebesar 131, 13 % dan 131,93% yang mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada sektor sosial dan budaya, Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi mencapai 112,50% sementara Rasio Kepala Keluarga (KK) yang terlayani infrastruktur Dasar mencapai 111,36% yang menunjukkan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah mencapai 110,20% yang mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, indikator pelayanan publik dan kesenjangan masyarakat juga menunjukkan capaian yang positif, di antaranya Indeks Pelayanan Publik sebesar 107,00%, serta Angka Harapan Hidup sebesar 104,97% yang menggambarkan peningkatan kualitas layanan dan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Nilai Investasi juga berhasil melampaui target dengan capaian 101,22% yang menunjukkan iklim investasi daerah yang cukup kondusif. Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut mencerminkan kinerja pembangunan daerah yang efektif dan menunjukkan keberhasilan dalam berbagai sektor. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut secara berkelanjutan serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Capaian kinerja pada sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun sebagian besar masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator dengan tingkat capaian mendekati 100%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif namun masih memerlukan penyempurnaan. Indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai 99,85%, diikuti oleh Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 99,33%, serta Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 99,19%, yang menunjukkan kinerja yang hampir mencapai target. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 97,08%, yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif

stabil meskipun musuh memerlukan upaya penyerapan tenaga kerja. Pada sektor pendidikan, indikator Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 94,96 % dan Rata -Rata Lama Sekolah sebesar 90,69% yang menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang di harapkan. Sementara itu, Rasio Konektivitas Angkutan Darat mencapai 93,55% yang mengindikasikan bahwa konektivitas transportasi darat sudah cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan infrastruktur dan layanan. Adapun indikator Persentase Pemerluan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri mencapai 90,73% yang menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan sosial telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, capaian indikator - indikator tersebut menggambarkan kinerja pembangunan yang cukup baik dan mendekati target. Kedepan, diperlukan upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar seluruh indikator dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 89,50% menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di bidang kepemudaan telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini mencerminkan kesehatan, serta kesempatan kerja dan kepemimpinan pemuda, telah menunjukkan perkembangan yang positif. Masih terdapat ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda, memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan serta mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah selain itu, tantangan dalam penyediaan lapangan kerja dan penguatan kapasitas kewirausahaan pemuda juga menjadi faktor yang memengaruhi capaian indikator ini. Diperlukan upaya lebih terarah melalui program pemberdayaan pemuda, peningkatan keterampilan serta penguatan peran organisasi kepemudaan. Dengan demikian, diharapkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda data terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Capaian kinerja pada beberapa indikator masih menunjukkan hasil yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks yang mencapai 78,79%. Rasio Konektivitas Angkutan Laut sebesar 78,29% serta Indeks Kualitas Udara sebesar 76,72%. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks yang belum optimal mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari sisi pemahaman, implementasi, maupun pengawasan terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Sementara itu, capaian Rasio Konektivitas Angkutan Laut mencerminkan bahwa konektivitas antara wilayah, khususnya pada daerah kepulauan, masih menghadapi kendal seperti keterbatasan sasaran dan prasarana transportasi serta belum optimalisasi jaringan layanan. Capaian nilai Indeks Kualitas Udara menunjukkan bahwa kualitas lingkungan udara masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas transportasi, industri maupun faktor lingkungan lainnya yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator tersebut menunjukkan perlunya upaya

peningkatan yang lebih terfokuskan dan berkelanjutan. Penguatan implementasi manajemen risiko, peningkatan infrastruktur dan layanan transportasi laut serta pengendalian pencemaran lingkungan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan agar capaian kinerja dapat meningkatkan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pada beberapa indikator strategis menunjukkan hasil yang belum tercapai sama sekali, sebagaimana terlihat pada indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Luas Ruang Terbuka Hijau, Nilai LPPD serta Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang masing–masing mencatat capaian sebesar 0%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum tersedianya data yang valid dan terukur, keterlambatan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data atau belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dimaksud. Selain itu, untuk indikator tertentu seperti Nilai LPPD, capaian sangat bergantung pada hasil evaluasi dari pemerintahan pusat yang memiliki siklus penilaian tersendiri sehingga tidak selalu dapat ditampilkan pada tahun yang sama. Pada indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, capaian nol dapat disebabkan oleh belum tersedianya rilis data resmi atau belum dilakukannya pengukuran pada periode pelaporan. Demikian pula dengan indikator Luas Ruang Terbuka Hijau dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang sangat bergantungan pada kesiapan sistem pendataan serta implementasi program di lapangan. Secara keseluruhan, kondisi ini menjadi perhatian penting bagi perangkat daerah terkait untuk segera melakukan perbaikan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program maupun sistem pengumpulan dan pelaporan data. Ke depan diperlukan penguatan koordinasi, percepatan penyediaan data serta optimalisasi program/kegiatan agar indikator-indikator tersebut dapat terukur dan menunjukkan capaian yang lebih baik pada periode berikutnya.

Penilaian Kinerja Organisasi Kabupaten Karimun (Perubahan) Per-tanggal 16 Oktober Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai saran untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan peluang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan penilaian kinerja ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan pembangunan, perkembangan kebijakan serta hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan penilaian kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif terhadap kondisi aktual capaian kinerja organisasi. Selain itu, penilaian kinerja organisasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kerja. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah ke depan. Dengan demikian, melalui Penilaian

Kinerja Organisasi Kabupaten Karimun (Perubahan) ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Karimun (Perubahan) tahun 2025 yang berjumlah 9 (100%), dengan kinerja yang memenuhi kriteria sangat tinggi 8 (90-99,%), kriteria tinggi 1 (89,00%) dan kriteria sedang 3 (70-78,%) serta kreteria 4 (0%) . Rincian dari capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

a. Indeks Risiko Bencana tercapainya 153.37%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercapainya 115.15%
c. Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) tercapai 108.73%
d. Indeks Pelayanan Publik tercapainya 107.00%
e. Persentase Keluarga Miskin yang Ditangani tercapainya 105.20 %
f. Usia Harapan Hidup tercapai 103.36 %
g. Indeks Infrastruktur tercapai 102.25 %
h. Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB) tercapainya 101.87 %
i. Rata-rata lama sekolah tercapai 100.89 %
j. Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 100.00 %
k. Nilai SAKIP tercapainya 99.62%
l. Rasio Konektivitas tercapainya 99.33 %
m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapainya 97.79%
n. Nilai Maturitas SPIP tercapainya 95.52%
o. Indeks Ketahanan Pangan tercapainya 93,28%
p. Indeks Desa tercapainya 93,28 %
q. Indeks Pembangunan Pemuda tercapai 89.50 %
r. Indeks Ketimpangan Gender tercapai 80%
s. Prevalensi Stunting tercapai 37.94 %
t. Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah) tercapainya N/A
u. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapainya N/A

Capaian kinerja Pembangunan daerah menunjukkan hasil yang sangat positif di mana Sebagian besar indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator Indeks Risiko Bencana mencatat capaian tertinggi sebesar 153,37% yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam Upaya pengurungan Risiko bencana dan kesiapsiagaan daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas program mitigasi dan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan. Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 115,15% yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) juga menunjukkan capaian yang baik sebesar 108,73%, mencerminkan peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pada aspek pelayanan Indeks Pelayanan Publik mencapai 107,00% yang menandakan adanya peningkatan kualitas layanan kepada Masyarakat. Selanjutnya dengan itu, persentase keluarga miskin yang ditangani mencapai 107,20% menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang semakin efektif dan tepat sasaran. Indikator Usia Harapan Hidup yang mencapai 103,36% menggambarkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, didukung oleh akses layanan Kesehatan yang semakin baik. Sementara itu Indeks Infrastruktur yang mencapai 102,25% menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar. Pada sisi ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB mencapai 101,87% yang mencerminkan peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi daerah. Di bidang Pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 100,89% dan angka harapan lama sekolah mencapai 100,00% yang menunjukkan bahwa capaian sektor Pendidikan telah sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa kinerja Pembangunan daerah berada pada jalur yang sangat baik dengan mayoritas indikator tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh.

Capaian kinerja pada indikator berikutnya menunjukkan hasil yang relatif baik, meskipun Sebagian masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP tercapai sebesar 99,62% yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan optimal dan mendekati target, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Rasio Konektivitas mencapai 99,33% mencerminkan tingkat keterhubungan wilayah yang sudah sangat baik dalam mendukung mobilitas Masyarakat dan distribusi barang, meskipun masih memerlukan sedikit peningkatan untuk mencapai target secara penuh. Pada aspek lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) tercapai sebesar 97,79% yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup relatif terjaga dengan baik, namun tetap memerlukan perhatian dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dari sisi tata Kelola pemerintahan Nilai Maturitas SPIP mencapai 95,52% yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan cukup efektif, namun masih perlu penguatan terutama dalam manajemen Risiko dan pengendalian kegiatan. Sementara itu, Indeks Ketahanan Pangan sebesar 93,28% menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan pangan. Indeks Desa yang juga mencapai 93,28% menggambarkan bahwa tingkat perkembangan desa berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan kemandirian, pelayanan dasar dan Pembangunan ekonomi desa. Capaian indikator pada kelompok ini menunjukkan kinerja yang solid dan mendekati target, meskipun diperlukan upaya peningkatan yang lebih terfokus agar seluruh indikator dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di masa mendatang.

Capaian kinerja pada indikator Pembangunan sosial menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Indeks Pembangunan Pemuda tercapai sebesar 89,50% yang mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan pemuda sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam peningkatan partisipasi pemuda, akses terhadap Pendidikan dan lapangan kerja serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan Gender yang tercapai sebesar 80% menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. Capaian ini mengindikasikan bahwa kesetaraan akses dan partisipasi antara laki-laki dan Perempuan dalam berbagai sektor pembangunan seperti Pendidikan, ekonomi dan pengambilan Keputusan belum sepenuhnya terwujud. Secara keseluruhan kedua indikator ini menggambarkan bahwa Pembangunan inklusif, khususnya yang menyasar kelompok pemuda dan kesetaraan gender, masih memerlukan Upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan kebijakan, program dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong peningkatan kualitas pemuda serta mewujudkan kesetaraan gender yang baik di masa mendatang.

Capaian indikator Prevelensi Stunting sebesar 37,94% menunjukkan bahwa kinerja penanganan stunting masih jauhnya dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius dalam Pembangunan Kesehatan masyarakat khususnya terkait pemenuhan gizi pola asuh sera akses terhadap layanan Kesehatan ibu dan anak. Rendahnya capaian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti masih terbatasnya investasi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, kurang optimalnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga terutama berperan dalam mempengaruhi tingkat prevelensi stunting di daerah. Degan demikian, diperlukan Upaya yang lebih intensif dan terfokus melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas intervensi gizi, perbaikan sanitasi lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat. Langkah–Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan prevlensi stunting sehingga target yang telah ditetapkan tercapai secara optimal di masa mendatang.

Capaian kinerja pada indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tercatat N/A menunjukkan bahwa data realisasi pada periode pelaporan belum tersedia atau belum dapat diukur secara *valid*. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterlambatan proses pengumpulan, pengelolaan, maupun verifikasi data dari instansi terkait. Pada indikator PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan belum tersedianya data dapat disebabkan oleh masih berlangsungnya proses perhitungan resmi yang biasanya dirilis secara periodik oleh Lembaga statistik. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indeks SPBE, nilai yang belum tersedia dapat mengindikasi bahwa proses evaluasi dan penilaian oleh instasnsi yang berwenang masih berlangsung atau belum dipublikasikan. Padahal, indikator ini sangat penting

dalam mengukur tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan percepatan koordinasi dengan instansi penyedia data serta penguatan sistem pelaporan agar ketersediaan data dapat lebih tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara menyeluruh dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan di periode selanjutnya.

Di samping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis *website*. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.

Hasil dari pencapaian kinerja sebagaimana dibahas di dalam cukup memberikan dampak terdapat pencapaian indikator makro dan di Kabupaten Karimun :

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI	
		2023	2024
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	6,45%
2	Indeks Gini	0,34	0,308
3	Tingkat Kemiskinan	5,95%	5,87%
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,7	75,49
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02%	5,52%
6	PDRB Perkapita	65,27	69,61

Perkembangan indikator makro daerah dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan tren yang positif di berbagai aspek Pembangunan, pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan dari 5,5% pada tahun 2023 menjadi 6,45% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya produktivitas di berbagai sektor. Dari sisi pemerataan, Indeks Gini menurun dari 0,34 menjadi 0,308 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan Masyarakat. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi semakin berkurang sehingga hasil Pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,95% menjadi 5,87%. Meskipun penurunannya relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

Pada aspek kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,7 menjadi 75,49. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi Pendidikan, Kesehatan dan standar hidup layak. Sejalan dengan itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 6,02% menjadi 5,52% yang menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu PDRB per kapita meningkat dari 65,27 menjadi 69,61 yang mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkat secara agregat, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan Masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, capaian indikator makro tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat mengalami perbaikan yang cukup signifikan, meskipun tetapi diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih inklusif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
IKHTISAR EKSEKUTIF IV
DAFTAR ISI XIII
DAFTAR TABEL XIV
DAFTAR GRAFIK XVIII
DAFTAR GAMBAR XIX
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN 1
1.3 POTENSI UNGGULAN DAERAH 7
1.4 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 14
1.5 APARAT PEMERINTAH 32
1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ORGANISASI 34
1.7 ISU STRATEGI 35
1.8 STRUKTUR ORGANISASI 36
1.9 MAKSUD DAN TUJUAN 37
1.10 SISTEMATIKA PENYAJIAN 38
BAB II PERENCANA KINERJA 40
2.1 RENCANA STRATEGIS 40
2.2 RENCANA KINERJA 45
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025. 49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 61
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 66
BAB IV PENUTUP 241
LAMPIRAN : 242
PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN IBUKOTA KECAMATAN SERTA JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 2
TABEL 1.2 PERSENTASE LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PULAU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 3
TABEL 1.3 LUAS WILAYAH KABUPATEN KARIMUN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2025 4
TABEL 1.4 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN KARIMUN MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2025 5
TABEL 1.5 DATA HASIL PEREKAMAN E-KTP KABUPATEN KARIMUN MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2024 6
TABEL 1.6 DATA PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN KABUPATEN KARIMUN MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2024 7
TABEL 1.7 VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 8
TABEL 1.8 VOLUME DAN NILAI PRODUKSI HASIL OLAHAN PERIKANAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 9
TABEL 1.9 JUMLAH EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 S.D. 2025 9
TABEL 1.10 VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN SELAMA TAHUN 2025 10
TABEL 1.11 PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN KARIMUN MENURUT JENIS TANAMAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024 S.D. 2025 (TON PER HA) 11
TABEL. 1.12 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 S.D. 2025 (TON) 11
TABEL 1.13 PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN MENENGAH TAHUN 2020- 2023 12
TABEL 1.14 PERKEMBANGAN JUMLAH UKM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2024 13
TABEL 1.15 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KARIMUN, 2021-2024 18
TABEL 1.16. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 S/D 2024 32
TABEL 1.17 REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 S/D 2024 33
TABEL 1.18 REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 S/D 2024 33
TABEL 1.19 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN 36
TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN 2021-2026 44
TABEL 2.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN 2025-2029 45
TABEL 2.3PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 (TRIWULAN I S/D III) 47
TABEL 2.4 PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUNTAHUN 2025 (TRIWULAN IV) 48
TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (TRIWULAN I S/D III) 50
TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (TRIWULAN IV) 52
TABEL 3.1 NILAI DAN KATEGORI PREDIKAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 56
TABEL 3.2 PENILAIAN KINERJA ORGANISASI KABUPATEN KARIMUN 03 MARET TAHUN 2025 57
TABEL 3.3 PENILAIAN KINERJA ORGANISASI KABUPATEN KARIMUN 16 OKTOBER TAHUN 2025 59
TABEL 3.4 SKALA PENGUKURAN KINERJA 61
TABEL 3.5 PENCAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2025 (TRIWULAN I S/D III) 61
TABEL 3.6 PENCAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2025 (TRIWULAN IV) 64
TABEL 3.7 CAPAIAN INDIKATOR NILAI INVESTASI 67
TABEL 3.8 RENCANA INVESTASI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 69
TABEL 3.9 REALISASI TAMBAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 69
TABEL 3.10 REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 69
TABEL 3.11 PERBANDINGAN TOTAL REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023, 2024 DAN 2025 70
TABEL 3.12 PERSENTASE KENAIKAN NILAI INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 70
TABEL 3.13 ANALISA EFISIENSI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 70
TABEL 3.14 TARGET DAN CAPAIAN NILAI PDRB KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 72
TABEL 3.15 PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN KARIMUN MENURUT JENIS TANAMAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024 S.D.2025 (TON PER HA) 73
TABEL 3.16 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KECAMATAN DIKABUPATENKARIMUNTAHUN2024 S.D.2025 (TON) 73
TABEL. 3.17 POPULASI TERNAK BESAR MENURUT JENIS DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 S.D.2024 75
TABEL. 3.18 DATA PRODUK TERNAK DI KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN PADA TAHUN 2024 75

TABEL 3.19 VOLUME DAN PRODUKSI PERIKANAN 2017S.D. 2025 77
TABEL 3.20 VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 80
TABEL 3.21 JUMLAH ARMADA PENANGKAPAN PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 81
TABEL 3.22 VOLUME DAN NILAI PRODUKSI HASIL OLAHAN PERIKANAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 82
TABEL 3.23 JUMLAH EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 S.D. 2025..... 83
TABEL 3.24 VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN SELAMA TAHUN 2025..... 85
TABEL 3.25 EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR NILAI PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 85
TABEL 3.26 TEGET DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025..... 86
TABEL 3.27 CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 87
TABEL 3.28 CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (APBD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 88
TABEL 3.29 KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KAB.KARIMUN TAHUN 2021 – 2025..... 89
TABEL 3.30 CAPIAN TARGET, REALISASIDAN KONTRIBUSI SEKTOR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 92
TABEL 3.31 ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARIMUN 95
TABEL 3.32 CAPIAN TARGET, REALISASIDAN KONTRIBUSI SEKTOR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 96
TABEL 3.33 PERSENTASE KK YANG TERLAYANI INFRASTRUKTUR DASAR DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 99
TABEL 3.34 PERSENTASE PENDUDUK BERAKSIS AIR BERSIH 101
TABEL 3.35 JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI DI KABUPATEN KARIMUN/KOTA PADA TAHUN 2025 101
TABEL 3.36 SASARAN STRATEGI MENINGKATNYA AKSES KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DASAR MASYARAKAT YANG MERATA TAHUN 2025 106
TABEL 3.37 CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN TERWUJUDNYA PRASARANA PENGHUBUNG YANG OPTIMAL TAHUN 2025 107
TABEL 3.38 PROPORSI PANJANG JALAN BERASPAL BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN KARIMUN 108
TABEL 3.39 PULAU-PULAU BERPENGHUNI YANG TERLAYANI TRAYEK/TRANSPORTASI LAUT REGULER TAHUN 2020 S.D 2024..... 109
TABEL 3.40 TABEL DATA TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DAN KABUPATEN..... 111
TABEL 3.41 TABEL DUKUNGAN ANGGARAN SASARAN "TERWUJUDNYA PRASARANA PENGHUBUNG YANG OPTIMAL" TAHUN 2025 114
TABEL 3.42 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR RASIO KONEKTIVITAS ANGKUTAN LAUT DAN DARAT ANTARA LAIN :..... 114
TABEL 3.43 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT..... 116
TABEL 3.44 ANALISIS EFISIENSI SASARAN 121
TABEL 3.45 CAPAIAN INDIKATOR ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH..... 125
NO 125
SASARAN..... 125
INDIKATOR..... 125
TAHUN 2025..... 125
TABEL 3.46 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN KARIMUN 126
SUMBER : BPS DAN DISDIKBUD KABUPATEN KARIMUN..... 126
TABEL 3.47 PERBANDINGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2026 127
TABEL 3.48 PERBANDINGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2025 KABUPATEN KARIMUN DENGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN NASIONAL 128
TABEL 3.49 CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 129
TABEL 3.50 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN KARIMUN . 130
TABEL 3.51 PERBANDINGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2026 131
TABEL 3.52 PERBANDINGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2025 KABUPATEN KARIMUN DENGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN NASIONAL 132
TABEL 3.53 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER 133
TABEL 3.54 INDIKATOR VARIABEL PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2025 134
TABEL 3.55 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2025 135

TABEL 3.56 INDEKS KETIMPANGAN GERDER (IKG) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020-2025 136
TABEL 3.57 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR IPG..... 137
TABEL 3.58 PERKEMBANGAN IPM, IPG DAN IDG PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020-2023..... 139
TABEL 3.59 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2025 140
TABEL 3.60 DATA PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 – 2025.... 141
TABEL 3.61 DATA KELAHIRAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 142
TABEL 3.62 DATA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DAN/PESERTA KB AKTIF MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN..... 143
TAHUN 2025..... 143
TABEL 3.63 DATA KEMATIAN PENDUDUK DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 144
TABEL 3.64 DATA PENDUDUK PINDAH DATANG DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 145
TABEL 3.65 DATA PENDUDUK PINDAH KELUAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025..... 146
TABEL 3.66 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR KEPENDUDUKAN TA 2025 146
TABEL 3.67 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 148
TABEL. 3.68 TINGKATAN STATUS INDEKS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 149
TABEL 3.69 NILAI AKTUAL INDIKATOR PADA DIMENSI PENDIDIKAN 149
TABEL. 3.70 ANALISIS PENENTUAN INDIKATOR INTI SETIAP DOMAIN 150
TABEL . 3.71 TOTAL PERSENTASE DARI MASING-MASING DOMAIN..... 151
TABEL 3.72 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... 152
TABEL 3.73 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 153
TABEL 3.74 DATA PRESTASI/PENGHARGAAN PELAKU BUDAYA KABUPATEN KARIMUN..... 153
TABEL 3.75 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN (IKU) DENGAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025 155
TABEL 3.76 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN..... 156
TABEL 3.77 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL 163
TABEL 3.78 CAPAIAN KINERJA PPKS YANG MANDIRI..... 164
TABEL 3.79 REKAP DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) KABUPATEN KARIMUN..... 164
TABEL 3.80 PERBANDINGAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH..... 166
TABEL 3.81 ANALISIS EFISIENSI SASARAN 12 167
TABEL 3.82 CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)..... 169
TABEL 3.83 JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN KABUPATEN KARIMUN AGUSTUS 2025 170
TABEL 3.84 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 (BASELINE) SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 171
TABEL 3. 85 TARGET PERJANJIAN KINERJA DENGAN TARGET DI RPJMD 173
TABEL 3.86 TARGET DAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERIN (PKP)TAHUN 2025..... 174
TABEL 3.87 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS..... 175
TABEL 3.88 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... 176
TABEL 3.89 TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT 182
TABEL 3.90 TERPENUHINYA KEBUTUHAN KETAHANAN PANGAN 186
TABEL 3.91 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS DESA..... 188
TABEL 3.93 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... 197
TABEL 3.94 INDIKATOR KINERJA..... 200
TABEL 3.95 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA LUAS RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024..... 201
TABEL 3.96 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 203
TABEL 3.97 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA/ANGGARAN TERHADAP SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024” 205
TABEL 3.98 INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 211
TABEL 3.99 HASIL ANALISIS INDEKS PENCEMARAN (PIJ) AIR TAHUN 2024 213
TABEL 3.100 HASIL ANALISIS INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024..... 214
TABEL 3.101 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 214
TABEL 3.102 HASIL PERHITUNGAN KUALITAS UDARA (RATA-RATA KONSENTRASI NO2 DAN SO2) TAHUN 2024 216
TABEL 3.103 HASIL ANALISIS INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) KAB. KARIMUN TAHUN 2024 217
TABEL 3.104 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 217
TABEL 3.105 HASIL ANALISIS INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL) KAB. KARIMUN TAHUN 2023 219
TABEL 3.106 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 219
TABEL 3.107 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA/ANGGARAN TERHADAP SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA

PENGELOLAAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024" 220
TABEL 3.108 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 226
TABEL 3.109 227
NILAI IRB 2024 KABUPATEN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 227
TABEL 3.110 KLASIFIKASI KELAS RISIKO BENCANA 228
TABEL 3.111 ANALISIS EFISIENSI SASARAN 15 228
TABEL 3.112 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 16 231
TABEL 3.113 TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDEKS SPBE TAHUN BERJALAN 232
TABEL 3.114 REKAP TARGET DAN RELAISASI INDEKS SPBE DARI TAHUN KETAHUN 232
TABEL 3.115 BOBOT PERDOMEN INDEKS SPBE 233
TABEL 3.116 ANALISIS PERDOMEN INDEKS SPBE KATOGORI INDEKS SPBE 234
TABEL 3.117 PERBANDINGAN REALISASI TUJUAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 235
TABEL 3.118 ANALISIS EFISIENSI SASARAN 16 237
TABEL 3.119 CAPAIAN INDIKATOR 238
TABEL 3.120 CAPAIAN INDIKATOR BIROKRASI YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN AKUNTABEL 240
TABEL 3.121 BOBOT KOMPONEN PENILAIAN LPPD KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 241
TABEL 3.122 KOMPONEN PENILAIAN PENGUNGKIT DAN HASIL REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 242
TABEL 3.123 CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 243
TABEL 3.124 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 245
TABEL 3.125 JUMLAH PEGAWAI YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 246
TABEL 3.126 JUMLAH PEGAWAI YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 248
TABEL 3.127 KOMPONEN PENILAIAN PENGUNGKIT DAN HASIL PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 252
TABEL 3.128 NILAI MRI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 253
TABEL 3.129 NILAI MRI KABUPATAEN KARIMUN TAHUN 2025 254
TABEL 3.130 EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG MENDUKUNG INDIKATOR 259
TABEL 3.131 CAPAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 260
TABEL 3.132 NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH OLEH KEMENTERIAN PAN RB TAHUN 2025 261
TABEL 3.133 DATA REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 16 OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 262
TABEL 3.134 KATEGORI MUTU PELAYANAN 263
TABEL 3.135 HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN MASING-MASING UNSUR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 263
TABEL 3.136 CAPAIAN RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN KEPEDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 264
TABEL 3.137 INTERVAL NILAI KINERJA UNIT PELAYANAN BERDASARKAN LAMA WAKTU PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 265
TABEL 3.110 CAPAIAN RATA-RATA LAMA PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 265
TABEL 3.138 DATA REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 17 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 266
TABEL 3.139 DATA REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 17 PADA RSUD MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 270
TABEL 3.140 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PER 31 DESEMBER 2025 271
TABEL 3.141 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PER 31 DESEMBER 2025 273
TABEL 3.142 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 DESEMBER 2024 274
TABEL 3.143 ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL 275
TABEL 3.144 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN (IKU) DENGAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025 (TRIWULAN I S/D TRIWULLAN III) 227
TABEL 3.145 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN (IKU) DENGAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025 (TRIWULAN IV) 235

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KARIMUN 2020 -2024 14
GRAFIK 1.2 PDRB ADHB DAN ADHK LAPANGAN USAHA (RP MILYAR) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020-2024 15
GRAFIK 1.3 PDRB ADHB DAN ADHK PENGELUARAN (RP JUTA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 – 2024 16
GRAFIK 1.4 INDEKS GINI KABUPATEN KARIMUN,PROPINSI KEPULAUAN RIAU DAN NASIONAL TAHUN 2021-2024 17
GRAFIK 1.5 PERBANDINGAN JUMLAH DAN PERSENENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 – 2024 18
GRAFIK 1.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021- 2024 19
GRAFIK 1.7 USIA HARAPAN HIDUP (UHH) 20
GRAFIK 1.8 INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS) 20
GRAFIK 1.10 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) 22
GRAFIK 1.11 RERATA KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI SD KABUPATEN KARIMUN 24
GRAFIK 1.13 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) 26
GRAFIK 1.14 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 27
GRAFIK 1.15 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB) 28
GRAFIK 1.16 INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (I-BANGGA) 29
GRAFIK 1.17 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) 29
GRAFIK 1.18 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN KARIMUN 2020-2024 30
GRAFIK 1.19 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN KARIMUN 2023-2024 31
GRAFIK 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2025 64
GRAFIK 3.2 KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARIMUNTAHUN 2019 – 2025 91
GRAFIK 3.3 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 – 2025 117
GRAFIK 3.4 ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI KEPRI TAHUN 2025 117
GRAFIK 3.5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KARIMUN YANG MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2021 S.D 2025 119
GAMBAR 3.6 GRAFIK ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (AHLS) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 S/D. 2025 126
GRAFIK 3.7 GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 S/D. 2025 130
GRAFIK 3.8. CAPAIAN IPG, IDG DAN IPM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2025 138
GRAFIK 3.9 IPG, IPM DAN IDG PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT KAB/KOTA TAHUN 2025 139
GRAFIK 3.10 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMINDI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 – 2023 142
GRAFIK 3.11 GRAFIK PRESTASI/ PENGHARGAAN PELAKU BUDAYAKABUPATEN KARIMUN 155
GRAFIK 3.4 NILAI INDEKS DESA DARI TAHUN 2019 S/D 2025 190
GRAFIK 3.3 PERKEMBANGAN INDEKS DESA KABUPATEN KARIMUN 191
GRAFIK 3.4 PERKEMBANGAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MENUJU INDEKS DESA 193
GRAFIK NILAI IRB 2024 KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 227
GRAFIK 3.13 JAWABAN RESPONDEN PER UNSUR PELAYANAN 268
GRAFIK 3.14 269

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PETA WILAYAH KABUPATEN KARIMUN.....3
GAMBAR 1.9 PREVALENSI STUNTING 21
GAMBAR 1.12 RERATA KOMPETENSI LITERASI DAN NUMERASI SMP KABUPATEN KARIMUN.....25
GAMBAR 3.12. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 2022-2025 172

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atautarget kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Governance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 13 Januari 2012 secara administratif Kabupaten Karimun mengalami pemekaran dari 12 Kecamatan menjadi 14 kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 desa, dengan ibukota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini:

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Wilayah AdminisTrasi	Ibukota Kecamatan	Jumlah				
		Kelurahan	Desa	RW	RT	Pulau
Moro	Moro	2	3	27	68	36
Durai	Durai	-	4	14	39	47
Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3	51	144	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	41	84	-
Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	11
Karimun	Tanjung Balai	6	3	24	106	-
Buru	Buru	2	2	29	64	7
Meral	Meral	6	-	30	119	4
Tebing	Tebing	5	1	25	75	6
Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	19
Belat	Sebele	-	6	28	65	22
Ungar	Sungai Buluh	1	3	23	47	26
Selat Gelam	Parit	-	3	16	36	24
Sugi Besar	Rawa Jaya	-	7	23	65	49
JUMLAH		**29**	**42**	**394**	**1.078**	**251**

Sumber **:** *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2025*

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten pemekaran yang terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999 dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota kabupaten terletak pada Kota Tanjung Balai. Wilayah Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00º 24' 36" LU sampai 01º 13' 12" LU dan 103º 13' 12" BT sampai 104º 00' 36" BT dan termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan maritim. Hal ini dikarenakan letaknya yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karimun adalah sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan. Kabupaten Karimun secara keseluruhan memiliki luas wilayah 7.984 Km^2, yang terdiri dari luas perairan seluas 6460 Km^2 (80,91%) dan luas daratan 1524 Km^2(19,09%). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 251 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama,

namun baru sebanyak 39 pulau di antaranya yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. berikut peta wilayah Kabupaten Karimun:

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Karimun

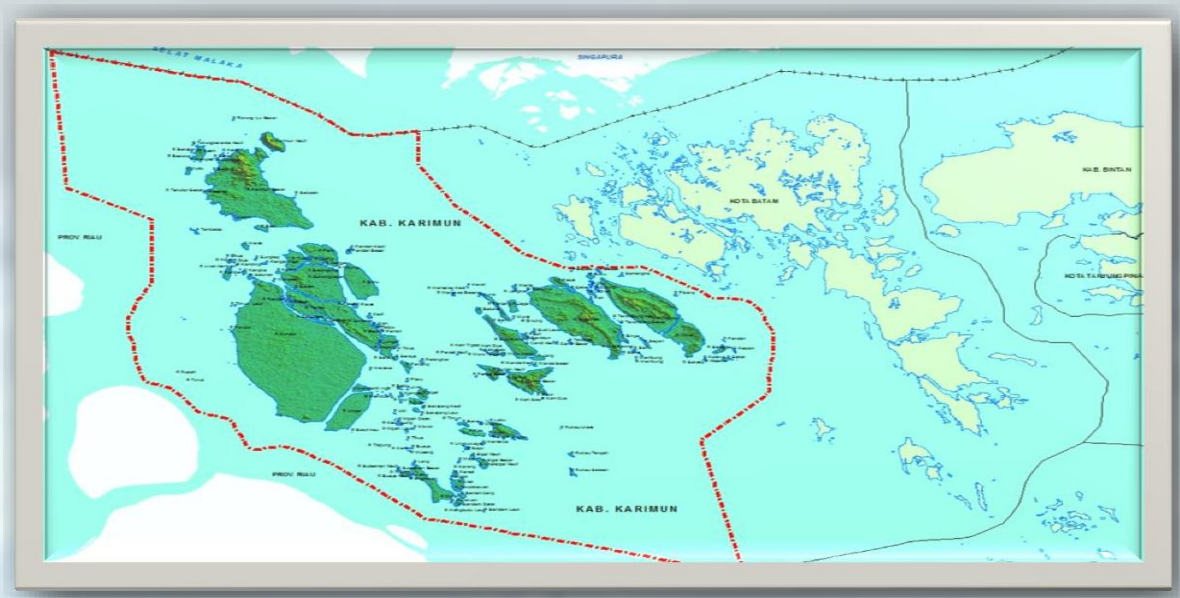

Adapun luas wilayah dan jumlah pulau berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2 Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan	Daratan		Lautan		Jumlah Pulau
	KM²	%	KM²	%	
Moro	1.166,80	76,56	1.668,44	25,83	36
Durai	52,00	3,41	1.480,54	22,92	47
Kundur	34,30	2,25	449,93	6,96	-
Karimun	49,90	3,27	404,06	6,25	-
Kundur Utara	29,50	1,94	509,15	7,88	-
Kundur Barat	21,70	1,42	267,12	4,13	11
Buru	17,80	1,17	366,88	5,68	7
Meral	80,00	5,25	515,41	7,98	4
Tebing	72,00	4,72	798,47	12,36	6
Meral Barat	NA	NA	NA	NA	19
Belat	NA	NA	NA	NA	22
Ungar	NA	NA	NA	NA	26
Selat Gelam	NA	NA	NA	NA	24
Sugi Besar	NA	NA	NA	NA	49
JUMLAH	1.524,00	19,09	6.460,00	80,91	251

Sumber : *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2025*

Secara umum Kabupaten Karimun memiliki karakteristik wilayah dataran yang datar dan landai serta berada pada ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga wilayah yang memiliki karakteristik berbukit-bukit dengan kemiringan sampai dengan 40° serta berada pada ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Kabupaten Karimun juga memiliki sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air. Disamping itu terdapat pula beberapa pulau yang memiliki rawa-rawa.

1.2.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus saran pembangunan. sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (meliputi kuantitas. distribusi. komposisi. dan kualitas). untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki. Luas wilayah di Kabupaten Karimun menurut Kecamatan tahun 2024 dapa dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3 Luas Wilayah Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
Moro	2329.43
Durai	319.36
Kundur	479.04
Kundur Utara	1277.44
Kundur Barat	958.08
Karimun	292.46
Buru	399.2
Meral	319.36
Tebing	399.2
Meral Barat	319.36
Belat	558.88
Ungar	319.36
Selat Gelam	26.9
Sugi Besar	21.93
TOTAL	**7.984**

Sumber : *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2025*

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik berjumlah **273.946** jiwa. Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen) dan lebih didominasi oleh suku Melayu.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah **76.208, KK** (68.717) laki-laki dan (16.734) perempuan tersebar di dua belas kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah terbanyak adalah Kecamatan Meral sebanyak **54.428** KK diikuti oleh Kecamatan Karimun yaitu **47.743** KK, sedangkan Kecamatan Selat Gelam yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak **4.193** KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel I.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK LAKI-LAKI	BERDASARKAN KK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	MORO	11.453	2.989	789	3.778
2	KUNDUR	31.421	8.177	2.373	1.055
3	KARIMUN	47.743	12.288	3.835	16.123
4	MERAL	54.428	13.751	3.515	17.266
5	TEBING	36.535	9.363	2.260	11.623
6	BURU	10.584	2.880	713	3.593
7	KUNDUR UTARA	13.106	3.429	890	4.319
8	KUNDUR BARAT	19.452	5.233	1.223	6.456
9	DURAI	6.451	1.716	464	2.180
10	MERAL BARAT	17.713	4.676	965	5.641
11	UNGAR	5.967	1.654	460	2.114
12	BELAT	6.795	1.836	483	2.319
13	SELAT GELAM	4.193	1.119	316	1.435
14	SUGIE BESAR	8.105	2.198	482	2.680
TOTAL		**273.946**	**71.309**	**18.768**	**90.077**

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , 2025*

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Semakin menimbulkan permasalahan–permasalahan kependudukan. Kabupaten Karimun juga sudah melaksanakan perekaman data penduduk berdasarkan perekaman e-KTP yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Untuk mengetahui lebih jelas penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dapat dilihat pada tabel I.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	PERSENTASE (%)	SISA PEREKAMAN
1	MORO	8.262	8.241	99.74	21
2	KUNDUR	23.676	23.636	99.83	40
3	KARIMUN	34.569	34.490	99.77	79
4	MERAL	38.266	38.197	99.81	69
5	TEBING	25.174	25.133	99.84	41
6	BURU	7.852	7.843	99.88	9
7	KUNDUR UTARA	9.703	9.690	99.86	13
8	KUNDUR BARAT	14.162	14.115	99.66	47
9	DURAI	4.749	4.744	99.89	5
10	MERAL BARAT	12.008	11.983	99.79	25
11	UNGAR	4.488	4.483	99.88	5
12	BELAT	5.036	5.033	99.94	3
13	SELAT GELAM	3.098	3.098	100.00	0
14	SUGIE BESAR	5.908	5.908	100.00	0
TOTAL		**196.951**	**196.594**	**11.281**	**357**

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah hasil perekaman e-KTP Kabupaten Karimun Tahun 2024 mencapai 110,103% dari jumlah wajib KTP sebanyak 196.951 orang dengan melakukan perekaman sebanyak 156,832 orang. Dari data tersebut hanya tersisa perekaman sebanyak 357 orang atau 251,12% sehingga perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Karimun melakukanpenerbitan terhadap akta kelahiran dan akta perkawinan.

Tabel 1.6 Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN
1	MORO	5.844	4.136
2	KUNDUR	17.490	13.257
3	KARIMUN	25.286	16.639
4	MERAL	32.427	19.833
5	TEBING	21.859	14.555
6	BURU	5.708	4.075
7	KUNDUR UTARA	7.652	5.556
8	KUNDUR BARAT	11.339	8.604
9	DURAI	3.346	2.779
10	MERAL BARAT	10.349	7.029
11	UNGAR	3.053	2.661
12	BELAT	3.685	2.752
13	SELAT GELAM	2.225	1.637
14	SUGIE BESAR	3.783	3.412
TOTAL		154.046	106.925

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2025*

1.3 Potensi Unggulan Daerah

1.3.1 Sektor Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah kepulauan memiliki luas perairan jauh lebih luas dari daratan di mana luas wilayah perairan seluas 80,91 % dan daratan seluas 19,09 %. Hal ini tentu menjadikan wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Pada sektor perikanan, Kabupaten Karimun memiliki potensi yang strategis untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Adapun potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah dari sub sektor perikanan tangkap dan sub sektor perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap memiliki volume produksi yang sangat besar dibandingkan usaha perikanan lainnya. Produk perikanan tangkap merupakan sumber utama untuk kebutuhan konsumsi ikan Kabupaten Karimun serta daerah sekitarnya. Selain itu ikan segar maupun olahannya juga diekspor dengan Negara tujuan Singapura dan Malaysia. Tingginya produksi perikanan tangkap Kabupaten Karimun juga seiring dengan besarnya jumlah masyarakat Kabupaten Karimun yang melakukan aktivitas sebagai nelayan.

Dari jumlah produksi yang sudah diketahui, maka akan dijabarkan jumlah produksi di Kabupaten Karimun yang ada pada 14 kecamatan setiap sektor tangkap dan budidaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7 Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya		Produksi Hasil Olahan Perikanan	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	538	18.802.011.000	56,13	2.775.234.000	8,30	830.270.000
Kecamatan Meral	11.229	528.792.231.000	189,42	9.366.416.000	20,43	2.335.550.000
Kecamatan Tebing	2.826	95.915.150.000	126,28	6.244.277.000	6,07	752.640.000
Kecamatan Kundur	396	12.046.085.000	77,17	3.815.947.000	6,39	776.490.000
Kecamatan Moro	6.023	201.518.900.000	14,03	693.809.000	69,83	8.655.360.000
Kecamatan Durai	492	10.485.329.000	70,16	3.469.043.000	16,58	1.660.540.000
Kecamatan Buru	954	37.664.038.000	-	-	51,72	4.240.810.000
Kecamatan Kundur Barat	1.126	30.839.860.000	49,11	2.428.330.000	2,54	190.800.000
Kecamatan Kundur Utara	459	12.814.252.000	35,08	1.734.522.000	0	-
Kecamatan Meral Barat	540	19.050.962.000	63,14	3.122.139.000	0,90	90.300.000
Kecamatan Belat	1.191	38.514.115.000	-	-	-	-
Kecamatan Ungar	4.294	100.346.397.000	21,05	1.040.713.000	2,85	125.330.000
Kecamatan Sugi Besar	4.496	150.211.530.000	4.314,44	21.572.200.000	54,65	6.773.760.000
Kecamatan Gelam	4.027	141.757.400.000	-	-	-	-
Jumlah	38.590	1.398.758.258.000	5.016	56.262.630.000	240,26	26.431.850.000

Sumber : *Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025*

Dilihat dari tabel di atas, jumlah produksi perikanan di Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi di sektor penangkapan (11.229 ton), sedang kan pada sektor budidaya yang tertinggi di Kecamatan Sugie Besar (4.314,44) dan volume produksi tertinggi pada produksi hasil olahan perikanan di kecamatan moro (69,83 ton). Adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Karimun berupa sarana prasarana, armada penangkapan ikan dan alat tangkap menjadi kunci utama bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan.Untuk melihat jumlah armada penangkapan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8 Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan	Produksi Hasil Olahan Perikanan	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	26,22	2.448.825.000
Kecamatan Meral	81,58	5.995.800.000
Kecamatan Tebing	7,32	878.400.000
Kecamatan Kundur	5,84	657.825.000
Kecamatan Moro	112,24	13.468.800.000
Kecamatan Durai	9,78	781.800.000
Kecamatan Buru	57,93	4.074.000.000
Kecamatan Kundur Barat	10,01	626.295.000
Kecamatan Kundur Utara	0	-
Kecamatan Meral Barat	3,29	377.400.000
Kecamatan Belat	3,27	130.800.000
Kecamatan Ungar	5,20	275.250.000
Kecamatan Sugi Besar	-	-
Kecamatan Selat Gelam	-	-
Jumlah	322,67	29.715.195.000

Sumber : *Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025*

Dilihat dari tabel di atas, jumlah volume produksi tertinggi pada produksi hasil olahan perikanan berada di kecamatan Moro sebesar (112,24 ton), sedangkan volume produksi terendah pada produksi hasil olahan perikan berada di Kecamatan Belat sebesar (3,29 ton) dan ada tiga (3) kecamatan yang tidak memproduksi hasil olahan perikanan di antaranya kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Sugi Besar dan Kecamatan Selat Gelam.

Selanjutnya potensi unggulan dari sektor perikanan ini dapat dilihat dari jumlah Ekspor usaha perikanan. Berikut jumlah data ekspor perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9 Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2025

NO	URAIAN	PRODUKSI (Ton)									PENINGKATAN/ PENGURANGAN (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1.	Jumlah ekspor perikanan budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	Jumlah ekspor perikanan tangkap	10.111	7.000,014	4.961,66	4.192,63	3.858	1.134,54	703,26	734,77	955,38	30,02%
3.	Jumlah ekspor pengolahan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-		-
JUMLAH		10.111	7.000,014	4.961,66	4.961,66	3.858	1.134,54	703,26	734,77	955,38	30,02%

Sumber : *Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor di antaranya :

1. Hasil Tangkapan Ikan untuk Kualitas Grade A (Kualitas Ekspor) menurun.
2. Permintaan Konsumen (Luar Negeri) Komoditi Perikanan Tangkap berkurang.
3. Nelayan tidak membongkar Ikan yang kualitas Ekspor di Karimun.

Dengan adanya kejadian tersebut yang menyebabkan ekspor perikanan turun setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan upaya sebagai berikut :

1. Nelayan di syaratkan untuk membongkar ikan di Karimun baik untuk keperluan ekspor maupun tidak.
2. Bantuan dari Pemerintah terkait peningkatan Sarana Penangkapan Ikan yang bisa menangkap ikan lebih jauh lagi di atas 12 mill sehingga kualitas Ikan yang ditangkap merupakan kualitas *Grade* A yaitu Kualitas Ekspor.

Sedangkan untuk Perkembangan produksi dan nilai ekspor perikanan per-triwulan untuk tahun 2023 di Kabupaten Karimun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.10 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2025

NO	BULAN	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp.)
1	JANUARI-MARET	211,08	4.575.520.000
2	APRIL-JUNI	250,56	5.535.400.000
3	JULI-SEPTEMBER	245,07	6.225.520.000
4	OKTOBER-DESEMBER	248,67	5.592.830.000
JUMLAH		955,38	21.929.270.000

Sumber : *Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025*

1.3.2 Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian Kabupaten Karimun memiliki potensi yang cukup strategis untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Adapun potensi pertanian yang dapat dikembangkan adalah produksi tanaman pangan dan produksi tanaman perkebunan rakyat. Untuk mengetahui dengan jelas produksi tanaman pangan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2024 s.d. 2025 (Ton per Ha)

Komoditas	Jagung		Talas		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
JUMLAH	20,1	16,7	0,5	0,8	798,2	700,7	83,9	54,1	45,0	18,1

***Sumber** : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Tahun 2025*

Berdasarkan data produksi beberapa komoditas tanaman pangan pada tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya dinamika perkembangan pada masing – masing komoditas. Secara umum, sebagian besar komoditas mengalami penurunan produksi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, meskipun terdapat beberapa komoditas yang menunjukkan peningkatan.

Produksi jagung pada tahun 2024 tercatat sebesar 20,1 sendangkan 2025 mengalami penurunan menjadi 16,7. Penurunan juga terjadi pada komoditas ubi kayu dari 798,2 pada tahun 2024 menjadi 700,7 pada tahun 2025. Komoditas ubi jalar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 83,9 pada tahun 2024 menjadi 54,1 pada tahun 2025. Hal yang sama juga terjadi pada kacang tanah, yang mengalami penurunan dari 45,0 pada tahun 2024 menjadi 18,1 pada tahun 2025.

Di sisi lain, komoditas talas menunjukkan tren peningkatan produksi. Pada tahun 2024 produksi talas tercatat sebesar 0,5, kemudian meningkat menjadi 0,8 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya potensi pengembangan komoditas talas di daerah tersebut.

Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa produksi komoditas tanaman pangan masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan pada beberapa komoditas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, luas lahan tanam, produktivitas lahan, maupun faktor terkini dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produktivitas melalui penguatan sektor pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian serta dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi komoditas pangan di daerah.

Tabel. 1.12 Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Karimun Tahun 2024 s.d. 2025 (Ton)

Kecamatan	Karet		Kelapa		Cengkeh		Kopi		Lada		Gambir		Sagu	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
JUMLAH	1.484,91	1.422,23	1.028,17	1.022,25	0,8	0,8	0,57	0,26	2	1,98	243,3	249,5	704,87	701,73

***Sumber** : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Tahun 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data produksi beberapa komoditas Perkebunan tahun 2024 dan 2025 terlihat adanya perubahan atau fluktuasi pada sebagian besar komoditas yang

dihasilkan di berbagi kecamatan. Secara umum, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi pada tahun 2025 di bandingkan tahun sebelumnya, sementara Sebagian lainnya menunjukkan peningkatan.

Komoditas karet mengalami penurunan produksi dari 1.484,91 pada tahun 2024 menjadi 1.422,23 pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada komoditas kelapa dari 1.028,17 pada tahun 2024 menjadi 1.022,25 ada tahun 2025. Hal serupa terjadi pada komoditas kopi, yang menurun dari 0,57 menjadi 0,26 serta lada yang sedikit menurun dari 2,00 menjadi 1,98. Selain itu, produksi sagu juga mengalami penurunan dari 704,87 ada tahun 2024 menjadi 701,73 pada tahun 2025.

Di sisi lain, beberapa komoditas menunjukkan peningkatan produksi. Komoditas gambir mengalami peningkatan dari 243,3 pada tahun 2024 menjadi 249,5 pada tahun 2025. Sementara itu, produksi cengkeh relatif stabil pada angka 0,8 pada kedua tahun tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa produksi komoditas Perkebunan di daerah masih mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, luas areal tanam, produktivitas tanaman serta kondisi pasar dan perawatan tanaman oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan pengelolaan komoditas Perkebunan secara berkelanjutan agar hasil produksi dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan Masyarakat.

1.3.3 Sektor Industri Kecil Menengah (IKM)

Pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami sedikit pertumbuhan. Hal ini menunjukkan jumlah pelaku usaha sektor industri kecil menengah masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel 1.13 di bawah ini :

Tabel 1.13 Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kabupaten Menengah Tahun 2020- 2023

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)				Pertambahan IKM Tahun 2023
		Tahun 2020 (pelaku usaha)	Tahun 2021 (pelaku usaha)	Tahun 2022 (pelaku usaha)	Tahun 2023 (pelaku usaha)	
1	Karimun	211	216	240	270	34
2	Meral	198	201	255	221	5
3	Meral barat	69	72	93	101	10
4	Tebing	258	260	174	260	0
5	Kundur	231	231	276	231	0
6	Kundur Barat	109	111	114	111	0
7	Kundur Utara	91	93	92	93	0

8	Buru	105	105	136	125	20
9	Moro	121	123	106	123	0
10	Durai	38	38	38	38	0
11	Belat	32	32	51	32	0
12	Ungar	84	85	46	85	0
13	Sugi Besar	NA	NA	NA	NA	NA
14	Selat Gelam	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah		**1547**	**1567**	**1621**	**1690**	**69**

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025*

Dari tabel 1.13. di atas analisa atas capaian indikator Sasaran Strategis II bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan IKM berjumlah 1621 IKM, sementara pada tahun 2023 berjumlah 3054 IKM. Maka jumlah pertumbuhan IKM tahun 2022 sebanyak 1883 IKM dengan persentase 53,7%.

1.3.4 Sektor Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Karimun senantiasa mengalami perkembangan, munculnya UKM yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan dengan ditandainya perkembangan kategori usaha. Jenis usaha mikro adalah yang paling banyak ditemukan di kalangan pelaku UKM Kabupaten Karimun, yakni jenis usaha antara lain usaha perdagangan, sektor produksi makanan kemasan, aneka usaha serta para pelaku kerajinan dan beberapa lainnya. Berikut ditampilkan perkembangan jumlah UKM Kabupaten Karimun tahun 2016-2023 pada tabel 1.14 di bawah ini:

Tabel 1.14 Perkembangan Jumlah UKM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2024

TAHUN	JUMLAH UMKM	PERKEMBANGAN (%)
2016	3556	40%
2017	5184	7%
2018	5444	10%
2019	8032	53%
2020	8032	0 %
2021	8032	0 %
2022	8032	0 %
2023	19.143	238%

***Sumber**: Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan, ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2025*

1.4 Kesejahteraan Masyarakat

1.4.1 Kesejahteraan Ekonomi

1.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi idealnya dilakukan terhadap indikator – indikator yang menunjukkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti indikator laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator makro untuk melihat sejauh apa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun dalam perekonomiannya.

Secara umum, Kabupaten Karimun mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif, meskipun ada fluktuasi pada beberapa tahun, terutama yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan perubahan harga komoditas global. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Karimun diperkirakan.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun 2020 -2024

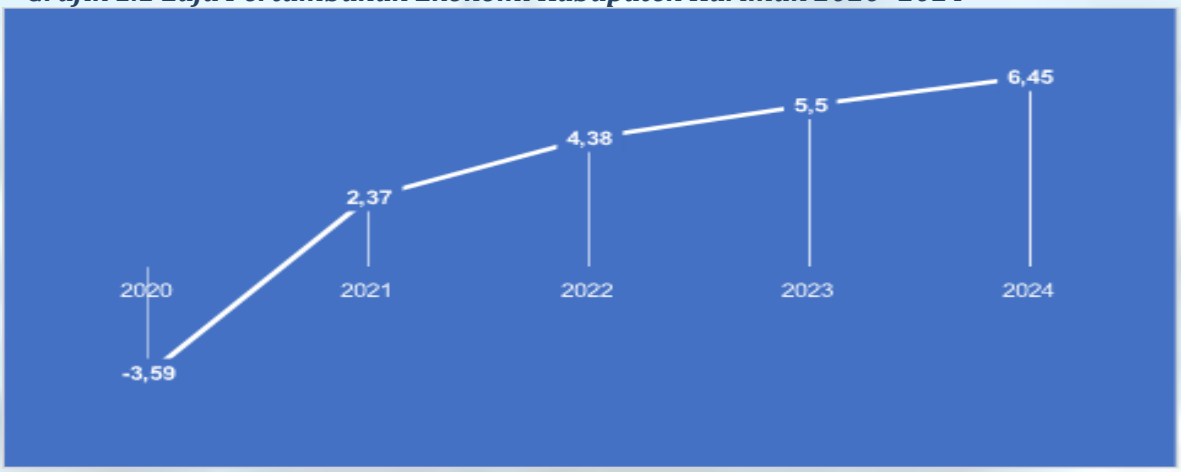

Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025

Berdasarkan gambar di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi. Pada 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,59%, namun mulai bangkit pada 2021 dengan pertumbuhan 2,37%. Pemulihan ini terus berlanjut, dengan laju pertumbuhan mencapai 4,38% pada 2022 dan 5,5% pada 2023. Pada 2024, ekonomi Kabupaten Karimun diperkirakan tumbuh lebih pesat dengan laju 6,45%, mencerminkan momentum positif yang kuat seiring dengan stabilitas dan peningkatan sektor-sektor ekonomi utama seperti industri dan perdagangan.

1.4.1.2 Pendapatan Perkapita

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur juga dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mampu mencapai 17.016,97 miliar rupiah, dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2023 nilai PDRB tahun yang sama sebesar 10.277,62 miliar rupiah.

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 18.330,90 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2024 sebesar 10.940,58 miliar rupiah.

Grafik 1.2 PDRB ADHB dan ADHK Lapangan Usaha (Rp Milyar) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025)

Data PDRB Kabupaten Karimun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, baik pada PDRB ADHB Lapangan Usaha (atas dasar harga berlaku) maupun PDRB ADHK Lapangan Usaha (atas dasar harga konstan). PDRB ADHB, yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga saat ini, mengalami peningkatan signifikan, dimulai dari Rp 13.310 Miliar pada 2020 hingga mencapai Rp 18.330 Miliar pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam sektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Karimun, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, PDRB ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil atau tanpa pengaruh inflasi, juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari Rp 9.117 Miliar pada 2020 menjadi Rp 10.940 Miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karimun, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Karimun mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan, yang didorong oleh perkembangan sektor-sektor utama ekonomi daerah tersebut.

Grafik 1.3 PDRB ADHB dan ADHK Pengeluaran (Rp Juta) Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2024

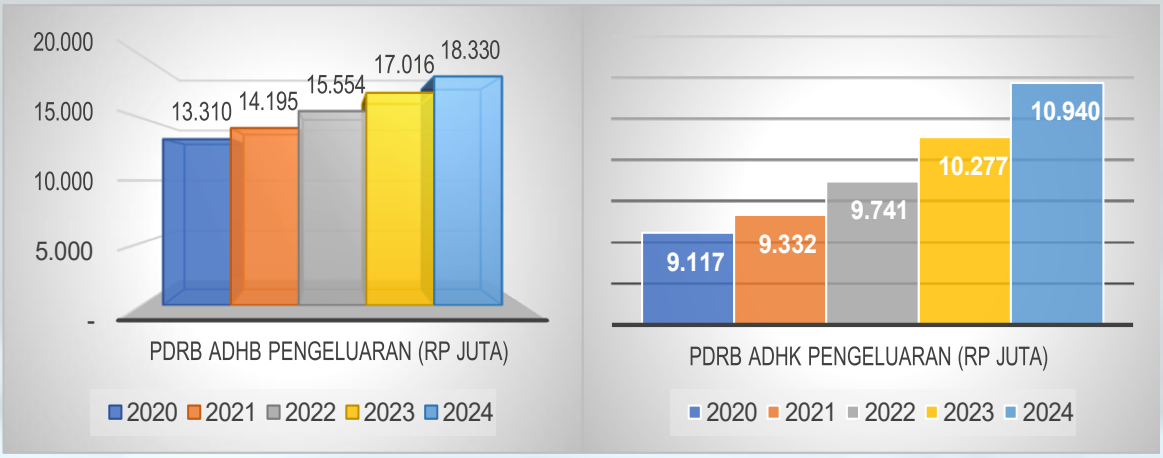

(Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa PDRB ADHB Pengeluaran (Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDRB ADHK Pengeluaran (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Karimun mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. PDRB ADHB Pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang jelas dari Rp 13.310 Juta pada 2020 menjadi Rp 18.330 Juta pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan nilai ekonomi berdasarkan harga yang berlaku di pasar, yang terpengaruh oleh fluktuasi harga barang dan jasa. Pertumbuhan yang terus meningkat ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang berkembang, baik di sektor industri, perdagangan, maupun sektor-sektor lainnya yang turut berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Karimun.

Sementara itu, PDRB ADHK Pengeluaran, yang mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh inflasi, juga menunjukkan kenaikan stabil dari Rp 9.117 Juta pada 2020 menjadi Rp 10.940 Juta pada 2024. Meskipun lebih rendah daripada PDRB ADHB, angka ini menunjukkan bahwa perekonomian riil Kabupaten Karimun juga mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan PDRB ADHK ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas dan output barang serta jasa yang lebih akurat karena dihitung dengan harga konstan, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Secara keseluruhan, kedua indikator ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Karimun, baik dalam aspek nominal (PDRB ADHB) maupun riil (PDRB ADHK), yang mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin membaik dan memperkuat daya saing daerah di masa depan.

1.4.1.3 Indeks Gini

Bila melihat Indeks Gini yang merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Data Indeks Gini untuk Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan dari tahun 2021 hingga 2024. Di Kabupaten Karimun, Indeks Gini mengalami penurunan yang signifikan, dari 0,31 pada 2021 menjadi 0,28 pada 2024, yang menandakan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut semakin berkurang, dengan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Sementara itu, di tingkat Provinsi, Indeks Gini sedikit berfluktuasi, dengan penurunan dari 0,339 pada 2021 menjadi 0,325 pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 0,34 pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi relatif lebih tinggi dan tidak stabil. Di tingkat Nasional, Indeks Gini cenderung stabil dengan sedikit penurunan dari 0,314 pada 2021 menjadi 0,308 pada 2024, mencerminkan penurunan kecil dalam ketimpangan pendapatan secara nasional. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1.4 Indeks Gini Kabupaten Karimun,Propinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2024

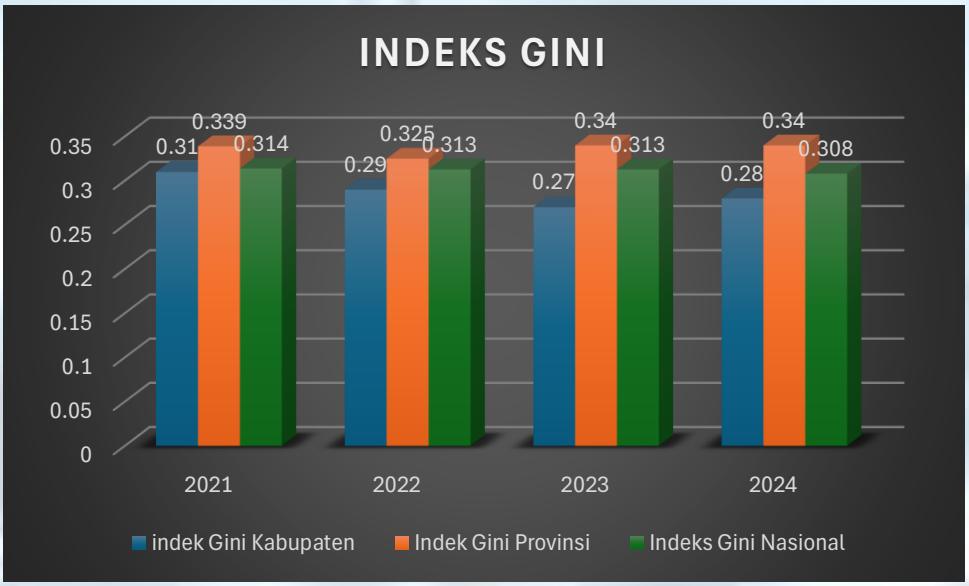

Sumber : BPS Karimun dan Nasional

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karimun yang lebih signifikan dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, meskipun ketimpangan masih menjadi tantangan di tingkat yang lebih luas.

1.4.1.4 Tingkat Kemiskinan

Dari aspek garis kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah 492.654 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99 dan indeks keparahan kemiskinan 0,21.

Tabel 1.15 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun, 2021-2024

Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*
(1)	(2)	(3)
2021	422.961	16,28
2022	466.856	16,44
2023	468.332	14,33
2024	492.654	13,99

Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025

Grafik 1.5 Perbandingan Jumlah dan Persenentase Penduduk Miskin Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2024

Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 422.961 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 6,85% atau sekitar 16,28 ribu penduduk miskin. Pada 2022, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 466.856, dengan sedikit kenaikan dalam persentase

penduduk miskin menjadi 6,87% dan jumlah penduduk miskin menjadi 16,44 ribu. Namun, pada 2023, meskipun garis kemiskinan hanya sedikit meningkat menjadi Rp 468.332, persentase penduduk miskin turun menjadi 5,95%, dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi 14,33 ribu. Di tahun 2024, meski garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp 492.654, persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dengan persentase 5,78% dan jumlah penduduk miskin sebesar 13,99 ribu. Secara keseluruhan, meskipun garis kemiskinan terus meningkat, terdapat penurunan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun.

1.4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Grafik 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun tahun 2021- 2024

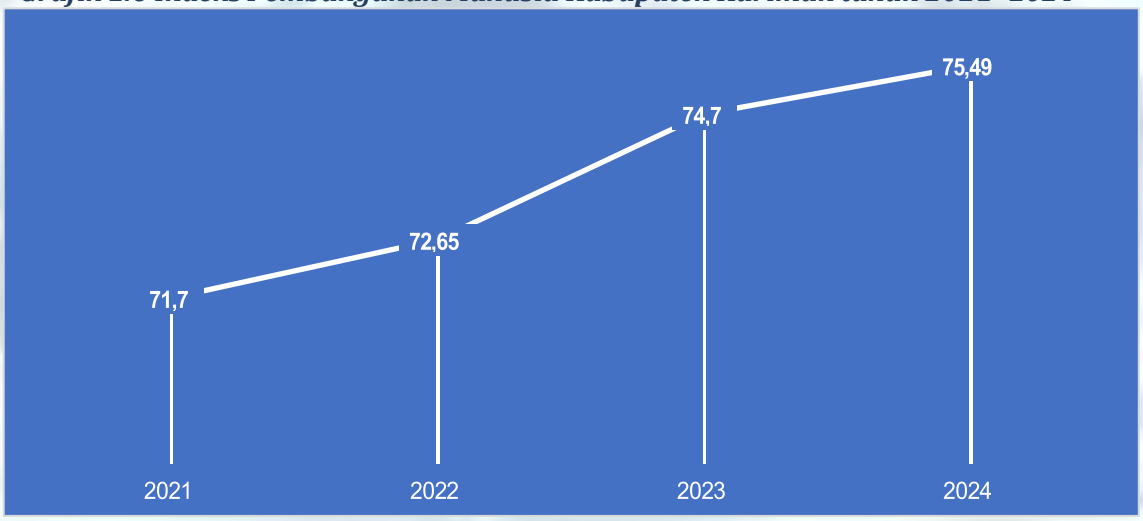

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka, 2025

1.4.2 Kesehatan Untuk Semua

1.4.2.1 Usia Harapan Hidup

Untuk indikator Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia, yang menunjukkan estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh

seseorang sejak lahir, jika tren kematian tetap konstan. UHH juga mencerminkan kualitas kesehatan, gizi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan hidup.

Grafik 1.7 Usia Harapan Hidup (UHH)

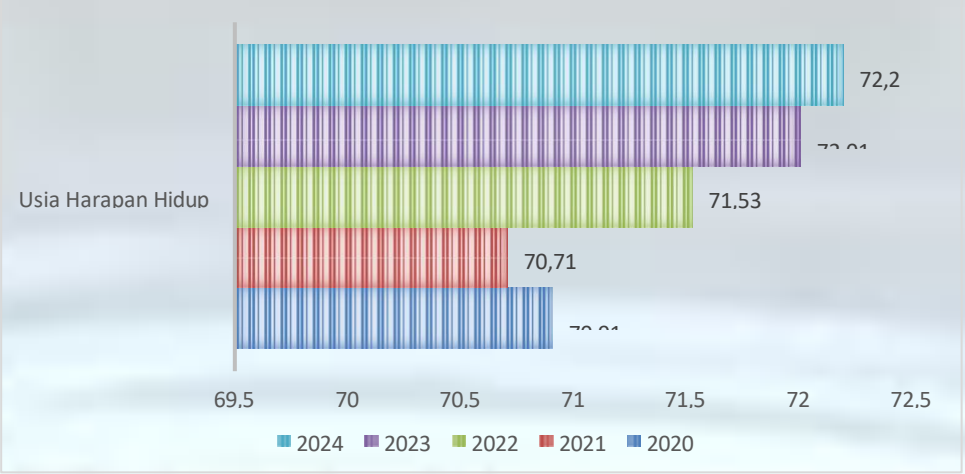

Terjadi penurunan dari 70,91 tahun (2020) menjadi 70,71 tahun (2021). Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka kematian dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai tahun 2022, tren kembali positif. Kenaikan tajam dari 70,71 menjadi 71,53 tahun menandakan pemulihan sistem kesehatan dan membaiknya layanan publik. Tren terus meningkat hingga mencapai 72,20 tahun di tahun 2024, mencerminkan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup secara konsisten setelah dampak pandemi mereda. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam Penguatan layanan kesehatan dasar, Peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi, Perbaikan sistem perlindungan sosial. Usia Harapan Hidup dipengaruhi tidak hanya oleh sektor kesehatan, tetapi juga oleh lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kinerja ini menjadi refleksi positif dari sinergi antar- OPD dalam mencapai target pembangunan manusia.

1.4.2.2 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian status kesehatan suatu keluarga, berdasarkan sejumlah indikator seperti: keikutsertaan BPJS Kesehatan, akses air bersih dan sanitasi, imunisasi anak, pemantauan ibu hamil, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Grafik 1.8 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

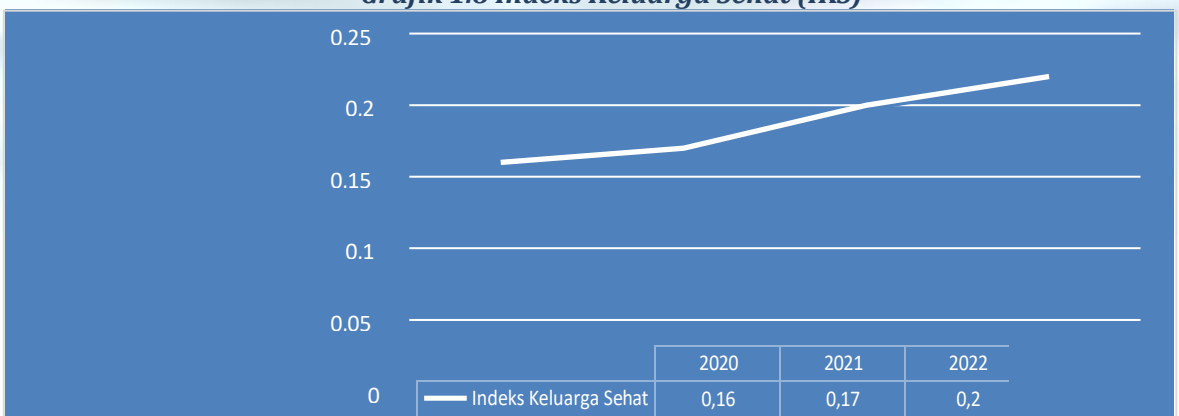

Dari 2020 ke 2023, IKS meningkat dari 0,16 menjadi 0,22. Peningkatan ini menandakan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara bertahap, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan dasar dan perilaku keluarga. Meskipun peningkatan awal antara 2020–2021 hanya 0,01 poin, lonjakan lebih tajam terjadi pada periode 2021–2022 dan terus meningkat pada 2023, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penyuluhan PHBS. Program seperti revitalisasi Posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, dan pelayanan jemput bola memberi dampak terhadap kenaikan IKS ini.

Meskipun ada tren positif, angka IKS 0,22 masih tergolong rendah, artinya sebagian besar keluarga belum memenuhi seluruh kriteria keluarga sehat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam meratakan akses dan kualitas kesehatan keluarga, terutama di daerah pinggiran atau terpencil

1.4.2.3 Prevalensi Sunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Indikator ini penting dalam menilai kualitas gizi dan layanan kesehatan dasar suatu daerah. Lonjakan dari 0% ke 17,6% mencerminkan mulainya pelaporan yang lebih akurat atau peningkatan pengukuran setelah sistem surveilans gizi diperkuat, bukan peningkatan kasus secara aktual dari nol.

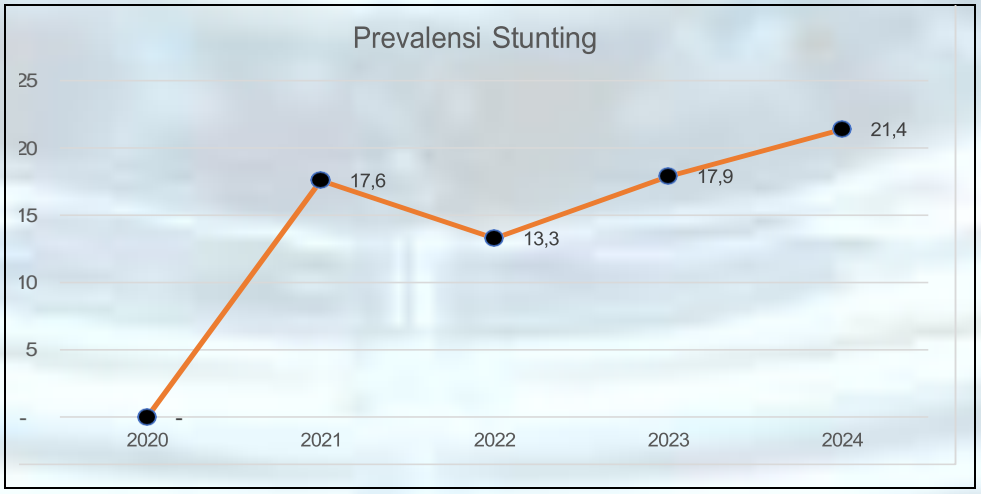

Gambar 1.9 Prevalensi Stunting

Bisa juga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi ketersediaan pangan, layanan kesehatan, dan pengasuhan. Perbaikan pada 2022 Terjadi penurunan signifikan ke 13,3%, yang mengindikasikan upaya serius dalam intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak, seperti: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Penguatan posyandu dan pemantauan pertumbuhan, Kampanye 1.000 HPK dan gizi seimbang. Kenaikan Kembali di 2023 Kembali naik menjadi 17,9%, yang mengkhawatirkan, karena menunjukkan Ketidakkonsistenan program. Artinya belum sepenuhnya berhasil menurunkan stunting secara berkelanjutan Intervensi masih bersifat sektoral, belum terintegrasi lintas dinas (kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian).

1.4.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1.4.3.1 Rata – Rata Lama Sekolah

Dari segi hal Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator pembangunan pendidikan yang mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk menilai capaian akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.

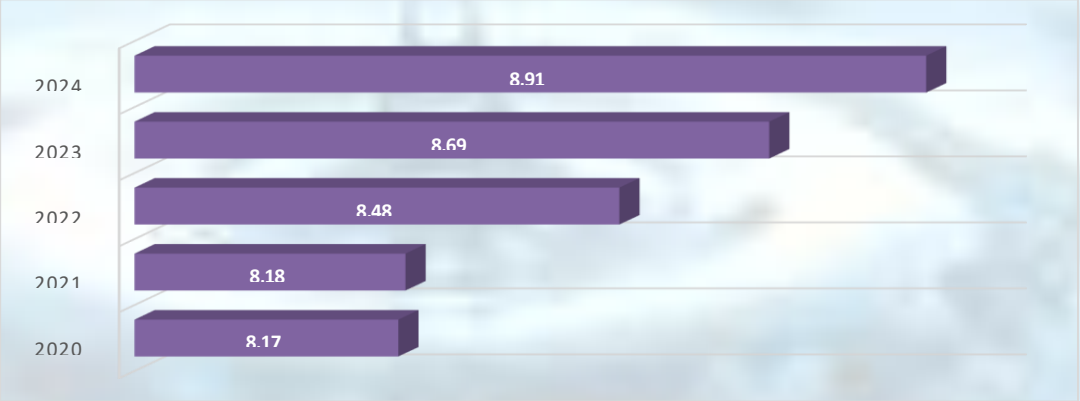

Grafik 1.10 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Terjadi tren peningkatan yang stabil setiap tahun dari 8,17 tahun (2020) menjadi 8,91 tahun (2024), atau meningkat 0,74 tahun selama lima tahun. Hal ini menunjukkan akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Karimun semakin membaik, serta menandakan penurunan angka putus sekolah. Peningkatan yang lebih tajam terjadi sejak 2022, yang bisa dikaitkan dengan Program wajib belajar 12 tahun, Peningkatan sarana prasarana Pendidikan, Program beasiswa, bantuan pendidikan, atau pendidikan non-formal bagi warga dewasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dinilai berhasil mendorong capaian pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Kemajuan ini juga mencerminkan keberhasilan koordinasi antar instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga pendidikan non-

formal. Peningkatan RLS berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendidikan yang lebih lama memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan penguatan literasi masyarakat.

1.4.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak yang baru masuk usia sekolah. Indikator ini mencerminkan proyeksi akses pendidikan ke depan dan menjadi bagian penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

HLS meningkat dari 12,42 tahun (2020) menjadi 12,62 tahun (2024)—peningkatan 0,20 tahun dalam lima tahun. Tren ini menunjukkan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, termasuk perluasan program pendidikan menengah dan peluang pendidikan tinggi.

Nilai HLS di atas 12 tahun menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Karimun diproyeksikan bisa menyelesaikan hingga tingkat SMA/SMK, yang merupakan sinyal baik terhadap pembangunan manusia di bidang pendidikan. Kenaikan HLS mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menyediakan dan memperluas layanan pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, rekrutmen guru, hingga program wajib belajar 12 tahun. Program bantuan seperti beasiswa pendidikan dan pendidikan gratis juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak. HLS bersifat proyeksi.

Artinya, keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin melihat pentingnya pendidikan, dan pemerintah daerah berhasil menciptakan iklim pendidikan yang kondusif.

1.4.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Indikator Rerata Kemampuan Literasi SD digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman membaca siswa sekolah dasar (SD), khususnya pada aspek mengenali kata, memahami teks bacaan, dan berpikir kritis terhadap informasi tertulis. Ini adalah salah satu indikator kunci dalam menilai mutu pendidikan dasar.

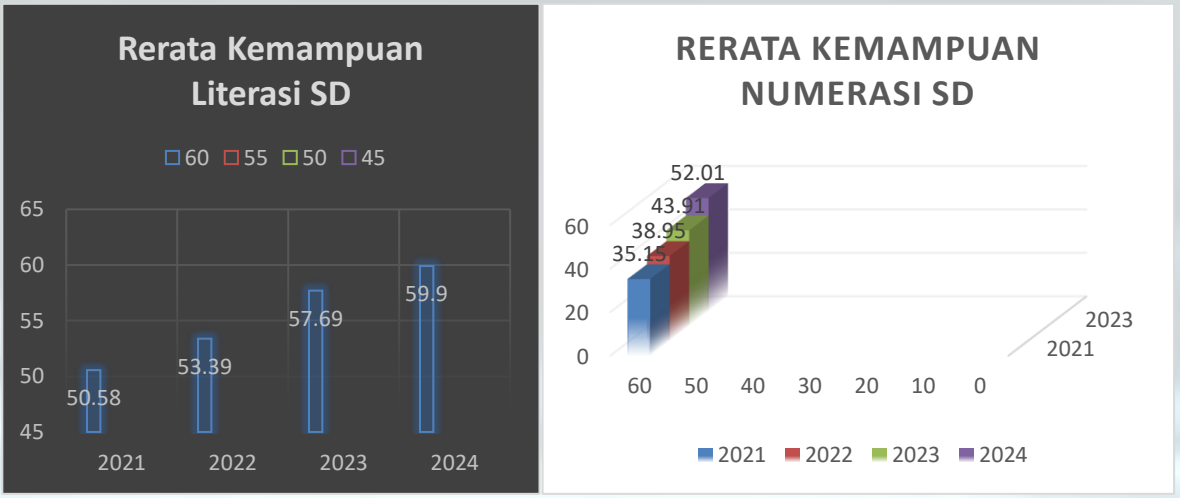

Grafik 1.11 Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten Karimun

Pada tahun 2021 menjadi awal pelaksanaan asesmen, dengan skor awal 50,28. Nilai literasi meningkat secara stabil tiap tahun 2021 ke 2022: +3,11 poin dan 2022 ke 2023: +4,30 poin dan pada tahun 2024 mencapai 59,90 atau meningkat +2,21 poin. Ini menunjukkan peningkatan kompetensi dasar siswa dalam membaca, yang merupakan hasil dari Implementasi program literasi sekolah, Pelatihan guru, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dan menarik, Pembelajaran yang lebih fokus pasca-pandemi. Kabupaten Karimun dinilai berhasil dalam membangun fondasi pendidikan dasar, khususnya kompetensi literasi siswa SD. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program Dinas Pendidikan dalam mendampingi sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi sejak dini. Literasi merupakan fondasi dari pencapaian akademik di jenjang lebih tinggi dan berkaitan langsung dengan produktivitas SDM ke depan.

Untuk kemampuan Numerasi SD menunjukkan perkembangan rerata kemampuan numerasi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, rata-rata kemampuan numerasi tercatat sebesar 35,15, yang menunjukkan tingkat kemampuan dasar dalam matematika di kalangan siswa SD. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 38,95, mencerminkan adanya perbaikan dalam pemahaman numerasi di tahun kedua. Pada tahun 2023, rerata kemampuan numerasi semakin meningkat menjadi 43,91 yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 52,02, ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa SD terus berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya peningkatan yang konsisten dalam kemampuan numerasi siswa, yang menunjukkan keberhasilan dalam program pendidikan atau intervensi yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan matematika di tingkat dasar.

Indikator Rerata Kompetensi Literasi SMP mengukur kemampuan siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi tertulis secara efektif. Ini merupakan indikator penting dalam menilai mutu pendidikan menengah pertama dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.

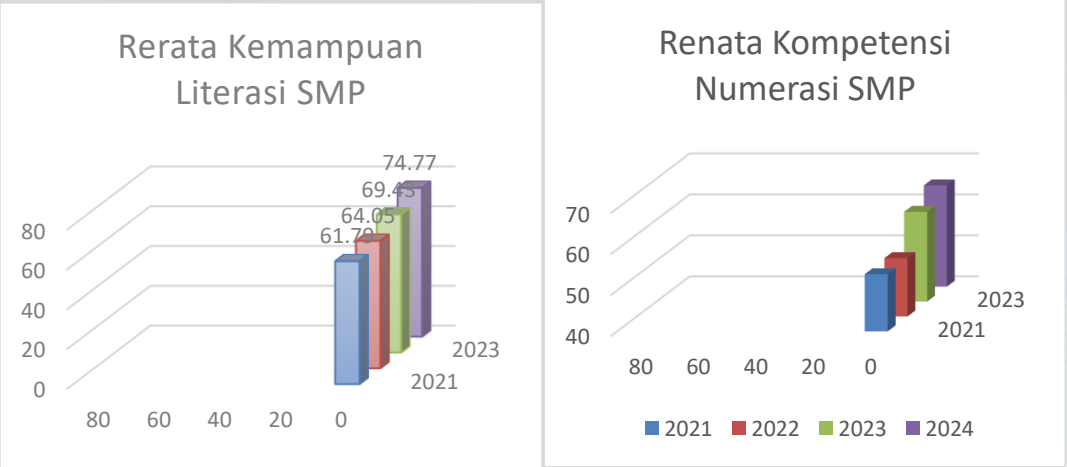

Gambar 1.12 Rerata Kompetensi Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Karimun

Skor awal cukup tinggi di 61,79, menunjukkan bahwa kompetensi dasar literasi siswa SMP sudah cukup baik sejak awal pemantauan. Peningkatan literasi dari 2021 ke 2023 adalah sebesar +7,64 poin, dengan kenaikan kembali terjadi pada 2024 sebesar +5,34 menjadi 74,77. Ini menunjukkan bahwa intervensi literasi di jenjang SMP berjalan efektif, seperti: Penerapan Kurikulum Merdeka atau kurikulum dengan pendekatan literatif, Pelatihan guru berbasis literasi, Program membaca dan penulisan kreatif di sekolah. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SMP, khususnya dalam aspek literasi. Ini penting karena kemampuan literasi yang baik berkontribusi langsung terhadap kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja.

Data mengenai rerata kompetensi numerasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rerata kompetensi numerasi siswa SMP tercatat 53,95, yang menunjukkan dasar kemampuan matematika yang cukup baik. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 54,24, mencerminkan adanya perbaikan kecil dalam kemampuan numerasi siswa.

Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dengan rerata mencapai 61,91, yang menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dalam keterampilan numerasi siswa SMP. Pada tahun 2024 kemampuan numerasi siswa SMP Kabupaten Karimun kembali meningkat pada skor 64,72. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kompetensi numerasi di tingkat SMP, dengan peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2023, yang

disebabkan oleh program pendidikan atau perubahan kurikulum yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa

1.4.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang mengukur perkembangan literasi masyarakat secara umum, termasuk kemampuan baca-tulis, akses terhadap bahan bacaan, infrastruktur pendukung literasi (perpustakaan, taman baca), dan partisipasi dalam aktivitas literasi. Turun drastis sebesar 15,08 poin (dari 74,56 ke 59,48). Hal ini menandakan penurunan signifikan dalam aktivitas literasi masyarakat atau berkurangnya dukungan infrastruktur seperti perpustakaan desa, taman baca, atau kegiatan literasi komunitas.

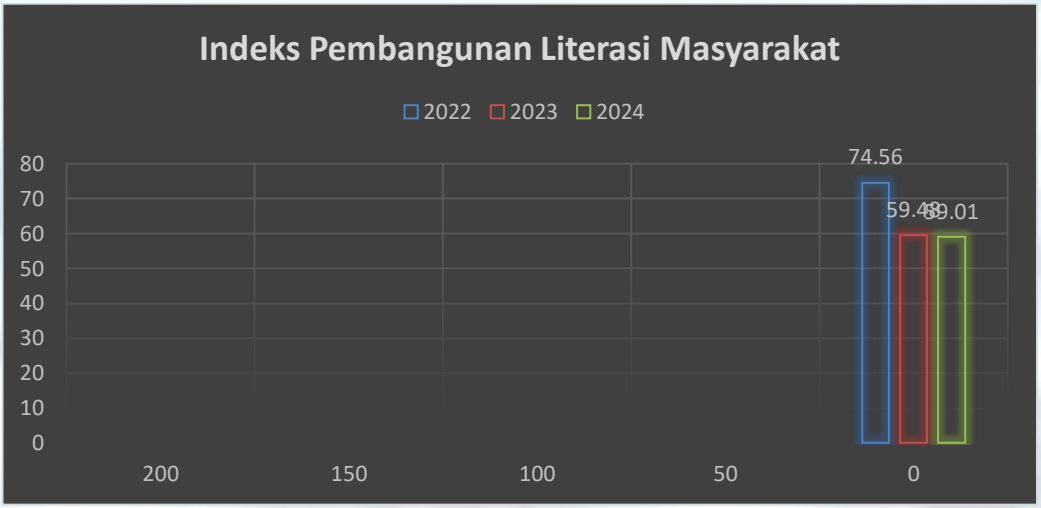

Grafik 1.13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Bisa jadi juga menunjukkan berkurangnya intervensi program pemerintah atau anggaran untuk bidang ini. Stagnasi dan Penurunan Lanjutan di 2024: Angka kembali turun ke 59,01, menandakan belum ada pemulihan atau peningkatan berarti dalam pembangunan literasi masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa aspek literasi masyarakat kurang mendapat perhatian yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Penurunan IPLM menunjukkan bahwa belum berhasil menjaga kesinambungan pengembangan literasi masyarakat, meskipun aspek literasi sekolah (SD & SMP) membaik. Ketimpangan antara peningkatan literasi formal di sekolah dengan rendahnya literasi masyarakat umum menunjukkan kesenjangan pembangunan SDM secara luas. Berkurangnya program kampung literasi, taman baca masyarakat, dan rendahnya pendanaan untuk perpustakaan daerah menjadi penyebab utama.

1.4.4 Perlindungan Sosial yang Adaktif

1.4.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengukur persentase tenaga kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (seperti BPJS Ketenagakerjaan). Indikator ini penting sebagai refleksi perlindungan kerja, keamanan sosial, dan kesejahteraan buruh

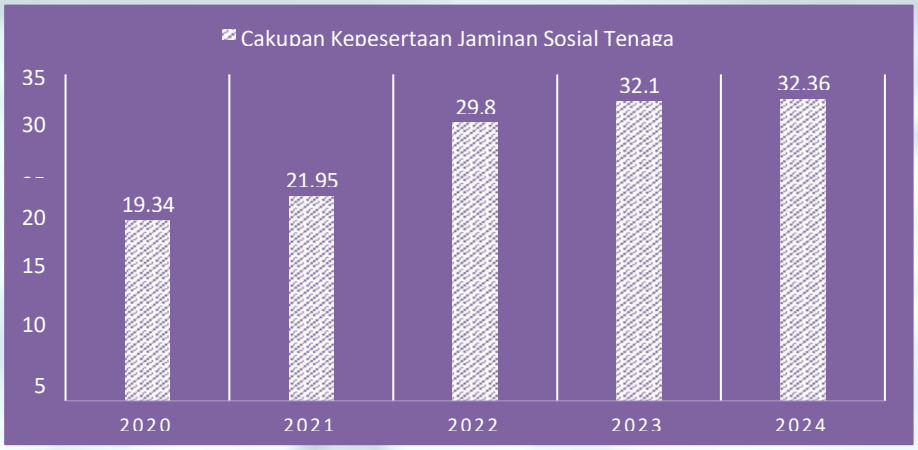

Grafik 1.14 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Terjadi peningkatan tajam dalam dua tahun pertama, dari 19,34% ke 29,80% (+10,46 poin). Ini menunjukkan upaya masif pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial tenaga kerja, kemungkinan melalui: Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, Kerja sama dengan perusahaan dan sektor informal, Penerbitan regulasi daerah atau surat edaran kewajiban pendaftaran pekerja. Stabilisasi dan Perlambatan 2023–2024: Pertumbuhan melambat menjadi hanya +0,26 poin dari 2023 ke 2024. Hal ini bisa mengindikasikan Tantangan menjangkau sektor informal, Keterbatasan data dan sistem pelaporan, Resistensi dari sebagian pelaku usaha atau pekerja nonformal. Kabupaten Karimun berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam cakupan perlindungan tenaga kerja di paruh awal periode. Ini menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor: Dinas Tenaga Kerja, BPJS, dan lembaga pengawas ketenagakerjaan.

1.4.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayan Maju

1.4.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang mengukur tingkat toleransi, kerja sama, dan harmoni sosial antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai IKUB tinggi menandakan stabilitas sosial yang baik dan menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Indeks mengalami kenaikan signifikan tiap tahun, dengan total kenaikan sebesar 14,04 poin dalam 4 tahun. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya peningkatan harmoni antar umat beragama dan peran aktif pemerintah serta masyarakat dalam menjaga toleransi. Nilai 81,5 pada 2023 merupakan capaian yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat Karimun hidup dalam suasana yang rukun, damai, dan saling menghormati. Ini merupakan indikator positif kestabilan sosial dan keberhasilan program integrasi sosial yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil mengarahkan pembangunan bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial dan keharmonisan antar umat beragama. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog antar agama, menjaga netralitas, dan mengatasi potensi konflik dengan pendekatan partisipasi.

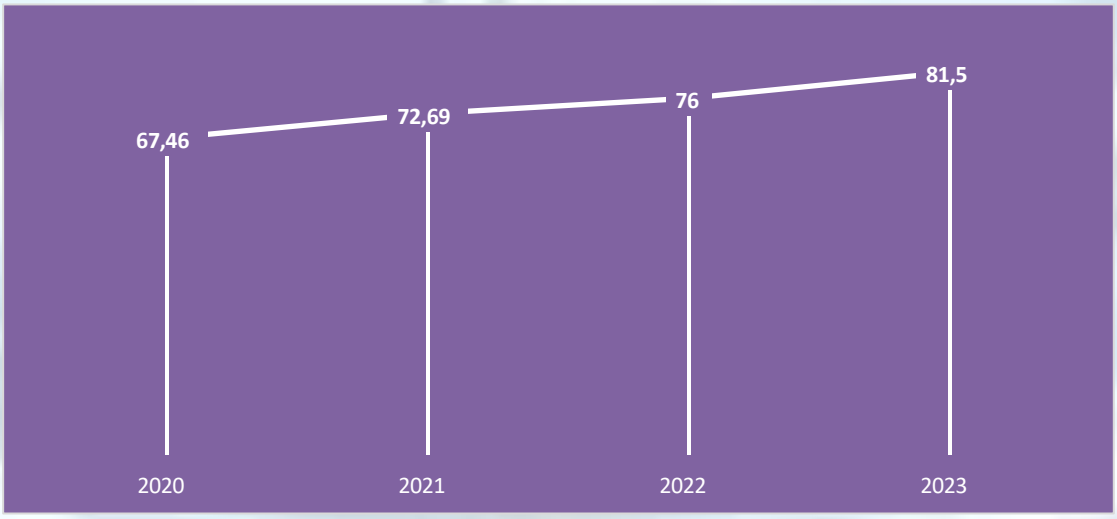

Grafik 1.15 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

1.4.6 Keluarga Berkualitas, Kesehatan Gender dan Masyarakat Inklusif

1.4.6.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga)

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran komposit yang menilai kualitas keluarga dari berbagai aspek seperti ketahanan ekonomi, pendidikan keluarga, akses terhadap layanan dasar, keikutsertaan dalam program KB, hingga peran serta dalam masyarakat. Indeks ini mencerminkan kesejahteraan dan ketangguhan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Grafik 1.16 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga)

Skor meningkat signifikan dari 55,73 (2021) ke 65,98 (2024), dengan total kenaikan 10,25 poin dalam tiga tahun. Ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk dalam hal: Akses terhadap pendidikan dan Kesehatan, Partisipasi dalam program keluarga berencana dan perlindungan sosial, Kemandirian ekonomi dan peran aktif dalam pembangunan komunitas. Peningkatan tertinggi terjadi antara 2022–2023 (+5,6 poin), lalu sedikit melambat pada 2024 namun tetap tumbuh, menandakan bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif dan mulai mencapai hasil nyata. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis keluarga ke dalam pembangunan daerah, melalui sinergi program dari Dinas P2KBP3A, Dinsos, dan Dinkes. Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs): i-Bangga berkontribusi langsung pada tujuan SDGs, terutama: SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 16 (Perdamaian dan Keadilan)

1.4.6.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Selanjutnya terkait indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten Karimun tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

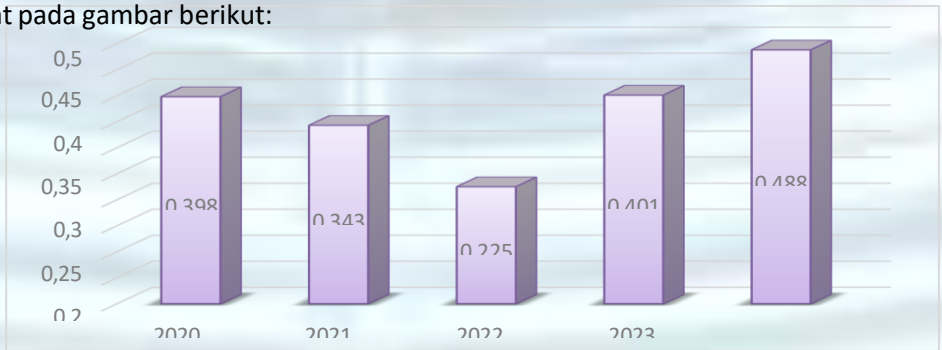

Grafik 1.17 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Semakin rendah nilai indeks, semakin baik (lebih setara) kondisi kesetaraan gender di suatu daerah. Terjadi penurunan ketimpangan dari 0,43 ke 0,25, menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesetaraan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran publik. Indeks kembali meningkat ke 0,42 (2023) dan 0,51 (2024). Ini menandakan penurunan kesetaraan gender, dan menjadi perhatian serius karena ketimpangan bahkan lebih besar dari tahun awal RPJMD. Ketidakstabilan Implementasi Program Kesetaraan Gender: Fluktuasi tajam menandakan bahwa program pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, atau partisipasi politik perempuan tidak dijalankan secara konsisten. Kemungkinan juga terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, menurunnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, atau hambatan partisipasi ekonomi akibat kondisi sosial/kultural. IKG tahun 2024 adalah yang tertinggi, artinya ketimpangan gender semakin melebar, bertentangan dengan semangat RPJMD dan SDGs (khususnya SDG 5: Kesetaraan Gender).

1.4.6.3 Indeks Pembangunan Gender

Untuk pembangunan gender Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan pemerataan sumber daya manusia berbasis gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

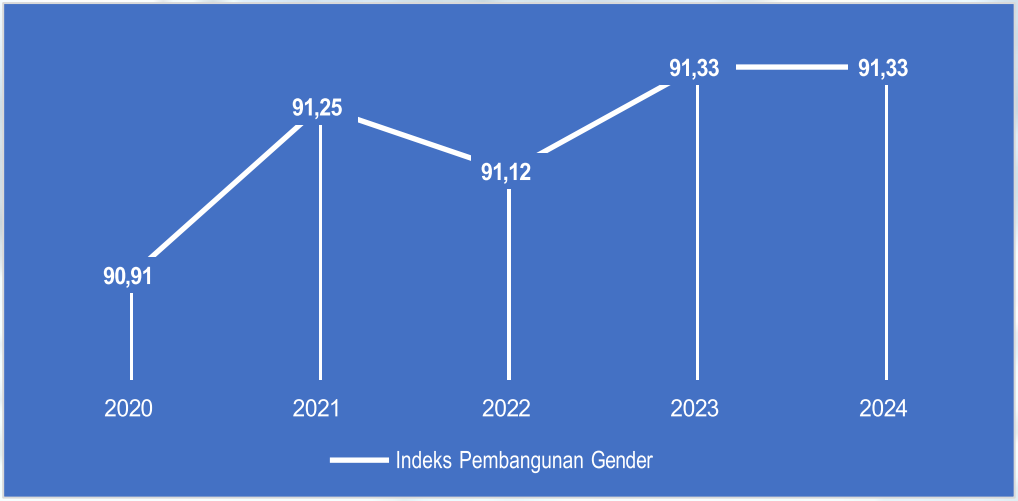

Grafik 1.18 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan perkembangan yang stabil dan sedikit meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPG tercatat 90,91, yang menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki- laki dan perempuan dalam akses terhadap

pembangunan masih ada, meskipun relatif kecil. Pada tahun 2021, IPG meningkat menjadi 91,25, yang mencerminkan adanya sedikit perbaikan dalam kesetaraan gender. Pada 2022, meskipun ada penurunan kecil menjadi 91,12, angka ini masih menunjukkan

bahwa ketimpangan gender tidak berubah secara signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, IPG tetap stabil di angka 91,33, menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada perubahan besar dalam tingkat kesetaraan gender, dan indeks ini tetap berada pada angka yang relatif tinggi. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perbaikan kecil namun konsisten dalam pembangunan gender, dengan peningkatan yang stabil di hampir setiap tahun.

1.4.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Kemudian dalam aspek kesejahteraan masyarakat salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah adalah pembangunan sektor kepemudaan yang memastikan pelibatan pemuda dalam ruang lingkup kebijakan daerah. Dapat dilihat dari indeks pembangunan pemuda sebagai berikut :

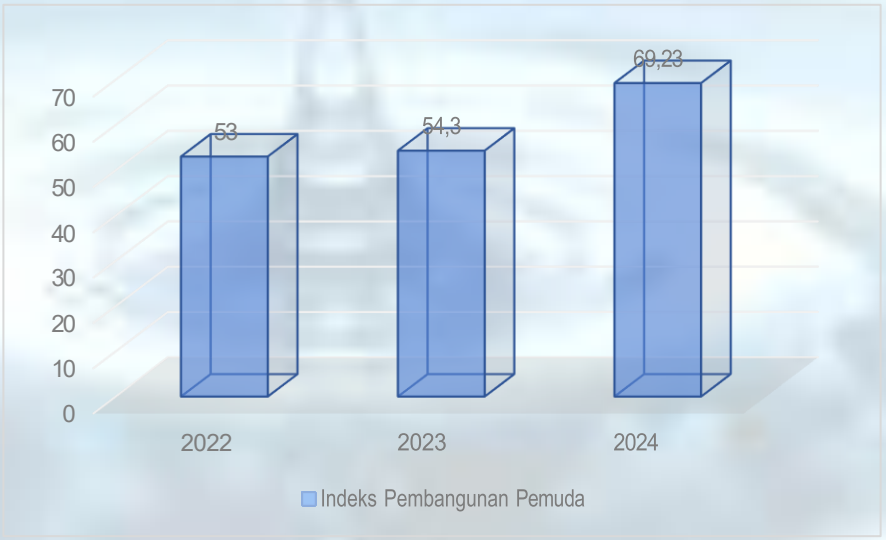

Grafik 1.19 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karimun 2023-2024

Berdasarkan Data Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pembangunan pemuda dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks ini tercatat 53, yang menggambarkan bahwa pembangunan pemuda pada tahun tersebut masih pada tahap yang sedang berkembang. Pada tahun 2023, indeks meningkat menjadi 54,3, menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam pengembangan potensi dan partisipasi pemuda di berbagai sektor. Namun, lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2024, dengan indeks mencapai 69,23, yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan pemuda, baik dalam hal

partisipasi sosial, pendidikan, ekonomi, maupun kapasitas kepemimpinan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan yang pesat dalam pembangunan pemuda, dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.

1.5 Aparat Pemerintah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Karimun didukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 5.082 (Empat ribu tiga ratus dua puluh empat) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.16. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024

NO	GOLONGAN PNS	2020	2021	2022	2023	2024
		(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)
1	Golongan I	54	43	34	34	24
2	Golongan II	877	814	850	744	651
3	Golongan III	2.419	2.411	2.551	2.518	2.522
4	Golongan IV	532	509	520	481	458
5	PPPK	-	43	366	937	1.427
	Jumlah	**3.882**	**3.777**	**4.321**	**4.704**	**5.082**

***Sumbe**r: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024*

Jumalah Pegawai Negeri Spil Golongan I tahun 2020 sebanyak 54 orang, ditahun 2021 sebesar 43 Orang, Tahun 2022 sebanyak 34 orang, ditahun 2023 sebanyak 34 orang dan ditahun 2024 mengalami penurun sebanyak 24 Orang. Jumlah pegawai Golongan II juga mengali penurunan dari tahun ketahuan, untuk tahun 2020 sebanyak 877 orang, tahun 2021 sebanyak 814 orang, di tahun 2022 sebanyak 850 orang, di tahun 2023 sebanyak 744 dan di tahun 2024 sebanyak 651. Sedangkan jumlah pegawai untuk Golongan III mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2020 sebanyak 2.419 orang, tahun 2021 sebanyak 2.411. tahun 2022 sebanyak 2.551, tahun 2023 sebanyak 2.158 dan di tahun 2024 sebayak 2.522 serta pegawai untuk Golongan IV juga mengalami peningkatan yang signifikan, untuk tahun 2020 sebanyak 532 orang, tahun 2021 sebanyak 509, tahun 2022 sebesar 366, tahun 2023 sebanyak 481 dan di tahun 2024 sebanyak 458. Ditambah dengan PPPK tahun 2021 berjumlah 43 orang, tahun 2022 sebanyak 366 orang, tahun 2023 sebanyak 937 dan tahun 2024 sebanyak 1.427.

Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang, Eselon III sebanyak 168 (Seratus enam puluh delapan) orang, Fungsional Setara Eselon III Sebanyak 3 (TIga) Eselon IV sebanyak 314

(Tiga ratus empat belas) orang dan Fungsional Setara Eselon IV Sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima orang.

Tabel 1.17 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024

No	JENIS JABATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Guru	1.541	1.501	1.904	2.226	2.268
2	Tenaga Kesehatan	493	505	765	754	813
3	Tenaga Teknis / Adm Lainnya	1.848	1.771	1.652	1.724	2.001
	Jumlah	**3.882**	**3.777**	**4.321**	**4.704**	**5.082**

***Sumber**: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024*

Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari Jabatan Tenaga Guru mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 1.541 orang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.268, persentase kenaikan sebesar 212 %., Jabatan Tenaga Kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 493 orang, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 813 orang dengan persentase peningkatan sebesar 154%, sedangkan untuk jabatan Tenaga Teknis /Administrasi Lainnya dari tahun 2020 sebanyak 1.848 orang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.001 orang dengan persentase peningkatan sebesar 1208%.

Tabel 1.18 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024

No	Pendidikan Terakhir	2022	2023	2024
1	DOKTORAL (S3)	7 Orang	6	6
2	PASCA SARJANA (S2)	320 Orang	324	323
3	SARJANA (S1)	2374 Orang	2842	3246
4	DIPLOMA (D-IV)	104 Orang	112	120
5	DIPLOMA (D-III)	597 Orang	604	640
6	DIPLOMA (D-II)	203 Orang	154	118
7	DIPLOMA (D-I)	8 Orang	7	7
8	SLTA	655 Orang	610	581
9	SLTP	42 Orang	35	32
10	SD	11 Orang	10	9
	Jumlah	**4321 Orang**	**4704 Orang**	**5082 Orang**

***Sumber**: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024.*

Tingkat Pendidikan ditahun 2024 terdiri dari SD sebanyak 9 (Sembilan) orang, SMP sebanyak 32 (Tiga Puluh dua) Orang, SMA sebanyak 581 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu) orang, D1 sebanyak 7 (Tujuh) orang, D2 sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang, D3 sebabyak 640 (Enam Ratus Empat Puluh) Orang, D4 sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) orang, S1 Sebanyak 3246 (Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh enam Ribu) Orang, S2 sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh Tiga) orang, S3 sebanyak 6(Enam) orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian Penghargaan Tahun 2024 :

1) Satya Lencana dengan masa kerja 10 tahun, sejumlah : 98 (Sembilan Puluh Delapan) orang.
2) Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun, sejumlah : 75 (Tujuh Puluh lima)orang.
3) Satya Lencana dengan masa kerja 30 tahun, sejumlah : 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang.

b. Pendidikan Pelatihan Tahun 2023 meliputi :

1) Diklatpim I : - orang
2) Diklatpim II : 1 orang
3) Diklatpim III : - orang,
4) Diklatpim IV : - orang.

c. Pemberian Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak : 8 orang, terdiridari :

1) Pelanggaran disiplin tingkat ringan : Nihil,
2) Pelanggaran disiplin tingkat sedang : 2 Orang
3) Pelanggaran disiplin tingkat berat : 10 Orang

1.6 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi

Permasalahan pembangunan Kabupaten Karimun diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik

pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan yang ditemui pada

daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdiri dari :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia);
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan);
3. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur);
4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik);
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak Covid-19.

1.7 Isu Strategi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadiisu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

Isu Strategis berdasarkan prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) serta Penanggulangan Kemiskinan;
2. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur);
3. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia);
4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik);
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah;
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Memperkuat Ketahanan Ekonomi;

9. Mengurangi Kemiskinan;
10. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
11. Meningkatkan Kualitas Kesehatan;
12. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya masyarakat.

1.8 Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dilingkungan pemerintah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.19 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun

SEKRETARIAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	LAINNYA
Sekretariat Daerah Tipe A	Dinas Pendidikan Tipe A	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A	Kecamatan Karimun Tipe A	Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A
Sekretariat DPRD Tipe B	Dinas Kesehatan Tipe A	Badan Pendapatan Daerah Tipe A;	Kecamatan Meral;	Rumah Sakit Muhammad Sani;
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A	Kecamatan Tebing Tipe A	Rumah Sakit Tanjung Batu Kundur.
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B	Kecamatan Moro Tipe A	
	Dinas Sosial Tipe A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A	Kecamatan Kundur Tipe A	
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe A	Kecamatan Buru Tipe A	
	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A		Kecamatan Kundur Barat Tipe A	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A		Kecamatan Kundur Utara Tipe A	

SEKRETARIAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	LAINNYA
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A		Kecamatan Meral Barat Tipe A	
	Dinas Perhubungan Tipe A		Kecamatan Durai Tipe A	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A		Kecamatan Ungar Tipe A	
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A		Kecamatan Belat. Tipe A	
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A		Kecamatan Segi Besar Tipe A	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A		Kecamatan Selat Gelam Tipe A	
	Dinas Perikanan Tipe A			
	Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;			
	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A			
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A			
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A			
	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A			

1.9 Maksud Dan Tujuan

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Karimun pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud LaporanKinerja yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakikatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”.

Laporan Kinerja selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen kepemerintahan, serta sebagai media pertanggungjawaban kepadalembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Karimun.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 mencakup hal–hal berikut ini :

1. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
2. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan daerah sekitar, pemerintah kabupaten berbatasan, dan pemerintah provinsi dan pusat;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.10 Sistematika Penyajian

Laporan ini disajikan dalam kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plans*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performancegaps*) bagi perbaikan kinerja di masa datang Uraian singkat masing-masing bab disusundengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Karimun, potensi unggulan, permasalahan utama dan isu strategis, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Karimun untuk periode 2025–2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2026, dan menjelaskan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Karimun secara makro berkaitan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian kinerja hasil pembangunan untuk Tahun 2025

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan saran perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

BAB II PERENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3); sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2021-2026.

2.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yang merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Karimun yang ingin diwujudkan dalam rangka memantapkan landasan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Karimun yang Maju Sejahtera dan Berbudaya”

2.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun, Bupati/Wakil Bupati Karimun menetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;

   Misi ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang kuat, kompetitif dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa serta peningkatan kualitas masyarakat agar lebih kompetitif di berbagai sektor, baik lokal, nasional maupun internasional.

b. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antara Wilayah;

   Bertujuan untuk meningkatkan aksebilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan pelabuhan guna

memperlancar mobilitas barang dan manusia. Peningkatan sarana transportasi darat dan laut untuk mendukung konektivitas antara pulau. Menghubungkan pulau – pulau di Kabupaten Karimun melalui jalur laut dengan peningkatan dermaga dan kapal penyebrangan. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi dan internet, khusus di daerah terpencil untuk mendukung transformasi digital dan pemetaan informasi. Membangun sistem transportasi publik agar lebih efisien dan terjangkau.

c. Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;

Misi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Karimun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor industri, perdagangan, pariwisata dan perikanan. Dengan mengembangkan sektor–sektor ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Penguatan unggulan daerah berarti memaksimalkan potensi sumber daya yang khas dan strategis di Kabupaten Karimun. unggulan daerah Kabupaten Karimun diantaranya :

1. Industri maritim dan perkapalan

   Sebagai daerah kepulauan, karimun memiliki sektor maritim yang kuat, termasuk galangan kapal dan jasa perbaikan kapal.

2. Perdagangan dan Pelabuhan

   Kabupaten Karimun memiliki kawasan perdagangan bebas (FTZ-Free Trade Zone) yang menarik investasi.

3. Pariwisata Bahari

   Keindahan pantai dan pulau–pulau di karimun dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun internasional.

4. Pertanian dan Perikanan.

   Pemanfaatan sumber daya laut dan hasil pertanian yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Misi ini juga mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan berarti pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi berarti menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung dalam jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang. Keberlanjutan sosial berarti memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Keberlanjutan lingkungan berarti mengurangi dampak negatif

terhadap ekosistem dan menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga untuk masa depan. Selain berkelanjutan, pembangunan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan artinya pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi berlebihan.

d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa;

Mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintah yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berlandaskan pada nilai–nilai agama dan moralitas. Pemerintah daerah diharapkan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjunjung tinggi integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menghindari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintah harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi juga harus diiringi dengan pendekatan yang humanis dan adil. Pembangunan SDM Berbasis iman dan taqwa, aparatur pemerintah diberikan pembinaan rohani dan moral untuk meningkatkan kesadaran spiritual dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan agama dan etika ditekankan dalam proses pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun merupakan cita-cita pembangunan masyarakat karimun yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2025-2029. Visi yang dijabarkan di dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju, religius dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang bertujuan untuk suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pembangunan. Sasaranya adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. ada pun tujuan dari Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Matriks Misi dan Tujuan

No	Misi		Tujuan
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	2	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Optimal
3	Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
		4	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah
		5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa	6	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan "BERSIH" yaitu; Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

a. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

b. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan aset dan potensi yang ada.

c. Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

d. Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

2.1.3. Tujuan Dan Sasaran.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun ditetapkan 6 (Enam) tujuan dan 17 (Tujuh belas) sasaran untuk Tahun 2021- 2026 dan mengalami perubahan Visi dan Misi pembangunan baru dengan Kepala Daerah Baru ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 10 (Sembilan Belas) sasaran untuk Tahun 2025-2029 , sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN	
PERTAMA	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah	1.	Meningkatnya Investasi Daerah
		2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan
		3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
KEDUA	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	4	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata
		5	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal
KETIGA	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas	6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
		8	Terwujudnya Kesetaraan Gender
		9	Terwujudnya Pengendalian penduduk
		10	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
		11	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah
KEEMPAT	Menurunkan Angka Kemiskinan	12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
		13	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah
KELIMA	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	14	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup
		15	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air
KEENAM	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Government*)	16	Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel
		17	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun 2025-2029

TUJUAN		SASARAN	
PERTAMA	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
		2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender
		4.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga
		5.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah
		6.	Meningkatkkan Daya Saing Pemuda
KEDUA	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Optimal	7.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah
		8.	Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung yang Optimal
KETIGA	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	9	Meningkatnya Investasi Daerah
		10	Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah
	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah	11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
		12	Terciptanya Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja
		13	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat
		14	Meningkatnya Kemandirian Desa
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		16	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang siap tanggap dan pulih
KEEMPAT	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	17	Terwujudnya Pemerintah yang Inovatif Berbasis Digital
		18	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
		19	Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamnan Daerah

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun 2025 yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan RPJMD terbaru Bupati terpilih Tahun 2025-2029 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2024 merupakan tahun ke 25 (Dua puluh lima) sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Karimun dan merupakan tahun ke 6 (enam) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun periode 2021-2026 serta terjadi transisi Tahun Pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Karimun Periode 2025-2029 . Mencermati arah dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 dan RPJMD Perubah terbaru Bupati Terpilih Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 disusun 5 (Lima) prioritas untuk RPJMD 2021-2026 dan 4 (empat) Prioritas untuk RPJMD 2025-2029 pembangunan sebagai penjabaran dari RPJMD, dimana prioritas pembangunan tersebut yang menjadi fokus pada tahun 2025 ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan Provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan, maka Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan tahun 2025 adalah Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis Maritim Menuju Karimun yang Terdepan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1	**Prioritas Pertama**	:	Pemberdayaan 6000 UMKM Se- Kabupaten Karimun
2	**Prioritas Kedua**	:	Membangun Konektivitas Di Wilayah Kabupaten Karimun, Khususnya Kec. Belat, Kec. Ungar Dan Kec. Durai Serta Kecamatan Hasil Pemekaran, Yaitu Kec.Selat Gelam Dan Kec.Sugie Besar
3	**Prioritas Ketiga**	:	Penyiapan 3000 Tenaga Kerja Yang Berkompeten Dan Memiliki Skill Yang Dibutuhkan Pasar Industri
4	**Prioritas Keempat**	:	Menjadikan Kabupaten Karimun “Bersih” (Beriman, Sehat, Indah Dan Harmonis)
5	**Prioritas Kelima**	:	Digitalisasi Pelayanan Publik Dan Birokrasi

Selanjutnya dari kelima prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten KarimunTahun 2024 maka disusun arah dan sasaran kegiatan pokok pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Triwulan I s/d III)

NO	SASARAN	PROGRAM	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Program pelayanan penanaman modal
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	2	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3.	Meningkatnya Konstribusi	3	Program Pengelolaan Pendapatan Derah
	Pendapatan Asli Daerah		
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	4	Program Pengelolaan SDA
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	5	Program Penyelenggaraan lahan
		6	Program Pengelolaan Pelayaran
		7	Program Penyelenggaraan lalu lintasdan angkutan Jalan (LLAJ)
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	8	program Pemenuhan Upaya Kesehatan peroranagn dan upaya kesehatan Masyarakat
		9	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	10	Program Pengembangan Kurikulum
		11	Program pendidik Dan Tenaga kependidikan
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	12	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	13	Program pengendalian penduduk
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	14	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan saing keolahragaan
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	15	Program Pengembangan Kebudayaan
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	16	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	17	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		18	Program Penempatan Tenaga Kerja
		19	Program Hubungan Industrial
		20	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	21	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		22	Program Pengelolaan Persampahan
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	23	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
	Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel	24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	25	Program Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Tabel 2.4 Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten KarimunTahun 2025 (Triwulan IV)

NO	SASARAN	PROGRAM	
1.	Rata – Rata Lama Sekolah	1	Program Pengelolaan Pendidikan
	Angka Harapan Lama Sekolah	2	Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
		3	Program Pembinaan Perpustakaan
2.	Usia Harpan Hidup (UHH)	4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) (%)	5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Indeks Ketimpangan Gender	7	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5	Indeks Pembangunan Pemuda	9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saiang Kepemudaan
6	Indeks Infrastruktur	10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		12	Program Penyelenggaraan Jalan
		13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7	Rasio Konektifitas	14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		15	Program Pengelolaan Pelayaran
8	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
9	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10	Persentase Penduduk Miskin yang ditangani	20	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	21	Program Pelatihan Kerja dan Produktifias Tenaga Kerja
		22	Program Penempatan Tenaga Kerja
12	Indeks Ketahanan Pangan	23	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakt
		24	Program Penanganan Kerawanan Pangan
13	Indeks Desa	25	Program Penataan Desa
		26	Program Administrasi Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	PROGRAM	
14	Indeks Kualitas Lingkungna Hidup (IKLH)	27	Program Pengendalian, Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		28	Program Pengelolaan Persampahan
15	Indeks Resiko Bencana	29	Program Penanggulangan Bencana
		30	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
16	Indeks Sismtem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	31	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
17	Nilai AKIP	32	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
		33	Prgrom Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		34	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		35	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		36	Program Penelitian dan Pengembangan
	Indeks Pelayanan Pelayanan Publik	37	Program Pendaftaran Penduduk
		38	Program Pencatatan Sipil
		39	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Maturitas SPIP	40	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		41	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja, maka untuk Tahun 2021 pelaporan kinerja telah diperbaiki denganterbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan strategis tersebut telah menerapkan tata laksananya dengan baik meliputi 17 (tujuh belas) sasaran strategis untuk Perjanjian Kinerja Triwulan I s/d III yang ditandatangani pada Bulan Maret 2025 dan Perjanjian Kinerja Triwulan IV yang ditanda tangani pada Bulan Oktober 2025 . Kemudian sasaran strategis tersebut dimuat dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnyapenyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukurdengan indikator kinerja yang tertera pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Triwulan I s/d III)

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025	INSTANSI
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Nilai Investasi	25 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Dalam Miliar Rp)	2.780.95 Miliar	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
3.	Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah	1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,68 %	Badan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	1.	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	37,95 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubungyang Optimal	1.	Rasio Panjang Dalam Kondisi Baik	40,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,69	Dinas Perhubungan
		3.	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,93	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	72,60 Tahun	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Angka HarapanLama Sekolah	13,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Rata - Rata Lama Sekolah	9,99 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	91,75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,50 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025	INSTANSI
1	*2*	*3*		*4*	*5*
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	72	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	1.	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	40 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1.	Persentase PPKS Mandiri	2,59 %	Dinas Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	33,97 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	50	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	1.	Indeks Kualitas Air	55	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Udara	95,20	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Indeks Kualitas Lahan	52,62	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	1.	Nilai LPPD	4,1000	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karimun
		2.	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun
		3.	Nilai Manajemen Resiko Indeks	3,30	Baperlitbang Kabupaten Karimun
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Pelayanan Publik	4,00	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Triwulan IV)

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025	INSTANSI
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Rata – Rata Lama Sekolah	8,98 Tahun	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,63 Tahun	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Usai Harapan Hidup	72,61 %	Dinas Kesehatan
		2.	Prevelensi Stunting	19,40 %	
3.	Meningkatnya Kesehatan Gender	1.	Indeks Ketimpangan Gender	0,390	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	1.	Indeks Pembanguan Keluarga (IBANGGA)	67,10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	69,5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
6.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	1.	Indeks Infrastruktur	0,2694	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penghubung yang Optimal	1.	Rasio Konektifitas	0.30%	Dinas Perhubungan
8.	Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	37,50 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025	INSTANSI
1	*2*	*3*		*4*	*5*
9.	Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	2.563,2 2	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	1.	Persentase Keluarga Miskin yang Ditangan	40,60%	Dinas Sosial
11.	Terciptanya Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48-5.50 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	1.	Indeks Ketahanan Makanan	77,18	Dinas Pangan dan Pertanian
13.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1.	Indek Desa	69, 35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Linkungan Hidup	73,60	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Siap Tanggap dan Pulih	1.	Indeks Resiko Bencana	99,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
16.	Terwujudnya Pemerintahan yang Inovattif Berbasis Digital	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
17.	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1.	Nilai AKIP	4,00	Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
		2.	Indeks Pelayanan Publik	4,38	Sekretariat Daerah
		3.	Nilai Maturitas SPIP	3,35	Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut untuk menerpakan sistem pengelolaan kinerja yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Salah satu instrumen panting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terahap tingkat pencapaian kinerja organisasi. Salah satu bentuk evaluasi tersebut dilakukan melalui Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). PKO merupakan proses penilaian terahap tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). SAKIP merupakah salah satu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup seluruh proses manajemen kinerja mulai dari perencanaan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja.

Melalui penerapan SAKIP, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan kinerja yang lebih terarah, menetapkan indikator kinerja yang terukur serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkelanjutan. Proses ini menjadi dasar dalam pelaksanaan PKO, karena penilaian kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas perencanaan, kejelasan indikator kinerja, serta ketetapan pengukuran dan pelaporan kinerja yang dihasilkan melalaui sistem SAKIP.

Dengan demikian, SAKIP berfungsi sebagai kerangka sistem manajemen kinerja, sedangkan PKO merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut mampu menghasilkan kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Keterkaitan ini menjadikan PKO sebagai alat penting dalam menilai keberhasilan implementasi SAKIP sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan salah satu bentuk implementasi dari SAKIP yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang

telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. PKO dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi yang dicapai pada periode tertentu. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi.

Interval Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Penilaian Kinerja OPD (PKO) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Melalui PKP, pemerintah dapat melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kinerja yang telah direncanakan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi juga menjadi bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Melalui proses penilaian ini, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, PKO berperan sebagai alat pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan. Dengan adanya penilaian kinerja organisasi, diharapkan setiap unit kerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan pelaksaan serta pelaporan kinerja sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pelaksanaan penilaian kinerja organisasi menjadi sangat penting bagi upaya untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan birokrasi yang profesional.

Penilaian Kinerja Organisasi adalah suatu proses pengukuran dan evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja suatu organisasi, khususnya instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. PKO umunya digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Penilaian ini juga menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara umum tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) antara lain:

1. Mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi kepada pimpinan maupun masyarakat;
4. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi di masa yang akan datang;
5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam pelaksanaannya, PKO bisa menilai beberapa aspek utama seperti :

- Perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja);
- Pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pengukuran dan pelaporan kinerja
- Capaian indikator kinerja organisasi
- Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Dengan adanya Penilaian Kinerja Organisasi, instansi pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai serta mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dengan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Perjanjian Kinerja;

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi setiap tahun yang dihitung dalam laporan kinerja.

2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh kementerian setiap tahunnya kepada seluruh instansi pemerintah. Sementara hasil evaluasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diterbitkan oleh inspektorat/ unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal instansi pemerintah. Hasil evaluator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Kategori/Predikat
>90 - 100	AA/Samgat Memuaskan
>80 - 90	A/ Memuaskan
>70 - 80	BB/Sangat Baik
>60 - 70	B/Baik
>50 - 60	CC/ Cukup (Memadai)
>30 - 50	C/Kurang
>0 - 30	D/Sangat Kurang

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 dilakukan berdasarkan capaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pada tahun tersebut terdapat dua dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pengukuran kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang ditetap kan pada tanggal 03 Maret 2025 dan Perjanjian Kinerja yang diperbaharui pada tanggal 16 Oktober 2025. Perubahan dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai konsekkuensi dari adanya perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dari RPJMD 2021-2025 lama menjadi RPJMD baru 2025-2029.

Dengan adanya perubahan tersebut, makan dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran serta indikator yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu, dalam proses perhitungan PKO tahun 2025 digunakan dua periode penilaian yang mengacu pada masing-masing dokumen perjanjian kinerja. Periode pertama mengacu pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tanggal 03 Maret 2025 yang masih merujuk pada RPJMD sebelumnya, sedangkan periode kedua mengacu pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2025 yang telah menyesuaikan dengan RPJMD yang baru.

Selanjutnya capaian Kinerja organisasi dihitung dengan memperhatikan target dan realisasi indikator kinerja pada masing–masing periode tersebut, sehingga hasil penilaian kinerja organisasi tetap mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya sepanjang tahun berjalan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian kinerja tetap akuntabel, transparan serta selaras dengan perubahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berlaku pada tahun 2025. Berikut ini Perhitungan PKO Pemerintah Kabupaten Karimun untuk tanggal 03 Maret tahun 2025 adalah:

Tabel 3.2 Penilaian Kinerja Organisasi Kabupaten Karimun 03 Maret Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	Capaian (%) (Hasil/target * 100	NORMALISASI CAPAIAN PK (1)	KOREKSI NORMALISASI PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Nilai Investasi	24,500	24,800	101,22	101.22	10%	91.10%
2	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Dalam Miliar Rp)	2780.95	N/A	0.00	0	10%	0.00%
3	Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah	1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28.68	33.39	110.20	110.20	10%	99.18%
4	Meningkatnya Akses Kebutuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	1	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar (%)	37.95	42.26	111.36	110	10%	99.00%
5	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	1	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	40.00	39.73	99.33	99.33	10%	89.40%
		2	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,69	0,54	78.26	78.26	10%	70.43%
		3	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0.93	0.87	93.55	93.55	10%	84.19%
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.5	75.05	104.97	104.97	10%	94.47%
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,30	12,63	94.96	94.96	10%	85.47%
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	9.99	9.06	90.69	90.69	10%	81.62%
8	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender	91.75	91.61	99.85	99.85	10%	89.86%
9	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.22	0.52	234.62	234.62	10%	211.15%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	Capaian (%) (Hasil/target * 100	NORMALISASI CAPAIAN PK (1)	KOREKSI NORMALISASI PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
10	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda (%)	69.50	62.20	89.50	89.50	10%	80.55%
11	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	1	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi (%)	40	45	112.50	125	10%	112.50%
12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PPKS Mandiri	2.59	2.35	90.73	84.39	10%	75.95%
13	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,50	6,31	97.08	92.00	10%	82.80%
14	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1	Luas Ruang Terbuka Hijau	33.97	N/A	-	0	10%	0.00%
		2	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	50	N/A	-	0	10%	0.00%
15	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	1	Indeks Kualitas Air	55	72.56	131.93	95.68	10%	86.11%
		2	Indeks Kualitas Udara	95.2	73.04	76.72	102.19	10%	91.97%
		3	Indeks Kualitas Lahan	52.62	69	131.13	98.57	10%	88.71%
16	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	1	Nilai LPPD	4,1000	N/A				0.00%
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	78.00	77.37	99.19	99.19	10%	89.27%
		3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	3.30	2.600	78.79	101.366	10%	91.23%
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4.28	107.00	110	10%	99.00%
								Total Capaian PK (4)	1994%
								Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)	91%
								Predikat PKO (6)	BAIK

Berdasarkan data PKO Tahun 2025 di atas, penilaian dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Hasil perbandingan tersebut kemudian dihitung persentase capaian dengan rumus (Realisasi/Target*100%), selanjutnya dilakukan normalisasi capaian kinerja serta koreksi berdasarkan predikat AKIP sebesar 10% untuk memperoleh nilai akhir capaian PK pada masing – masing indikator.

Secara umum beberapa sasaran strategi menunjukkan capaian yang sangat baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Nilai Investasi Daerah yang mencapai 101,22%, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 110,20%, serta Rasio KK yang terlayani Infrastruktur dasar sebesar 111,36%. Selain itu , indikator Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu 234,64% yang mengindikasikan keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pada sektor lingkungan hidup, indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan Juga menunjukkan capaian di atas target dengan persentase masing-masing 131,93% dan 131,13%.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal atau belum tersedia datanya pada tahun penilaian, seperti Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Luas Ruang Terbuka Hijau, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah serta nilai LPPD yang belum dapat dihitung sehingga nilai capaiannya masih 0%. Disisi lain, beberapa indikator seperti Rasio Konektivitas angkutan laut, Rasio Konektivitas Angkutan Darat, Indeks Pembangunan Pemuda dan Persentase PPKS Mandiri juga menunjukkan

capaian yang masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Stelah dilakukan perhitungan normalisasi dan koreksi terhadap seluruh indikator kinerja, diperoleh total capaian Perjanjian Kinerja sebesar 1.994% dengan rata–rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 91%. Berdasarkan hasil tersebut maka predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Pemerintah Kabupaten berada pada Kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pada periode berikutnya.

Berikut ini Perhitungan PKO Periode ke dua Pemerintah Kabupaten Karimun untuk tanggal 16 Oktober 2025 adalah :

Tabel 3.3 Penilaian Kinerja Organisasi Kabupaten Karimun 16 Oktober Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	Capaian (%) (Hasil/target * 100	NORMALISASI CAPAIAN PK (1)	KOREKSI NORMALISASI PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,06	100.89	101.22	10%	91.10%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,63	12,63	100.00	101.22	10%	91.10%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	72.61	75,05	103.36	101.22	10%	91.10%
		2	Prevalensi Stunting	19.4	7.36	37.94	101.22	10%	91.10%
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender	0,390	0.488	79,918	93.30	10%	83.97%
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	65.6	71.33	108.73	108.73	10%	97.86%
5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda	69.5	62.20	89.50	58.29	10%	52.46%
6	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	1	Indeks Infrastruktur	0,2694	N/A	N/A	100.21	10%	90.19%
7	Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal	1	Rasio Konektifitas	0,30	0.298	99.33	96.34	10%	86.71%
8	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	37,50	38,20	101.87	99.81	10%	89.83%
9	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	2.563,22	N/A	#VALUE!	49.41	10%	44.47%
10	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	1	Persentase Keluarga Miskin yang Ditangani	40.60	42.71	105.20	0	10%	0.00%
11	Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.48	6.31	115.15	125	10%	112.50%
12	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	77,18	72,00	93,28	84.39	10%	75.95%
13	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Indeks Desa	69,35	N/A	N/A	92.00	10%	82.80%
14	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,60	71.97	97.79	89.46	10%	80.51%
15	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	1	Indeks Risiko Bencana	99.87	153.17	153.37	110	10%	99.00%
16	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	N/A	-	0	10%	0.00%
17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih , Akuntabel dan Melayani	1	Nilai SAKIP	76.20	75.91	99.62	131.23	10%	118.11%
		2	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4.28	107.00	107.00	10%	96.30%
		3	Nilai Maturitas SPIP	3,35	3,20	95.52	0	10%	0.00%
								Total Capaian PK (4)	**1479%**
								Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)	**67%**
								Predikat PKO (6)	**BUTUH PERBAIKAN**

Berdasarkan dari data di atas hasil pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) terhadap sasaran strategis pembangunan daerah, dilakukan perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja untuk memperoleh persentase capaian kinerja. Nilai capaian tersebut kemudian dinormalisasi dan dikoreksi berdasarkan predikat AKIP sebesar 10% sehingga menghasilkan nilai akhir capaian PK pada setiap indikator yang menjadi dasar penilaian Kinerja Organisasi.

Beberapa indikator menunjukkan capaian yang cukup baik dan bahkan melampau target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Rata -Rata Lama Sekolah yang mencapai 100,89%, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 100%, serta Usia Harapan Hidup yang mencapai 103,36% yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) juga menunjukkan capaian yang baik sebesar 108,73%, yang menggambarkan meningkatnya kualitas pembangunan keluarga di daerah. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto sebagai Salah satu ukuran peningkatan investasi daerah juga menunjukkan capaian di atas target yaitu 101,87%.

Terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya masih belum optimal atau belum dapat dihitung secara penuh karena keterbatasan data pada tahun penilaian. Beberapa indikator yang belum tersedia realisasinya antara lain Indeks Infrastruktur, Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Indeks Desa serta Indeks SPBE. Selain itu, terdapat pula indikator yang menunjukkan capaian relatif rendah seperti Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Ketahanan Pangan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas pembangunan pada beberapa sektor strategis.

Pada aspek tata kelola pemerintah, Indikator Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik menunjukkan capaian yang cukup baik, yang menggambarkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, indikator Maturitas SPIP masih memerlukan peningkatan lebih lanjut agar sistem pengendalian Internal Pemerintah dapat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap seluruh indikator kinerja tersebut, diperoleh Total Capaian Perjanjian sebesar 1.479% dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata–rata capaian PK sebesar 67%. Dengan nilai tersebut maka Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berada pada Kategori Butuh Perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa indikator telah mencapai target bahkan melampai target yang ditetapkan, masih terdapat sejumlah indikator strategi yang perlu ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan, penguatan koordinasi antara perangkat daerah, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja organisasi pada periode selanjutnya dapat lebih optimal.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) sasaran. Berdasarkan dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa rata- rata capaian kinerja sasaran telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi 18 (72.00%), 4 (16,00%) kriteria tinggi dan 3 (12,00%) sasaran sedang. Sementara itu, Rata-Rata capaian IKU telah memenuhi kriteria sangat tinggi (96,94%), namun demikian capaian per kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) bervariasi dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai	Skala Pengukuran Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

***Sumber** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2024. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2025 (Triwulan I s/d III)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Triliun Rupiah	24,500	24,800	101,22	18,9	73,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Miliar Rupiah	2.780,95	N/A	-	2.947,48	73,31	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
3.	Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	28,68	33,39	110.20	28,91	101,94	Badan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	Persen	37,95	42,26	111,36	38,63	93,53	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	40,00	39,37	99,33	86,93	76,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Persen	0,69	0,54	78,26	0,71	68,31	Dinas Perhubungan
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Persen	0,93	0,87	93,55	1,00	73,00	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,50	75,05	104,97	71,70	99,76	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan LamaSekolah	Tahun	13,30	12,63	94,95	13,50	93,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	9,99	9,06	90,69	9,00	94,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	91,75	91,61	99,85	92,25	98,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,22	0,52	234,62	1,75	1,45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	NIlai	69,50	62,20	89,50	85	62,35	Dinas Kepemudaandan Olahraga
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	Persen	40	45	112,50	52,5	42,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Mandiri	Persen	2,59	2,35	90,73	3,03	46,20	Dinas Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.50	6,31	97,08	5,43	126,52	Dinas Tenaga Kerja dan Periindustrian
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau	Hektar	33,97	N/A	-	38,45	50,14	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	Nilai	50	N/A	-	66	78,51	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	55	72,56	131,93	56,90	87,87	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	95,20	73,04	76,72	94,71	97,59	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	52,62	69	131,13	52,62	85,54	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	Nilai LPPD	Nilai	4,1000	N/A	-	4,1150	96,26	Bagian Tata Pemerintahan
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78,00	77,37	99.19	65	87,15	Bagian Organisasi
		Nilai Manajemen Resiko Indeks	Nilai	3,30	2,600	78,79	-	-	Baperlitbang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,00	4,28	107.00	4,00	86,50	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun 2025 yang berjumlah 25 indikator (100%), rata-rata capaian kinerja IKU telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi (96,94%) yang digambarkan pada diagram berikut:

Grafik 3.1 ***Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2025***

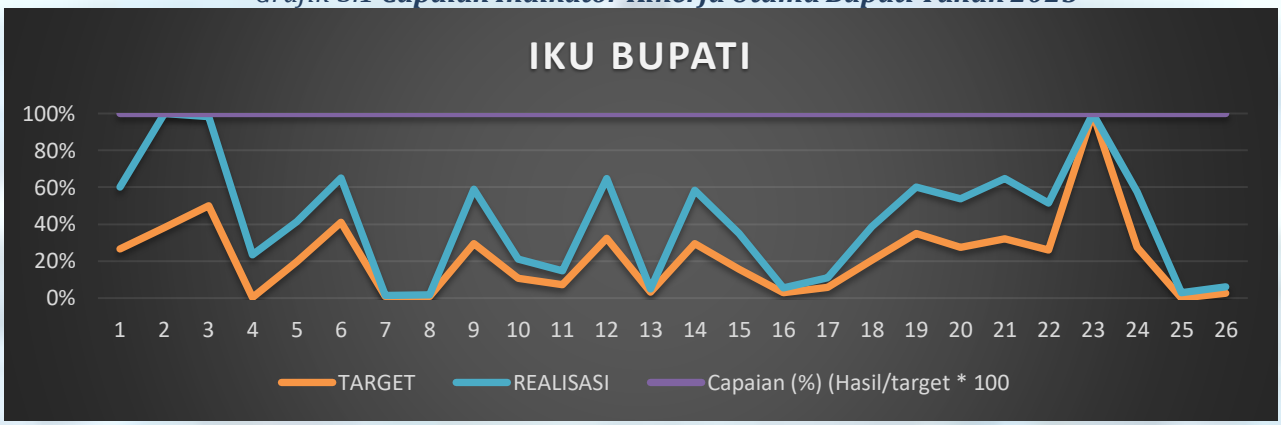

Tabel 3.6 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2025 (Triwulan IV)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2029	Capaian s/d 2025 terhadap 2029	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,98	9,06	100,89	11,00	-	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,63	100,00	12,72	-	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,61	75,05	103,36	73,95	-	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Persen	19,40	7,36	37,98	14,00	-	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2029	Capaian s/d 2025 terhadap 2029	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,390	0,488	80	0,373	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	67,10	71,33	108,37	71,00	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	69,5	62,20	89.50	72,30	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
6.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daera	Indeks Infrastruktur	Angka	0,2694	N/A	-	0,2930	-	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Terwujudnya Sasaran Prasarana Penghubung yang Optimal	Rasio Konektifitas	Persen	0,30	0,298	99,33	0,39	-	Dinas Perhubungan
8.	Meningkatnya Investasi Daerah	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	Persen	37,50	38,20	101,87	40,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	Rp Miliyar	2.563,2 2	N/A	-	2.670,47	-	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Keluarga Miskin yang ditangani	Persen	40,60	42,71	105,20	42,32	-	Dinas Sosial
11.	Terciptanya Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,48-5,50	6,37	115,15	5,32-5,74	-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD Tahun 2029	Capaian s/d 2025 terhadap 2029	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12.	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	77,18	72,00	93,28	101,24	46,20	Dinas Pangan dan Pertanian
13.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	Persen	69,35	N/A	-	70,55	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,60	71,97	97,79	74,29	-	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	Indeks Risiko Bencana	Angka	99,87	153,17	153,37	95,22	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
16.	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,50	N/A	-	3,30	-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP	Nilai	76,20	75,91	99,62	79,20	-	Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,38	4,28	107,00	4,50	-	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. RSUD M.Sani 4. Kecamatan
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,35	3,20	95,52	3,60-	-	Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerjayang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Berikut akan dijelaskan analisis capaian masing-masing indikator dari 17 sasaran sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

Wilayah Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura menjadikan Kabupaten Karimun memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini tentu menjadi potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya**.** Salah satu potensi ekonomi dimaksud adalah dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik guna menangkap limpahan *(spill over*) positif dari negara-negara tetangga. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan sasaran Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru sebagai sasaran ke- 1 yang ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor, parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat berjalan dengan mudah dan cepat yang tentunya hal ini akan menumbuhkan citra positif bagi pelaku usaha (perusahaan) atas kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun sehingga merangsang pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun.

Adapun indikator pendukung sebagai ukuran keberhasilan dari capaian sasaran ini adalah indikator nilai ekspor, nilai investasi dan jumlah kawasan strategis. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Indikator Nilai Investasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Investasi (Rp)	24.500.000.000.000,-	24. 800.000.000.000,-	101,22%
Rata-Rata Tingkat Capaian				**101, 22 %**

Sumber : *DPMPTSP Kab. Karimun, 2025*

Dari tabel capaian di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target sasaran diperolehrata-rata capaian sebesar 101,22 % dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Nilai Investasi merupakan faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah,

tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pula dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai.

Persentase kenaikan PMDN dan PMA berbanding lurus atau sejalan dengan kenaikan Nilai realisasi investasi, di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor , ada parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dapat berjalan dengan mudah dan cepat yang tentunya hal ini akan menumbuhkan citra positif bagi pelaku usaha (perusahaan) atas kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun sehubungan merangsang pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun

Di Tahun 2025 pelaksanaan rencana investasi dan proses perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui aplikasi *oss RBA* yang diajukan secara mandiri. Pada periode Januari – Desember 2025 *sistem oss* menerbitkan nomor induk berusaha sebanyak 2.052 KBLI sebagai bentuk permohonan kegiatan usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NIB dengan seluruh jenis penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada data NKU tersebut tercatat jumlah rencana investasi sebesar Rp. 12.084.380.478.850,- rencana investasi tersebut tercatat pada lokasi proyek yang bergerak pada sektor industri berupa Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung untuk penanaman modal asing yang merupakan investasi lanjutan pada kegiatan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.933.935.100.334,- pada tahun 2025 terdapat penambahan rencana investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 10.855.991.470.335,- dan terdapat penambahan di Tahun nilai rencana investasi dari PMD sebesar Rp. 1.228.389.008.515,-

Realisasi investasi di Tahun 2025 tercatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp. **1.377.010.715.719**,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp 420.772.437.623,- dan PMDN sebesar Rp. 938.691.769.805,- terbagi berdasarkan jenis modal pada perusahaan . PMDN terdiri UMK sebesar Rp. 28.034.797.290,- dan Non UMK sebesar Rp. 910.656.972.515,- Adapun Hambatan pelaku usaha dalam

merealisasikan rencana investasi tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi sektoral yang mengatur perizinan berusaha yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rencana Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Status Penanaman Modal	Jenis Perusahaan						Jumlah Rencana Investasi (Rp)
		Perorangan			Badan Usaha			
		NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	
1	PMA	-	-	-	8	14	10.855.991.470.335	10.855.991.470.335
2	PMDN	49	91	15.656.630.223	568	2.164	1.212.732.378.292	1.228.389.008.515
		49	91	15.656.630.223	576	2.178	12.084.380.478.850	12.084.380.478.850

Sumber : https://oss.go.id/

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan melihat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha per triwulan dan Semester pada aplikasi OSS (Online single submission). Pada tahun 2025 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM berdasarkan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) 2.052 NKU yang dimiliki, dari Laporan Kegiatan Penanaman modal oleh 2.052 tersebut telah disetujui sebanyak 1.746 NKU dari NIB yang dimiliki perusahaan yang selanjutnya nilai investasinya di catatkan dalam perolehan realisasi investasi di Tahun 2025. Dalam laporan tersebut diketahui selama Tahun 2025 terdapat nilai tambahan sebesar Rp. **1.377.010.715.719,-** yang terdiri dari PMA sebesar Rp 420.772.437.623,- dan PMDN sebesar Rp. 956.238.278.096,- sehingga jika dijumlahkan dengan tahun sebelumnya maka total realisasi investasi di Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp. 24.840.831.035.305,- dalam hal capaian realisasi investasi tahun 2025 yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar 24,8 Triliun telah melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Tambahan Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Status Badan Usaha	Jumlah Tambahan Realisasi Investasi				Jumlah 2024
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	PMA	216.615.062.280.	74.837.280.969	25.276.922.768	104.043.171.606	420.772.437.623
2	PMDN	216.313.070.257	165.067.182.124	98.129.920.768	476.728.104.947	956.238.278.096
	Jumlah	432.928.132.537	239.904.463.093	123.406.843.536	580.771.276.553	1.377.010.715.719

Sumber : https://oss.go.id/ (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 10 Januari 2025

Tabel 3.10 Realisasi Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Total Investasi	23.896.748.452.122	23.703.724.782.678	24.477.519.728.675	24.044.591.596.138	24.840.831.035.305

Sumber : https://oss.go.id/ (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 12 Januari 2024

Tabel 3.11 Perbandingan Total Realisasi Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2023, 2024 dan 2025

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN		
	2023	2024	2025
PMA	10.371.877.425.821	18.878.183.823.152	19.298.956.260.775
PMDN	4.078.010.126.409	4.585.636.496.434	5.541.874.774.530
TOTAL	14.449.887.552.230	23.463.820.319.586	24.840.831.035.305

Adapun target realisasi investasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 24.5 T,** maka capaian realisasi investasi yang dicapai **Rp 24,8 T,** capaian indikator ini dapat di hitung dengan membandingkan realisasi terhadap target dengan rumus berikut :

Tabel 3.12 Persentase Kenaikan Nilai Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Nilai Investasi	=	Nilai Investasi Tahun n	-	Niai Investasi Tahun n-1			X 100%
		Niai investasi Tahun n-1					
Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	=	23.463.820.319.586	-	14.449.887.552.230	X 100%	=	6,23 %
		14.449.887.552.230					

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025*

Dari realisasi di atas, untuk capaian indikator sasaran RPJMD persentase nilai investasi pada Tahun 2025 sebesar 5.86 %, ini bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel 3.13 Analisa Efisiensi di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Input			Indikator Kinerja (Output)			Tingkat Efisiensi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
Meningkatnya kualitas pelayanan dan dan optimalisasi Investasi	- Nilai IKM	11.256.000,	11.230.000-,	99.76	3.51	3.56	101.42	1.66
	- Nilai Investasi	75.130.000	65.755.400	87.52	24.5 T	24.8 T	101.22	13.7

1. Efisiensi sumber daya biaya.

   Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya,

misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah

Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai untuk dibelanjakan. Upaya efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan dan pembelanjaannya telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi** dalam rangka mendukung pelaksanaan :

- Program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dengan indikator nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Pada Tahun 2024 kegiatan ini tidak dapat terlaksana namun kegiatan tetap dijalankan, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana para pelaku usaha wajib untuk mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat melalui link https://dpmptsp.karimunkab.go.id Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah mencapai tingkat yang tinggi.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase kenaikan PMDN dan PMA. Realisasi anggaran sebesar Rp. 535.478.800,- (84.40 %), anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Non Fisik yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan peningkatan Nilai Investasi. Upaya efisiensi yaitu Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.

2. Efisiensi sumber daya manusia.

   Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan cara mengirimkan link kuesioner ke semua pengguna layanan : *dpmptsp,karimunkab.go.id/skm* bersamaan dengan email penyerahan izin yang telah selesai diproses. Sedangkan untuk pengisian Survei Kepuasan Masyarakat secara manual, tiap kecamatan diambil sebanyak 5-10 responden untuk memenuhi syarat pengumpulan data yang lebih luas. Jumlah responden penerima layanan yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu 550 orang responden.

3. Sarana dan Prasarana.

   Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media sebagai penunjang utama terselenggaranya kegiatan ataupun proses. Terkait pelaksanaan penggunaan sarana prasarana pada program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan yaitu Sarana : meja, kursi, komputer, alat tulis kantor. Prasarana : Tim Manajemen, Gedung.

3.3.2 Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan

Perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di mana pada sasaran ***Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan*** memiliki indikator ***Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (Dalam Miliar Rp)***. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun target dan capaian dari indikator nilai PDRB sektor pertanian Kehutanan dan perikanan Kabupaten Karimun pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Target dan Capaian Nilai PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2024	CAPAIAN %
1.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (Dalam Miliar Rp)	2.563,22 Miliar	2.537,09 Miliar	99 % (Persen)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025, dimana target nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2025 yaitu 2.563,22 miliar dan realisasi 2.537,09 miliar (angka sementara) dengan capaian 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Karimun telah mendekati nilai target yang ditetapkan dari faktor pendukung dari nilai PDRB Sektor Pertanian dan perikanan di Kabupaten Karimun.

Tercapainya target pada sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Meningkatnya produksi pertanian karena mampu menyediakan ketersediaan bahan pangan sehingga dengan sendirinya menekan inflasi secara signifikan serta didukung oleh penyerapan tenaga kerja disektor pertanian.
2. Meningkatnya produksi perikanan, dimana pemerintah juga ikut serta dalam membantu ketersediaan sarana dan prasarana baik di sektor perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan perikanan.

Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Nilai PDRB pada sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian diperoleh dan didukung dari beberapa indikator yaitu Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Populasi Ternak. Adapun

jumlah produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.15 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2024 s.d.2025 (Ton per Ha)

Komoditas	Jagung		Talas		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
JUMLAH	20,1	16,7	0,5	0,8	798,2	700,7	83,9	54,1	45,0	18,1

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa untuk produksi komoditas tanaman pangan pada tahun sebanyak 947,6ton pada tahun 2024, produksi tanaman pangan sebanyak 790,4 ton pada tahun 2025, realisasi produksi tanaman pangan 83,41 % dari tahun 2024 angka produksi ini di pengaruhi oleh petani yang berusaha tani komoditas tanaman pangan sebagai upaya dan mendukung ketahanan pangan keluarga dan penambahan penghasilan keluarga, komoditas tanaman pangan di Kabupaten Karimun cukup menjanjikan dari aspek nilai jualnya tapi juga perlu menjadi catatan komoditas tanaman pangan dari luar Kabupaten Karimun merupakan bagian dari tata niaga pertanian yang telah berlangsung lama.

Produksi komoditas tanaman pangan tahun 2024 di dukung oleh produksi tanaman Jagung (pipilan) sebesar 16 ton, ub kayu sebanyak **700,7** ton, ubi kayu sebanyak **54,1**ton, talas sebanyak 0,8 ton dan kacang tanah sebanyak 18,1 ton, angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan peluang pasar yang tersedia di Kabupaten Karimun.

Tabel 3.16 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan diKabupatenKarimunTahun2024 s.d.2025 (Ton)

Kecamatan	Karet		Kelapa		Cengkeh		Kopi		Lada		Gambir		Gambir	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2024	2025	2024	2025	2024	2025
JUMLAH	1.484,91	1.422,23	1.028,17	1.022,25	0,8	0,8	243,3	243,3	2	1,98	243,3	249,5	704,87	701,73

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Dari tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa untuk produksi komoditas perkebunan tahun 2025 di Kabupaten karimun sebanyak 3.398,75 Ton, atau 98,09 persen pencapaian dari tahun 2024, komoditas perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di Kabupaten Karimun seperti kelapa, sagu, gambir dan karet, , kedepannya Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mendorong hilirisasi sektor perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bukan hanya produksi perkebunan tetapi berbagai turunan sektor perkebunan yang mempunyai andil bagi pendapatan petani. Kemudahan

akses pasar atau jaringan pemasaran yang baik (baik lokal maupun luar daerah) sektor perkebunan Kabupaten karimun memungkinkan hasil perkebunan laku terjual dengan harga optimal, secara umum akses pasar menjadi salah satu faktor penting pendapatan petani, diharapkan peran semua steakholder terkait peningkatan produksi dan rantai tata niaga perkebunan akan menjadi prioritas pada tahun tahun kedepannya.

Produksi tanaman Kelapa sebesar 2.192,60 ton pada tahun 2023, tahun 2023 produksi tanaman Kelapa sebesar 1.022,25 ton, penurunan sebesar 1,87 % dikarenakan beberapa sentra produksi terserang hama yang berakibat penurunan produksi di Kabupaten Karimun, tetapi tanaman kelapa tetap menjadi andalan petani di Kabupaten Karimun mengingat pemeliharaan tanaman yang tidak begitu susah, umur panen yang singkat serta tingkat produksi yang tinggi menjadikan tanaman kelapa menjadi Komoditas unggulan di Kab, Karimun. Adapun jumlah Populasi Ternak Besar menurut Jenis Di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sektor perkebunan, beberapa komoditas utama menunjukkan dinamika produksi antara tahun 2024 dan 2025. Komoditas karet mengalami penurunan dari 1.484,91 pada tahun 2024 menjadi 1.422,23 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi produksi yang perlu menjadi perhatian, baik dari sisi produktivitas lahan maupun faktor cuaca dan harga pasar.

Komoditas kepala juga mengalami sedikit penurunan dari 1.028,17 pada tahun 2024 menjadi 1,002,25 pada tahun 2025. Penurun ini relatif kecil, namun tetap perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas perawatan dan optimalisasi hasil panen.

Untuk cengkeh produk tercatat stabil pada angka 0,8 di tahun 2024 maupun 2025 yang menunjukkan konsisten produksi tanpa peningkatan maupun penurunan signifikan. Sementara itu, kopi mengalami penurunan cakup tajam dari 0,57 pada tahun 2024 menjadi 0,26 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam produksi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut, baik dari sisi budidaya maupun faktor eksternal lainnya.

Komoditas lada relatif stabil dari 2 pada tahun 2024 menjadi 1,98 pada tahun 2025. Penurunan yang sangat tipis ini menunjukkan kondisi produksi yang cenderung terjaga. Berbeda dengan beberapa komoditas lainnya, gambir justru mengalami peningkatan dari 243,3 perdata tahun 2024 menjadi 249,5 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya potensi pengembangan yang cukup baik dan dapat terus didorong untuk meningkatkan kontribusi sektor perkebunan. Adapun sagu mengalami sedikit penurunan dari 704,87 pada tahun 2024 menjadi 701,73 pada tahun 2025. Meskipun penurunannya tidak signifikan, komoditas ini tetap memiliki potensi strategis, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Secara umum data tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa sebagai besar komoditas mengalami penurunan tipis dengan pengecualian gambir yang menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mengindikasi perlunya strategi peningkatan produktivitas, intensifikasi serta penguatan hilirisasi agar nilai tambah komoditas perkebunan dapat terus meningkat.

Tabel. 3.17 Populasi Ternak Besar menurut Jenis Di Kabupaten Karimun Tahun 2023 s.d.2024

NO	Produksi Peternakan	PRODUKSI (kg)	
		2023	2024
1.	Daging Sapi	6.299	6.388
2.	Daging Kambing	18.208	20.832

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Upaya peningkatan populasi ternak di Kabupaten Karimun terutama sapi dan kambing, dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi jumlah ketersediaan daging dan Perayaan hari raya idul adha di daerah Kabupaten Karimun. peningkatan produksi ternak besar pada tahun 2024 sebesar 111,07 % di Kabupaten Karimun dikarenakan permintaan pasar yang besar sehingga menjadikan usaha ternak sapi dan kambing di Kabupaten menjadikan usaha yang cukup menjanjikan. Komoditas peternakan dengan jumlah populasi ternak sapi sebesar 6.299 ekor pada tahun 2023 dan 6.388 pada tahun 2024 sedangkan populasi ternak kambing pada tahun 2023 sebanyak 18.208 ekor dan pada tahun 2024 sebanyak 20.832 ekor.

Tabel. 3.18 Data Produk Ternak di Kecamatan Di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024

Kecamatan	Daging Sapi	Daging Kambing	Daging Babi	Daging Ayam Buras	Daging Ayam Petelur	Ayam Broiler	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Moro	201	452		2450		500	151
Durai	15	372	-	200		950	304
Sugie Besar	59	26		210		160	11
Kundur	331	148	150	620	103000	99800	202
Kundur Utara	221	570	-	2000	31000	10100	202
Kundur Barat	116	1164	243	1750	41000	15600	3364
Ungar	63	263	-	830		2850	545
Belat	94	346	-	755		6650	151
Karimun	11	137	-	1700			30
Buru	141	297	-	1200			1324
Meral	171	350	-	1500		85250	505
Tebing	194	350	1142	820	350	26550	355
Meral Barat	311	383	175	730		120300	151
Selat Gelam	5	18		650			11
Total	**1,933**	**4,876**	**1,710**	**15,415**	**176,350**	**368,710**	**7,306**

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024*

Upaya peningkatan populasi ternak di Kabupaten Karimun , dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi jumlah ketersediaan daging pada saat perayaan hari-hari besar maupun kebutuhan harian di Kabupaten Karimun, peningkatan populasi ternak pada tahun 2025 sebanyak 110 % dari tahun sebelumnya, peningkatan populasi ini dikarenakan minat peternak akan mengusahakan berbagai jenis ternak semakin meningkat seiring dengan permintaan pasar yang tinggi akan kebutuhan berbagai jenis daging ternak di

Kabupaten Karimun. Sektor peternakan menjadikan usaha yang cukup menjanjikan untuk ekspansi usaha yang terus berkembang serta didukung dengan peran serta kerjasama yang baik Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pangan dan melakukan pendampingan tenaga medis veteriner dalam upaya penanggulangan penyakit ternak dan peningkatan populasi ternak yang ada di Kabupaten Karimun.

Data populasi ternak per kecamatan menunjukkan bahwa sektor peternakan milik kontribusi yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas unggas. Secara totol, populasi ternak di Kabupaten Karimun tercatat sebanyak 1.933 ekor sapi, 4.876 ekor kambing, 1.710 ekor babi, 15,415 ekor ayam buras, 176.350 ekor ayam petelur, 368.710 ekor ayam broiler dan 7.306 ekor itik.

Populasi sapi terbesar terdapat di Kecamatan Kundur 331 ekor, disusul Meral Barat 331 ekor dan Kundur Utara 221 ekor. Sementara itu, populasi kambing tertinggi berada di Kecamatan Kundur Barat 1.164 ekor, kemudian Kundur Utara 570 ekor dan moro 452 ekor.

Untuk ternak babi, populasi terbesar tercatat di Kecamatan Tebing 1.142 ekor, diikuti Kecamatan Kundur Barat 243 ekor, Kecamatan Meral Barat 175 ekor dan kecamatan Kundur 150 ekor. Beberapa kecamatan lainnya tidak memiliki populasi babi.

Pada komoditas ayam buras, Kecamatan Kundur menjadi wilayah dengan populasi tertinggi 620 ekor , diikuti buru 1.200 ekor , Kecamatan Meral 1.500 ekor dan Kecamatan Karimun 1.700 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa ayam buras tersebar cukup merata di beberapa kecamatan.

Populasi ayam petelur sangat terkonsentrasi di wilayah Kundur dan sekitarnya, dengan angka tertinggi di Kecamatan Kundur 103.000 ekor, diikuti kundur Barat 41.000 ekor dan kecamatan Kundur Utara 31.000 ekor. Ini menandakan bahwa wilayah tersebut menjadi Sentara produksi telur.

Sementara itu , ayam broiler sebagai komoditas dengan populasi terbesar secara keseluruhan 368.710 ekor, didominasi oleh Kecamatan Meral Barat 120.300 ekor, Kecamatan Kundur 99.800 ekor dan Meral 85.250 ekor. Tingginya populasi boiler menunjukkan orientasi produksi daging ayam yang cukup kuat.

Untuk ternak itik, populasi tertinggi berada di Kecamatan Kundur Barat 3.364 ekor, di ikuti Kecamatan Buru 1.324 ekor dan Kecamatan Ungar 545 ekor, yang menunjukkan potensi pengembangan usaha ternak itik di wilayah tersebut.

Secara umum data ini memperlihatkan bahwa sub sektor unggas. Khususnya ayam broiler dan ayam petelur, menjadi tulang punggung produksi peternakan daerah. Beberapa kecamatan seperti Kundur, Kundur Barat dan Meral Barat tampak sebagai sentral utama produksi, sehingga dapat diprioritaskan dalam program pengembangan, peningkatan kualitas bibit serta penguatan rantai distribusi hasil peternakan.

1. Sektor Perikanan

Nilai PDRB pada sektor perikanan diperoleh dan didukung dari beberapa indikator yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan. Adapun jumlah produksi perikanan Tangkap, Budidaya dan Hasil Olahan Perikanan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.19 Volume dan Produksi Perikanan 2017s.d. 2025

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Nilai (Rp,-)
2017	60.116,00	1.887.966.468.000,-
2018	66.387,00	2.029.508.642.000,-
2019	57.621,22	1.996.308.683.000,-
2020	52.952,82	1.864.502.760.000,-
2021	34.545,42	1.247.166.484.000,-
2022	38.439,02	1.272.154.785.000,-
2023	39.443,48	1.434.229.991.000,-
2024	40.059,57	1.465.742.580.000,-
2025	43.846,28	1.481.452.738.000,-

Sumber: *Dinas Perikanan, Tahun 2025*

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Karimun memiliki jumlah produksi perikanan (tangkap, budidaya & pengolahan) yaitu 43.846,28 ton dengan nilai Rp. 1.481.452.738.000,- dan pada tahun 2024 yaitu 40.059,57 ton dengan nilai Rp. 1.465.742.580.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa sudah terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan serta nilai yang mencakup sektor tangkap, budidaya dan pengolahan sebesar 3.786,71 atau 9,45% dari tahun sebelumnya. Adapun faktor pendorong terhadap naiknya produksi perikanan di Kabupaten Karimun yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan;

   Tersedianya kapal, alat tangkap, kolam budidaya, serta fasilitas pendukung lainnya yang lebih memadai

b. Penerapan Teknologi dan Inovasi budidaya;

   Penggunaan teknologi pakan, sistem budidaya intensif, serta pengelolaan kualitas air yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas.

c. Dukungan program pemerintah;

   Adanya bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, pelatihan nelayan/pembudidaya, serta program pemberdayaan perikanan

d. Kondisi cuaca dan lingkungan yang relatif mendukung;

   Cuaca yang setabil dan kualitas perairan yang baik mendorong peningkatan hasil tangkapan maupun budidaya.

e. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman pelaku usaha perikanan;

   Peningkatan kapasitas sumber manusia melalui pelatihan dan pengalaman lapangan.

f. Meningkatkan Permintaan Pasar

   Permintaan konsumsi ikan yang meningkat sehingga mendorong nelayan dan pembudidaya meningkatkan produksi terus.

Penangkapan ikan terukur dimaksudkan sebagai cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha, serta bagi negara. Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mencegah turunnya jumlah produksi perikanan di sektor perikanan tangkap yaitu:

a. Pengendalian dan peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan di Kabupaten Karimun.
b. Penguatan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui pengawasan kegiatan penangkapan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengevaluasi kembali antara program dan kegiatan terhadap anggaran yang tersedia di Kabupaten Karimun;
d. Setiap masukan dari para pelaku usaha perikanan tangkap akan ditindak lanjuti yang diakomodir oleh tenaga pengelola data kelembagaan dan masyarakat yang berada di setiap kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di 5 pulau besar yaitu Karimun, Buru, Moro, Kundur dan Durai;
e. Pemerintah daerah juga berupaya mengikatkan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, termasuk alat tangkap yang ramah lingkungan;
f. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada nelayan guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Perkembangan sektor perikanan budidaya saat ini menunjukkan tren yang relatif positif dan terus mengalami peningkatan. Kegiatan budidaya ikan yang dilakukan oleh masyarakat pembudidayaan berkembang baik pada budidaya air tawar, air payau, maupun budidaya laut, dengan dukungan potensi sumber daya perairan yang memadai. Peningkatan produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari semakin meningkatnya teknis budidaya yang baik serta pemanfaatan sarana dan prasarana produksi secara optimal. Selain itu, permintaan pasar terhadap produk perikanan budidaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan sektor perikanan budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terkait saran produksi, pengendalian penyakit hukum serta pengelolaan kualitas lingkungan budaya. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan pemerintah daerah secara berkelanjutan guna menjadi stabilitas dan keberlanjutan produksi perikanan budidaya. Seperti halnya usaha budidaya rumput laut semakin berkembang serta diminati oleh masyarakat pembudidaya

khususnya di Kecamatan Sugie Besar, karena permintaannya yang tinggi dan adanya jaminan pasar khususnya di pasar luar. Selain itu adanya bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Karimun serta menyebabkan motivasi pembudidaya rumput laut meningkat

Sementara dalam sektor perikanan budidaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu :

a. Memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pembudidayaan ikan sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di bidang Perikanan Budidaya;
b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya, termasuk penyediaan benih dan pekan berkualitas serta pengelolaan kualitas air dan lingkungan budidaya;
c. Optimalisasi potensi budidaya yang dimiliki;
d. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha budidaya;
e. Penentuan waktu panen dan pengelolaan panen;
f. Mendorong penerapan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan, serta memperkuat pengendalian penyakit ikan melalui kegiatan pencegahan dan penanganan diri;
g. Peningkatan koordinasi dan instansi terkait juga terus dilakukan guna menjaga stabilitas dan berkelanjutan produksi perikanan budidaya.

Sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan olahan saat ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya ketersediaan bahan baku hasil tangkap dan budidaya, serta meningkatnya kapasitas pelaku usaha pengolahan dalam mengolah produk perikanan menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Kegiatan pemasaran hasil perikanan juga menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh meningkatnya permintaan pasar baik lokal maupun antar daerah. Upaya diversifikasi produk olahan, peningkatan mutu dan keamanan pangan , serta penguatan jaringan pemasaran turut mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Meskipun demikian, sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih menghadapi tantangan, antara lain terkait kontinuitas pasokan bahan baku, standar mutu produk, serta akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara berkelanjutan

Adapun Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar tercapainya target pada produksi hasil olahan perikanan yaitu :

1. Membuka akses bagi pelaku usaha perikanan Kabupaten Karimun dalam mendapatkan peralatan pengolahan ikan yang memadai dan sesuai standar;
2. Meningkatkan inovasi dan deversifikasi produk yang dihasilkan sehingga pada akhirnya mempengaruhi kemampuan produk lokal bersaing di pasar domestik maupun internasional;

3. Penyediaan peralatan pemasaran yang tepat sangat penting dalam menjamin mutu ikan, terutama dalam meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen;
4. Membina dan mendampingi pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

Dari jumlah produksi yang sudah diketahui, maka akan dijabarkan jumlah produksi di Kabupaten Karimun yang ada pada 14 kecamatan setiap sektor tangkap dan budidaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	538	18.802.011.000	56,13	2.775.234.000
Kecamatan Meral	11.229	528.792.231.000	189,42	9.366.416.000
Kecamatan Tebing	2.826	95.915.150.000	126,28	6.244.277.000
Kecamatan Kundur	396	12.046.085.000	77,17	3.815.947.000
Kecamatan Moro	6.023	201.518.900.000	14,03	693.809.000
Kecamatan Durai	492	10.485.329.000	70,16	3.469.043.000
Kecamatan Buru	954	37.664.038.000	-	-
Kecamatan Kundur Barat	1.126	30.839.860.000	49,11	2.428.330.000
Kecamatan Kundur Utara	459	12.814.252.000	35,08	1.734.522.000
Kecamatan Meral Barat	540	19.050.962.000	63,14	3.122.139.000
Kecamatan Belat	1.191	38.514.115.000	-	-
Kecamatan Ungar	4.294	100.346.397.000	21,05	1.040.713.000
Kecamatan Sugi Besar	4.496	150.211.530.000	4.314,44	21.572.200.000
Kecamatan Gelam	4.027	141.757.400.000	-	-
Jumlah	38.590	1.398.758.258.000	5.016	56.262.630.000

Sumber: *Dinas Perikanan, Tahun 2025*

Dilihat dari tabel di atas, jumlah produksi perikanan di Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi di sektor penangkapan (11.229 ton), sedang kan pada sektor budidaya yang tertinggi di Kecamatan Sugie Besar (4.314,44) dan volume produksi tertinggi pada produksi hasil olahan perikanan di kecamatan moro (69,83 ton). Berdasarakan data produksi perikanan, total volume perikanan tangkap di Kabupaten Karimun mencapai 38.590 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.398.758.258.000. sementara itu, perikanan budidaya mencatat total volume 5.016 ton dengan nilai produksi Rp.56.262.630.000. data ini menunjukkan bahwa sub sektor perikanan tangkap masih menjadi kontributor utama dibandingkan budaya. Pada perikanan tangkap, produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Meral dengan volume 11.229 ton dan Rp. 528.792.231.000 disusul Kecamatan Moro

sebesar 6.023 ton Rp. 201518.900.000, Kecamatan Sugi Besar sebesar 4.027 ton Rp. 150.211.530.000, dan Kecamatan Selat Gelam sebesar 4.027 Rp. 141.757.400.000. hal ini menunjukkan bahwa wilayah – wilayah tersebut merupakan sentra utama aktivitas penangkapan ikan. Kecamatan Ungar juga mencatat peroduksi tangkap yang cukup besar, yakni 4.294 ton dengan nilai Rp. 100.346.397.000, sementara Kecamatan Tebing menghasilkan 2.826 ton senilai Rp. 95.915.150.000. kecamatan lainnya seperti Belat, Kundur Barat, Buru, Karimun, Durai dan Kundur utara memberikan kontribusi dalam skala menengah hingga kecil.

Pada sektor perikanan budidaya, produk terbesar terdapat di Kecamatan Sugi Bear degan volume 4.314,44 ton dan nilai Rp. 21.572.200.000. angka ini jauh melampaui kecamatan lainnya dan menunjukkan potensi besar pengembangan budidaya di wilayah tersebut. Selanjutnya, Kecamatan Meral mencatat volume budidaya 189,42 ton Rp. 9.366.416.000, Tebing 126,28 ton Rp6.244.277.000, serta Kundur 77,17 ton Rp3.815.947.000. Beberapa kecamatan seperti Buru, Belat, dan Gelam belum memiliki kontribusi pada sektor budidaya. Secara umum, struktur produksi perikanan Kabupaten Karimun masih didominasi oleh perikanan tangkap, baik dari sisi volume maupun nilai ekonomi. Namun demikian, potensi pengembangan budidaya cukup menjanjikan, terutama di Kecamatan Sugi Besar dan beberapa kecamatan lainnya. Strategi penguatan sarana prasarna, akses permodalan serta peningkatan teknologi budidaya dapat menjadi langkah penting untuk mendorong keseimbangan dan keberlanjutan sektor perikanan ke depan.

Adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Karimun berupa sarana prasarana, armada penangkapan ikan dan alat tangkap menjadi kunci utama bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan. Untuk melihat jumlah armada penangkapan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.21 Jumlah Armada Penangkapan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)						JUMLAH (Unit)
		PTM	PERAHU BERMOTOR	MOTOR TEMPEL	< 5 GT	5 - 30 GT	> 30 GT	
1	Kecamatan Karimun	13	51	15	72	6		157
2	Kecamatan Meral	50	125	8	234	102	123	642
3	Kecamatan Tebing	14	142	151	147	-	-	454
4	Kecamatan Kundur	9	58	1	52	-	-	120
5	Kecamatan Moro	50	454	132	476	51	3	1.166
6	Kecamatan Durai	6	145	8	224	1	-	384
7	Kecamatan Buru	2	381	63	180	25	-	651
8	Kecamatan Kundur Utara	13	72	-	23	-	-	108
9	Kecamatan Kundur Barat	3	378	12	66	-	-	459

10	Kecamatan Meral Barat	87	142	53	157	-	-	439
11	Kecamatan Belat	64	197	5	60	-	-	326
12	Kecamatan Ungar	5	302	2	67	-	-	376
13	Kecamatan Sugie Besar	82	620	218	270	5	-	1.195
14	Kecamatan Gelam	5	221	64	90	2	-	382
JUMLAH								6.859

Sumber: *Dinas Perikanan, Tahun 2025*

Selanjutnya untuk ***Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan*** di KabupatenKarimun pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22 Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan	Produksi Hasil Olahan Perikanan	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	26,22	2.448.825.000
Kecamatan Meral	8,30	830.270.000
Kecamatan Tebing	20,43	2.335.550.000
Kecamatan Kundur	6,07	752.640.000
Kecamatan Moro	6,39	776.490.000
Kecamatan Durai	69,83	8.655.360.000
Kecamatan Buru	16,58	1.660.540.000
Kecamatan Kundur Barat	51,72	4.240.810.000
Kecamatan Kundur Utara	2,54	190.800.000
Kecamatan Meral Barat	0	-
Kecamatan Belat	0,90	90.300.000
Kecamatan Ungar	-	-
Kecamatan Sugi Besar	2,85	125.330.000
Kecamatan Gelam	54,65	6.773.760.000
Jumlah	240,26	26.431.850.000

Sumber: *Dinas Perikanan, Tahun 2025*

Berdasarkan data produksi hasil olahan perikanan, total volume produksi di Kabupaten Karimun mencapai 240,26 ton dengan nilai sebesar Rp. 26.431.850.000. hal ini menunjukkan bahwa sub sektor pengolahan perikanan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kecamatan Durai menjadi penyumbang produksi terbesar dengan volume 69,83 ton dan nilai Rp. 8.655.360.000. diusul oleh Kecamatan Gelam sebesar 54, 65 ton dengan nilai Rp 6.773.760.000, serta Kecamatan Kundur Barat sebesar 51,72 ton dengan nilai Rp. 4.240.810.000. tingginya angka ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan

tersebut merupakan sentral utama pengelolaan hasil perikanan. Kecamatan Karimun dan Tebing juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Kecamatan Karimun menghasilkan 26,22 ton dengan nilai Rp. 2.448.825.000, sedangkan Kecamatan Tebing sebesar 20,43 ton dengan nilai Rp. 2.335.550.000. sementara itu, Kecamatan Buru memproduksi 16,58 ton senilai Rp. 1.660.540.000. Kecamatan Moro dan Kundur memiliki volume produksi relatif lebih kecil, masing – masing sebesar 8,30 ton 830.270.000, 6,39 ton Rp776.490.000, dan 6,07 ton Rp752.640.000. adapun Kecamatan Kundur Utara dan Sugi Besar mencatat produksi terbatas, sedangkan Kecamatan Meral Barat dan Ungar belum mencatatkan produksi hasil olahan perikanan pada periode tersebut.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pengelolaan hasil perikanan telah berkembang di beberapa kecamatan dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, diversikan olahan, serta perluasan akses pasar menjadi strategi penting untuk mendorong peningkatan volume dan nilai produksi di masa mendatang.

Adapun Data Jumlah Ekspor usaha perikanan di Kabupaten Karimun dapatdilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2017	PRODUKSI (Ton)								PENINGKATAN/ PENGURANGAN (%)
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1.	Jumlah ekspor perikanan budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah ekspor perikanan tangkap	10.111	7.000,014	4.961,66	4.192,63	3.858	1.134,54	703,26	734,77	955,38	30,02%
3.	Jumlah ekspor pengolahan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		10.111	7.000,014	4.961,66	4.961,66	3.858	1.134,54	703,26	734,77	955,38	30,02%

Sumber :*Dinas Perikanan, Tahun 2025*

Berdasarkan data perkembangan ekspor perikanan selam periode 2017 hingga 2025, tercatat bahwa kontribusi ekspor masih didominasi oleh sektor perikanan tangkap, sementara ekspor dari perikanan budidaya dan pengolahan perikanan belum menunjukkan realisasi (nihil dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2017, jumlah ekspor perikanan tangkap mencapai 10.111 ton. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan signifikan menjadi 7.000,014 ton dan Kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 4.981,66 ton. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2020 sebesar 4.192,63 ton serta tahun 2021 sebesar 3.858 ton. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2022, Di mana volume ekspor hanya mencapai 1.134,54 ton. Kondisi ini terus menurun pada tahun 2023 menjadi 703,26 ton. Meskipun demikian, pada tahun 2024 mulai terlihat adanya pemulihan dengan peningkatan menjadi 734,77 ton. Pada tahun 2025, ekspor perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan menjadi 955,38 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 30,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekspor, baik dari sisi produksi,

permintaan pasar, maupun dukungan kebijakan. Secara keseluruhan, meskipun terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, data tahun 2024-2025 menunjukkan adanya sinyal pemulihan ekspor perikanan tangkap. Ke depan, diperlukan strategi penguatan daya saing, peningkatan kualitas produksi, diversifikasi pasar serta pengembangan ekspor dari sektor budidaya dan pengolahan agar struktur ekspor perikanan menjadi lebih berkelanjutan dan tidak bergantungan pada atau sub sektor saja.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap mengalami Kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu.Hal ini disebabkan karena beberapa faktor di antaranya:

1. Peningkatan Produksi hasil tangkap

   Adanya modernisasi alat tangkap, perbaikan armada kapal, serta penerapan teknologi penangkapan yang lebih efisien membuat hasil tangkapan meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

2. Permintaan Pasar Internasional yang terus naik

   Konsumsi produk perikanan dunia meningkat seiring kesadaran masyarakat global terhadap gizi, protein hewani, dan pola hidup sehat, sehingga kebutuhan impor dari negara lain ikut bertambah.

3. Kualitas dan Standar Produk yang semakin baik

   Penerapan standar mutu internasional (seperti HACCP, sertifikasi mutu, dan traceability) membuat produk perikanan tangkap lebih diterima di pasar ekspor dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

4. Diversifikasi produk olahan perikanan

   Tidak hanya mengekspor ikan segar, tetapi juga produk olahan (beku, fillet, kalengan) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga meningkatkan nilai ekspor.

5. Perbaikan sistem distribusi dan logistik

   Infrastruktur rantai dingin (cold chain) yang semakin baik membantu menjaga kualitas produk hingga sampai ke pasar ekspor

6. Nilai tukar dan daya saing harga

   Kurs mata uang yang kompetitif dapat membuat harga produk perikanan Indonesia lebih menarik di pasar internasional.

Sedangkan untuk Perkembangan produksi dan nilai ekspor perikanan per-triwulan untuk tahun 2025 di Kabupaten Karimun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.24 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2025

NO	BULAN	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp.)
1	JANUARI-MARET	211,08	4.575.520.000
2	APRIL-JUNI	250,56	5.535.400.000
3	JULI-SEPTEMBER	245,07	6.225.520.000
4	OKTOBER-DESEMBER	248,67	5.592.830.000
JUMLAH		955,38	21.929.270.000

Sumber: *Dinas Perikanan, Tahun 2025*

ANALIS EFESIENSI SUMBERDAYA

Efisiensi merupakan hubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Berikut disampaikan Efisiensi Penggunaan Sumber daya yang mendukung Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada sasaran ini untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.25 Efesiensi Penggunaan Sumberdaya yang Mendukung Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan

PUTOUTPUTCM / TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		EFESIENSI
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024									Sudah sebagian efesiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 tetapi cukup efesiensi dikarenakan dari output keluaran target dimana realisasinya lebih besar dibandingkan pada tahun 2024 dan dari outcome pencapaian realisasi tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024.
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.1199.184.644	336.771.900	12.537 Ton	13.642 Ton	100 % / Jumlah produksi tercapai	108 % /Jumlah produksi pertanian 13.642 Ton	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.120.956.673	1.071.506.094	37.744 ton	38.573 ton	100 % / Jumlah produksi tangkap tercapai	100 % / jumlah produksi tangkap 38.573 ton	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	4.274.429.633	3.537.094.898	529,88 ton	1.163,90 ton	100 % / Jumlah produksi budidaya tercapai	100 % / jumlah produksi budidaya 1.163,90 ton	
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	478.925.450	433.737.925	137 ton	322,67 ton	100 % / Jumlah Hasil Olahan Perikanan tercapai	100 % / Jumlah Hasil Olahan Perikanan 322,67 ton	
2025	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.822.559.425	2.267.548.831	12.663,20 Ton	18.118 Ton	100 % / Jumlah produksi tercapai	143 % /Jumlah produksi pertanian 13.642 Ton	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.297.013.000	4.137.937.594	38.611 ton	38.590 ton	100 % / Jumlah produksi tangkap tercapai	100 % / jumlah produksi tangkap 38.590 ton	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	615.896.874	611.278.325	566,97 ton	5.016,02 ton	100 % / Jumlah produksi	100 % / jumlah	

PUTO UTPU TCM HUN	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		EFESIENSI
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
							budidaya tercapai	produksi budidaya 5.016,02 ton	
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.700.000	25.141.450	141 ton	240,26 ton	100 % / Jumlah Hasil olahan perikanan tercapai	100 % / Jumlah Hasil olahan perikanan 240,26 ton	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.822.559.425	2.267.548.831	12.663,20 Ton	18.118 Ton	100 % / Jumlah produksi tercapai	143 % /Jumlah produksi pertanian 13.642 Ton	

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025

3.3.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaankeuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah memiliki peran vital dalam rangka desentralisasi fiscal mengingat keterbatasan keuangan negara dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerah salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). Pada tahun 2022 yang merupakan tahun Pertama RPJMD, realisasi pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari

capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Tinggi. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.26 Teget dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah	28,68 %	33.39	116,42

***Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Untuk tahun 2025 Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kab. Karimun ditargetkan 28,68 % atau sekitar Rp. 414.997.456.943,63 dari target Pendapatan Daerah kab. Karimun. Namun berjalannya waktu realisasi PAD tahun 2025 naik sekitar 33.39 % atau menjadi Rp 405.760.870.753,78 dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.215.184.434.824,78.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kontribusi PAD mengalami kenaikan ditahun 2025 antara lain Tercapainya realisasi penerimaan PAD dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya beberapa komponen PAD yang telah mencapai target seperti:

3. Tercapainya realisasi penerimaan PAD dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya beberapa komponen PAD yang telah mencapai target seperti :
   a. Pajak daerah capaiannya naik sekitar 100,58 %
   b. Penerimaan Lain -lain PAD yang sah capaiannya 114.28 %; dan
   c. Sedangkan Turunnya/tidak tercapainya target dari pendapatan retribusi daerah dan juga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sehingga Pendapatan Daerah tidak sesuai yang diharapkan.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.27 Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan	Kontribusi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025**	**414.997.456.943,63**	**405.760.870.753,78**	**97,77**	**5.53**	**100**
a	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	3.79	75.84
b	Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.086.032.636,5	88,79	2.047,86	21,71
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	7.24	0.67
d	yang Sah	6.335.962.408,63	7.240.717.267,19	114,28	-91.10	1.78

***Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan Tabel diatas realisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2025** mencapai Rp **405.760.870.753,78** dari target sebesar Rp **414.997.456.943,63**, atau dengan tingkat capaian **97,77%**. Secara tahunan, PAD menunjukkan **pertumbuhan positif sebesar 5,53%**, yang menandakan adanya peningkatan kinerja penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari struktur PAD, **Pajak Daerah** merupakan komponen dominan dengan realisasi sebesar Rp **307.726.290.863,09**, capaian **100,58%**, serta kontribusi sebesar **75,84%** terhadap total PAD. Pajak

Daerah juga mencatat **pertumbuhan sebesar 3,79%**, yang menunjukkan stabilitas dan efektivitas pemungutan pajak daerah sebagai sumber utama PAD.

Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp **88.086.032.636,50** atau **88,79%** dari target. Meskipun capaian targetnya belum optimal, Retribusi Daerah mengalami **pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 2.047,86%** dan memberikan kontribusi **21,71%** terhadap PAD. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan penerimaan retribusi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif, perluasan objek retribusi, atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatat realisasi sebesar Rp **2.707.829.987,00** dengan capaian **77,40%**, pertumbuhan **7,24%**, dan kontribusi relatif kecil yaitu **0,67%**. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah masih terbatas terhadap pembentukan PAD.

Adapun **Lain-lain PAD yang Sah** menunjukkan realisasi sebesar Rp **7.240.717.267,19** atau **114,28%** dari target, namun mengalami **penurunan pertumbuhan sebesar 91,10%**, dengan kontribusi hanya **1,78%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis pendapatan ini bersifat fluktuatif dan tidak berkelanjutan.

B. Pendapatan Daerah (APBD)

Tabel 3.28 Capaian Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan	Kontri busi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	**PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025**	**1.261.374.051.671,63**	**1.215.184.434.824,78**	**96,34**	**-6.86**	**100**
a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	414.997.456.943,63	405.760.870.753,78	104,00	5.53	33.40
b	Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	809.423.564.071,00	95,63	-11.8	66.63
c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.335.962.408,63	7.240.717.267,19	114.28	186.56	0,60

Berdasarkan Tabel diatas realisasi **Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025** mencapai Rp **1.215.184.434.824,78** dari target Rp **1.261.374.051.671,63**, dengan tingkat capaian **96,34%**. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan daerah mengalami **penurunan sebesar 6,86%**, yang menunjukkan adanya kontraksi pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dari sisi komposisi, **Pendapatan Transfer** masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan realisasi Rp **809.423.564.071,00**, kontribusi sebesar **66,63%**, dan **pertumbuhan negatif sebesar 11,80%**. Penurunan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi turunnya total pendapatan daerah pada Tahun 2025, sekaligus menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar **33,40%** terhadap total pendapatan daerah dan mencatat **pertumbuhan positif sebesar 5,53%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara total pendapatan daerah menurun, kinerja PAD justru mengalami perbaikan dan menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Adapun **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar **186,56%**, namun kontribusinya masih sangat kecil yaitu **0,60%**, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap struktur pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan menurun akibat berkurangnya pendapatan transfer, meskipun **Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan positif**. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara kontribusi PAD belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta diversifikasi sumber-sumber PAD yang berkelanjutan.

Selain dari sub sektor pajak daerah yang tidak tercapai target, ada beberapa sub sektor dari penerimaan PAD yang tidak memenuhi target, antara lain (1). Retribusi Daerah (88,79%); (2). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (77,40%); dan (3). Lain-lain PAD yang Sah (114,28%)**.** Data dapat diliha pada tabel 3.22 berikut ini:

Tabel 3.29 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Karimun tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	KONTRIBUSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2021**	386.623.101.742,00	454.382.443.324,35	117,53	53,85	34,56
	Pajak Daerah	285.322.225.000,00	304.683.602.199,50	106,79	49,19	67,05
	Retribusi Daerah	2.562.208.000,00	3.159.098.996,01	123,30	-4,36	0,70
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.219.492.803,00	1.832.028.997,00	82,54	-21,41	0,40
	Lain-Lain PAD yang Sah	96.519.175.939,00	144.707.713.131,84	149,93	69,29	31,85
2.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022**	369.697.001.907,00	384.483.331.941,10	104,00	-15,38	29,47
	Pajak Daerah	283.010.686.514,00	296.491.087.858,00	104,76	-2,69	77,11
	Retribusi Daerah	3.695.388.500,00	4.101.098.569,80	110,98	29,82	1,07
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.574.068.491,00	2.524.976.119,00	98,09	37,82	0,66
	Lain-Lain PAD yang Sah	80.416.858.402,00	81.366.169.394,30	101,18	-43,77	21,16
3.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023**	496.530.233.850,00	407.956.397.694,88	82,19	6,11	30,26
	Pajak Daerah	294.827.500.000,00	314.758.951.315,00	106,76	6,16	77,16
	Retribusi Daerah	10.066.344.000,00	5.947.596.489,90	59,08	45,02	1,46
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.739.835.254,00	2.464.387.949,00	89,95	-2,40	0,60
	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023	496.530.233.850,00	407.956.397.694,88	82,19	6,11	30,26
4.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024**	403.112.004.485,00	372.206420.339,97	92,33	-11,36	28,27
	Pajak Daerah	256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105,75	-13,79	72,90
	Retribusi Daerah	99.465.071.779,00	94.116.020.876,04	94,62	1482,42	25,29
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.086.978.412,00	3.086.978.412,00	77,21	25,26	0,83

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	KONTRIBUSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Lain-Lain PAD yang Sah	43.056.351.781,00	3.655.406.193,98	8,49	-95,7	0,98
5.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025**	414.997.456.943,63	405.760.870.753,78	97,77	5.53	100
	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	3.79	75.84
	Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.086.032.636,5	88,79	2.047,86	21,71
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	7.24	0.67
	yang Sah	6.335.962.408,63	7.240.717.267,19	114,28	-91.10	1.78

***Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2021–2025, terlihat bahwa kinerja PAD menunjukkan **fluktuasi baik dari sisi realisasi, pertumbuhan, maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah**.

Secara umum, kinerja Pendapatan Daerah (PAD) dalam periode 2021-2025 menunjukkan dinamika capaian yagn fluktuatif, baik dari sisi realisasi, pertumbuhan maupun kontribusi terhadap total pendapat daerah. Pada tahun 2021, PAD ditargerkan sebesar Rp. 386.623.101.742,00 dan terealisasi Rp. 454.382.443.324,35 atau mencapai 117,53%. Pertumbuhan tercatat sebesar 53,85 denan kontribusi 34,56% capaian ini didorong terutama olah Pajak Daerah yang terealisasi Rp. 304.683.602.199,50 (106,79%) serta lain – lain PAD yang sah yang melampaui target hingga 149,93%.

Memasuki tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 369.697.001.907,00 dengan Realisasi Rp. 384.483.331.941,10 (104,00%). Meskipun melampau target, pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar -15,38%. Pajak Daerah tetapai menjadi Kontributor utama dengan realisasi Rp. 296.491.087.858,00 dan Kontribusi 77,11%.

Pada tahun 2023, target PAD meningkat signifikan menjadi Rp. 496.530.233.850,00, namun realisasi hanya mencapai Rp. 407.956.397.694,88 atau 82,19%. Walaupun pertumbuhan tercatata posisi sebesar 6,11%, capaian tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pajak Daerah tetap menunjukkan kinerja baik dengan realisasi Rp 314.758.951.315,00 (106,76%) sedangkan retribusi daerah hanya tercapai 59,08% dari target.

Tahun 2024 menunjukkan target sebesar Rp. 403.112.004.485,00 dengan Realisasi Rp. 372.206420.339,97 atau 92,33%. Pertumbuhan mengalami penurunan sebesar – 11,36%. Pajak Daerah kembali menjadi tulang punggung PAD dengan capaian 105,75% dan kontribusi 72,90%. Namun, lain – lain PAD yang Sah mengalami penurunan tajam dengan capaian hanya 8,49% dari target.

Pada tahun 2025, kinerja PAD kembali dnegan target Rp. 414.997.456.943,63 dan realisasi Rp. 405.760.870.753,78 atau 97,77%. Pertumbuhan tercatata sebesar 5,53% dengan kontribusi 100%. Pajak daerah tetapai mendominasi dnegan relaisasi Rp. 307.726.290.863,09 (100,58%) dan Kontribusi 75,84%. Retribusi Daerah terealisasi Rp. 88.086.032.636,5(88,77%), sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangn dipisahkan mencapai 77,40% dari target.

Secara keseluruhan, Pajak Daerah menjadi sumber utama PAD dengan kontribui terbesar setiap tahunnya. Fluktuasi capaian terutama dipengaruhi oleh dinamika pada komponen Retribui Daerah dan Lain – Lain PAD yang Sah. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pajak, peningkatan efektiviatas retribusi serta penguatan pengelolaan aset daerah menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.

Grafik 3.2 ***Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten KarimunTahun 2019 – 2025***

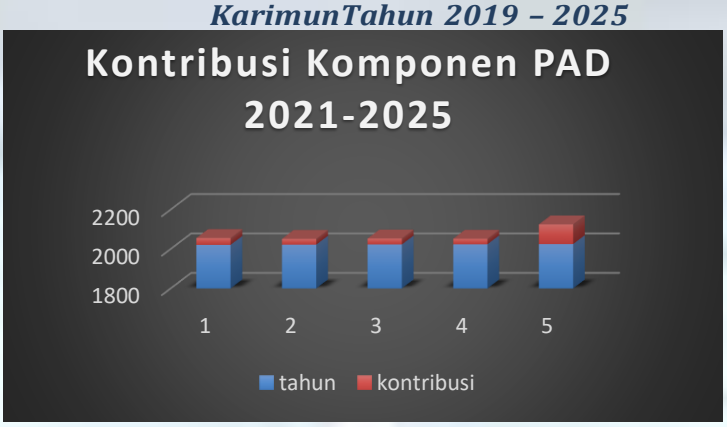

***Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. *Memperluas basis penerimaan*;

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. *Memperkuat proses pemungutan*;

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif khususnya pada tarif retribusi.

3. *Meningkatkan pengawasan*;

   Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan atau secara berkala, memperbaiki proses pengawasan.

4. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*;

   Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*/ instansi terkait di daerah.

5. *Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi*;

   Perlu ditumbuhkan rasa kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak/wajib retribusi dal hal membayar pajak

daerah/retribusi daerah adalah dengan turut andil mereka dalam membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

a) Melalui pendekatan persuasif dan partisipatif;

b) Melakukan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. *Meningkatkan pelayanan prima*;

Dalam hal ini dapat diambil *sample* pembayaran pajak melalui *online* serta menciptakan inovasi–inovasi baru tentang akselerasi peningkatan penerimaan daerah khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025 terdiri dari (a). Pendapatan Asli Daerah (PAD); (b). Pendapatan Transfer; dan (c). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun target, realisasi, persentase capaian dan kontribusi setiap sektor penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30 Capian Target, Realisasidan Kontribusi Sektor Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KONTRIBUSI %
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**414.997.456.943,63**	**405.760.870.753.78**	**97,77**	
	1	PAJAK DAERAH	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100.58	75,84
	2	RETRIBUSI DAERAH	99.207.574.236,00	88.086.032.636,50	88,79	21,71
	3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	0.67
	4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	6.335.962.408.63	7.240.717.267,19	114,28	1,78
II	**PENDAPATAN TRANSFER**		**915.045.475.344,00**	**809.423.564.071,00**	**88.46**	
	1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	830.629.464.000,00	736.765.225.667,00	88.70	91.02
		DANA DESA	36.624.884.000,00	36.202.677.740.00	98.85	4.47
		INSENTIF FISKAL	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100.07	1.98
		DANA BAGI HASIL (DBH)	101.529.744.000,00	84.501.118.200,00	83.23	10.44
		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	483.784.277.000,00	470.002.100.490,00	97.15	58.07
		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	192.638.746.000,00	129.995.880.237,00	67.48	16.06
	2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	84.416.011.344,00	72.658.338.404,00	86.07	8.98
		PENDAPATAN BAGI HASIL	14.161.863.522,00	71.480.578.404,00	504.74	8.83
		BANTUAN KEUANGAN	70.254.147.822,00	1.177.760.000,00	1.68	0.15
TOTAL PENDAPATAN DAERAH			**1.325.027.848.635,00**	**1.206.604.294.641,58**	**91.06**	

***Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran belanja, total Pendapatan Daerah ditergetkan sebesar Rp. 1.325.027.848.635,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.206.604.294.641,58, sehingga tingkat capaian pendapatan daerah mencapai 91,06 persen dari target yang ditelah ditetapka.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp. 414.997.456.943,63 dengan realisasi sebesar Rp.

405.760.870.753,78 atau 97,77 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD telah berjalan cukup baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah dengan target Rp. 305.955.324.291,00 dan realisasi Rp. 307.726.290.863,09 atau 100,58 persen, dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 75,84 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pajak daerah menjadi sumber utama pendapatan daerah serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 99.207.574.236,00 dengan realisasi Rp. 8.086.032.636,50 atau 88,79 persen dengan kontribusi sebesar 21,71 persen terhadap PAD. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya cukup besar, realisasi retribusi daerah masih berada di bawah taraget yang direncanakan. Untuk hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, target sebesar Rp. 3.498.596.008,00 dengan realisasi Rp. 2.707.829.987,00 atau 77,40 persen, dengan kontribusi 0,67 persen terhadap PAD. Sementara itu, lain – lain PAD yang Sah menunjukkan kinerja yang baik dengan target Rp. 6.335.962.408,63 dan realisasi sebesar Rp. 7.240.717.267,19 atau 114,28 persen dengan kontribusi 1,78 persen.

- Pendapatan Transfer

  Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 915.045.475.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 809.423.564.071,00 atau 88,46 persen. Pendapatan trasfer dari Pemerintah Pusat memiliki target sebesar Rp. 830.629.464.000,00 dengan realisasi Rp. 736.765.225.667,00 atau 88,70 Persen dengan kontribusi sebesar 91,02 persen terhadap total pendapatan teransfer. Komponen terbear derasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp. 470.002.100.490,00 atau 97,15 persen, di ikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi Rp. 129.995.880.237,00 atau 67,48 persen, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 84.501.118.200,00 atau 83 persen. Selain itu terdapat Dana Desa dengan capaian 98,85 persen dan insentif fiskal yang mencapai 100,07 persen dari target. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp. 84.416.011.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 72.658.338.404,00 atau 86,07 persen, dengan kontribusi sebesar 8,98 persen terhadap total pendapatan transfer. Komponen ini terdiri dari Pendapatan Bagi Hasl yang realisasinya sangat tinggi yaitu 504,74 persen, serta Bantuan Keuangan dengan realisasi sangat tinggi yaitu 504,74 persen serta bantuan keuangan dengan realisasi sebesar 1,68 persen dari target.

Secara keseluruhan capaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan reralisasi mencapai 91,06 persen dari target yang ditetapkan. Sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat sementara dari sisi pendapatan asli daerah, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja PAD sudah cukup optimal, upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Untuk formulasi dalam perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerahadalahsebagaiberikut:

$$Kontribusi\ PAD = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Daerah} x100$$

Berdasarkan formulasi diatas didapat besaran kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar:

$$x \quad \frac{405.760.870.753,78}{1.206.604.294.641,58} x100 = 33,$$

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp405.760.870.753,78, sedangkan total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.206.604.294.641,58. Untuk mengetahui besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dilakukan perhitungan dengan membagi realisasi PAD dengan total pendapatan daerah, kemudian dikalikan 100 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan Rp405.760.870.753,78 dibagi Rp1.206.604.294.641,58 kemudian dikalikan 100, diperoleh nilai sebesar 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 33 persen.

Setelah dilakukan analisis dan dievaluasi/reviu capaian kinerja dengan kondisi permasalahan yang ada, maka didapat alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. ***Memperkuat regulasi;***

   Memperbaiki regulasi tentang perpajakan dan mengatur ulang sistem adminitrasi serta menciptakan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan pendapatan / penerimaan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. ***Memperluas basis penerimaan***;

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

3. ***Memperkuat proses pemungutan***;

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif khususnya pada tarif retribusi.

4. ***Meningkatkan pengawasan***;

   Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan atau secara berkala,

memperbaiki proses pengawasan.

5. ***Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik***;

   Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*/ instansi terkait di daerah.

6. ***Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi***;

   Perlu ditumbuhkan rasa kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak/wajib retribusi dal hal membayar pajak daerah/retribusi daerah adalah dengan turut andil mereka dalam membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

   a. Melalui pendekatan persuasif dan partisipatif;
   b. Melakukan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. ***Meningkatkan pelayanan prima***;

   Dalam hal ini dapat diambil *sample* pembayaran pajak melalui *online* serta menciptakan inovasi–inovasi baru tentang akselerasi peningkatan penerimaan daerah khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapatdi lihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31 Analisis Efesiensi Sumber Daya Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kontribusi (%)	Anggaran yang dikeluarkan	Realisasi PAD	Tigkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
2025	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	20,34	Rp. 27.398.168.083,00	**Rp. 405.760.870.753.78**	6,75
2024			17,14	Rp. 22.761.574.545,00	Rp. 341.870.142.537,47	6,66
2023			20,46	Rp. 24.394.981.988,00	Rp. 408.109.845.853,54	5,98
2022			**19,28**	Rp. 23.356.159.529,00	Rp. 384.483.331.941,10	6,07
2021			22,78	Rp. 22.191.651.001,00	Rp. 454.382.443.324,35	4,88

$$\mathbf{TE} = \frac{\textit{Anggaran yang dikeluarkan}}{\textit{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} x100$$

Dengan Kriteria :

a. Sangat efisien : <10,00%

b. Efisien : 10,00%-20,00%

c. Cukup efisien : 21,00%-30,00%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kontribusi PAD melalui pengelolaan pendapatan yang lebih optimal serta pemanfaatan potensi daerah secara maksimal. Pada tahun 2025 kontribusi indikator Pertubbuhan Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar 20,34 persen dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 27.398.168.083,00 dan realisasi PAD mencapai Rp. 405.760.870.753,78 serta Tingkat efisiensi sebesar 6,75 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa dengan alokasi anggaran yang relative terukur, pemerintah daerah mampu menghasilkan realisasi PAD yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 kontribusi pertumbuhan PAD tercatat sebesar 17,14 persen dengan anggaran Rp. 22.761.574.545,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 341.870.142.537,47 serta Tingkat efisiensi 6,66 persen. Sementara itu pada tahun 2023, kontribusi pertumbuhan PAD mencapai 20,46 persen dengan anggaran Rp. 24.394.981.988,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 408.109.845.853,54 dengan Tingkat efisiensi 5,98 persen. Pada tahun 2022 kontribusi pertumbuhan PAD sebesar 19,28 persen dengan anggaran Rp. 23.356.159.529,00 dan realisasi PAD mencapai Rp. 384.483.331.941,10 serta tingkat efisiensi sebesar 6,97 persen. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi pertumbuhan PAD tercatat paling tinggi yaitu 22,78 persen dengan anggaran Rp. 22.191.651.001,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 454.382.443.324,35, serta tingkat efisiensi 4,88 persen.

Secara umum data tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD dari tahun ke tahun relaitf stabil dan berada pada kisaran ratusan miliar rupiah dengan tingakat efisiensi anggaran yang cukup baik. Hal ini mencerminkan bahwa upya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber -sumber pendapatan daerah yang dipisahkan, telah berjalan dengan cukup efektif. Ke depan, optimalisasi PAD perlu terus ditingkatkan melalui penguatan system pemungutan pendapatan, digialisasi pelayanan pajak dan retribusi, serta pengembangan potensi ekonomoi daerah guna meningkatkan kemandirian fiscal daerah.

Tabel 3.32 Capian Target, Realisasidan Kontribusi Sektor Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		EFESIENSI
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.170.161.869,13	923.893.569	256 M	271 M	100 %	105,85 %	Penggunaan anggaran pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersedia pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024. Akan tetapi realisasinya lebih besar anggaran Tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2025 dan dari outcome pencapaian realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2025, dikarenakan Target PAD pada tahun 2025 meningkat sebanyak 49 M.
2025	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.376.071.200,00	758.953.083,00	305 M	307 M	100 %	100,65 %	

Berdasarkan data pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dan 2025 terlihat adanya perbandingan antara penggunaan anggaran, realisai kegiatan serta capaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Pada tahun 2024 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.170.161.869,13 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 923.893.569. dari sisi output, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp 256 Miliar dan realisasinya mencapai Rp. 271 Miliar. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik dnegn realisasi *outcome* sebesar 105,85 persen, yang berarti melebihi target yang telah ditepati.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk program yang sama mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.376.071.200,00, namun realisasi anggaran tercatata sebear Rp. 758.953.083,00 yang lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Dari sisioutput, target PAD pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp.305 meliar dengan realisasi sebesar Rp. 307 miliar. Capaian outcame pada tahun 2025 tercatat sebesar 100,65 persen, yang berarti masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan meskipun dengan persentase capaian yang lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Peningkatan target PAD pada tahun 2025 sebesar sekitar Rp.49 miliar dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya Upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Meskipun realisasi anggaran pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian target PAD tetap dapat tercapai bahkan sedikit melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah masih berjalan secara efektif dan relaitf efisien dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3.3.4 Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastuktur Dasar MasyarakatYang Merata

Rasio Kepala Keluarga (KK) yang Terlayani Infrastruktur Dasar merupakan salah satu Indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan dasar disiatu daerah. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi layak, perumahan serta sarana dan prasaran pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan utam dalam kehidupan sehari–hari. Peningkatan rasio KK yang terlayani infrastruktur daar mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat jangkauan layanan publik serta meningkatkan kualitas hidup masyarkat. Indikator ini juga menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kesejahteraan antar wilayah.

Oleh karea itu, upaya peningkatan cakupan pelayanan infrstruktur dasar perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangu kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarkat dapat memperoleh akses yang adail dan merata terhadap layanan dasar, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sistem Pengolahan Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan meningkatkan kualitas

hidup sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perencanaan penyediaan sarana dan prasana air minum sangat penting dalam meningkatkanperekonomian wilayah.

Penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas khususnya dalam rangka pencapaian sasaran dan target penyediaan air minum baik dalam konteks universal akses, nasional, maupun daerah. Di samping itu, penyelenggaraan dan pengembangan SPAM ini juga dilaksanakan dalam upaya pengendalian pelaksanaan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal. Selain itu, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, prinsip penyelenggaraan SPAM haruslah memenuhi prinsip

pembangunan berkelanjutan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu permasalahan yang terjadi di kabupaten Karimun mengenai sistem penyediaan air minum yaitu ketersediaan air baku yang tidak merata di setiap Perdesaan/Perkotaan. Terdapat daerah yang memiliki banyak ketersediaan air baku dan sebaliknya terdapat daerah yang kekurangan ketersediaan air baku dikarenakan sulitnya menemukan titik air besih. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta dalam pemanfaatan potensi air baku secara bersama-sama sekaligus membantu daerah Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki keterbatasan air baku.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun melaksanakan Program Sistem Pengembangan dan Penyediaan SPAM di wilayah Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun. Adapun Indikator dan Target yang harus dicapai sasaranya demi terwujudtnya Kebutuhan dasar Masyarakat yang merata.

Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur daerah terkait indeks infrastruktur mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan dan pemerataan layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indeks infrastruktur menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat ketersediaan, kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, perumahan serta sarana pendukung lainnya.

Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah telah berjalan secara lebih efektif dan terarah dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengurangan kesenjangan antara wilayah. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi perencanaan penggaran dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi dan berbasis prioritas.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Dampaknya, akses masyarakat terhadap layanan desar semakin luas. Kualitas hidup

meningkat serta terbukanya peluang pengembangan ekonomi lokal. Upaya peningkatan akses kebutuhan infrastruktur daerah perlu terus diperkuat, khususnya dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil, meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan serta memanfaatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Berikut Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun

Tabel 3.33 Persentase KK yang terlayani Infrastruktur Dasar di Kabupaten karimun Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	**37,95%**	**42,26%**	**111,36%**
2	Indeks Infrastruktur	**0.267**	**0,273**	**102,25%**

***Sumber** : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025*

Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) dikarenakan target yang ditetapkan di dalam PK Bupati dibawah realisasi target tahun sebelumnya yaitu 37,28

Berdasarkan dari tabel di atas capaian kinerja indikator Persentase Keluarga (KK) yang terlayanai Infrastruktur Desa di Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 37,95 persen, sementara realisasi mancapai 42,26 persen, sehingga tingkat capaian kinreja mencapai 111,36 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya jangkauan pelayanan infrastruktur dasar kepada masyarakat yang meliputi askses terhadap air bersih, sanitas, perumahan layak serta infrastruktur pendukung lainnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan program pembanguan infrastruktur yang tepat sasaran serta adanya sinergi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Persentase peningkatan jumalah penduduk yang mendaptkan akases terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungai terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Karimun (Rumus Perhitungan)

$$¿ \frac{\textit{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N}}{\textit{Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota}} x\,100$$

$$= \frac{\mathbf{153.248}}{\mathbf{276.650}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\% = 42,261\ \%}$$

Selain itu, peningkatan capaian ini juga menunjukkan efektivitas perencanaan perencanaan dan pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pelayanan infrastruktur, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karimun dapat terus meningkat. Meskipun capaian telah melampaui target, upaya peningkatan tetap perlu dilanjutkan untuk memastikan pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah, khususnya bagi masyarakat yang masih belum terlayani secara optimal. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Capaian kinerja indikator Indeks Infrastruktur di Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target indeks Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 0,267 sementara realisasi mencapai 0,273 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 102,25 persen.

Rumus Perhitungan sarana strategis meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur daerah

$$\frac{\textit{Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui spam jaringan perpipaan \& bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota + Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah Domestik + Persentase Panjang jalan dalam Kondisi Baik}}{100} : 3$$

$$= \frac{\mathbf{42.26 + 0 + 39.73}}{\mathbf{100}} : \mathbf{3} = \mathbf{0.273}$$

Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar di Kabupaten Karimun yang meliput berbagai aspek seperti jalan air bersih, sanitasi dan sarana pendukung lainnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi perencanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta sinergi antara perangkat daerah dalam mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat.

Meskipun capaian telah melampaui target, selisish yang relatif tipis antara target dan realisasi menjunjukkan bahwa upaya peningkatan infrastruktur masih perlu terus diperkuat terutama dalam memperluas jangakauan layanan dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata diseluruh wilayah. Dengan capaian tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kaulitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saiang daerah.

Tabel 3.34 Persentase Penduduk Beraksis Air Bersih

TAHUN	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
2024	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	66.544	59.963	6.581	90,11
2023	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	66.410	59.963	6.447	90,29
2022	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	63.364	59.219	4.415	93,46

***Sumber** : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025*

Capaian Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Karimun selama periode tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tingkat pelayanan yang relatif tinggi, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2022, persentase capaian tercatat sebesar 93,46 persen, dengan jumlah rumah yang telah terlayani sebanyak 59.219 dari total 63.364 rumah.

Pada tahun 2023, jumlah total rumah meningkat menjadi 66.410 dengan jumlah rmah yang terlayani sebesar 59.963 dan belum terlayani sebanyak 59.963 dan belum terlayananani sebanyak 6.447 rumah. Persentase capaian pada tahun tersebut tercatat sebesar 90,29 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dimana total rumah kembali meningkat menjadi 66.544 dengan jumlah rumah yang terlayani tetapi sebanyak 59.963 dan belum terlayani meningkat menjadi 6.581 rumah, sehingga persentase capaian menjadi 90,11 persen.

Penurunnan persentase capaian ini bukan semata-mata disebabkan oleh berkurangnya layanan, maliankan lebih dipengaruhi oleh peningkatan jumalah rumah tangga yang belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan cakupan layanan air bersih. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan kebtuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan perluasan layanan.

Meskipun demikian, secara umum cakupan layanan air bersih di Kabupaten Karimun masih berada pada kategori tinggi diatas 90 persen. Diperlukan upaya percepatan perluasan akses layanan air bersih, khususnya bagi rumah tangga yang belum terlayani, penguatan kondisi lintas sektor guna memastikan pemerataan layanan yang berkelanjutan.

Tabel 3.35 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Kabupaten Karimun/Kota pada Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR MINUM / SPAM											KET
		JARINGAN PERPIPAAN					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				JUMLAH RUMAH	JUMLAH PENDUDUK	
		UNIT AIR BAKU	UNIT PRODUKSI	UNIT DISTRIBUSI	UNIT PELAYANAN	SAMBUNGAN RUMAH	SUMUR DANGKAL / SUMUR GALI	SUMUR POMPA / SUMUR BOR	BAK PENAMPUNGAN AIR HUJAN	TERMINAL AIR			
1	Karimun	110	110	0	1	4455	0	0	0	840	5295	21180	
2	Meral	1,2	1,2	0	1	2861	1032	92	16	132	4133	16532	
3	Meral Barat	3,3	3,3	0	1	1452	0	0	0	0	1452	5808	
4	Tebing	22	22	0	2	2354	62	391	0	131	2938	11752	
5	Buru	3,2	3,2	0	1	1500	1306	9	0	0	2815	11260	
6	Kundur	23,7	19	0	2	3206	74	0	1742	180	5202	20808	
7	Kundur Barat	64	64	0	2	1370	684	2	0	134	2190	8760	
8	Kundur Utara	3	3	0	1	2208	947	42	437	0	3634	14536	

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR MINUM / SPAM											KET
		JARINGAN PERPIPAAN					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				JUMLAH RUMAH	JUMLAH PENDUDUK	
		UNIT AIR BAKU	UNIT PRODUKSI	UNIT DISTRIBUSI	UNIT PELAYANAN	SAMBUNGAN RUMAH	SUMUR DANGKAL / SUMUR GALI	SUMUR POMPA / SUMUR BOR	BAK PENAMPUNGAN AIR HUJAN	TERMINAL AIR			
9	Ungar	2	2	0	1	1627	342	0	88	0	2057	8228	
10	Belat	5,5	5,5	0	1	1504	0	0	0	0	1504	6016	
11	Moro	13	11,7	0	1	1555	790	111	174	147	2777	11108	
12	Sugie Besar	5,4	5,4	0	1	1457	410	0	0	0	1867	7468	
13	Durai	4	4	0	1	2050	0	0	0	0	2050	8200	
14	Selat Gelam	3,5	3	0	1	398	0	0	0	0	398	1592	
Jumlah											38312	153248	

Data Penduduk Menggunakan Data BPS

Dari data diatas, jumlah penduduk mendapatkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian layanan air minum telah menjangkau sebagian besar masyarakat, baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan terlindungi. Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum tercatat sebanyak 38.312 rumah dengan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 153.248 Jiwa. Layanan air minum melalui jaringan perpipaan masih menjadi sumber utama, khususnya melalui sambungan rumah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kecamatan Karimun, Meral, Tebing dan Kundur merupakan wilayah dengan jumlah penerimaan manfaat terbesar dari jaringan perpipaan.

Akses melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti sumur dangkal, sumur bor, bak penampungan air hujan dan terminal air juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan perpipaan. Kecamatan seperti Buru, Kundur, Kundur Utara dan Moro menunjukkan pemanfaatan yang cukup signifikan terhadap sumber air non-perpipaan ini.

Distribusi layanan menunjukkan adanya variasi antara kecamatan, baik dari sisi jumlah rumah tangga maupun jenis layanan yang dimanfaatkan. Hal ini mencerminkan kondisi geografis serta tingkat ketersediaan infrastruktur yang berbeda di masing – masing wilayah. Meskipun sebagian besar masyarakat telah mendapatkan akses air minum masih terdapat ketergantungan pada sumber non-perpipaan di beberapa wilayah yang menunjukkan perlunya peningkatan dan pemerataan layanan perpipaan ke depan. Dengan capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun diharpkan dapat terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan SPAM, khususnya melalui pengembangan jaringan perpipaan yang lebih luar serta peningkatan kualitas sumber air non-perpipaan yang aman dan terlindungi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses air minum yang layak dan berkelanjutan.

Akses air minum melalui jaringan perpipaan menjadi tulang punggung pelayanan, terutama melalaui sambungan rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Karimun dan Kundur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga terlayani terbesar, masing – masing mencapai 5.295 rumah (21.180 jiwa) dan 5.202 rumah (20.808 jiwa). Kecamatan Meral dan Tebing juga menunjukkan cakupan yang cukup

tinggi dengan jumlah rumah tangga terlayani masing – masing 4.133 dan 2.2983 rumah.

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indikator Rasio Kepala Keluarga (KK) yang terlayani infrastruktur dasar di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 37,28 persen dengan realisasi mencapai 41,51 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 111,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyediaan infrastruktur dasar telah berjalan efektif dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dibandingkan dengan target yang rencanakan.

Pada tahun 2025 target mengalami peningkatan menjadi 37,95 persen dengan realisasi yang juga meningkat menjadi 42,26 persen. Meskipun demikian, capaian kinerja tercatat sebesar 111,36 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap berada pada kategori sangat baik karena masih melampaui target.

Secara keseluruhan kinerja indikator ini menunjukkan tren positif baik dari sisi peningkatan target maupun realisasi. Hal ini mencerminkan adanya keberlanjutan dan konsistensi dalam upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan palayanan infrastruktur dasar kepada masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan tetap perlu difokuskan pada pemerataan akses, khususnya bagi wilayah atau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal sehingga capaian yang tinggi dapat diiringi dengan distribusi layanan yang lebih merata dan berkeadilan.

- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator rasio kepala keluarga (KK) yang terlayani infrastruktur dasar antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang tetap tinggi dan stabil. Pada tahun 2024, capaian kinerja tercatat sebesar 111,51 persen, sedangkan pada tahun 2025 capaian kinerja sebesar 111,36 persen.

Meskipun terdapat sedikit penurunan sebesar 0,15 poin, capaian kinerja pada tahun 2025 tetap barada diatas 100 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi masih melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penyediaan infrastruktur dasar kepada masyarakat dasar kepada masyarakat tetap berjalan efektif dan konsisten.

Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, capaian yang selalu melampaui target mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kinerja pelayanan infrastruktur dasar. Penurunan tipis pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh adanya peningkatan target atau dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan kinerja indikator ini tetap menunjukkan tren positif dan stabil sehingga perlu dipertahankan degan tetap meningkatkan pemerataan akses layanan agar manfaat pembangunan infrastruktur dasar dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat.

- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realiasi kinerja indikator Rasio Kepala Keluarga (KK) yang Terlayani Infrastruktur Dasar di Kabupaten Karimun sampai dengan tahun berjalan terhadap target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi indikator mencapai 42,26 persen melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 37,95 persen dengan capaian kinerja sebesar 111,36 persen.

Jika dibandingkan dengan target jangka menegah dalam dokumen renstra, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur daerah telah berada pada jalur yang tepat, bahkan cenderung melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dasar serta keberhasilan dalam memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian yang melampaui target ini juga mengindikasikan adanya percepatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap infrastruktur yang layak. Namun demikian untuk memastikan keberlanjutan pencapaian target jangka menengah, diperlukan upaya konsisten dalam menjaga kualitas layanan serta meningkatkan pemerataan akses, terutama bagi wilayah yang masih belum terlayani secara optimal.

Dengan demikian, keberhasilan yang telah dicapai perlu terus diperkuat melalui perencanaan yang lebih terarah, penganggaran yang efektif serta pengendalian dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal dan merata.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Perbandingan realisasi kinerja indikator Rasio Kepala Keluarga (KK) yang Terlayani Infrastruktur Dasar di Kabupaten Karimun dengan standar nasional menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi indikator mencapai 42,26 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesarnya 37,96 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,36 persen.

Jika dibandingkan dengan standar nasional pelayanan infrastruktur dasar yang pada umumnya menentukan peningkatan cakupan layanan secara bertahap dan merata, capaian Kabupaten Karimun menunjukkan kinerja yang cakup progresif. Hal ini terlihat dari realisasi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang direncanakan, sehingga mencerminkan efektivitas program

pembangunan infrastruktur dasar yang dilaksanakan.

Meskipun demikian apabila mengacu pada target ideal nasional yaitu tercapainya pelayanan dasar yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat, capai sebesar 42,26 persen masih menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam memperluas cakupan layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya bagi wilayah atau kelompok masyarakat yang belum terlayani agar dapat mendekati standar pelayanan yang lebih optimal.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Karimun berada pada jalur yang positif dalam meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar namun tetap memerlukan penguatan strategi untuk mencapai pemerataan pelayanan sesuai dengan standar nasional secara berkelanjutan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta upaya perbaikan ke depan.**

Analisis Keberhasilan dan Peningkatan

Capaian indikator Rasio Kepala Keluarga (KK) yang terlayani infrastruktur dasar di Kabupaten Karimun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi yang konsisten melampaui target dalam dua tahun terakhir. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya alokasi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur dasar, pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran serta adanya sinergi antara perangkat daerah dalam penyediaan layanan dasar.

Selain itu peningkatan kualitas perencanaan yang berbasis data serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa turut berkontribusi dalam memperluas cakupan layanan. Pemanfaatan program prioritas yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong capaian yang optimal.

Analisis Penurunan

Meskipun capaian kinerja tetap tinggi, terdapat sedikit penurunan persentase capaian dari tahun 2024 ke tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya target kinerja, bertambahnya jumlah KK yang harus dilayani serta adanya keterbatasan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah khususnya daerah yang memiliki tantangan geografis atau aksebilitas. Selain itu belum meratanya distribusi layanan infrastruktur dasar dan keterbatasan kapasitas teknis di lapangan juga dapat mempengaruh tingkat percepatan capaian kinerja.

Upaya berbaikan ke Depan

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, diperlukan beberapa langka strategis, antara lain:

d. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan rill masyarakat;
e. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung
f. Mempercepat pembangunan pada wilayah yang belum terlayani secara optimal;
g. Memperkuat sinergi lintas sektoral dan koordinasi dengan pemerintah desa;

h. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
i. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara berakal
j. Memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dapat terus meningkat secara merata sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata Tahun 2025

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		EFESIENSI
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024									1. Target dan realisasi merupakan komulatif dari perhitungan tahun- tahun sebelumnya. 2. Target Kinerja Pada Tahun 2024 cendrung lebih besar dibandingkan tahun 2025 disebabkan oleh **Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun,** oleh karna itu OPD nelakukan penyesuaiann terhadap target dan pagu indikatif pada Dokumen Renstra OPD agar lebih rasional dan terukur serta melihat Pada Kebutuhan Ril dan kekuatan Fisikal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 3. Target 2025 masih menggunakan RPJMD Lama Sehingga Sulit dicapai dan faktor lain lainya yang mempengaruhi di sebabkan penyesuaian anggaran di Tengah gejolak Fisikal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan TKD menjadi berkurang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.101.723.974	1.042.069.274	64.95 %	56.37%	100%	86.79%	
2025	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.418.135.684,50	911.594.000,00	68.28 %	42.26%	100 %	61.89%	

3.3.5 Sasaran Strategi Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal

Kabupaten Karimun adalah daerah yang memiliki banyak pulau. hal ini menyebabkan akses untuk menuju ke suatu tempat membutuhkan waktu dan biaya. Membangun jalan, jembatan dan transportasi

laut dan darat yang mampu menghubungkan antar daerah pemukiman penduduk di masing-masing daerah Kecamatan yang masih terisolir merupakan suatu langkah yang strategis untuk memudahkan masyarakat menuju ke suatu tempat sehingga Pemerintah Kabupaten Karimun membuat sasaran Terwujudnya Prasarana penghubung yang optimal menjadi sasaran ke-4 pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran ke-4 ditentukan oleh 3 indikator yaitu Indikator Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Indikator Rasio konektivitas angkutan Laut, Indikator Rasio konektivitas angkutan darat. Adapun realisasi dan capaian dari tiga indikator sasaran ke-5 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	74.55%	39.73%	53.29%
2.	Rasio kontektivitas angkutan Laut	0,69	O,54	78%
3.	Rasio konektifitas angkutan Darat	0,93	0,87	94%

Sumber : *Dinas Perhubungan Kab. Karimun : Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing–masing indikator. Secara umum, sebagian indikator telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar

Pencapaian sasaran selanjutnya didukung dengan indikator Rasio konektivitas angkutan laut. Kabupaten karimun memiliki 54 Pulau berpenghuni, dari 54 pulau berpenghuni yang didata ada 35 pulau yang memerlukan transportasi laut regular dengan tujuan dari pulau tersebut ke ibu kota kecamatan ataupun ibu kota kabupaten. Target di tahun 2025 sebesar 0,69 yaitu 24 trayek akan terlayani oleh transportasi laut regular, sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 0,54 yaitu baru sebesar 19 trayek atau pulau berpenghuni yang telah terjangkau transportasi laut regular, ketidak berhasilan pencapaian dari indikator ini adalah karena tidak bertambahnya trayek pulau-pulau berpenghuni yang terlayani oleh transportasi laut regular, ditahun tidak tercapai target pada indikator ini penyebabnya adalah :

1. **Keterbatasan Pembiayaan**: Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur transportasi laut, sehingga sulit untuk menambahkan trayek baru;

2. **Tantangan Teknis dan Operasional**: Pengembangan trayek angkutan laut memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, kondisi laut, dan ketersediaan infrastruktur pendukung;
3. **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil**: Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengoperasikan angkutan laut juga dapat menjadi faktor penghambat;
4. **Faktor Keamanan dan Keselamatan**: Pengembangan trayek angkutan laut juga harus mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan, termasuk pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

Dengan memahami penyebab-penyebab tersebut, pemerintah dan stakeholders dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas serta kuantitas trayek angkutan laut.

Berikut proporsi panjang jalan beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 3.29 dibawah ini:

Tabel 3.38 Proporsi Panjang Jalan Beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun

KECAMATAN	WILAYAH PENANGANAN JALAN (DALAM KILOMETER)			
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH
1	2	3	4	5=(2+3+4)
Kecamatan Karimun	3,24	20,64	40,17	64,05
Kecamatan Meral	13,37	0,00	59,50	72,87
Kecamatan Tebing	0,00	3,99	57,88	61,87
Kecamatan Kundur	0,00	15,38	89,40	104,78
Kecamatan Moro	0,00	0,00	28,86	28,86
Kecamatan Durai	0,00	0,00	29,17	29,17
Kecamatan Buru	0,00	0,00	64,94	64,94
Kecamatan Kundur Utara	0,00	37,20	85,75	122,95
Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	84,67	84,67
Kecamatan Meral Barat	9,26	0,00	31,12	40,38
Kecamatan Belat	0,00	0,00	27,55	27,55
Kecamatan Ungar	0,00	0,00	21,15	21,15
Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	49,47	49,47
Kecamatan Selat Gelam	0,00	2,50	15,81	**18,31**
Jumlah/ Total	**25,87**	**79,71**	**685,44**	**791,02**

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025*

Dari tabel 3.29 diatas dapat dilihat bahwa Panjang Jalan Nasional 25,87 KM dengan kondisi baik 25.87, Panjang Jalan Provinsi yang beraspal 79,71 dengan kondisi dengan baik 61,26, kondisi sedang 5.48, kondisi rusak 4.45, dan kondisi rusak berat 8.52. Panjang jalan beraspal untuk jalan Kabupaten 685.437 dengan kondisi baik 272.44, kondisi sedang 162.85, kondisi rusak ringan 31.66 dan kondisi rusak berat 218.49.

Sampai dengan tahun 2023 terdapat tantangan berupa menurunnya kualitas pelayanan jalan kabupaten, provinsi dan nasional di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan.

Berbagai tantangan lain yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten meliputi :

1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih.
2. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, termasuk masih banyaknya daerah yang terisolasi.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat.

Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan- dan pengembangan wilayah (termasuk daerah terisolasi, daerah perbatasan, pulau- pulau kecil) dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Tabel 3.39 Pulau-Pulau Berpenghuni Yang Terlayani Trayek/Transportasi laut Reguler Tahun 2020 s.d 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENGHUNI PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER		Trayek angkutan laut reguler				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	**Tebing**	Pongkar	1	Tokonghiu Kecil	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
2	**Karimun**		2	Kenipan	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			3	Karimun Anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tdk ada
3	**Selat Gelam**	**Parit**	4	Parit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			5	Tulang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	**Buru**		6	Buru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			7	Pulau Papan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	**Belat**	Sebele	8	Belat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			9	Degong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			10	Seraya	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			11	Panjang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			12	Junge	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			13	Pelangkat	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			14	Serenteng	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
5	**Kundur Barat**		15	Lalang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENGHUNI PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER		Trayek angkutan laut reguler				
					2020	2021	2022	2023	2024
7	**Kundur**		16	Kundur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	**Ungar**		17	Ungar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			18	Mandah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			19	Ngal	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada
			20	Propos	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada
7	**Durai**		21	Durai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			22	Akat	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada
			23	Semembang	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada
8	**Moro**		24	Moro Darat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			25	Moro Tengah	Belum lancar setiap hari	Ada	Ada	Ada	Ada
			26	Pauh	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada
			27	Jang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			28	Citlim	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			29	Pisang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			30	Combol	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			31	Bahan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			32	Muraibatu	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			33	Pasai	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			34	Keban	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari
9	**Sugi Besar**		35	Sugi Besar	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada
	Jumlah				**13**	**14**	**14**	14	**19**
	Jumlah Pulau yang yang memerlukan transportasi laut regular								**35**

Sumber : *Dinas Perhubungan, 2025*

Indikator ketiga yang mendukung dari sasaran ini adalah ***Rasio konektivitas angkutan darat*.** Target di tahun 2024 sebesar 0,87 atau setara dengan 13 trayek angkutan darat yang merupakan indikator penunjang sasaran di atas. Tahun 2024 Kabupaten Karimun bertambah 1 trayek. Dengan bertambahnya 1 trayek Kabupaten Karimun memiliki 13 trayek angkutan darat di tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 0,87 atau 13 trayek angkutan darat. Jadi di tahun 2024 target yang dicapai sebesar 100%. Tercapainya pencapaian dari indikator ini adalah karena bertambahnya trayek angkutan darat yaitu :

1. **Pertumbuhan Ekonomi**: Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat dapat meningkatkan permintaan akan transportasi darat, sehingga memicu penambahan trayek angkutan darat.
2. **Investasi Infrastruktur** : Investasi dalam infrastruktur transportasi darat, seperti pembangunan jalan tol dan terminal bus, dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkutan darat, sehingga memungkinkan penambahan trayek.
3. **Kebijakan Pemerintah**: Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan transportasi darat, seperti peningkatan investasi infrastruktur dan pengaturan lalu lintas, dapat memicu penambahan trayek angkutan darat.
4. **Peran Serta Masyarakat**: Peran serta masyarakat dalam menggunakan transportasi darat yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat meningkatkan permintaan akan angkutan darat dan memicu penambahan trayek.

Tabel 3.40 Tabel Data Trayek Angkutan Umum Perkotaan dan Kabupaten

No	Item	Jumlah			
1.	**Trayek Yang Tersedia/Kendaraan**		**13 Trayek**		
		1)	Trayek Balai- Tebing	: 33	Kendaraan
		2)	Trayek Balai - Meral	: 174	Kendaraan
		3)	Trayek Balai - Kapling	: 26	Kendaraan
		4)	Trayek Meral - Pangke	: 30	Kendaraan
		5)	Trayek Tg. Batu - Tg. Berlian	: 109	Kendaraan
		6)	Trayek Tg. Batu - Selat Beliah	: 86	Kendaraan
		7)	Trayek Meral - Pasir Panjang	: 3	Kendaraan
		8)	Trayek Desa Pongkar – Tebing	: 1	Kendaraan
		9)	Trayek Desa Pangke – Meral Barat	: 1	Kendaraan
		10)	Trayek Pulau Parit	: 1	Kendaraan
		11)	Trayek Desa Jang Kecamatan Moro	: 1	Kendaraan
		12)	Trayek Desa Jang Kecamatan Belat	: 1	Kendaraan
		13)	Trayek Desa Sebele Kecamatan Belat	: 1	Kendaraan
			Jumlah	**464**	**Kendaraan**
2.	**Total**			13	Trayek

No	Item	Jumlah
3.	**Total Kebutuhan Trayek Angkutan Darat**	**15 Trayek**

Rumus Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Konektivitas Angkutan Laut :

Rasio Konektivitas Angkutan Darat
Target = 0,93

$$= \frac{\text{Jumlah Izin Trayek Angkutan Darat yang diterbitkan (13) x Bobot Tra (1)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Darat (15)}}$$

$$= \frac{13 \times 1}{15}$$

$$= 0,87$$

Realisasi = 0,87

$$= \frac{0,87 \times 100\%}{0,87}$$

$$= 94\%$$

Data trayek angkutan darat yang sudah diterbitkan berjumlah 13 trayek.
Target Rasio Konektivitas Angkutan Laut = 0,69

$$= \frac{\text{Jumlah Izin Trayek Angkutan Laut yang diterbitkan (24) x Bobot Trayek (1)}}{\text{Jumlah IzinTrayek Angkutan Laut yang Dibutuhkan (35)}}$$

$$= \frac{24 \times 1}{35}$$

$$= 0,69$$

Realisasi = 19 Trayek

$$= \frac{19 \times 1}{34}$$

$$= 0,54$$

$$\frac{0,54}{0,68} \times 100\%$$

$$= 78\%$$

Data trayek angkutan laut yang sudah diterbitkan berjumlah 19 trayek.Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sudah berusaha untuk membuka konektivitas antar pulau dengan mengusulkan trayek kapal perintis yang dapat membuka akses pengangkutan barang dan penumpang dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau melalui Dana APBN dengan memanfaatkan Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara dan Kapal Rede Transport KM. Gandha Nusantara 07 dan KM. Gandha Nusantara 08 yang melayani Kapal PELNI KM. Kelud karena masih memiliki rentang waktu yang dapat digunakan untuk dialihkan melayani masyarakat pulau-pulau terdekat dengan Pulau Karimun. Trayek kapal perintis KM. SABUK NUSANTARA 48 dari Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun-Moro-Jagoh-Pulau Pekajang-Belinyu-Pulau Pekajang-Jagoh-Tanjungpinang-Tambelan-Midai-Selat-Lampa-Serasan-Sintete-Tambelan-Batam-

Tanjungpinang oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehingga terbuka akses Pulau Karimun dan Moro yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan masuknya barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih murah apabila dibandingkan dengan mengangkut menggunakan kapal kayu.

Kemudian untuk membuka konektivitas antar desa di Kecamatan Dinas Perhubungan juga sudah mengusulkan Transportasi Darat Mikro Bus melalui DAK untuk memperkuat akses transportasi antar Desa yang diserahkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan di pulau Karimun sendiri sudah diusulkan Trayek Bus Damri dan Trans Karimun untuk menambah sarana transportasi dari Kota Karimun ke Desa-Desa di Kecamatan yang belum memiliki akses transportasi darat.

Untuk wilayah pulau yang terdekat juga sudah diusulkan Pembangunan Bus Air Ro-ro melalui DAK dengan trayek Pelabuhan Penyeberangan Parit Rempak Meral tujuan Pulau Parit untuk mengangkut penumpang, barang dan kendaraan bermotor. Karena selama ini hanya dilayani Speed Boat Pancung yang berbahan kayu untuk mengangkut penumpang dan barang yang masih belum memenuhi aspek keselamatan berlayar.

Ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun akan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Bus Air Ro-ro yang akan ditambah trayeknya sehingga dapat membuka akses baru pulau-pulau terdekat dan terpencil yang memerlukan transportasi laut.

Untuk transportasi udara Dinas Perhubungan Kabupaten juga sudah berupaya bersama Kantor Unit Penyelenggara Bandara Raja Haji Abdullah Sei Bati untuk menambah landasan pacu (Run Way) sehingga bisa dilayani oleh pesawat berkapasitas besar selain pesawat perintis Susi Air dengan berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan lindung yang berada diujung lokasi Bandara.

Dibandingkan dengan Kota Batam dan Tanjungpinang akses transportasi Kabupaten Karimun masih dibawah sehingga dibutuhkan kerjasama yang kuat antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Swasta untuk mendukung terwujudnya pelayanan transportasi laut yang memadai. Kabupaten Karimun sangat terbantu dengan akses Kapal Penyeberangan Ro-ro yang sudah beroperasi selama ini dengan trayek antar Kabupaten dan antar Provinsi antara lain:

a. Karimun-Tanjungpinang;
b. Karimun-Batam;
c. Karimun-Bengkalis; dan

trayek dalam Kabupaten yaitu : Karimun-Selat Beliah yang beroperasi 2 kali dalam seminggu. Serta Kapal Pelni KM. kelud yang rutin 2 kali seminggu melayani masyarakat yang hendak berangkat atau pulang dengan trayek dari Jakarta-Batam-Karimun-Medan.

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 3.41 Tabel Dukungan Anggaran Sasaran "Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal" Tahun 2025

No	Program /Kegiatan	Kinerja Keuangan			
		Anggaran	Realisasi	SILPA	%
I	Pengelolaan Pelayaran	138.717.000	96.455.000	42.262.000	69,53%
II	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	-	-
JUMLAH		**138.717.000**	**96.455.000**	**42.262.000**	**69,53 %**

Sumber : *Dinas Perhubungan Kab. Karimun : Tahun 2025*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada program dan kegiatan di atas masih atau tergolong cukup rendah dari pagu anggaran yang ada. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan Dana Transfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi dan Pencapaian Pendapatan yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya. Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum tidak terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya manusia dan anggaran.

Tabel 3.42 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan Darat antara lain :

Tahun	Program	Sub Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 2.083.740.425,-	Rp. 761.316.410,-	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	Tahun 2023 penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.048.520.775,- , sedangkan tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.634.743.820,- lebih kecil
		2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 14.572.906.565,-	Rp. 14.122.756.877,-	5 Unit	5 Unit	100 %	98,98 %	
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum	Rp. 11.422.913.546,-	Rp. 11.164.447.488,-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	97,74 %	

Tahun	Program	Sub Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota							dari tahun 2023
2024	Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 2.354.760.100,-	Rp. 1.487.341.145,-	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	
		2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 22.977.992.900,--	Rp. 22.343.609.355,-	5 Unit	5 Unit	100 %	98,98 %	
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 907.178.000,- -	Rp. 803.793.320,-	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	

Sasaran Strategi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnyaAngka Harapan Hidup di suatu wilayah. Pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Indikator sasaran ini merupakan dukungan misi ke 3 (tiga) Kabupaten Karimun yaitu “Mengembangkan sumber daya manusia

yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa".

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.50	75.05	104.97
Tingkat Capaian				**104,97 %**

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian sasaran sebesar **104.97%** yang bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Selengkapnya nilai capaian sasaran indikator pada sasaran enam sesuai hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakat atau kata lain dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang

sejak orang tersebut lahir. Data Angka Harapan Hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada urusan kesehatan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Merujuk data BPS Provinsi Kepulauan Riau yang dirilis melalui link https://kepri.bps.go.id ada bulan November 2025, Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah sebesar 71,50 tahun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,05 tahun dengan capaian kinerja sebesar 104,97% dengan kategori tercapai dan kriteria **Sangat Baik**. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 s.d 2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.3 ***Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2025***

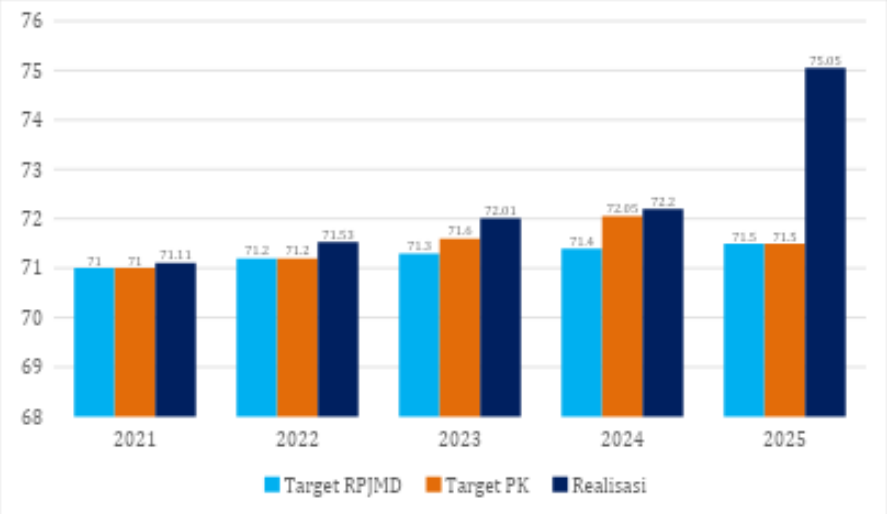

Sumber data: BPS Provinsi Kepulauan Riau, November 2025

Grafik 6.1 menunjukkan capaian Angka Harapan Hidup selama lima tahun terakhir trendnya meningkat. Pada tahun 2025 capaian angka harapan hidup meningkat 2,85 dibanding dengan tahun 2024 yaitu 72,20 tahun 2025 menjadi 75,05. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Karimun rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 75,05 tahun.

Berikut Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun dibanding dengan rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau:

Grafik 3.4 Angka Harapan Hidup Provinsi Kepri Tahun 2025

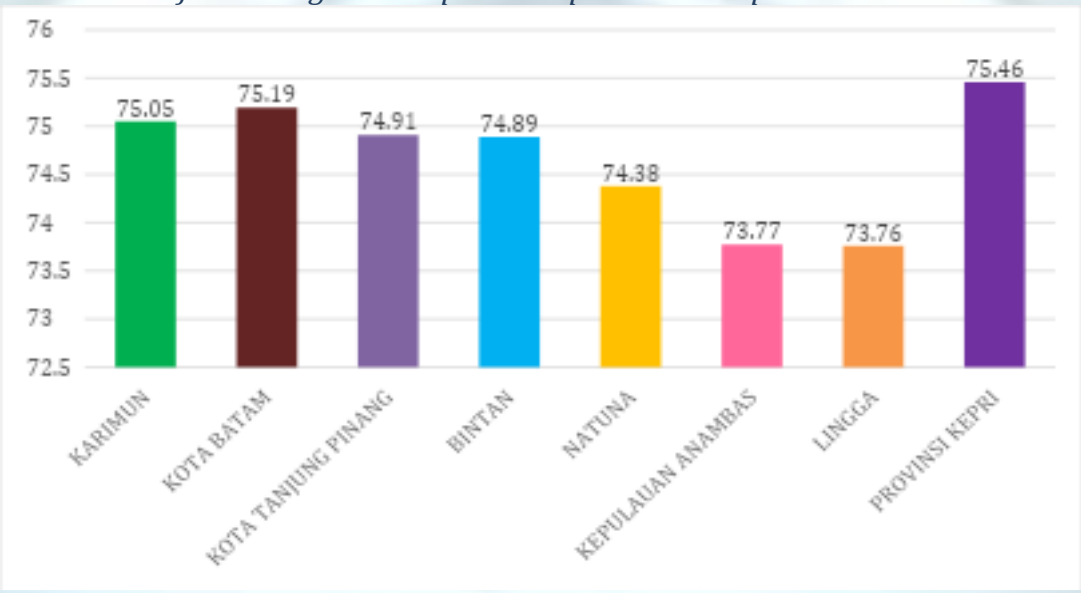

Sumber data: BPS Provinsi Kepulauan Riau, November 2024

Grafik 6.2 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2025 sudah berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun menempati urutan ke 3 (tiga)

tertinggi setelah Provinsi Kepri dan Kota Batam. Selama rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun lebih tinggi atau berada di atas rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Angka harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor demografi, sosio-ekonomi, gaya hidup, psikososial dan faktor-faktor kesehatan. Faktor-faktor kesehatan yang pengaruhi serta berhubungan dengan Angka Harapan Hidup terdiri atas gizi (pola makan), perilaku , menapouse, osteoporosis, penyakit tidak menular seperti tekanan daerah tinggi dan diabetes melitus, penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV AIDs.

Faktor pendorong tercapainya Angka Harapan Hidup dibidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan di tahun 2025 yang ditingkatkan seperti:
   a. Dilakukannya kunjungan dokter spesialis ke RSUD Tg. Batu Kundur
   b. Pengadaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) kit dan Posbindu/ Lansia kit untuk Puskesmas dan Posyandu
   c. Pengadaan obat essensial dan bahan medis habis pakai untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
   d. Dilakukannya penilaian akreditasi pada 4 (empat) Puskesmas dengan hasil akreditasi 2 puskesmas lulus Paripurna dan 2 puskesmas lulus Utama
   e. Penilaian akreditasi terhadap RSUD Tanjung Batu Kundur dengan hasil tingkat kelulusan Paripurna
   f. Penilaian akreditasi terhadap RSUD Muhammad Sani dengan hasil tingkat kelulusan Paripurna
2. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Karimun yang terlindungi jaminan kesehatannya melalui kepesertaan BPJS. Dibanding dengan tahun 2023 kepesertaan BPJS di Kabupaten Karimun tahun 2024 meningkat sebanyak 22.198 orang yaitu dari 240.117 orang menjadi 262.315 orang atau meningkat 9,24%.

Grafik 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2021 s.d 2025

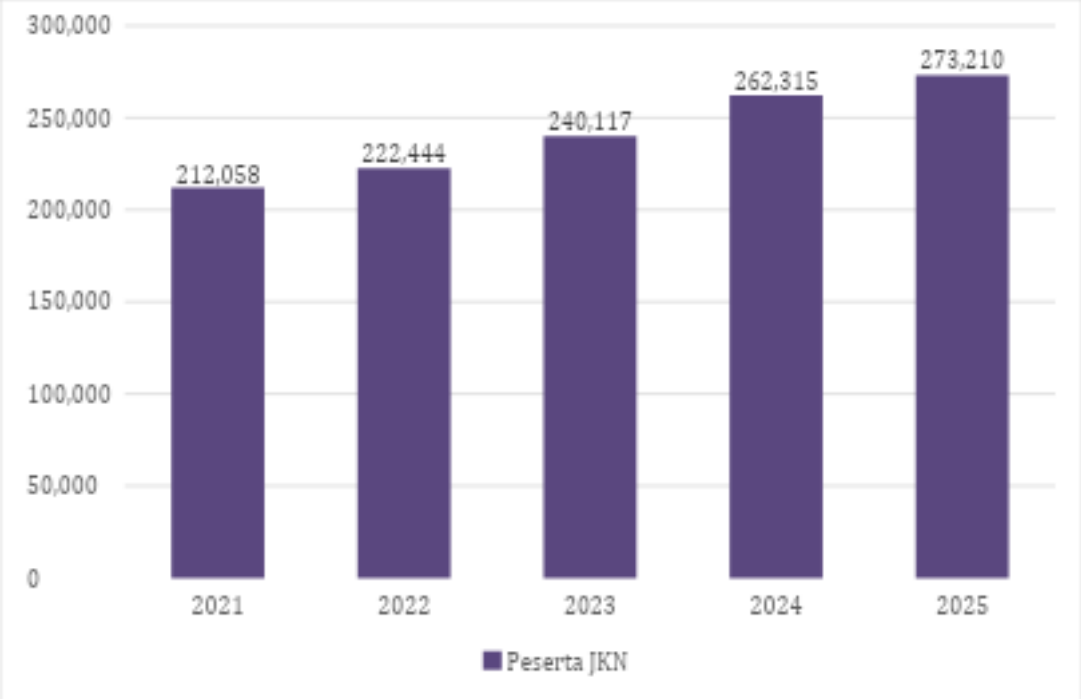

3. Menurunnya mortalitas atau angka kematian seperti:
   a. Menurunnya angka lahir mati yang dilaporkan yaitu 6,4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 menjadi 4,8 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2025 atau menurun sebesar 1,6%. secara absolut dapat didefinisikan jumlah lahir mati menurun dari 19 menjadi 18 dengan total kelahiran yang meningkat dari 2.782 menjadi 3.519. Angka lahir mati terbesar berada di Kecamatan Karimun sebanyak 5 jiwa dan terendah atau 0 kematian ada di Kecamatan Ungar, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Sugie Besar dan Kecamatan Moro.

   b. Meningkatnya angka kematian neonatal yang dilaporkan yaitu 7,24 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 menjadi 7,25 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,01%. secara absolut dapat didefinisikan kematian neonatal menurun dari 20 menjadi 19 dengan jumlah lahir hidup yang menurun dari 2.764 menjadi 2.619. Angka kematian neonatal terbesar berada di Kecamatan Karimun yaitu sebanyak 4 jiwa dan terendah atau 0 kematian ada di Kecamatan Sugie Besar dan Kecamatan Moro.

   c. Meningkatnya angka kematian balita, yaitu dari 10,13 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 menjadi 14,51 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 4,38. Secara absolut dapat didefinisikan dari 28 kematian balita menjadi 38 kematian balita. Angka kematian balita terbesar berada di Kecamatan Meral yaitu sebanyak 8 jiwa dan terendah atau 0 kematian tidak ada.

   d. Meningkatnya Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian DBD Deman Berdarah Dengue) tahun 2024, yaitu dari 0% menjadi 0,43% ditahun 2025. Secara absolut dapat didefinisikan 0 pada tahun 2024 menjadi

2 pada tahun 2025 kematian akibat DBD.

4. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat di tahun 2025, yaitu dari 0,23 tetap 0,23. Indeks keluarga sehat (IKS) adalah suatu perhitungan untuk mengetahui apakah sebuah keluarga tersebut termasuk kedalam kategori keluarga sehat, prasehat dan tidak sehat. Hasil indeks 0,23 masih dikategorikan tidak sehat. Untuk mencapai kategori prasehat dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk memenuhi 12 indikator yang diukur.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, kesehatan lingkungan yang belum maksimal, keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa. Tidak bisa dideteksi dini penyakit pada masa kehamilan juga merupakan masalah yang menyebabkan kematian ibu.

Untuk mencapai target akhir RPJMD yang bisa dilakukan dan perencanaan kedepan antara lain meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan seperti mengutamakan upaya promotif, preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, meningkatkan status gizi, meningkatkan kesehatan lingkungan. Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dengan melakukan

percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM, pengawasan, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan. Pengawasan dan pembinaan terhadap sediaan farmasi, makanan dan minuman serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

Pada tahun 2025 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp. 62.355.864.589,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.572.207.243,- atau 87,51%

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakanperbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai seperti pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan misalnya memanfaatkan tenaga ahli yang berada di Kabupaten Karimun seperti tenaga ahli dari RSUD M.Sani sebagai pemateri, melibatkan kader posyandu dalam melaksanakan kegiatan review kematian ibu dan bayi, penggunaan jasa pihak ke-3 dan lintas sektor dalam pengelolaan kegiatan seperti RS swasta, Komisi Penanggulangan AIDS dan LSM. Tindakan lainnya yang bisa menghasilkan efisiensi SDM adalah dengan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya.

Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.44 Analisis Efisiensi Sasaran

Tahun	Program	Input		Out put		Outcome		Penjelasan Evaluasi Analis Efisien
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Target	Realisa	Targe	Realisa	
2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.761.099.174	36.809.973.512	13 Puskes mas yang mengisi aplikasi Keluarga Sehat	13 Puskes mas yang telah mela porkan pe mantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS	0,23 Indeks Keluarga Sehat	0,23 Indeks Keluarga Sehat	Anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025. Besarnya anggaran 2025 dibanding tahun 2024 ada di kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mana ini adalah kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik. Dengan meningkatnya anggaran kegiatan tersebut maka persentase Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP tahun 2025 mengalami
2025	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.356.057.939	50.856.506.403	- 13 Puskes mas yang mengisi aplikasi Keluarga Sehat - *13.343 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat*	- 13 Puskes mas yang telah mela porkan pe mantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS - 13.343 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat	0,23 Indeks Keluarga Sehat	0,23 Indeks Keluarga Sehat	

Tahun	Program	Input		Out put		Outcome		Penjelasan Evaluasi Analis Efisien
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Target	Realisa	Targe	Realisa	
								peningkatan. Hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kegiatan dan capaian program yaitu Indeks Keluarga Sehat. Output program ke-1 yang dikeluarkan tahun 2025 dan 2024 hasilnya sama yaitu 13 Puskesmas yang telah melaporkan pemantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS. Pada output ke-2 realisasi jumlah keluarga yang tercapai 12 indikator sehatnya, realisasi tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu dari 13.343 keluarga. Jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2024 sama dibanding kan tahun 2025 yaitu dari 0,23 Indeks Keluarga Sehat. Ditahun 2025 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran tersedia, terjadi peningkatan sebesar 27,52% se hingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggu naan sumber daya. Pada tahun

Tahun	Program	Input		Out put		Outcome		Penjelasan Evaluasi Analis Efisien
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Target	Realisa	Targe	Realisa	
								2025 realisasi output dan outcome tercapai.
2024	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	748.264.000	92.557.500	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	92,30 % unit pelayanan dengan ketersedia an tenaga kesehatan sesuai standar	53,85% unit pela yanan dengan ketersedia an tenaga kesehatan sesuai standar	Efesiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2025 dan 2024 sama yaitu 13 Unit pelayanan kesehatan yang telah melakukan update data di SISDMK, dan jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2024 lebih tinggi dibanding kan 2025 sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2025	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	45.000.000	15.814.900	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	61,53 % unit pelayanan dengan ketersedia an tenaga kesehatan sesuai standar	61,53% unit pela yanan dengan ketersedia an tenaga kesehatan sesuai standar	
2024	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	487.407.000	327.162.267	7 jenis sedia an farmasi, alkes dan makaanan minuman dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	7 jenis sedia an farmasi, alkes dan makaanan minuman yang telah dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	67,94% Sediaan farmasi, alat kese hatan dan makanan minuman memenuhi syarat	71,89% sediaan farmasi, alat kese hatan dan makanan minuman memenuh i syarat	Penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2025 meningkat yaitu 81 jenis sediaan farmasi, alkes dan makaanan minuman yang telah dilakukan pengawasan. Dan jika dibandingkan dari outcome, capaian
2025	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	231,884,000	172.244.990	81 jenis sedia an farmasi, alkes dan makaanan minuman dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	81 jenis sedia an farmasi, alkes dan makaanan minuman yang telah dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal,	100% Sediaan farmasi, alat kese hatan dan makanan minuman memenuhi syarat	100% sediaan farmasi, alat kese hatan dan makanan minuman memenuhi syarat	

Tahun	Program	Input		Out put		Outcome		Penjelasan Evaluasi Analis Efisien
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Target	Realisa	Targe	Realisa	
					UMOT, PIRT/IRTP, TPM)			outcome tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024. Ditahun 2025 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran tersedia, terjadi efisiensi sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2024	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.295.471.741	6.605.400.041	71 desa/ kelurahan yang dilakukan advokasi kebijakan Germas	71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas	56,33% desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	63,38% desa/ keluraha n yang me nerapkan kebijakan Germas	Penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2025 sama yaitu 71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas. Jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2024 lebih rendah dibandingkan 2025. Ditahun 2025 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran tersedia, terjadi efisiensi sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2025	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.723.695.950	2.575.250.950	71 desa/ kelurahan yang dilakukan advokasi kebijakan Germas	71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas	73,24% desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	73,24% desa/ kelurahan yang me nerapkan kebijakan Germas	

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai seperti pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan misalnya memanfaatkan tenaga ahli yang berada di Kabupaten Karimun seperti tenaga ahli dari RSUD M.Sani sebagai pemateri, melibatkan kader posyandu dalam melaksanakan kegiatan review kematian ibu dan bayi, penggunaan jasa pihak ke-3 dan lintas sektor dalam pengelolaan kegiatan seperti RS swasta, Komisi

Penanggulangan AIDS dan LSM. Tindakan lainnya yang bisa menghasilkan efisiensi SDM adalah dengan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya.

Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Indikator Angka **Harapan Lama Sekolah (AHLS)** adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Karimun pada tahun 2025

Tabel 3.45 Capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka HarapanLama Sekolah	13,10 Tahun	12,63 Tahun	96,41 %

***Sumber** : BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, Tahun 2025*

Berdasarkan data tahun 2025, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya drajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 13,10 tahun, realisasi yang berhasil dicapaian adalah 12,63 tahun atau sebesar 96,41%. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan telah berjalan dengan efektif, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,47 tahun dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat partisipasi pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Upaya yang lebih optimal dan terarah seperti peningkatan pemerataan layanan pendidikan, penguatan program wajib belajar serta dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi 4 tahun sebelumnya tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun semakin meningkat, sebagaimana nampak pada grafik berikut:

Gambar 3.6 ***Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d. 2025***

Sumber : *BPS Kabupaten Karimun, 2025*

4.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebesar s.d 2025 terlihat bahwa capaian AHLS menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kencendrungan meningkat secara bertahap. Pada periode awal, nilai AHLS berada pada kisaran 12,3 tahun dan terus mengalami peningkatan secara perlahan hingga mencapai sekitar 12,6 tahun pada tahun 2025. Meskipun kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan setiap tahunnya, namun tren positif ni menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam harapan lama sekolah masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa akses terhadap pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan semakin membaik dari waktu ke waktu. Namun demikian, peningkatan yang masih bersifat gradual menunjukkan perlunya upaya yang lebih optimal dan terarah, terutama dalam mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penguatan kebijakan dan program pendidikan yang lebih progresif, seperti peningkatan pemerataan akses pendidikan, penanganan angka putus sekolah serta dukungan terhadap kelompok masyarakat renta, agar capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat meningkat lebih signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Angka harapan lama sekolah dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.46 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karimun

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34%	13,10 Tahun	12,63 Tahun	96,41%

Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabe di atas, tahun 2024 dan 2025 capaian kinerja pada sasaran meningkatnya drajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2024, dari target sebesar 13,10 tahun, realisasi yang dicapai adalah 12,62 tahun dengan capaian sebesar 96,34%. Sementara itu pada tahun 2025 target tetap sebesar 13,10 tahun dengan realisasi meningkat menjadi 12,63 tahun atau capaian sebesar 96,41%.

Terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,01 tahun dan kenaikan capaian sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan telah berjalan, namun belum mampu mendorong meningkatkan yang signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penguatan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan seperti peningkatan pemerataan akses pendidikan, penanganan angka putus sekolah serta peningkatan partisipasi masyarakat terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, dengan demikian, diharapkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat meningkat secara lebih optimal dan target yang ditatapkan dapat tercapai.

Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET AKHIR DI RPJMD 2026	CAPAIAN
1	MeningkatnyaDerajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan LamaSekolah	12,63 Tahun	13,50 Tahun	93,56 %

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat yang diukur melalui indikator angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai 12,63 tahun dari target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 13,50 tahun dengan tingkat capaian sebesar 93,56%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar target jangka menengah telah berhasil dicapai, namun masih terdapat selisih sebesar 0,87 tahun yang perlu dikejar hingga akhir periode RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan dan program Pendidikan sudah berada pada jalur yang tepat, percepatan Upaya masih diperlukan untuk mencapai target secara optimal. Diperlukan strategi uang lebih intensif dan terfokus antara lain melalui peningkatan akses dan pemerataan layanan Pendidikan, penguatan program penuntasan wajib belajar serta intervestasi terhadap kelompok Masyarakat yang beresiko putus sekolah. Dengan Langkah – Langkah tersebut diharapkan target Angka Harapan Lama Sekolah pada hakih RPJMD tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perbandingan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karimun

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	PROV. KEPRI	NASIONAL
1	MeningkatnyaDerajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan LamaSekolah	12,63 Tahun	13.27 Tahun	13,21 Tahun

Berdasarkan data perbandingan capaian Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025, kinerja pada sasaran meningkatnya drajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa realisasi sebesar 12,63 tahun masih berada di bawah capaian tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebesar 13,27 tahun maupun nasional sebesar 13,21 tahun.

Selisih capaian tersebut masing - masing sebesar 0,64 tahun dibandingkan provinsi dan 0,58 tahun dibandingkan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat harapan lama sekolah Kabupaten Karimun masih relatif lebih rendah, sehingga diperlukan perhatian dan upaya yang lebih intensif untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemerataan akses pendidikan, kondisi geografis wilayah, tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang menengah dan tinggi serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah, seperti peningkatan akses layanan pendidikan, penguatan program wajib belajar serta intervensi bagi kelompok masyarakat renta, agar capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun dapat meningkat dan lebih mendekati bahkan melampaui capaian provinsi maupun nasional.

Untuk itu perlu upaya - upaya dengan berbagai Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

a. Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah/madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
b. Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
c. Melakukan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karimun mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMP dengan cara mutasi atau penerimaan CPNS atau PPPK.
d. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang berimbang antara di kota dan di pulau-pulau.
e. Memberikan bantuan seragam sekolah kepada siswa baru tingkat SD maupun SMP untuk seluruh siswa di Kabupaten Karimun.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah

adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Capaian Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,90 Tahun	9,06 Tahun	101,80%

Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun

Berdasarkan Tabel di atas Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat yang diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 8,90 tahun, realisasi yang dicapai adalah 9,06 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 101,80%. Capaian ini mengindikasi bahwa target yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan dalam rata – rata lama Pendidikan yang ditempuh oleh Masyarakat yang menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan di bidang Pendidikan.

Keberhasilan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, Upaya peningkatan kualitas dan akses Pendidikan tetap perlu perhatikan dan ditingkatkan, terutama untuk mendorong Masyarakat agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga capaian ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tren capaian Rata-Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 3.7 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d. 2025

Sumber : BPS Kabupaten Karimun

Berdasarkan Grafik di atas tentang Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2025 terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,17 tahun dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 8,18 tahun pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 8,48 tahun, kemudian terus naik menjadi 8,69 tahun pada tahun 2023 dan 8,91 tahun pada tahun 2024. Pada tahun 2025, capaian Kembali meningkat menjadi 9,06 tahun yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 0,89 tahun dalam kerun waktu enam tahun terakhir. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Karimun yang mencerminkan keberhasilan Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses , pemerataan dan kualitas Pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan terutama dengan mendorong partisipasi Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga rata-rata lama sekolah dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja rata-rata lama sekolah dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83%	8,90 Tahun	9,06 Tahun	101,80%

Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel di atas perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 pada sasaran

meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah, menunjukkan kinerja yang konsisten dan melampaui target pada kedua tahun tersebut. Pada tahun 2024 dari target sebesar 8,75 tahun realisasi mencapai 8,91 tahun dengan tingkat capaian sebesar 101,83%. Sementara itu pada tahun 2025 target meningkat menjadi 8,90 tahun dengan realisasi sebesar 9,06 tahun atau capaian 101,80%. Jika dibandingkan, terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,15 tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025. Meskipun persentase capaian sedikit menurun sebesar 0,03 %, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan target pada tahun 2025. Secara substansi, kinerja tetap menunjukkan tren positif karena realisasi terus meningkat dan tetap berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan rata-rata lama seklah masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini terus dipertahankan dan diperkuat, khususnya dalam mendorong akses dan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi agar peningkatan yang dicapai dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET AKHIR DI RPJMD 2026	CAPAIAN
1	MeningkatnyaDerajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9,06 Tahun	9,00 Tahun	100,67%

Berdasarkan data perbandingan capaian tahun 2025 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 pada sasaran meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat, indikator Rata – Rata Lama Sekolah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi pada tahun 2025 telah mencapai 9,06 tahun melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditatapkan sebesar 9,00 tahun dengan tingkat capaian sebesar 100,67%. Capaian ini mengindikasikan bahwa target jangka menengah telah berhasil dilampaui lebih awal dari waktu yang direncanakan. Kondisi terebut mencerminkan efektivitas program dan kebijakan dibidang Pendidikan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat. Meskipun target telah terlampaui, Upaya peningkatan tetap perlu dilanjutkan secara berkelanjutan, terutama untuk mendorong masyarakat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, keberhasilan ini juga dapat menjadi dasar untuk penetapan target yang lebih progresif pada periode perencanaan berikutnya, guna terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karimun.

Selanjutnya perbandingan capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.52 Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	PROV. KEPRI	NASIONAL
1	MeningkatnyaDerajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	9,06 Tahun	10,50 Tahun	8,85 Tahun

Berdasarkan tabel diatas data perbandingan capaian Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2025 kinerja pada sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Karimun menunjukkan hasil yang cukup baik jika dibandingkan dengan tingkat nasional, namun masih tertinggal dari capaian Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi Kabupaten Karimun tercatat sebesar 9,06 tahun lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 8,85 tahun dengan selisih 0,21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karimun sudah berada di atas rata – rata nasional. Namun demikian, jika dibandingkan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,50 tahun, Kabupaten Karimun masih tertinggal sebesar 1,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Ke depannya diperlukan strategi yang lebih terarah seperti peningkatan pemerataan layanan pendidikan, penanganan angka putus sekolah serta dorongan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar capaian rata – rata lama sekolah di Kabupaten Karimun dapat semakin meningkat dan mendekati bahkan melampaui capaian provinsi.

Untuk itu perlu upaya - upaya dengan berbagai Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Rata-Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

a. Program bantuan operasional sekolah (BOS), merupakan bentuk perhatian pemerintah agar seluruh penduduk usia sekolah dapat bersekolah walaupun terkendala kondisi ekonomi. Untuk diketahui bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri jenjang PAUD, SD dan SMP. Melalui dan BOS, kebutuhan dasar peserta didik dapat dipenuhi, seperti pengadaan buku/modul pembelajaran.
b. Program pendidikan nonformal, membantu masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) untuk tetap mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan/paket yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain itu, pendidikan nonformal juga menyiapkan program keahlian terampil, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesetaraan Gender.

Capaian sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender dilaksanakan secara sinergis dengan program dari Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dengan pemenuhan target-

target yang merupakan strategi sasaran ke-10 yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2025. Sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran ini ditentukan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender.(IPG). Adapun capaian dari indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.40 berikut ini :

Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Kesetaraan Gender

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pembangunan Gender(IPG)	91,75	91,61	99,85 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				99,85 %

Berdasarkan dari tabel 3.47 di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini pada tahun 2025 adalah sebesar 99,85 % atau bermakna semakin meningkat dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2025 sebesar 91,61 poin terhadap target yang ditetapkan sebesar 91,75 poin serta dikalikan 100 persen. Capaian realisasi IPG tahun 2025 mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi IPG tahun 2024 sebesar 91,33 poin (meningkat 0,28 poin). Begitu juga jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, capaian realisasi IPG tahun 2025 yaitu 91,61 poin belum mencapai target RPJMD tahun 2025 sebesar 91,75 poin (menurun 0,14).

Dalam rangka mencapai Tujuan OPD Terwujudnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 melalui indikator pengukurnya yaitu : Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indikator tersebut bertujuan mencapai sasaran Pemkab Karimun untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas sebagaimana tercantum pada Misi ke 3 dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperoleh dari hasil perhitungan data oleh DP3AKB Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Kementerian PPA dan BPS Pusat), Perhitungan indikator IPG pada tahun 2025 terhadap target yang ditetapkan masih menggunakan angka realisasi IPG pada tahun 2024, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan realisasi indikator IPG Kabupaten/Kota tahun 2025 baru akan diumumkan/dipublikasi oleh Kementerian PPA dan BPS pada pertengahan tahun 2026.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah merupakan salah satu indikator pemerintahan yang Responsif Gender. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG sendiri memiliki 3 indikator; indikator pada bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang Ekonomi. Pada bidang pendidikan terdapat indikator melek huruf, akses pendidikan dasar, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pada bidang kesehatan terdapat Angka Harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan pada bidang ekonomi kita bisa melihat dari pendapatan, daya beli, lapangan pekerjaan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan.

Tabel 3.54 Indikator Variabel Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2025

TAHUN	AMH/AHLS	ARLS	UHH	IPG
2021	12,57	8,18	74,17	91,25
2022	12,59	8,48	74,37	91,00
2023	12,61	8,69	74,58	91,12
2024	12,62	8,91	74,79	91,33
2025	12,63	9,06	75,05	91,61
Prov Kepri 2025	13.05	10.50	75.12	94,20
Nasional 2025	13,21	8,85	74,15	91,85

***Sumber** : Kemen PPPA, BPS, 2024*

Berdasarkan data indikator Variabel Pembentukan Gender (IPG) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2025, terlihat bahwa secara umum seluruh komponen pembentukan IPG menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Variabel utama yang mempengaruhi IPG meliputi Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Umur Harapan Hidup (UHH) yang menggambarkan kondisi kesetaraan gender dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Pada tahun 2021, nilai AHLS tercatat sebesar 12,57 tahun, ARLS sebesar 8,18 tahun dan UHH sebesar 74,17 tahun dengan nilai IPG sebesar 91,25. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada Sebagian besar indikator, Dimana AHLS meningkat menjadi 12,59 tahun, ARLS menjadi 8,48 tahun dan UHH menjadi 74,34 tahun meskipun nilai IPG sedikit menurun menjadi 91,00. Selanjutnya pada tahun 2023, indikator Pendidikan dan Kesehatan Kembali mengalami peningkatan dengan AHLS sebesar 12,61 tahun, ARLS sebesar 8,69 tahun dan UHH sebesar 74,58 tahun, sehingga nilai IPG meningkat menjadi 91,12. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, Dimana AHLS mencapai 12,62 tahun, ARLS 9,91 tahun dan UHH 74,79 tahun, dengan nilai IPG sebesar 91,33. Pada tahun 2025 capaian indikator menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan AHLS mencapai 12,63 tahun, ARLS 9,06 tahun dan UHH 75,05 tahun, sehingga nilai IPG Kabupaten Karimun meningkat menjadi 91,61. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi Pembangunan gender, khususnya dalam peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi laki-laki dan Perempuan. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi kepulauan Riau pada tahun 2025, nilai IPG Kabupaten Karimun yang sebesar 91,61 masih berada di bawah nilai provinsi yang mencapai 94, 20 dengan indikator AHLS sebesar 13,05 tahun, ARLS 10,50 tahun dan UHH 75, 12 tahun. Sementara itu, jika

dibandingkan dengan rata-rata nasional tahun 2025, nilai IPG Kabupaten Karimun masih sedikit lebih rendah dari nilai nasional yaitu 91,85, meskipun indikator UHH Kabupaten Karimun (75,05 tahun) sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (74,15 tahun).

Secara keseluruhan, perkembangan IPG Kabupaten Karimun selama Periode 2021-2025 menunjukkan tren yang positif. Peningkatan pada indikator Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan bahwa Upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender melalui peningkatan akses Pendidikan, layanan Kesehatan serta pemberdayaan Masyarakat telah memberikan dampak yang cukup baik. Ke depan, Upaya peningkatan kualitas Pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar perlu terus diperkuat agar kesenjangan gender dapat semakin diperkecil dan nilai IPG Kabupaten Karimun dapat terus meningkatkan serta mendekati capaian tingkat provinsi maupun nasional.

Berdasarkan perhitungan metode baru Rasio IPM terhadap IPG di Kabupaten Karimun tahun 2025 tercatat 123,33 poin menurun jika di bandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 124,24 poin. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 0,91 poin. Indeks IPG Kabupaten Karimun tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2025

TAHUN	IPM	IPG	IDG	UHH	RASIO IPG TERHADAP IPM (%)
2021	71,44	91,25	64,05	74,17	127,73
2022	71,70	91,00	63,89	74,37	126,92
2023	72,65	91,12	63.47	74,58	125,42
2024	73,51	91,33	57,07	74,79	124,24
2025	74,28	91,61	58,34	75,05	123,33
Prov. Kepri 2024	**77,97**	**94,20**	**65,21**	**75,12**	**120,82**
Nasional	**75,02**	**91,85**	**77,62**	**74,15**	**122,43**

***Sumber** : Kemen PPPA, BPS, 2025*

Pencapaian pembangunan gender adalah IPG yang merupakan turunan dari IPM, tetapi yang diukur adalah “Angka Rasio”, yaitu Rasio antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan Melalui angka IPG, kesenjangan atau Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (mewakili dimensi kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta Pengeluaran Per Kapita (mewakili dimensi

ekonomi). Salah satu indikator gender yang mampu menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender/ IKG (Gender Inequality Index/GII).

Tabel 3.56 Indeks Ketimpangan Gerder (IKG) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2025

TAHUN	Kespro (MTF)	Pendidikan SMA	Pasar Naker (TPAK)	IKG
2020	0.077	27.53	36.00	0,423
2021	0.051	37.01	41.02	0,398
2022	0.028	31.97	41.76	0,343
2023	0.000	39.63	41.28	0,225
2024	0.041	39.04	44.26	0,401
2025				0,488
Prov. Kepri 2025				0,309
Nasional 2025				0,421

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2025

Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskiriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Indeks ini diukur dari tiga dimensi, yaitu Kesehatan Reproduksi/Kespro (MTF), Pemberdayaan (Pendidikan Perempuan Minimal SMA), dan Pasar Tenaga Kerja (TPAK).

Ketidaksetaraan gender terutama dalam hal ekonomi diprediksi semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014). Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja. Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap penyakit menjadi turun. Dampaknya, perempuan menjadi lebih bebas dan tenang untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

Realisasi capaian indikator IPG Kabupaten Karimun Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 antara lain : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta Program Perlindungan Khusus Anak.

Tabel 3.57 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator IPG

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Out Put		Out Come		Efisiensi
			APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	**Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota**	**100.000.000**	**0**	**0**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	Efisiensi Penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia pada APBD Murni TA 2025 lebih kecil dari anggaran APBD-P TA 2025 cukup efisiensi pemanfaatan nya dalam mencapai target. Dari Output keluaran target 8 Sub kegiatan/RKA terdapat 8 Sub kegiatan target kinerjanya mencapai 100% bahkan melebihi target, sehingga dapat dikatakan sudah efisiensi.
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	100.000.000	0	0	35 OPD/ Lembaga	35 OPD/ Lembaga	100% jumlah peserta	100% jumlah peserta	
2	Perlindungan Perempuan	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota**	**101.500.000**	**101.500.000**	**94.284.000**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	101.500.000	101.500.000	94.284.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	**95.046.000**	**95.046.000**	**49.822.761**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota	95.046.000	95.046.000	49.822.761	75 Layanan	75 Layanan	100% Layanan Selesai	100% Layanan Selesai	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	**45.000.000**	**29.452.000**	**19.304.436**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100% 2 Kegiatan**	**100% 2 Kegiatan**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	20.000.000	20.000.000	13.384.050	75 Laporan	75 Laporan	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	25.000.000	9.452.000	5.920.386	30 Orang	30 Orang	100% Orang dibina	100% Orang dibina	
3	**Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota**	**95.000.000**	**6.641.000**	**6.641.000**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	95.000.000	6.641.000	6.641.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
4	**Perlindungan Khusus Anak**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**135.094.000**	**135.094.000**	**96.831.140**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	135.094.000	135.094.000	96.831.140	75 Layanan	75 Layanan	100% Layanan Selesai	100% Layanan Selesai	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**69.020.000**	**69.016.000**	**54.534.500**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	69.020.000	69.016.000	54.534.500	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	

***Sumber** : Kemen PP&PA, BPS, 2026*

Capaian prestasi dan kinerja yang diperoleh Kabupaten Karimun berhubungan dengan capaian indikator IPG pada tahun 2025 antara lain :

1. Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2025 dari Kementerian Negara PPA

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peringkat/ Nilai	Madya (601-700)	Penilaian (-)	Nindya (701-800)	Nindya (715,84)	Nindya (782)
2	Target Peringkat/Nilai	Pratama (501 – 600)	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	Utama (801-900)	Mentor (>900)
Capaian Kinerja (%)		117	0	100	89	87

2. Piagam Penghagaan Kabupaen Layak Anak (KLA) Tahun 2025, dari Kementerian Negara PPA,

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peringkat/ Nilai	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Pratama (581)	Pratama (600)
2	Target Peringkat/Nilai	Pratama (501 – 600)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Madya (601-700)
Capaian Kinerja (%)		100	100	86	97	99

Pencapaian pembangunan gender adalah IPG yang merupakan turunan dari IPM. Berikut Capaian Data IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah in:

Grafik 3.8. ***Capaian IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2021-2025***

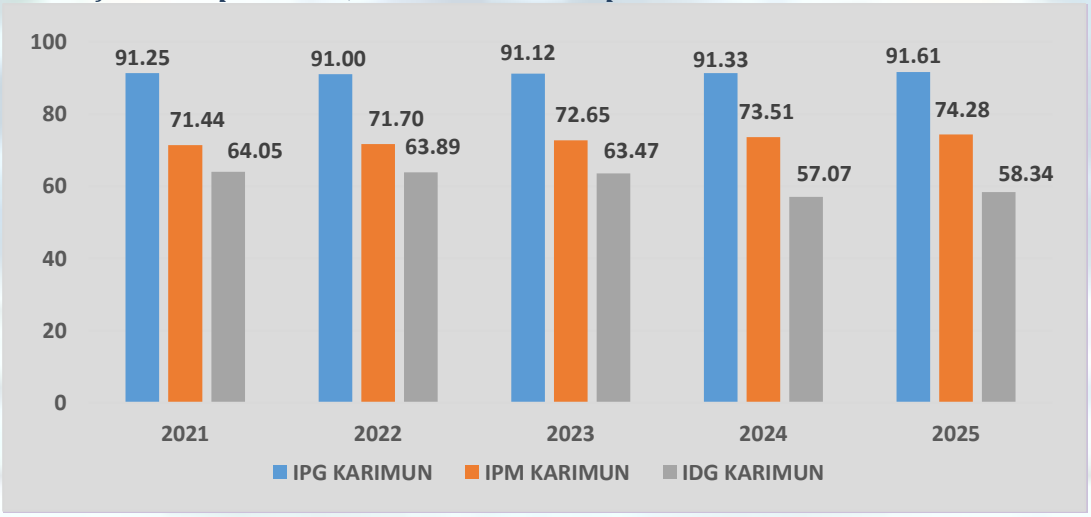

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2026

Pencapaian pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya secara signifikan.

IPG Kabupaten Karimun tahun 2025 sebesar 91,61 poin masih menduduki peringkat kelima dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga terhadap pencapaian IPM Kabupaten Karimun tahun 2025 sebesar 74,28 poin serta pencapaian IDG Kabupaten Karimun tahun 2025

sebesar 58,34 poin masih menduduki peringkat kelima dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 3.9 ***IPG, IPM Dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kab/Kota Tahun 2025***

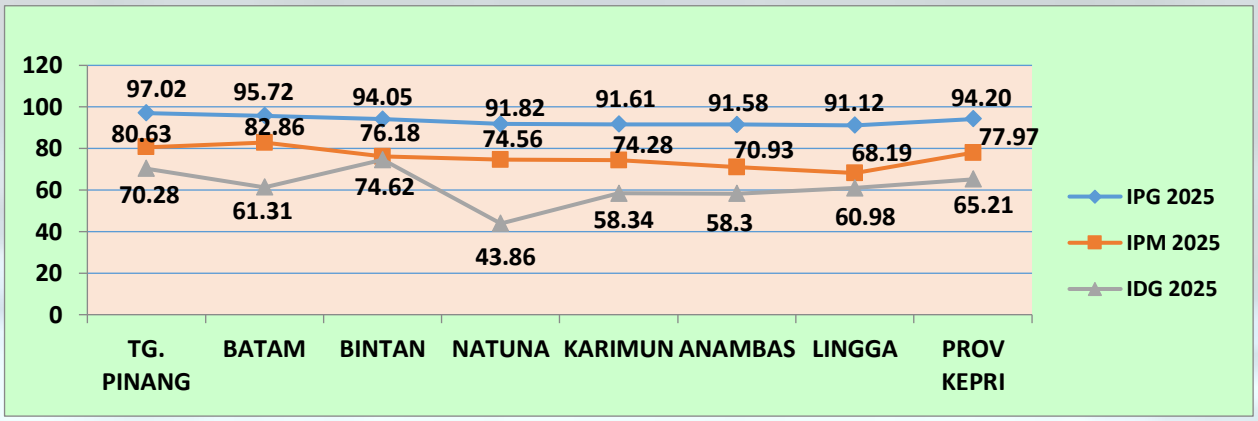

***Sumber** : Kemen PP&PA, BPS, 2026*

Pencapaian indikator IPG Tahun 2025 pada peringkat tertinggi berada di Kota Tanjung Pinang, sebesar 97,02 poin. Sedangkan pencapaian IPG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah 94,20 poin, serta pencapaian IPG Nasional sebesar 91,85 poin.

Pencapaian indikator IPM Tahun 2025 pada peringkat tertinggi berada di Kota Batam, sebesar 82,86 poin. Sedangkan pencapaian IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah 77,97 poin, serta pencapaian IPG Nasional sebesar 75,02 poin.

Sedangkan pencapaian indikator IDG Tahun 2025 peringkat tertinggi berada di Kabupaten Bintan, sebesar 74,62 poin. Sedangkan pencapaian IDG Provinsi Kepulauan Riau adalah 65,21 poin, serta IDG Nasional sebesar 77,62 poin.

Data perkembangan IPM, IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.58 Perkembangan IPM, IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

No	Uraian	Karimun	Batam	Tg. Pinang	Bintan	Lingga	Anambas	Natuna	Prov. Kepri	Nasional
I	IPM – 2021	71.44	81.11	78.91	74.13	65.29	68.80	72.72	75.59	72,81
	IPM - 2022	71.70	81.12	78.93	74.57	65.83	69.23	73.09	75.79	73,16
	IPM - 2023	72,65	81,67	79,64	74,99	66,57	69,61	73,47	76,46	73,77
	IPM - 2024	73,51	82,11	80,23	75,70	67,44	70,26	74,21	77,11	74,39
	IPM - 2025	74,28	82,86	80,63	76,18	68,19	70,93	74,56	77,97	75,02
II	IPG – 2021	91,25	94,43	96,79	93,12	89,25	90,27	91,67	93,31	91,06
	IPG - 2022	91,00	94,51	97,14	93,53	89,73	90,30	91,95	93,49	91,27
	IPG - 2023	91.12	94.75	97.14	93.78	90.48	91.14	91.86	93.50	91,63
	IPG - 2024	91,33	94,95	96,96	93,93	90,75	91,25	92,07	93,96	91,85
	IPG - 2025	91,61	95,72	97,02	94,05	91,12	91,58	91,82	94,20	91,85
III	IDG – 2021	64,05	59,10	76,44	69,64	48,52	62,57	42,99	62,02	75,57

No	Uraian	Karimun	Batam	Tg. Pinang	Bintan	Lingga	Anambas	Natuna	Prov. Kepri	Nasional
	IDG - 2022	63,89	58,38	76,64	73,04	48,50	67,66	42,95	58,97	76,26
	IDG - 2023	63.47	58.65	76.68	71.98	48.44	67.36	42.96	59.05	76,59
	IDG - 2024	57,07	58,26	76,97	71,93	48,94	62,29	50,13	58,83	76,90
	IDG - 2025	58,34	61,31	70,28	74,62	60,98	58,30	43,86	65,21	77,62

***Sumber** : Kemen PP&PA, BPS, 2024*

Peningkatan atau perkembangan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang masih rendah. Sebagai akibatnya IPG menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.

Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Data capaian sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Adapun capaian dari sasaran ke 11 ini dapatdilihat pada tabel 3.36 berikut ini :

Tabel 3.59 Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Penduduk Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP)	1,22 %	0,52 %	157 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				157 %

***Sumber** : Disdukcapil Kab.Karimun Tahun 2026*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 157 % atau bermakna semakin menurun dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2025 sebesar 0,52 persen terhadap target yang ditetapkan sebesar 1,22 persen serta dikalikan 100 persen. Perhitungan indikator LPP pada tahun 2025 terhadap target yang ditetapkan dalam perhitungan capaian masih menggunakan Data Agregat Kependudukan (DAK) pada tahun 2025.

Capaian realisasi LPP tahun 2025 (0,52 %) mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi LPP tahun 2024 sebesar 0,84 persen (sudah berhasil menekan/menurunkan sebesar 0,32 persen). jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, capaian realisasi LPP tahun 2025 sebesar 0,52

persen sudah memenuhi target RPJMD pada tahun 2025 sebesar 1,22 persen (menekan 0,7 persen).

Peningkatan capaian indikator LPP Kabupaten Karimun Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 seperti :

1. Program Pengendalian Penduduk,
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Berikut data penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.60 Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2024 – 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		TAHUN 2024	TAHUN 2025			
			LAKI-IAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	KARIMUN	47.743	24.399	23.437	47.836	17,37
2	TEBING	36.535	18.925	18.288	37.213	13,51
3	MERAL	54.428	28.177	26.761	54.938	19,95
4	MERAL BARAT	17.713	9.227	8.653	17.880	6,49
5	BURU	10.584	5.384	5.169	10.553	3,83
6	KUNDUR	31.421	15.747	15.753	31.500	11,44
7	KUNDUR BARAT	19.452	9.953	9.492	19.445	7,06
8	KUNDUR UTARA	13.106	6.724	6.344	13.068	4,75
9	BELAT	6.795	3.535	3.241	6.776	2,46
10	UNGAR	5.967	3.046	2.916	5.962	2,16
11	MORO	11.453	5.909	5.558	11.467	4,16
12	DURAI	6.451	3.296	3.129	6.425	2,33
13	SELAT GELAM	4.193	2.157	2.016	4.173	1,52
14	SUGIE BESAR	8.105	4.176	3.971	8.147	2,96
KAB. KARIMUN		273.946	140.655	134.728	275.383	100

***Sumber**: Disdukcapil Kabupaten Karimun tahun 2026*

Adapun indikator yang memiliki korelasi dan mendukung sasaran ini adalah angka kelahiran, angka kematian, penduduk datang dan penduduk pergi tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 1,22 % dengan realisasi sebesar 0,52 % atau capaian kinerja 157 %.

Realisasi ini dihitung berdasarkan rumus periode jangka waktu 1 tahun yaitu jumlah penduduk tahun 2025 (Data Agregat Tahun 2025) sebanyak 275.383 jiwa dikurangi jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 273.946 jiwa lalu berbanding terbalik terhadap penduduk tahun 2024 sebanyak 273.946 jiwa serta dikali 100.

Berikut grafik perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Karimun tahun 2020-2025 seperti pada

grafik di bawah ini:

Grafik 3.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis KelaminDi Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2023

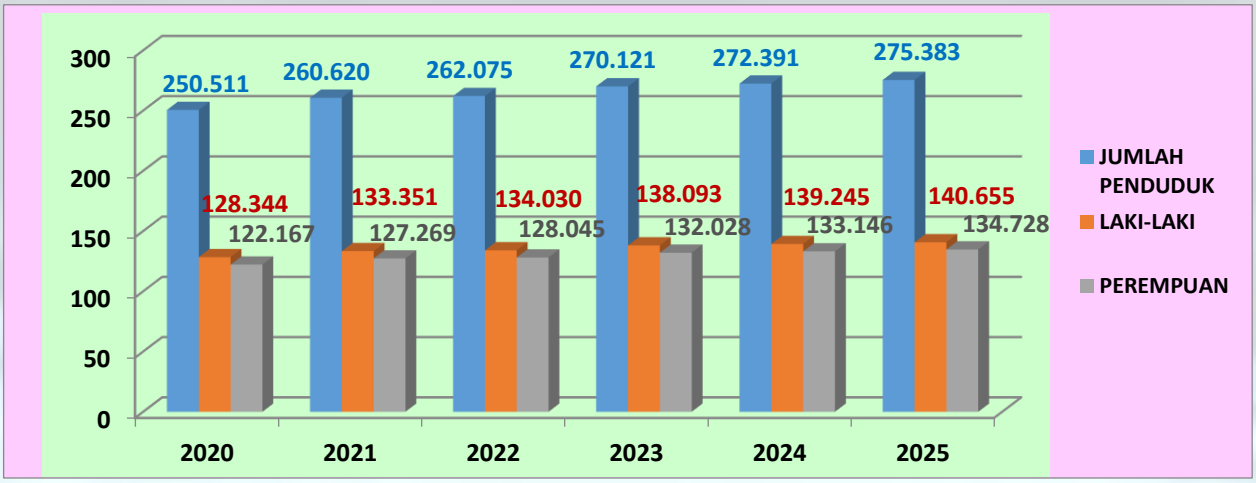

Sumber: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2026

Ada empat faktor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)antara lain yaitu ;

1. Kelahiran

Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, Antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program Keluarga Berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Kedua yang menghambat kelahiran itu karena menggunakan Program Keluarga Berencana. Selanjutnya melalui berbagai upaya kegiatan seperti Generasi Berencana (Genre) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun menurun atau dapat diturunkan.

Data angka kelahiran tahun 2025 di wilayah Kabupaten Karimun sebanyak 2.619 bayi, mengalami penurunan kelahiran bayi jika dibandingkan terhadap kelahiran bayi tahun 2024 sebanyak 3.094 bayi.

Selama tahun 2025 kelahiran bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Meral sebanyak 545 bayi (20,81%), serta kelahiran bayi terendah terdapat di Kecamatan Ungar sebanyak 51 bayi (1,95%). Berikut data kelahiran bayi di Kabupaten Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.61 Data Kelahiran di Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	KECAMATAN	BAYI LAHIR HIDUP TAHUN 2025				KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH
1	Karimun	248	220	468	18,0	13.411	12.491	25.902
2	Meral	286	259	545	20,81	17.361	15.989	33.350
3	Meral Barat	108	93	201	7,67	5.582	5.079	10.661
4	Tebing	203	195	398	15,20	11.778	10.957	22.735
5	Buru	35	42	77	2,94	2.982	2.772	5.754
6	Kundur	126	126	252	9,62	9.081	8.577	17.658
7	Ungar	29	22	51	1,95	1.617	1.448	3.065

8	Kundur Utara	65	47	112	4,28	4.160	3.515	7.675
9	Belat	30	25	55	2,10	2.042	1.677	3.719
10	Kundur Barat	94	73	167	6,38	6.095	5.375	11.470
11	Moro	52	47	99	3,78	3.126	2.837	5.963
12	Durai	37	23	60	2,29	1.756	1.579	3.335
13	Sugi Besar	40	38	78	2,98	2.020	1.871	3.891
14	Selat Gelam	32	24	56	2,14	1.184	1.051	2.235
TOTAL		1.385	1.234	2.619	100	82.195	75.218	157.413

Sumber: Dinkes, Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) adalah peningkatan Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara (*proximate determinant*) fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berupayameningkatkan pemakaian kontrasepsi atau kepesertaan ber KB di masyarakat guna mengendalikan angka kelahiran penduduk.

Jumlah capaian angka rasio pemakaian kontrasepsi/ peserta KB aktif Kabupaten Karimun tahun 2025 sebanyak 28.274 dari PUS sebanyak 38.401 atau Rasio 73.63%. Rasio peserta KB aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Meral Barat sebesar 81,47% sebanyak 2.295 akseptor dari 2.817 total PUS, sedangkan Rasio terendah terdapat di Kecamatan Kundur Barat sebesar 63,72% sebanyak 1.751 akseptor dari 2.748 total PUS. Berikut data PUS dan peserta KB aktif menurut kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.62 Data Pasangan Usia Subur (PUS) dan/Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JLH PUS	JLH PESERTA KB AKTIF	RASIO (%)
1	Karimun	5.575	4.123	73,96
2	Meral	7.499	5.339	71,20
3	Meral Barat	2.817	2.295	81,47
4	Tebing	6.679	5.022	75,19
5	Buru	1.572	1.182	75,19
6	Kundur	3.885	2.891	74,41
7	Ungar	873	690	79,04
8	Kundur Utara	1.458	974	66,80
9	Belat	986	718	72,82
10	Kundur Barat	2.748	1.751	63,72
/11	Moro	1.625	1.257	77,35
12	Durai	894	662	74,05
13	Selat Gelam	530	410	77,36
14	Sugi Besar	1.260	960	76,19
	JUMLAH	38.401	28.274	73,63

***Sumber**: Disdalduk, KB, PP&PA 2026*

2. Kematian

Menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh peningkatan perkembangandalam bidang kesehatan atau medis, berbanding lurus dengan meningkatnya angka Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk memberi arti terhadap angka kelahiran yang tinggi dan umur yang panjang, tentulah mempengaruhi penduduk di wilayah Kabupaten Karimun semakin padat dan peningkatan kepada laju pertumbuhan penduduk.

Data kematian di Kabupaten Karimun yang terlapor dan terdata serta menurut penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 (Data Agregat Tahun 2024) sebanyak 802 kasus/ Akta kematian dari 275.383 jumlah penduduk.

Salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh tingginya kelompok umur penduduk Usia Tua yang tergolong Lansia yang rentan terhadap masalah derajat kesehatan. Penduduk Usia Tua (Lansia) tertinggi terdapat di Kecamatan Karimun sebanyak 3.125 jiwa dari 47.836 total seluruh penduduk serta sudah penerbitan Akta Kematian sebanyak 130 kasus, sedangkan persentase Penduduk Usia Tua (Lansia) terendah terdapat di Kecamatan Selat Gelam sebanyak 429 jiwa dari 4.173 total seluruh penduduk serta sudah penerbitan Akta Kematian sebanyak 33 kasus. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.63 Data Kematian Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Tua (Lansia)	Data Kematian		Penerbitan Akta Kematian
				Kematian Ibu	Kematian Bayi/Balita	
1	KARIMUN	47.836	3.125	-	3	130
2	MERAL	54.938	3.023	-	5	153
3	MERAL BARAT	17.880	775	-	3	44
4	TEBING	37.213	1.793	-	2	92
5	BURU	10.553	1.051	1	3	43
6	KUNDUR	31.500	3.131	-	5	93
7	KUNDUR UTARA	13.068	1.330	-	1	34
8	KUNDUR BARAT	19.445	1.823	1	2	43
9	UNGAR	5.962	604	-	1	29
10	MORO	11.467	921	-	1	41
11	DURAI	6.425	532	-	-	16
12	BELAT	6.776	708	-	2	34
13	SELAT GELAM	4.173	429	-	1	33
14	SUGI BESAR	8.147	681	-	1	17
JUMLAH		275.383	19.926	2	30	802

***Sumber**: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2026*

3. Pindah Datang

Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Karimun adalah penduduk yang datang dan pindah dari luar wilayah yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Berikut data Penduduk Pindah Datang di Kabupaten

Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.64 Data Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Produktif	Penduduk Pindah Datang	%
1	Karimun	47.836	33.974	554	22,64
2	Meral	54.938	38.268	612	25,01
3	Meral Barat	17.880	12.180	182	7,44
4	Tebing	37.213	25.748	476	19,45
5	Buru	10.553	7.246	28	1,14
6	Kundur	31.500	22.187	259	10,58
7	Ungar	5.962	4.152	34	1,39
8	Kundur Utara	13.068	9.010	85	3,47
9	Belat	6.776	4.637	14	0,57
10	Kundur Barat	19.445	13.219	76	3,11
11	Moro	11.467	7.946	69	2,82
12	Durai	6.425	4.516	25	1,02
13	Selat Gelam	4.173	2.879	5	0,20
14	Sugi Besar	8.147	5.680	28	1,14
TOTAL		275.383	191.642	2,447	100

***Sumber**: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2025*

Penduduk pindah datang di Kabupaten Karimun tahun 2025 (Data Agregat Tahun 2024) sebanyak 2.447 jiwa, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 2,912 jiwa. Berdasarkan data tersebut persentase penduduk pindah datang di wilayah kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Meral sebanyak 612 jiwa (25,01%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Selat Gelam sebanyak 5 jiwa (0,20%).

Salah Satu Penyebab peningkatan jumlah penduduk pindah datang di Kecamatan Meral dipengaruhi oleh kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah pengembangan kawasan industri dan perdagangan bebas (FTZ) di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

4. Pindah Keluar

Penduduk yang pergi keluar daerah dapat terjadi jika penduduk di suatu wilayah datang ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja bahkan bisa dalam jumlah yang banyak seperti menjadi Tenaga Kerja (TKI) ke negara lain atau migrasi ke daerah lain di luar wilayah Kabupaten Karimun, hal ini bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk suatu daerah.

Data penduduk pindah keluar/pergi dari Kabupaten Karimun yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun (Data Agregat Tahun 2024) sebanyak sebanyak 2.513 jiwa, kondisi tersebut menunjukkan penurunan capaian jika dibandingkan terhadap tahun 2023 sebesar 4,135 jiwa.

Berikut Data Penduduk Pindah Keluar dari wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.65 Data Penduduk Pindah Keluar Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Produktif	Penduduk Pindah Keluar	%
1	Karimun	47.836	33.974	644	25,63
2	Meral	54.938	38.268	483	19,22
3	Meral Barat	17.880	12.180	151	6,01
4	Tebing	37.213	25.748	324	12,90
5	Buru	10.553	7.246	66	2,63
6	Kundur	31.500	22.187	307	12,22
7	Ungar	5.962	4.152	31	1,23
8	Kundur Utara	13.068	9.010	85	3,38
9	Belat	6.776	4.637	25	1,0
10	Kundur Barat	19.445	13.219	127	5,05
11	Moro	11.467	7.946	100	4,0
12	Durai	6.425	4.516	66	2,63
13	Selat Gelam	4.173	2.879	15	0,60
14	Sugi Besar	8.147	5.680	89	3,54
TOTAL		275.383	191.642	2,513	100

***Sumber**: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2026*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk pindah keluar/pergi di wilayah kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Karimun sebanyak 644 jiwa (25,63%). Sedangkan persentase penduduk pindah keluar/pergi terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Selat Gelam sebanyak 15 jiwa (0,60%).

Tabel 3.66 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Kependudukan TA 2025

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Out Put		Out Come		Efisiensi
			APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pengendalian Penduduk	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**454.200.000**	**454.200.000**	**121.444.267**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100% 4 Kegiatan**	**100% 3 Kegiatan**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	60.000.000	56.744.267	1 Laporan	1 Laporan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	58.200.000	58.200.000	46.700.000	1 Laporan	1 Laporan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000	36.000.000	18.000.000	1 Laporan	1 Laporan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	300.000.000	300.000.000	-	1 Laporan	1 Laporan	100% 1 Kegiatan	Efisiensi Anggaran	
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**618.800.000**	**603.475.000**	**507.837.184**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100% 6 Kegiatan**	**100% 6 Kegiatan**	
		Pengendalian Program KKBPK	75.000.000	59.675.000	45.433.707	1 Laporan	1 Laporan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	103.800.000	103.800.000	61.967.075	3 Unit BPKB	3 Unit BPKB	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000	240.000.000	227.664.484	14 Kecamatan	14 Kecamatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	80.000.000	80.000.000	53.696.250	1 Paket	1 Paket	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Out Put		Out Come		Efisiensi
			APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	20.000.000	20.000.000	19.980.000	1 Paket	1 Paket	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000	100.000.000	99.095.668	30 Organisasi	30 Organisasi	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**433.800.000**	**433.800.000**	**396.660.000**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	433.800.000	433.800.000	396.660.000	45 Kader KB	45 Kader KB	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**574.505.000**	**574.505.000**	**481.098.791**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100% 3 Kegiatan**	**100% 3 Kegiatan**	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16.200.000	16.200.000	14.253.756	16 Unit Faskes	16 Unit Faskes	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	544.805.000	544.805.000	453.393.084	50 Orang Akseptor	50 Orang Akseptor	100% Pelayanan	100% Pelayanan	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	13.500.000	13.451.951	16 Unit Faskes	16 Unit Faskes	100% Unit dibina	100% Unit dibina	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**144.350.000**	**144.350.000**	**128.260.597**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100% 1 Kegiatan**	**100% 1 Kegiatan**	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	144.350.000	144.350.000	128.260.597	24 Kampung KB	24 Kampung KB	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
3	**Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**180.000.000**	**162.368.000**	**160.975.503**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100% 2 Kegiatan**	**100% 2 Kegiatan**	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	130.000.000	129.800.003	10 Unit BKB Kit	10 Unit BKB Kit	100% Paket Selesai	100% Paket Selesai	
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50.000.000	32.368.000	31.175.500	30 Orang Genre	50 Orang Genre	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**1.009.800.000**	**1.009.800.000**	**990.000.000**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100% 2 Kegiatan**	**100% 2 Kegiatan**	
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	459.000.000	459.000.000	450.000.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	550.800.000	550.800.000	540.000.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	

Efisiensi Penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 lebih kecil dari anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, cukup efisiensi pemanfaatannya dalam mencapai target. Dari output keluaran target 19 Sub kegiatan/RKA terdapat 18 Sub kegiatan target kinerjanya mencapai 100% bahkan melebihi target, sehingga dapat dikatakan sudah efisiensi.

ii. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan untuk mewujudkan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.67 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks PembangunanPemuda	69,50	62,20	89.49%
Rata-Rata Tingkat Capaian				**89.49 %**

Sumber **:** *Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karimun, Tahun 2025*

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks pengukuran perbandingan dari domain pendidikan, domain partisipasi pemuda, domain ketenagakerjaan dan domain kesehatan. Indeks ini digunakan untuk melihat seberapabesar pembangunan pemuda di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kabupaten Karimun tahun 2025. Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 69,50%. Capaian kinerja tersebut didapatmelalui domain dan indikator. Penentuan domain dan indikator pembangunan kepemudaan yang tepat, ditempuh dengan melakukan pemeringkatan domain sesuai pilihan ahli (expert judgement), dan dianalisis kesesuaiannya dengan Undang- Undang Kepemudaan. Berdasarkan domain yang terpilih, ditentukan indikatornya secara tepat. Ketepatan di sini selain merujuk pada studi literatur, didasarkan pula pada ketersediaan data. maka perlu ditetapkan indikator inti dan penunjang. Indikator inti akan menjadi komponen penyusunan rumus Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sendiri dirumuskan secara sederhana agarsecara praktis dapat dihitung dan diketahui indeksnya. Indeks hasil perhitungan dapat menjadi alat analisis untuk mengevaluasi keterlaksanaan pembangunan kepemudaan dalam konteks penyempurnaan program-program kepemudaan mendatang.

Penentuan Tingkatan Status Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan merujuk pada *Human Development Index* (HDI), sebagai tahap akhir pengukuran pembangunan kepemudaan adalah menentukan tingkatan status pembangunan kepemudaan dengan kriteria.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yaitu sebesar 62.20 % sedangkan Nilai Indeks pembangunan pemuda tingkat Nasional yaitu sebesar 89,49%.

Tabel. 3.68 Tingkatan Status Indeks Pembangunan Kepemudaan

No	Tingkat Status	Kriteria
1	Rendah	IPP < 50
2	Menengah Bawah	50 ≤ IPP < 66
3	Menengah Atas	66 ≤ IPP < 80
4	Tinggi	IPP ≥ 80

***Sumber** : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2025*

Adapun perumusan IPP dapat dilakukan sebagai berikut :

Domain Pendidikan

1. Rata-rata lama sekolah umur 16-30 tahun
2. Tingkat melek huruf pemuda, setiap jenis kelamin.

Tingkat partisipasi pemuda

Tingkat partisipasi pemuda (kewirausahaan dan Peran PolitikKepemimpinan/Kepeloporan)

Domain Ketenagakerjaan

1. Tingkat pengangguran pemuda
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda

Domain Kesehatan

1. Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS

Indikator ini secara kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur pembangunankepemudaan dalam kaitannya dengan pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, kesehatan, teknologi infomasi dan komunikasi, kenakalan remaja.

Tabel 3.69 Nilai Aktual Indikator pada Dimensi Pendidikan

NO	Dimensi	Indikator	Nilai Aktual
1	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah usia 16 s.d 30 Tahun	Ijazah tertinggi yang dimiliki +kelas yang sedang diduduki)-1
		Tingkat melek huruf pemuda, setiap jenis kelamin	Jumlah pemuda melek huruf yang bisa baca tulis, dibagi jumlah seluruh pemuda, dikali100.
2	Kesehatan	Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS, setiap jenis kelamin.	Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang HIV/ AIDS, dibagi jumlah pendudukpemuda, dikali 100

NO	Dimensi	Indikator	Nilai Aktual
3	PartisipasiPemuda	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan.	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dibagi jumlah penduduk yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemsyarakatan, dikali 100
4	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran terbuka pemuda	Jumlah pegangguran terbuka pemuda,dibagi jumlah penduduk angkatan kerja, dikali 100
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	

***Sumber** : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2025*

Tabel. 3.70 Analisis Penentuan Indikator Inti Setiap Domain

NO	Domain	Indikator	Persentase	Total Persentase Setiap Domain
1	Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah usia 16 s.d 30 Tahun	86.04	186.02
		Tingkat melek huruf pemuda	99.98	
2	Partisipasi pemuda	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	0,87	0,87
3	Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran terbuka pemuda umur 16 s.d 30 Tahun	6,31	53,98
		Tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda 16 s.d 30 Tahun	47,67	
4	Kesehatan	Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensiftentang HIV/AIDS	1.63	1.63
			Total	**54,85**
			Persentase	**13,71**
Ket. Perumusan Pencapaian Persentase total Setiap Domain di bagi Empat Domain				

***Sumber** : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2025*

a. Domain Pendidikan

Capaian Indikator Rata-rata lama Sekolah usia 16 s.d 30 Tahun capaian sebesar 86.04%. Formulasi penghitungan Ijazah tertinggi yang dimiliki + kelas yang sedang diduduki)-1. Indikator

Tingkat melek huruf pemuda, 99,98%. Formulasi jumlah pemuda melek huruf yang bisa baca tulis, dibagi jumlah seluruh pemuda dikali 100**.** Total Persentase untuk Domain Pendidikan Adalah 186,02%.

b. Partisipasi Pemuda

Capaian Indikator Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan 0,87%. Formulasi penghitungan Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dibagi jumlah penduduk yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemsyarakatan. Total persentasi untuk domain partisipasi pemuda adalah 0,87%.

c. Domain Kesehatan

Capaian Indikator Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS 1.63% formulasi penghitungan Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang HIV/ AIDS, dibagi jumlah penduduk pemuda, dikali 100. Total persentase unutuk domain kesehatan adalah 1,63%.

d. Domain Ketenagakerjaan

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran terbuka pemuda umur 16 s.d 30 Tahun 6,31% dan tingakat partisipasi angka kerja 47,67%, formulasi penghitungan Jumlah pegangguran terbuka pemuda, menurut jenis kelamin ,dibagi jumlah penduduk angkatan kerja, dikali 100. Total persentase untuk dominan ketenagakerjaan adalah 53,98%.

Tabel . 3.71 Total persentase dari masing-masing Domain

D1	D2	D3	D4	Jumlah
186,02	1,63	0,87	53,98	248,81

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)= jumlah total indikator/ jumlah domainIndeks Pembangunan Pemuda (IPP) = 248,81 / 4

= **62,20 %**

Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 69,50%. Indikator Realisasi dan capaian perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar **62.20%,** jadi capaian indikatornya adalah 89,46% diperoleh dari jumlah total indikator dibagi dengan jumlah domain. Sehingga Tingkatan Status Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025 yaitu menengah bawah 50 ≤ IPP < 66.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakanperbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Rincian efisiensi untuk mencapai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditargetkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.72 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			86.000 Orang	85.261 Orang	49.97% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	46.15% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			227 Orang	138 Orang	6.93% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	6.08% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2025	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			86.000 Orang	86.936 Orang	46.19% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	42.05% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			330 Orang	436 Orang	7.85% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8.51% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

iii. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah.

Pada sasaran ini terdapat indikator ***"Rasio Sumber Daya Manusia Kebudayaan Berprestasi"*** yaitu suatu potensi yang memiliki rasio, rasa dan karsa. Potensi tersebutsangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang berprestasi. Dapat dilihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, diperoleh gambaran indikator rasio Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan berprestasi serta Kreatifitas Seni dan Budaya putra/i Kabupaten Karimun dengan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan yaitu dari indikator yang ditargetkan sebesar 30,00 % memperoleh realisasi 52,50%. Realisasi ini merupakan hasil dari jumlah 21 prestasi yang diraih dibagi dengan 40 sanggar yang berada di kabupaten karimun. Hal ini menunjukkan bahwa rasio SDM kebudayaan berprestasi mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian yang diperoleh sebesar 175,00%, untuk Penghargaan/prestasi putra/i Kabupaten Karimun pada Tahun 2024, untuk Penghargaan/prestasi putra/i Kabupaten Karimun pada Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.73 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Rasia SDM Kebudayaan Berprestasi	30,0 %	37,50 %	125,00 %
Rata-Rata Tingkat Capaian					125.00%

Sumber **:** *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, Tahun 2024*

Adapun prestasi yang telah diraih pada tahun pada tahun 2020 sampai dengan pada 2024 sebanyak 21 prestasi. Berikut merupakan tabel data prestasi / penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun.

Tabel 3.74 Data Prestasi/Penghargaan Pelaku Budaya Kabupaten Karimun

NO	TAHUN	JUMLAH PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN
1	2020	4	Penyaji terbaik 1 pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari Tari terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari lelaki terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari Wanita terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
2	2022	3	Juara 1 tingkat Provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama
			Juara 1 Kepri Festival Kepri Berkompang tingkat Provinsi Kepulauan Riau
			Penggagas penetapan bermulanya penadbiran (pemerintahan) kabupaten Karimun.
			Juara 1 tingkat Provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama
3	2023	17	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP
			Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dan penetapan 1 WBTb Indonesia.

			8 Penerima penghargaan kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24 Tahun 2023
4	2024	21	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP
			Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
			Penetapan 1 WBTb Indonesia
			Penerima penghargaan pada kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24
			Penghargaan Kebudayaan Prov. Kepulauan Riau Kategori Pelestari dan/atau Pelaku Seni Musik Kabupaten Karimun An. Loni Jaya Putra
			Juara 2 Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N Thn 2024 di Jakarta
			Juara 3 nasional Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N THN 2024 di Jakarta
			Penetapan "Gasing Berembang" sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tahun 2024

***Sumber** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, 2025*

Adapun beberapa karya seni dan budaya putra/putri dari Kabupaten Karimun pada tahun 2024 yaitu Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP, Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, penetapan 1 WBTb Indonesia, 8 Penerima penghargaan kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24, Penghargaan Kebudayaan Prov. Kepulauan Riau Kategori Pelestari dan/atau Pelaku Seni Musik Kabupaten Karimun An. Loni Jaya Putra, Juara 2 Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N Thn 2024 di Jakarta, Juara 3 nasional Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N THN 2024 di Jakarta, dan Penetapan "Gasing Berembang" sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tahun 2024. Berikut merupakan grafik prestasi/ penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 3.11 Grafik prestasi/ penghargaan pelaku budayaKabupaten Karimun

***Sumber** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, 2025*

Dari grafik diatas dapat kita lihat hanya selama tahun 2021 tidak meraih prestasi atau penghargaan, hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan- kegiatan maupun lomba- lomba baik ditingkat Provinsi hingga Nasional dikarenakan adanya Pandemi COVID-19. Setelah berlalunya pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2024 putra/putri dari Kabupaten Karimun kembali mengikuti berbagai kegiatan maupun lomba sehingga mendapatkan 21 jenis prestasi dan penghargaan.

Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi dapat tercapai optimal, yaitu: Program Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya merupakan sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah (RPJMD) serta untuk mengetahui jumlah karya seni dan Penghargaan /Prestasi putra/putri daerah.

Perbandingan capaian kinerja sasaran (IKU) dengan kinerja keuangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.75 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) Dengan Kinerja Keuangan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2025		%
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34	- Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 90.183.235.228	Rp 69.875.005.190	77.48%
		2.	Rata – Rata Lama Sekolah	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83	- Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 50.000.000 Rp 485.232.000	Rp 50.000.000 Rp 239.231.500	100% 49.30%
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam	1.	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	30 %	52,50 %	175,00	- Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 424.777.100 Rp 70.198.000	Rp 327.032.600	76.99%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2025		%
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
	Pelestarian Nilai Budaya Daerah						- Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Rp 69.148.000	98.50%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Program Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.76 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Program Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 215.924.905.536	Rp 122.694.876.447	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	56.82% / 1 Laporan tepat waktu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 518.345.633	Rp 366.427.919	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	70.69% / 1 Laporan tepat waktu	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 101.373.986	Rp 51.150.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	50.46% / 1 Laporan tepat waktu	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 44.864.551..300	Rp 44.256.163.575	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	98.64% / 1 Laporan tepat waktu	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 26.380.000	Rp 18.700.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	70.89% / 1 Laporan tepat	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Urusan Pemerintahan Daerah						waktu	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.94.939.722	Rp 62.968.013	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	66.32% / 1 Laporan tepat waktu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 145.992.891	Rp 129.299.891	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	88.57% / 1 Laporan tepat waktu	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 50.701.789.001	Rp 49.227.104.222	91,37%	86,43%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	97.09% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 24.987.621.168	Rp 20.510.079.580	90,38%	86,80%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	82.08% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 6.202.028.179	Rp 5.646.472.065	54,55%	51,92%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	91.04% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 1.632.787.738	Rp 1.354.804.800	60%	41,67%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	82.97% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.10.626.000	Rp.9.031.000			100% Realisasi Fisik tepat waktu	84.99% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Rp.20.480.000	Rp.20.293.000			100% Realisasi Fisik tepat waktu	99.09% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 119.999.704	Rp 111.936.767	0.57%		100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	93.28% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	Rp 120.531.812	Rp 49.391.113	35	10	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	40.98% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.338.753.406	Rp 1.172.027.923	8	4	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	87.55% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 390.370.371	Rp 240.237.900	1	15	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	61.54% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 815.896.698	Rp 108.490.500	25	12	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	13.30% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Rp 50.000.000	Rp 34.920.300	35	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	69.84% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 245.420.682.404	Rp 242.375.141.596	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	98.76% / 1 Laporan tepat waktu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 437.681.900	Rp 241.518.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	55.18% / 1 Laporan tepat waktu	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.048.121.000	Rp 377.993.900	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	36.06% / 1 Laporan tepat waktu	
		Penyediaan Jasa Penunjang	Rp 41.207.720.050	Rp 36.993.404.076	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat	89.77% / 1 Laporan	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Urusan Pemerintahan Daerah					waktu	tepat waktu	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 240.631.000	Rp 206.979.400	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	86.02% / 1 Laporan tepat waktu	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 252.730.000	Rp 111.579.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	44.15% / 1 Laporan tepat waktu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 174.515.000	Rp 162.417.000	8 Dokumen	8 Dokumen	100% Dokumen tepat waktu	93.07% / 8 Dokumen tepat waktu	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 49.324.722.705	Rp 30.239.247.880	92,81%	87,86%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	61.31% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 31.359.282.000	Rp 30.470.510.333	92,31%	83,33%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	97.17% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 8.199.843.523	Rp 7.869.309.977	57,34%	52,26%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	95.97% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 1.299.387.000	Rp 1.295.937.000	80,00%	38,46%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	99.33% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	40	167	100% Realisasi Fisik tepat waktu	100% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 485.232.000	Rp 239.231.500	0,57%	9,16%	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	49.30% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Rp 224.777.100	Rp 158.122.600	37	27	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	70.35% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	Rp 0	9	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	0% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp 168.910.000	1	15	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	84.46% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 70.198.000	Rp 69.148.000	27	22	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	98.50% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 0	Rp 0	37	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	0% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	

Efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, dimana total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 348.067.382.145 dengan realisasi anggaran mencapai 70,69% ,sedangkan untuk tahun 2022 total anggaran sebesar Rp 307.265.980.173. dengan realisasi anggaran mencapai 97.29%. Melihat dari jumlah pagu anggaran yang tersedia, disimpulkan bahwa dari total pencapaian realisasi 2023 dapat dikatakan bahwa kurang efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan defisit anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023, dimana total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 39.995.523.682 dengan realisasi anggaran mencapai 92,38% ,sedangkan untuk tahun 2023 total anggaran sebesar Rp 348.067.382.145 dengan realisasi anggaran mencapai 70,69%. Melihat dari jumlah pagu anggaran yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa dari total pencapaian realisasi 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 dan dapat dikatakan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya tercapai.

iv. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup layak baik jasmani, rohani, maupun sosial secara

memadai dan wajar.

Sejalan dengan pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Karimun yaitu Menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan sosial merupakan strategi yang harus dilakukan untuk tercapainya sasaran ke-12 yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2025. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.77 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kesejahtraan Sosial	Persentase PPKS Mandiri	2,59 %	2,35 %	90,73 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN					90,73 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa capaian sasaran mencapai 90,73 % atau bermakna baik sekali dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya.

Indikator yang mendukung sasaran ini adalah **Persentase PPKS Mandiri**. Adapun target yang ditetapkan sebesar 2,59 persen atau sebanyak 866 keluarga PPKS yang mandiri dengan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Desember 2024 sebanyak 33.495 Keluarga. Indikator Persentase PPKS mandiri dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase PPKS mandiri} = = \frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang digraduasidan Penyandang Disabilitas yang mandiri}}{\text{Jumlah keluarga yang masuk dalam DTKS}}$$

Capaian pengukuran kinerja ini diperoleh penerima manfaat yang digraduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang merupakan program dari Kementerian Sosial sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Graduasi merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH dan sembako karena penerima manfaat telah meningkat kesejahteraannya sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kriteria DTKS meliputi: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. DTKS dijadikan sebagai data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Sosial. Namun, dalam perjalanan adanya peralihan database kemiskinan dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

(DTSEN) sesuai INPRES Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan PERMENSOS Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berikut hasil analisis Pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial" Tahun 2025:

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target Sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial" dengan indikator "Persentase PPKS yang Mandiri" Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,59 persen. Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja, realisasi pencapaian adalah 2,35 persen. Dimana jumlah PPKS yang mandiri sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 868 keluarga dengan jumlah DTSEN desil 1 sampai 5 sebanyak 36.936 Keluarga, dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.78 Capaian Kinerja PPKS yang Mandiri

No.	Kecamatan	Realisasi	
		2024	2025
1	Moro	64	74
2	Kundur	63	67
3	Karimun	33	40
4	Meral	32	36
5	Tebing	54	54
6	Buru	60	60
7	Kundur Utara	43	53
8	Kundur Barat	67	99
9	Durai	173	173
10	Meral Barat	48	54
11	Ungar	73	75
12	Belat	45	73
13	Selat Gelam	6	6
14	Sugie Besar	-	4
	JUMLAH	**761**	**868**

Tabel 3.79 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Karimun

No.	Kecamatan	Realisasi	
		2024 (per Des)	2025 (per Des)
1	Moro	2,018	2,227
2	Kundur	3,505	4,169
3	Karimun	3,486	4,071
4	Meral	4,686	5,104
5	Tebing	3,056	3,245
6	Buru	2,810	2,755
7	Kundur Utara	1,405	1,846
8	Kundur Barat	3,412	3,584

No.	Kecamatan	Realisasi	
		2024 (per Des)	2025 (per Des)
9	Durai	1,465	1,586
10	Meral Barat	2,403	2,289
11	Ungar	778	1,150
12	Belat	1,753	1,802
13	Selat Gelam	1,029	1,033
14	Sugie Besar	1,689	2,075
	J U M L A H	**33,495**	**36,936**

Meskipun Pencapaian Tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan PPKS yang mandiri. Dimana sampai dengan Tahun 2025, ada sebanyak 868 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang digraduasi. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian adalah:

1. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar pelaksanaan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu;
2. Melakukan *ground check* DTSEN guna memperoleh data yang akurat;
3. Pembinaan dan penguatan KPM PKH melalui *Family Development Session* (FDS) agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan memotivasi KPM untuk graduasi;
4. Peningkatan kapasitas pendamping sosial dalam pendampingan dan pembinaan KPM.

- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Untuk mengukur progres pencapaian kinerja indikator ini dari tahun ke tahun maka perlu untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan dengan Tahun 2021 sampai dengan 2024, realisasi PPKS yang mandiri Tahun 2025 mengalami peningkatan. Dimana realisasi Tahun 2024 sebesar 2,27% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 761 keluarga, sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar 2,35% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 868 keluarga.

- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Untuk mengukur progres pencapaian kinerja indikator ini juga perlu untuk membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target RPJMD Kabupaten Karimun yang

ditetapkan untuk Tahun 2025 dan target akhir periode RPJMD Tahun 2026. Berikut disampaikan perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah :

Tabel 3.80 Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	2,35 %	2,86%	3,03%

Jika melihat perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka realisasi kinerja belum mencapai target jangka menengah. Hal ini dikarenakan perluasan KPM PKH dan Program Sembako/BPNT serta jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selalu mengalami perubahan.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional tidak dilakukan dikarenakan indikator kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” tidak ada di level regional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta upaya perbaikan kedepan**

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja diatas disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator ini belum dapat dikatakan berhasil karena realisasi kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah:

1. Adanya peralihan database kemiskinan dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada peningkatan jumlah keluarga yang menjadi sasaran;
2. Data penerima bantuan tidak dapat diakses karena aplikasi SIKS_MA sehingga menghambat dalam menemukan sasaran graduasi;
3. Tantangan dalam mengubah pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi lebih mandiri;
4. Faktor ekonomi KPM;
5. Jumlah SDM Pendamping yang terbatas dapat menyebabkan pendampingan dan pembinaan KPM tidak optimal.

Adapun upaya perbaikan kedepan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan adalah:

1. Optimalisasi ground check guna mendapatkan data yang akurat;
2. Penguatan pendampingan dan program pemberdayaan yang sistematis;
3. Sinergi dengan pemangku kepentingan untuk pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan;
4. Peningkatan kompetensi pendamping sosial dalam hal pelatihan dan sertifikasi;
5. Mengoptimalkan pendamping sosial yang terbatas guna meningkatkan pembinaan bagi KPM;

6. Melakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Rincian analisis efisiensi sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.81 Analisis Efisiensi Sasaran 12

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	489,704,000	484,534,100	86.000 Orang	85.261 Orang	49.97% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	46.15% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	342,959,600	212,226,400	227 Orang	138 Orang	6.93% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	6.08% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2025	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	286,163,000	133,872,936	86.000 Orang	86.936 Orang	46.19% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	42.05% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	598,012,600	419,825,673	330 Orang	436 Orang	7.85% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8.51% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Efisiensi penggunaan sumber daya (biaya) dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia dengan realisasinya, dimana dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dilihat dari outcome, pencapaian realisasi 2025 lebih tinggi dari Tahun 2024. Upaya efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai yaitu:

1. Melibatkan pilar-pilar sosial Pendamping PKH dan TKSK yang merupakan mitra kerja dalam fasilitasi penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT, sehingga pelaksanaan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Keluarga Penerima Manfaat melalui pendampingan dan pembinaan sehingga KPM lebih terampil sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan dengan pihak terkait (HIMBARA/PT. POS).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dilakukan melalui 2 (dua) Program antara lain Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran program pendukung sebesar Rp. 884.175.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 553.698.609,- atau 62,62% yang bermakna terjadi efiensi anggaran sebesar 37,38%.

v. Sasaran Strategis Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan

ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan Ketenagakerjaan pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu bagaimana membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga memungkinkan penduduk memperoleh penghasilan yang baik dan penghidupan yang layak, seperti yang telah diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktivitas.

Upaya memperluas lapangan kerja dan produktivitas merupakan kebijaksanaan yang harus ditempuh oleh pemerintah, sebagai jawaban bagi upaya mengatasi **pengangguran**. Seiring dengan itu juga perlu didorong oleh upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan pendapatan maupun produktivitas.

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan pada peningkatan kemandirian,kewirausahaan, etos kerja dan disiplin, produktivitas, kemampuan belajar, kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan berusaha, baik di dalam maupun diluar negeri. Untuk itu perlu didukung dengan upaya keterpaduan kebijakan termasuk didalamnya pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja.

Pembangunan Ketenagakerjaan pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu bagaimana membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga memungkinkan penduduk memperoleh penghasilan yang baik dan penghidupan yang layak, seperti yang telah diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktivitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023 menetapkan Sasaran yakni : **Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah** dengan indikator "**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)".** Adapun capaian dari indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.61 berikutini:

Tabel 3.82 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan

1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.60	6.31	104,39	Penghitungan Capaian : target [kali] 2 [dikurang] realisasi [dibagi] target [dikali] 100 persen

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025*

Berdasarkan data diatas , sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan satuan persentase. Pada tahun pelaporan, target TPT ditetapkan sebesar 6,60 %, sedangkar realisasi yang dicapai Adalah 6,31%. Realisasi ini menjukan bahwa tingkatan pengangguran terbuka lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja yang dicapai dapat dikategorikan melampaui target.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, diperoleh nilai capaian sebesar 104,39% yang menunjukkan bahwa sasaran kinerja telah tercapai dengan sangat baik.

Perolehan realisasi tabel diatas bahwa jumlah pengguran terbuka sebanyak 7.414 orang, sementara jumlah angkatan kerja sebanyak 134.383 orang, maka terealisasi sebesar 5,52 persen, atau sebagaimana rumus:

$$\textbf{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} = \frac{\mathbf{7.414}}{\mathbf{134.383}} \times 100\% = \mathbf{5,52\ \%}$$

Dengan demikian, menurunnya tingkat pengguran terbuka dibandikan dengan target telah ditetapkan menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja serta perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah. Hal ini mengidikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi produktif telah memberikan kontribusi posotof terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Perolehan persentase tersebut diatas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.83 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Karimun Agustus 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	101.928	96.838	198.766
I. Angkatan Kerja	84.128	48.671	132.799
1. Bekerja	77.782	46.637	124.419
2. Pengangguran Terbuka	6.346	2.034	8.380
II. Bukan Angkatan Kerja	17.800	48.167	62.526
1. Sekolah			
2. Mengurus Rumah tangga			
3. Lainnya			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,54	4,18	**6,31**

Sumber : *BPS Kabupaten Karimun 2025*

Berdasarkan data ketanagakerjaan tersebut, jumalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 198.766 orang, yang terdiri dari 101.928 laki-laki dar 96.838 perempuan. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 132.700 orang, dengan rincian 84.128 dari 48.671 perempuan. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang berkerja sebanyak 124.419 orang, yakni 77.782 laki – laki dan 46.637 perempuan serta pengangguran terbuak sebanyak 8.380 orang yang terdiri dari 6.346 laki-laki dan 2.034 perempuan.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja tercatatan sebanyak 62.526 orang, yang terdiri dari 17.800 laki – laki dan 48.167 perempuan. Kelompok ini umumnya mencakup penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan kegitan lainnya di luar aktiitas ekonomi. Berdasarkan data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,31%, dengan rincian 7,54% pada laki – laki dan 4,18% pada perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagaian besar penduduk usia kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi, meskipun masih terdapat sejumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi perhatian dalam upya peningkatankesempatan kerja di daerah.

Perbandingan Realisasi Capai Tahun 2022 (*base line*) sampai dengan Tahun 2025 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 (baseline) sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2022	2023		2024		2024	
				Realisasi	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,87	6,02	108,79	5.52	122,25	6,31	104,39

Sumber *: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025*

Pada tabel diatas bahwa sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan satuan persentase. Perkembangan capaian indikator ini selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relative fluktuatif namun masih berada pada ketegori melampaui target. Padat haun 2022 tingkata pengganguran terbuka tercatat sebesar 6,02% dengan capaian kinerja 108,79% yang menunjukkan bahwa realisasi lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 6,87%. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi TPT mengalami penurunan menjadi 5,52% dengan capaian kinerja 122,25% yang mengindikasikan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah. Sementara itu pada tahun 2024, Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebessr 6,31% dengan capaian

kinerja 104,39%. Meskipun terjadi sedikit peningkatan angka penganguran dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut masih lebih baik dibandinkan tahun sebelumnya, namun ralisasi tersebut masih lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja tetap berada diatas 100 persen. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa Upaya pemerintah daerah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatna kualitas tenga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian Tingkat pengangguran terbuka di derah, meskipun masih diperlukan Upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas penyerapan tenaga kerja di masa mendatang , atau bisa dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022-2025

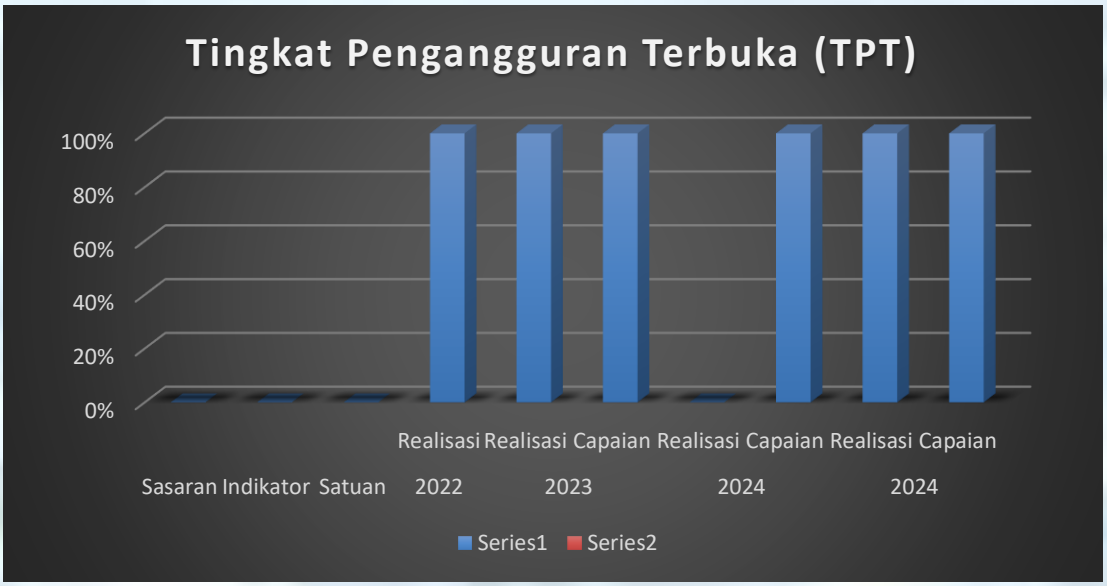

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2024

Pada gambar diatas bahwa pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 6,31 persen dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab Pengangguran Meningkat

Akibat pengangguran mencakup penurunan drastis tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, dan penurunan daya beli yang memperlambat perekonomian. Pengangguran memicu dampak negatif seperti peningkatan kriminalitas, beban psikologis (stres/depresi), penurunan keterampilan, hingga potensi ketidakstabilan sosial-politik akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah. Beberapa faktor yang mendorong menurunnya Tingkat pengangguran terbuka sehingga capaian kinerja dapat melampaui target antara lain :

a. Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, terutama pada sektor perdagangan, jasa, perikanan dan usaha mikro yang mampu menyerap tenaga kerja lokal;

b. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga meningkatkan keterampilan dan daya saing pencari kerja;
c. Peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang membuka peluang kerja baru bagi Masyarakat;
d. Peran sektor informasi dan UMKM yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja yang belum terserap di sektor formal.

Meskipun capaian masih melampaui target, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka TPT mengalami fluktuasi, antara lain :

a. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja ;
b. Pertumbuhan jumlah Angkatan kerja baru setiap tahun, khususnya lulusan sekolah dan perguruan tinggi.
c. Terbatasnya kesempatan kerja formal diabandingkan dengan jumlah pencari kerja yang tersedia;

Secara keseluruhan, pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan terganggunya pembangunan nasional dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Solusi

Mengatasi pengangguran memerlukan pendekatan multi-sektor, melibatkan peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, pengembangan UMKM melalui modal dan pendampingan, penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung seperti program padat karya dan insentif kerja, di samping peran individu untuk terus belajar dan membangun wirausaha.

Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

a. Menyelenggarakan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri;
b. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui kegiatan bursa keraja dan layanan informasi pasar kerja;
c. Mendorong pengembangan kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja;
d. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal;
e. Mendorong investasi daerah yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat terus ditekan serta mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Target Perjanjian Kinerja dengan Target RPJMD

Untuk Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target di RPJMD Tahun 2025 sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3. 85 Target Perjanjian Kinerja dengan Target di RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
				PK	RPJMD

1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,60	6,60

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2026*

Berdasarkan data tersebut, sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan satuan persentase. Target indikator ini telah ditetapkan baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dengan nilai yang sama yaitu sebesar 6,60 persen.

Kesamaan target antara dokumen Perjanjian Kinerja dan RPJMD menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan Pembangunan daerah dengan komitmen kerja perangkat daerah dalam menurunkan Tingkat pengangguran. Penetapan target tersebut mencerminkan Upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan Tingkat pengangguran melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif. Dengan demikian, target TPT sebesar 6,60 persen menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program ketenaga kerjaan di daerah, sehingga diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Target Perjanjian Kinerja dengan Target PKP

Berkenaan dengan perbandingan antara Target Perjanjian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.86 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerin (PKP)Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	PK		Target PKP	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,60	6,02	5,3 – 6,0	5,45

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2026*

Berdasarkan data diatas sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan satuan persentase. Dalam

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan target TPT sebesar 6,60 persen dengan realisasi sebesar 6,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Tingkat pengangguran terbuka berada lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga dapat diikatkan bahwa kinerja pada indikator ini telah tercapai dengan baik.

Sementara itu, pada Target PKP ditetapkan rentang target sebesar 5,3-6,0 persen, dengan realisasi sebesar 5,45 persen. Capaian ini masih berada dalam rentang target yang telah ditetapkan yang berarti bahwa Upaya pemerintah daerah dalam menekan Tingkat pengangguran terbuka telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang direncanakan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja serta pengembangan sektor ekonomi produktif telah memberikan kontribusi terhadap penurunan Tingkat pengangguran di daerah. Ke depan, Upaya tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan serta penciptaan lapangan kerja baru guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan penurunan Tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun.

Sasaran strategis tersebut diatas didukung oleh Program dan Kegiatan dengan anggaran serta realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.87 Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah				
No	**Progrm**	**Target Anggaran**	**Realisasi Anggaran**	**Persentase Anggaran (%)**
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,621,730,000	1,437,737,300	88,65
2	Program PenempatanTenaga Kerja	380,825,200	270,722,700	71,09
3	Program HubunganIndustrial	278,451,000	225,006,800	80,81
	TOTAL	2,281,006,200	1,933,466,800	84,76

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2026*

Berdasarkan data tersebut, dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah, pemerintah daerah melaksanakan beberapa program utama yang didukung oleh alokasi anggaran pada tahun berjalan. Secara keseluruhan, total target anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 2.281.006.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.933.466.800 atau 84,76 persen dari total anggaran yang tersedia.

Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga

Kerja, dengan target anggaran sebesar Rp. .621.730.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.437.737.300 atau 88,65 persen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu bersaing di dunia kerja serta mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah. Selanjutnya, Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki target anggaran sebesar Rp. 380.825.200 dengan realisasi sebesar Rp. 270.722.700 atau 71,09 persen. Program ini difokuskan pada upaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha atau industri melalui kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan penyediaan informasi pasar kerja. Ada pun program hubungan industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 278.451.000 dengan realisasi sebesar Rp. 225.006.800 atau 80,81 persen. Program ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar pekerja dan pengusaha melalui pembinaan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan kerja, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran sebesar 84,76 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program yang mendukung perluasan kesempatan kerja telah berjalan degan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di daerah.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian KabupatenKarimun dapat kami sajikan sebagaimana tabel 3.81 berikut :

Tabel 3.88 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2022	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.067.484.000	4.370.290.516	481 Orang Peserta	433 Orang Peserta	20 Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	17 persen Jlh tenaga kerrja yg mengikuti pelatihan 433 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 2463 orang [dikali] 100 persen	Efisiensi penggunaan sumber daya jika dibandingkan pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia pada kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi lebih besar anggaran tahun 2022 dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya perhatian pemerintah daerah untuk memberikan anggaran pelatihan sehingga realissi output sebanyak 433 orang sedangkan pada tahun 2023 realisasi output sebanyak 109 orang dengan
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	42.000.000	40.461.700	1 Laporan	1 Laporan	47,63% Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	47,22% Jlh Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 34 Perusahaan [dibagi} jumlah perusahaan 72 Perusahaan {dikali] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	36.000.000	35.776.500	1 Laporan	1 Laporan	100 Jumlah Lowongan yang tersedia	133 Jumlah Lowongan yang tersedia	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi	49.584.000	49.507.126	1 Laporan	1 Laporan	30 Orang Izin Perpanjangan TKA	22 Orang Izin Perpanjanagn TKA	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota							efisiensi sumber daya terjadi di tahun 2022 yang mana lebih banyak realisasi outputnya. 2. Kegiatan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota efesiensi sumber daya ada di tahun 2022 karena persentase realisasi outputnya lebih tinggi disbanding tahun 2023. 3. Untuk kegiatan pengelolaan Informasi pasar kerja efesiensi penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih besar dibanding pada tahun 2022 yang disesuaikan dengan meningkatnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan juga data BPS menunjukkan ada penurunan tingkat pengangguran terbuka antara tahun 2022 dan 2023. 4. Untuk kegiatan penerbitan IMTA yang bertujuan untuk menambah retribusi daerah sehingga efisiensi sumber daya untuk tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 dengan anggaran yang diperoleh dari data-data TKA. Untuk Program Hubungan Industrial terdapat 2 kegiatan dan pada tahun 2023 lebih besar efesiensi sumber daya dbanding pada tahun 2022 karena dengan anggaran kecil tapi bisa menaikkan persentase
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	265.434.000	264.923.564	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. Persentase Perusahaan yang telah memiliki PP	21,34% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 35 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 179 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							85% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	148,78% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 61 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 41 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100% 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
2023	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,445,100,249,-	1,267,690,409,-	119 Orang Peserta	109 Orang Peserta	30 Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	49,32 persen Jumlah peserta yg ikut pelatihan 109 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 221 orang [dikali] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	49,000,000,-	40,861,623,-	1 Laporan	1 Laporan	45 Persen Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	40 Persen Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi} jumlah perusahaan 40 Perusahaan {dikali] 100 persen	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	244,999,508	240,267,090	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	100 Persen Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbassis wirausaha baru (TKM,TTG) 60 orang [dibagi] Jumlah yang mendaftar pelatihan berbasis wirausahabaru (TKM,TTG) 60 Orang [dikali] 100 persen	realissi outcomenya yakni sebesar 33,33%
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	51,199,357,-	40,260,139,-	1 Laporan	1 Laporan	150 Jumlah Lowongan yang tersedia	215 Jumlah Lowongan yang tersedia	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	51,188,367	41,717,183	1 Laporan	1 Laporan	150 Orang Izin perpanjangan TKA	102 Orang Izin perpanjangan TKA	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	321,249,665	185,907,513	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. persentase perushaan yang telah memiliki PP	33,33% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 47 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 141 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							95% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	137,04% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 74 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 5 4 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100 % 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
2024	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	1,587,223,000	1,434,806,131	136 Orang Peserta	136 Orang Peserta	11.50 % Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10, 57 % Jumlah peserta yg ikut pelatihan 136 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 1.287 orang [dikali] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	7,992,200	3,714,893-	1 Laporan	1 Laporan	42 % Persentase perusahaan yang menerapkan prog	47,06 % Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Kabupaten / Kota					peningkatan produktivitas	Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi} jumlah perusahaan 40 Perusahaan {dikali] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	103,900,000-	102,324,923	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	0 Efesiensi Anggaran	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10,332,000	10,317,000	1 Laporan	1 Laporan	250 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	308 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	9,422,000	9,422,000	1 Laporan	1 Laporan	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	
	Program Hubungan Industrial	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota*	*254,128,520,-*	*225,516,576*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*16 % Persentase perushaan yang telah memiliki PP*	*14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	*100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*153,952,000,-*	*140,070,000,-*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit*	*71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselsaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)*	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	*1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Lapor tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen*	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*254,128,520,-*	*225,516,576*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*16 % Persentase perushaan yang telah memiliki PP*	*14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
							100 % Persentase perusahaan	*100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada*	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
							telah memiliki PKB.	*tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*153,952,000, -*	*140,070,000, -*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit*	*71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselsaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)*	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	*1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Lapor tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen*	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	*254,128,520, -*	*225,516,576*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*16 % Persentase perushaan yang telah memiliki PP*	*14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	*100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*153,952,000, -*	*140,070,000, -*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit*	*71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselsaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)*	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	*1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Lapor tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen*	
2025	*Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja*	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*1,599,392,000*	*1,437,737,300*	*145 Orang Peserta*	*135 Orang Peserta*	*25 % Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi*	*50,37 % Jumlah peserta yg ikut pelatihan 135 orang [dibagi] jlh yg mendaftar orang [dikali] 100 persen*	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	*22.338.000,*	*0 (Efesiensi Anggaran)*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*42 % Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas*	*41,46 % Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 17 Perusahaan [dibagi]*	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Kabupaten / Kota						*jumlah perusahaan 41 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	*Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota*	*156,564,700 -*	*112,574,700*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100 % Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha*	*100% Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Pelatihan berbasis Wirausaha 35 orang [dibagi] jumlah tenaga kerja yang mendaftar 35 orang [dikali] 100 persen*	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*167,550,000*	*158,148,000*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*351 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan*	*351 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan*	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	*56,710,500*	*0 (Efesiensi Anggaran)*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*102 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri*	*102 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri*	
	Program Hubungan Industrial	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota*	*218,451,000*	*165,011,800*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.*	*53,72 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 101 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 188 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	*53,72 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 101 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 188 Perusahaan [dikali] 100 persen*	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*60,000,000*	*59,995,000*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*100 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit*	*82,35 % Jumlah Perselisihan yang diselsaikan melalui perundingan bipartit 14 Kasus [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat 17 Kasus [dikali] 100 persen) 82,35%*	
							2,40 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	*2,45 % Jumlah perusahaan yang berselisih (17 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Lapor tahun 2025 (695 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,45 persen*	
Total 2025			2,281,006,200	1,933,466,800					

***Sumber** : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025*

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui 3(tiga) program yakni:

1. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sdm tenaga kerja yang berkualitas dengan memiliki keahlian sertifkat yang berkompetensi sehingga siap bersaing di pasar kerja serta kepemilikan sertifikat tersebut maka produktivitas pada perusahaan tersebut akan meningkat.

2. Program Penempatan Tenagakerja :

   Program ini bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi atau yang sesuai dengan keahlian /lowongan yang di buka oleh perusahaan-perusahaan, dengan dibukanya lowongan pekerjaan oleh perusahaanmelalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, para pencakerakan mengikuti kesempatan kerja pada perusahaan tersebut.

3. Program Hubungan Industrial :

   Program ini bertujuan menjalin hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dengan memberikan bimbingan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, dengan demikian kasus-kasus perselisihan tidak begitu berdampak sehingga keadaan pada perusahaan tersebut tetap kondusif.

vi. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan

Sarana Terpenuhinya Kebutuhan Pangan merupakan salah satu prioritas strategi dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan jumlah, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keberagaman, keamanan serta berkelanjutan dalam pemenuhan konsumsi masyarakat. Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, penguatan distribusi dana aksesibilitas serta pengendalian stabilitas harga pangan. Selain itu pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian, perikanan dan pangan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara merata diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurut tingkat kerawanan pangan serta mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tabel 3.89 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketahanan Pangan	77,18	63,34	82.07%
Rata-Rata Tingkat Capaian				**82.07 %**

Sumber **:** *Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Tahun 2025*

Pencapaian sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 77,18 namun realisasi yang dicapai adalah 63,34, sehingga tingkat capaianya kinerja berada pada 82,07. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kesenjangan

antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian. Nilai capaian sebesar 82,07% mengindikasi bahwa sebagai besar aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan telah terpenuhi, namun belum optimal.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum tercapainya target secara penuh antara lain keterbatasan produksi pangan lokal, distribusi pangan yang belum merata serta fluktuasi harga bahan pangan di pasar. Diperlukan langkah strategis yang lebih terfokus seperti peningkatan produksi dan diversifikasi pangan, pengautan sistem distribusi serta pengendalian harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Rata – rata tingkat capaian sebesar 82,07 mencerminkan kinerja yang cukup baik, namun tetap memerlukan upaya perbaikan berkelanjutan agar target ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dimasa mendatang.

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Karimun dihitung berdasarkan Indeks ketersediaan, indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan. Rumus perhitungan ketahanan pangan adalah:

$$\frac{\textbf{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\textbf{Jumlah penduduk}} X\,100$$

Indeks Ketersediaan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kecukupan pasokan pangan bagi masyarakat, baik yang bersumber dari produksi lokal maupun pasukan dari luar daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan penanganan yang cukup, aman dan berkelanjutan.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki karakteristik khusus diaman ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan pertanian serta kondisi geografis yang tidak sepenuhnya mendukung produksi pangan dalam skala besar. Oleh karena itu, stabilitas ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi, konektivitas antara wilayah serta kondisi cuaca dan transportasi. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan indek ketersediaan pangan dilakukan melalui berbagi strategi antara lain peningkatan produk pangan lokal secara terbatas seperti hortikultura dan perikanan, penguatan cadangan pangan pemerintah serta menjamin kelancaran distribusi bahan pangan pokok. Selain itu, kerja sama antara daerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan pangan tetap stabil. Nilai indeks ketersediaan pangan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin baik kemampuan daerah dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas sektor dan keberlanjutan program untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Karimun tetap terjaga.

Indeks keterjangkauan Pangan merupakan indikator yang mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan secara ekonomi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan , daya beli serta stabilitas harga bahan pangan. Indeks ini menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur ketahanan pangan khususnya dari sisi aksebilitas. Di Kabupaten Karimun keterjangkauan pangan masih menjadi tantangan terutama karena fluktulasi harga bahan pangan yang dipengaruhi oleh ketergantungan pasaikan dari luar daerah. Sebagai wilayah kepulauan biaya distribusi dan transportasi yang relatif tinggi turut berdampak pada

harga jual pangan di tingkat konsumen, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Upaya peningkatan indeks keterjangkauan pangan dilakukan melalui berbagai kebijakan antara lain pengendalian inflasi daerah, pelaksanaan operasi pasar serta penguatan kerja sama antara daerah dalam penyediaan bahan pangan. Program perlindungan sosial juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Secara umum semakin tinggi nilai indeks keterjangkauan menunjukkan semakin baik kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu, diperlukan langkah berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar akses terhadap pangan dapat semain merata dan terjangkau.

Indeks Pemanfaatan Pangan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana penganan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Indeks ini berkaitan erat dengan aspek konsumen pangan, polah makan, kualitas gizi sera kondisi kesehatan dan senitasi masyarakat. Di Kabupaten Karimun, pemanfaatan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dan keterjangkauan tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pola konsumen yang beragam. Masih terdapat tantangan dalam hal pemenuhan gizi yang optimal, seperti pola konsumsi yang belum beragam, ketergantungan pada jenis pangan tertentu serta kesadaran akan penting gizi seimbang yag belum merata. Upaya peningkatan indeks pemanfaatan pangan dilakukan melalui berbagai program antara lain edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), Penanganan Stanting, peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih serta penguatan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, intervensi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan bahwa pangan dikonsumsi benar – benar memberikan manfaat gizi yang optimal. Secara umum, semakin tinggi nilai indeks pemanfaatan pangan menunjukkan semakin baik kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintahan daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat intervensi gizi guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.

- **Membandingakan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar 77,18, realisasi yang berhasil dicapai adalah 63,34 dengan tingakat capaian sebesar 82,07%.

Perbandingan ini mengindikasi bahwa kinerja dalam upaya mewujdkan katahanan pangan masyarakat telah mencapai kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah mencapai kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi menunjukkan masih adanya tentang yang perlu diatasi terutama dalam memperkuat aspek ketersedian, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Belum optimalnya capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan produksi pangan lokal, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta fluktuasi harga pangan yang berdampak pada daya beli masyarakat, selain itu, aspek distribusi dan kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja. Secara keseluruhan,

dengan rata – rata capaian sebesar 82,07%, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan melalui strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**
- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**
- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta upaya perbaikan kedepan**

Capaian indeks ketahanan pangan menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ketahanana pangan daerah berada pada kategori cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kombinasi faktor pendukung dan penghambatan yang memengaruhi tingkat keberhasilan indikator tersebut.

Dari sisi keberhasilan, pencapaian indeks didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan melalui kelancaran distribusi, pengendalian inflasi daerah serta pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Intervensi tersebut berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan pangan dan mengurangi risiko kerawanan pagan khususnya bagi kelompok rentan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian belum optimal. Keterbatasan produksi pangan lokal menjadi salah satu kendala utama, terutama pada daerah dengan karekteristik kepulauan yang bergantung pada pasikan dari luar wilayah. Selain itu, flukturasi harga pagan akibat biaya distribusi dan transportasi yang tinggi berdampak pada daya beli masyarakat. Dari sisi pemanfaatan, masih ditemukan pola konsumsi yang belum beragam dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang yang turut memengaruhi kualitas ketahanan pangan secara keseluruhan.

Adapun jika terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh efektivitas program pengendalian harga, peningkatan koordinasi antara perangkat daerah serta penguatan kerja sama antar wilayah dalam pemenuhan pasokan pangan. Sebaiknya, apa bila terjadi penurunan, hal ini dapat disebabkan oleh tekanan inflasi pangan, gangguan distribusi serta faktor eksternal sepersi kondisi cuaca dan dinamik ekonomi. Untuk perbaikan kedepan diperlukan langkah strategi yang lebih terintegrasi antara lain meningkatkan produksi pangan lokal melalui optimalisasi potensi wilayah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah serta meningkatkan kerja sama antara daerah dalam menjamin ketersediaan pasokan. Selain itu, penguatan sistem distribusi dan pengendalian harga melalui operasi pasar perlu terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan pangan. Di sisi lain, peningkatan edukasi masyarakat terkait konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta investasi perbaikan gizi menjadi penting dalam meningkatkan aspek pemanfaatan pangan.

Ada beberapa penyebab keberhasilan di antaranya :

a. Kelancaran distribusi pangan antara wilayah;
b. Pengendalian inflasi daerah yang relatif efektif;
c. Pelaksanaan operasional pasar dan stabilitas harga
d. Program bantuan sosial yang menjaga daya beli masyarakat
e. Adanya kerja sama antara daerah dalam pemenuhan pasokan pangan

Penyebab kegagalan/ belum optimal

a. Keterbatasan produk pangan lokal;
b. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah;
c. Biaya distribusi dan transportasi yang tinggi (wilayah kepulauan)
d. Fluktuasi harga pangan yang mempengaruhi daya beli
e. Pola konsumen masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang
f. Masih adanya permasalahan gizi.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaiaan Indeks ketahanan Pangan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang optimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap tetapi juga dari kemampuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasaran serta dukungan kelembagaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam kontek pembangunan ketahanan pangan, efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan efektivitas intervensi pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merancang program yang tetap sasaran, terintegrasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahuai sejauh mana tingkat efisiensi pelaksanaan program serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya ke depan. Dengan demikian hasil analisis efisiensi ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian indeks ketahanan pangan. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.90 Terpenuhinya Kebutuhan Ketahanan Pangan

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2025	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.200.000.000,-	800.000.000,-	1 Laporan	1 Laporan	25.382 Ton target ketersediaan banhan pokok (beras) di Kabupaten Karimun	dan realisasi target sebesar 34.720 Ton atau 97,39 % dari target yang ditetapkan	**Efisensi dari kegiatan ini sebesar 66,66 %**
Total 2025			1.200.000.000,-	800.000.000,-					

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja indeks ketahanan pangan tidak terlepas dari peran berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Secara umum, terdapat sejumlah program yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan capai indikator ini, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal sehingga memengaruhi belum tercapai target secara penuh. Dari sisi keberhasilan, program stabilitas pasokan dan harga pangan melalui kegiatan operasi pasar dan pemantauan harga terbukti mampu menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, penguatan kerja sama antara daerah dalam penyediaan pasokan pangan juga berperan penting dalam menjamin ketersedian, khususnya bagi daerah yang memiliki terbatasan produk lokal. Pengelolaan cadangan pagan pemerintah daerah turut memberikan kontribusi sebagai buff stock dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga. Di sisi lain, program bantuan sosial pangan membantu menjaga daya beli masyarakat rentan, sementara pengembangan sektor perikanan dan hortikultural mulai m emberikan tambahan pasokan pangan lokal. Program edukasi sonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian indek ketahan pangan. Program peningkatan produksi pangan lokal masih menghadapi kendala keterbatasan lahan, teknologi dan sasaran prasarana sehingga kontribusinya terhadap ketersediaan pangan belum signifikan. Selain itu, sistem distribusi dan logistik pangan masih belum efisien, terutama pada wilayah dengan karekteristik kepulauan yang menyebabkan tingginya biaya transportasi dan berdampak pada harga pangan. Program pengendalian inflasi pangan juga belum sepenuhnya mampu menahan fluktulasi harga bahan pangan strategis. Di sisi pemanfaatan, implementasi program diverifikasi pagan dan investasi gizi belum merata, sehingga pola konsumsi masyarakat masih cenderung bergantung pada jenis pangan tertentu dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang.

Dengan demikian, keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indeks ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program pada ketiga aspek utama tersebut. Oleh karena itu, kedepan diperlukan penguatan dan penyempurnaan program / kegiatan secara terintegrasi, terutama dalam meningkatkan produksi pangan lokal, memperbaiki sistem distribusi, menjaga stabilitas harga serta memperluas edukasi dan intervensi gizi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan capaian indeks ketahanan pangan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

vii. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa

Indeks desa merupakan alat ukur untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia secara komprehensif. Indeks ini menggabungkan data dari berbagai aspek pembangunan desa seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa. Sejak 2025, pemerintah Indonesia mulai menerapkan Indeks Desa sebagai indikator tunggal, yang menggabungkan konsep dari Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Indeks Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Melalui Indeks Desa, pemerintah dapat menyalurkan sumber daya secara tepat guna serta memantau kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya,ekonomi, dan politik. Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Tabel 3.91 Capaian Indikator Indeks Desa

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemandirian Desa			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
Indeks Desa	69,35	74,18	106,96

Capaian indikator kinerja Indeks Desa dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningktnya kemandirian Desa menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun pelaporan, target Indeks Desa ditetapkan sebesar 69,35, sedangkan realisasinya mencapai 74,18. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 106,96 persen yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian desa, baik dasi aspek

sosial, ekonomi maupun lingkungan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan desa serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang didukung oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan afektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa yang semakin terarah dan berbasis kebutuhan masyarkat. Meskipun demikian, upaya peningkatan kemandirian desa tetap perlu dilanjutkan secara berkelanjutan khususnya dalam memperkuat daya saiang ekonomi desa dan meningkatakkan kualitas sumber daya manusia ditingkat desa. Dengancapaian yang melampaui target ini, diharapkan desa-desa semakin mampu menjadi subjek pembangunan yang mandidi dan berdaya saing serta berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ada pun tujuan pelaksanaan pendataan Indeks Desa (ID) Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Mengukur status dena, menentukan status desa mulai dari sangat tertinggal hingga mandiri untuk mengukur capaian pembangunan;
2. Dasar penyusunan kebijakan.
   Menentukan prioritas pembangunan Menjadikan acuan untuk menentukan target dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing - masing desa;
3. Memperkuat analisis
   Memperkuat hasil analisis pembangunan dengan menggabungkan dengan indeks lainnya seperti indeks keadilan gender , demokrasi dan kapasitas tata kelola pemerintahan.
4. Memfasilitasi alokasi anggaran
   Menjadi bahan advokasi untuk mendorong alokasi anggaran dan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian desa.
5. Menyelaraskan pembangunan
   Mendukung penyelarasan pembangunan desa dengan visi Indonesia Emas 2045.

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 – 5.

Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) dan nilai indeks 100,00% (seratus persen), dengan penghitungan scoring setiap indikator ditentukan sebagai berikut: Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1. Adapun rumus untuk perhitungan Indeks Desa (ID) Adalah sebagai berikut:

$$Y = \frac{Total\ Skor\ X}{Nilai\ maksimum\ Skor\ Indek\ Desa}$$

Keterangan:

Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar,total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa

X = Indikator X

Penentuan Status Indeks Desa

Klasifikasi Status Desa dittapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : 0% ≤ ID ≤ 49,48%
2. Desa Tertinggal : 49,49% ≤ ID ≤ 57,38%
3. Desa Berkembang : 57,39% ≤ ID ≤ 69,34%
4. Desa Maju : 69,35% ≤ ID ≤ 79,62%
5. Desa Mandii : 79,63% ≤ ID ≤ 100%

Klasifikasi status desa ditetapkan berdasarkan nilai Indeks Desa (ID) dengan ambang batas tertentu yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian desa. Desa dengan nilai indeks antara 0% sampai dengan 49,48% dikategorikan sebagai Desa Sangat Tertinggal, yang mencerminkan kondisi desa dengan tingkat perkembangan yang masih sangat rendah. Selanjutnya, desa dengan nilai antara 49,49% hingga 57,38% masuk dalam kategori Desa Tertinggal, yang menunjukkan masih terbatasnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengelolaan potensi desa. Adapun desa dengan nilai indeks antara 57,39% sampai dengan 69,34% diklasifikasikan sebagai Desa Berkembang, yaitu desa yang mulai menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek pembangunan. Sementara itu, desa dengan nilai antara 69,35% hingga 79,62% termasuk dalam kategori Desa Maju, yang mencerminkan kondisi desa dengan tingkat kemandirian yang cukup baik serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Terakhir, desa dengan nilai indeks antara 79,63% hingga 100% dikategorikan sebagai Desa Mandiri, yaitu desa yang telah memiliki tingkat kemandirian tinggi, daya saing yang kuat, serta mampu menjadi penggerak pembangunan secara berkelanjutan. Klasifikasi ini menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan dan intervensi pembangunan desa agar lebih tepat sasaran sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing desa.

Berikut ini merupakan Perkembangan Status IDM menunjukkan ID Kabupaten Karimun berdasarkan hasil pemutahiran ID tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.4 Nilai Indeks Desa dari tahun 2019 s/d 2025

No	Kabupaten	Tahun	Nilai IDM	Status
1	Karimun	2019	0.6415	Berkembang
2	Karimun	2020	0.6697	Berkembang
3	Karimun	2021	0.6781	Berkembang
4	Karimun	2022	0.7184	Maju
5	Karimun	2023	0.7470	Maju
6	Karimun	2024	0.7833	Maju
7	Karimun	2025	0.7418	Maju

Perkembangan Nilai Indeks Desa (IDM) Kabupaten Karimun selama periode 2019 hingga 2025 meunujukan teren yang cendruing meningkat dengancapaian stataus desa yang semakin baik. Pada tahun 20219, nilai IDM tercatat sebesar 0,6415 dengan setatus berkembang. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan secara bertahap ada tahun 2020 menjadi 0,6697 dan tahun 2021 sebesar 0,6781 yang masih berada

pada kategori berkembang. Memasuki tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan nilai IDM mencapai 0,7184 yang mengantarkan status desa menjai maju. Tern positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing – masing nilai sebesar 0,7470 dan 0,7418 yang mengantarkan suatu desa menjadi maju. Tren posistif ini berlanjti pada tahun 2023 dan 2024 denga masing-masing nilai sebesar 0,7470 dan 0,783 yang menunjukkan penguatan kemandirian desa secara konsisten.

Namun demikian, pada tahun 2025 nili IDM tercatata sebesar 0,7418, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berada pada kategori Maju. Penurunan ini dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Secara keseluruhan perkembangan IDM Kabupaten Karimun menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju. Hal ini mencerminkan afektivitas program pembangunan desa, pemberdayaan masyarkat serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terfokus untuk menjaga konsisten peningkatan serta mendorong desa menuju kategori mendiri.

Grafik 3.3 Perkembangan Indeks Desa Kabupaten Karimun

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal. Adapun rekapitulasi hasil pendataan indeks desa tahun 2025 Kabupaten Karimun basis desa adalah sebagai berikut :

Tabel : Rekapitulasi hasil Pendataan Indeks Desa tahun 2025 basis desa

NO	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	SKOR/ NILAI						% Skor	Status Desa
				Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksesibilitas	Tata Kelola Pem. Desa		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	KARIMUN	MORO	PAUH	136	67	102	70	49	61	76.38	Maju
2	KARIMUN	MORO	JANG	131	75	128	60	46	72	80.63	Mandiri
3	KARIMUN	MORO	PULAU MORO	136	68	72	50	39	63	67.40	Berkembang
4	KARIMUN	KUNDUR	SUNGAI SEBESI	144	72	137	61	50	67	83.62	Mandiri
5	KARIMUN	KUNDUR	SUNGAI UNGAR	136	66	123	76	41	71	80.79	Mandiri
6	KARIMUN	KUNDUR	LUBUK	140	75	126	84	42	64	80.62	Mandiri
7	KARIMUN	TEBING	PONGKAR	132	63	101	56	45	55	71.18	Maju
8	KARIMUN	BURU	TANJUNG HUTAN	121	74	140	70	40	73	81.42	Mandiri
9	KARIMUN	BURU	TANJUNG BATU KECIL	148	63	121	74	38	64	80.00	Mandiri
10	KARIMUN	KUNDUR UTARA	SUNGAI UNGAR UTARA	132	53	134	80	49	71	81.73	Mandiri
11	KARIMUN	KUNDUR UTARA	TELUK RADANG	135	70	102	54	38	66	73.23	Maju
12	KARIMUN	KUNDUR UTARA	PERAYUN	142	74	141	64	48	66	84.25	Mandiri
13	KARIMUN	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN BARAT	125	73	103	68	42	65	74.96	Maju
14	KARIMUN	KUNDUR BARAT	SAWANG SELATAN	138	72	113	66	50	64	79.21	Maju
15	KARIMUN	KUNDUR BARAT	SAWANG LAUT	139	80	117	62	40	67	79.53	Maju
16	KARIMUN	KUNDUR BARAT	KUNDUR	130	64	110	77	48	61	77.17	Maju
17	KARIMUN	KUNDUR BARAT	GEMURUH	154	77	116	52	40	74	80.79	Mandiri
18	KARIMUN	DURAI	SANGLAR	110	71	67	64	41	66	65.98	Berkembang
19	KARIMUN	DURAI	TANJUNG KILANG	134	79	121	62	41	68	79.53	Maju
20	KARIMUN	DURAI	SEMEMBANG	131	63	116	50	47	67	74.65	Maju
21	KARIMUN	DURAI	TELAGA TUJUH	152	84	136	58	49	72	86.77	Mandiri
22	KARIMUN	MERAL BARAT	PANGKE	142	64	115	71	48	68	80.00	Mandiri
23	KARIMUN	MERAL BARAT	PANGKE BARAT	149	51	127	71	47	77	82.20	Mandiri
24	KARIMUN	UNGAR	BATU LIMAU	148	77	109	56	42	70	79.06	Maju
25	KARIMUN	UNGAR	NGAL	126	72	95	54	39	59	70.08	Maju
26	KARIMUN	UNGAR	SUNGAI BULUH	146	76	114	54	41	69	78.74	Maju
27	KARIMUN	BELAT	SEBELE	143	78	124	70	49	70	84.09	Mandiri
28	KARIMUN	BELAT	LEBUH	134	80	122	69	50	77	83.78	Mandiri
29	KARIMUN	BELAT	PENARAH	141	60	127	74	50	63	81.10	Mandiri
30	KARIMUN	BELAT	SUNGAI ASAM	123	82	122	68	49	76	81.89	Mandiri
31	KARIMUN	BELAT	TEBIAS	130	71	97	58	33	70	72.28	Maju
32	KARIMUN	BELAT	DEGONG	130	73	87	84	45	72	77.32	Maju
33	KARIMUN	SELAT GELAM	PARIT	124	58	112	50	49	62	71.65	Maju
34	KARIMUN	SELAT GELAM	TULANG	131	66	99	58	36	67	71.97	Maju
35	KARIMUN	SELAT GELAM	SELAT MENDAUN	137	75	94	74	50	54	76.22	Maju
36	KARIMUN	SUGIE BESAR	SUGIE	114	43	93	42	32	66	61.42	Berkembang
37	KARIMUN	SUGIE BESAR	NIUR PERMAI	142	37	78	38	38	63	62.36	Berkembang
38	KARIMUN	SUGIE BESAR	KEBAN	138	37	80	30	42	67	62.05	Berkembang
39	KARIMUN	SUGIE BESAR	RAWA JAYA	116	47	86	38	46	55	61.10	Berkembang
40	KARIMUN	SUGIE BESAR	TANJUNG PELANDUK	132	36	63	42	45	63	60.00	Berkembang
41	KARIMUN	SUGIE BESAR	BULUH PATAH	114	39	76	42	42	54	57.80	Berkembang
42	KARIMUN	SUGIE BESAR	SELAT MIE	110	50	70	34	36	54	55.75	Tertinggal

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa mengatur mengenai komponen indeks desa, yang terdiri dari dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Sehingga dapat dilihat dari tabel dibawah, terdapat satu desa yang berstatus tertinggal yaitu Desa Selat Mie Kecamatan Sugie Besar yang disebabkan oleh masih banyak belum terpenuhinya 6 (enam) dimensi utama untuk mengukur perkembangan desa. Berikut merupakan perkembangan status Indeks Desa Membangun menuju Indeks Desa Tahun 2019 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4 Perkembangan Status Indeks Desa Membangun Menuju Indeks Desa

No	Perkembangan Status Indeks Desa Membangun Menuju Indeks Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Mandiri	0	0	0	6	10	19	16
2	Maju	6	12	13	14	16	13	17
3	Berkembang	28	25	26	22	16	10	8
4	Tertinggal	7	5	3	0	0	0	1
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0	0
KARIMUN		42	42	42	42	42	42	42

Perkembangan status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Karimun selama periode 2019 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kualitas dan kemandirian desa. Jumlah desa dengan status mandiri mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari tidak ada desa mandiri pada tahun 20219 hingga 2021. Kemudian mulai muncul sebanyak 6 desa pada tahun 2022, meningkat menjadi 10 desa pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 19 desa meskipun pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi 16 desa.

Desa dengan status maju juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 17 desa pada tahun 2025, meskipun sampai mengalami fluktuasi pada tahun 2024. Disisi lain, jumlah desa dengan status berkembang harus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 28 desa pada tahun 2019 menjadi hanya 8 desa pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya pergeseran status menuju kategori yang lebih tinggi.

Untuk desa dengan status tertinggi terjadi penurunan drastis dari 7 desa pada tahun 2019 menjadi nihil pada tahun 2022 hingga 2024, namun pada tahun 2025 masih terdapat 1 dea yang masuk kategori ini. Adapun desa dengan status Sangat Tertinggal hanya terdapat pada tahun 2019 sebanyak 1 desa dan tidak ditemukan lagi pada tahun – tahun berikutnya, yang menunjukkan keberhasilan dalam pengentasan desa sangat tertinggal. Komponen status desa di Kabupaten Karimun mengalami transformasi positif dengan semakin banyak desa yang naik kelas dari kategori berkembang dan tertinggal menuju maju dan mandiri. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan desa serta meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi peningkatan menuntaskan desa yang masih berada pada kategori tertinggal.

Berikut merupakan rekomendasi terhadap kendala yang dihadapi Desa Selat Mie Kecamatan Sugie Besar Tahun 2025 dengan penurunan status menjadi tertinggal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN
1	LAYANAN DASAR	112		
1.A	SUB-DIMENSI PENDIDIKAN	30		

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN
1	**AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat**	**10**		
a	SKOR Keberadaan PAUD/TK/Sederajat di Desa	2	Terdapat 1 PAUD/TK/Sederajat	Perlu penambahan PAUD/TK/Sederajat sebanyak 4
b	SKOR Kemudahan Akses menuju PAUD/TK/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sangat Mudah	
c	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD/TK/Sederajat di desa	3	Angka Partisipasi Murni (APM) >40-60%	APM >40-60%, Perlu partisipasi anak usia 3-6 tahun bersekolah PAUD/TK/Seserajat
2	**AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat**	**7**		
a	SKOR Kemudahan Akses menuju SD/MI/Sederajat terdekat di Desa	4	Akses Menuju SD/MI/Sederajat Mudah	Perlu pembangunan SD/MI/Sederajat
b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Sederajat di desa	3	Angka Partisipasi Murni (APM) >40-60%	APM >40-60%, Perlu partisipasi anak usia 7-12 tahun bersekolah SD/MI/Seserajat
3	**AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat**	**10**		
a	SKOR Kemudahan Akses menuju SMP/MTs/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sangat Mudah	

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Desa Kabupaten Karimun antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cendung meningkatkan, meskipun pada tahun terakhir terdapat sedikit penurunan. Pada tahun 2025, realisasi Indeks desa tercatat sebesar 74,18 dengan capaian kinerja 106,96 persen, melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024

yang mencapai 78,33, terjadi penurunan nilai indeks, namun secara status masih berada pada kategori maju. Apa bila dilihat dalam rentang waktu yang lebih panjang, sejak tahun 1019 hingga 2024 Indeks Desa Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 0,6415 pada tahun 2019 menjadi 0,7833 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang ditandai dengan pergesaran status desa dari berkembang menjadi maju dan meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri.

Namun demikian, penurunan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsisten capaian kinerja, baik dari aspek pemetaan pembangunan antara desa maupun optimalisasi program pemberdayaan. Meskipun terjadi penurunan, capaian tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal periode pengukuran, sehingga secara umum kinerja indeks desa tetap menunjukkan tren positif. Diperlukan upaya penguatan pada sepek – aspek yang masih lemah serta peningkatan kualitas intervensi program agar tren peningkatan dapat kembali terjaga dan mendorong lebih banyak desa mencapai status Mandiri di masa mendatang.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Desa Kabupaten Karimun sampai dengan tahun berjalan terhadap target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis menunjukkan capaian yang cukup optimal. Realisasi Indeks Dea pada tahun ini tercatat sebesar 74,18, yang telah melampaui target tahun sebesar 69,35 dengan capaian kinerja mencapai 106,96 persen.

Jika dibandingkan dengan target jangka menegah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra), capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa berada pada jalur yang tepat (on track), bahkan cenderung lebih cepat dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa barbagai program dan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian desa.

Meskipun demikian apabila mengacu pada target jangka menengah yang lebih tinggi, khususnya dalam mendorong desa mencapai kategori mandiri, masih diperlukan upaya akselerasi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan Indeks Desa tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga mampu mencapai target akhir periode perencanaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan capaian saat ini perlu diikuti dengan penguatan strategi, peningkatan kualitas intervensi program serta konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Desa Kabupaten Karimun dengan standar nasional menunjukkan capaian yang sangai baik. Pada tahun berjalan, realisasi Indeks Desa Kabupaten Karimun tercatat sebesar 74,18 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 69,35 dengan tingkat capaian mencapai 106,96 persen. Jika mengacu pada klasifikasi nasional, nilai tersebut berada dalam kategori Desa Maju (69,35-79,62).

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi desa di Kabupaten Karimun telah berada diatas ambang batas minimal kategori maju sesuai standar nasional. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Karimun telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kemandirian desa , baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dibandingkan dengan standar nasional, kinerja Indeks Desa Kabupaten Karimun dapat dikatakan kompetitif dan berada pada jalur yang positif menuju kategori yang lebih tinggi, yaitu desa mandiri. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan nilai indeks agar dapat menembus ambang batas kategori mandiri (≥79,63) sehingga diperlukan penguatan pada aspke-aspek yang masih menjadi kendala khususnya dalam pengembangan ekonomi desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Karimun diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif serta meningkatkan kualitas pembangunan desa secara berkelanjutan agar mampu bersaingan dan sejajar dengan daerah – daerah lain di tingkat nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta upaya perbaikan kedepan

Secara umum capaian indeks desa menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada periode terakhir terdapat sedikit penurunan. Keberhasilan peningkatan indeks desa tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, diantaranya meningkatnya efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas aparatur desa serta optimalisasi pemanfaatan dana desa yang lebih terarah pada pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa dan pemangku kepentingan lainnya turut mendorong percepatan peningkatan status desa dari Berkembang menjadi maju bahkan mandiri.

Penurunan indeks Desa pada tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum meratanya capaian pembangunan antara desa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sebagian desa serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Selin itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan dinamika sosial juga dapat mempengaruhi capaian indikator, khususnya pada dimensi ekonomi dan ketahanan sosial desa.

Upaya Perbaikan Ke Depan

Untuk menjaga konsisten peningkatan Indeks Desa dan mendorong lebih banyak desa mencapai status mandiri, diperlukan beberapa langkah perbaikan strategis antara lain :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis data dan kebutuhan rill masyarakat;
2. Memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pedampingan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Mendorong pengembangan potensi unggulan desa (BUMDes, UMKM, sektor unggul lokal)
5. Memperkuat sinergi lintas sektor dan pendamping oleh perangkat daerah terkait
6. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara berkala;
7. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan desa.

Dengan langkah – langkah tersebut, diharapkan peningkatan Indeks Dea dapat lebih merata dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kemandirian desa serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Desa merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif dengan memastikan keselarasan antara perencanaan program, penganggaran serta pelaksanaan kegiatan sehingga setiap input yang digunakan mampu menghasilkan outpu dan outcome yang maksimal. Dalam pelaksanaan, efisiensi diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia serta saran dan prasarana yang tersedia. Dinas Pemberdayaan Desa juga mendorong pelaksanaan program yang bersifat perioritas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian desa sehingga alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran. Selain itu penerapan prinsip value for mony menjadi acuan dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat desa.

Upaya efisiensi juga didukung oleh penguatan koordinasi dan sinergisitas dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah desa, sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan kinerja turut meningkat akurasi serta kecepatan dalam pengembalian keputusan. Dengan pengelolaan sumber daya yang efisien, dinas pemberdayaan desa mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas kinerja serta memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan status dan kemandirian desa.

Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat kami sajikan sebagaimana tabel 3.81 berikut :

Tabel 3.93 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.484.978.251,-	1.167.288.594,-	1 Laporan	1 Laporan	92,86 % Persentase Desa Yang Mengelola Administrasi Dengan Baik	97,62 % Desa yang mengelola Administrasi dengan baik memiliki target 92,86% pada triwulan IV dan terealisasi sebesar 97,62%. Pada TW IV hampir seluruh desa sudah bisa mengelola administrasi dengan baik yaitu sebanyak 41 desa yang dimana desa - desa tersebut sudah menyelesaikan APBDes perubahan tahun 2024 namun masih ada 1 Desa yang belum mengelola administrasi dengan baik yaitu Desa Perayun.	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efesiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	710.536.800,-	369.719.468,-	570 Lembaga	570 Lembaga	70% Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	87% Lembaga Kemasyarakatan yang dibina memiliki target 70% dan terealisasi sebesar 87%. Pada tahun 2024 terdapat 6 Lembaga yang menjadi target untuk dibina yaitu PKK,Posyandu, RT,RW,LPM dan Karang Taruna. Pembinaan terhadap lembaga PKK sebanyak 42 desa,Posyandu 12 Kecamatan, RT sebanyak 258 dan RW sebanyak 219,LPM sebanyak 19 dan Karang Taruna sebanyak 20 maka total lembaga kemasyarakatan yang dibina pada TW IV sebanyak 570.	
2025	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.387.378.764,-	1.187.989.784,-	1 Laporan	1 Laporan	95,24 % Persentase Desa Yang Mengelola Administrasi Dengan Baik	97,62 % Desa yang mengelola administrasi dengan baik memiliki target 95,24%. dan terealisasi 97,62% dengan capaian kinerja sebesar 102%, dimana dari 42 desa terdapat 41 Desa yang terealisasi mengelola administrasi dengan baik dan terdapat 1 Desa belum terealisasi yaitu Desa Tanjung Pelanduk.	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	277.130.000,-	79.314.161,-	906 Lembaga	906 Lembaga	85% Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	85% Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk dan dibina memiliki target 85% dan terealisasi sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2025 terdapat 5 Lembaga yang menjadi target untuk dibina yaitu PKK, Posyandu, RT, RW, dan LPM. Adapun pembinaan terhadap Lembaga PKK sebanyak 42 desa, Posyandu sebanyak 117, RT sebanyak 512, RW sebanyak 215 dan LPM 20 Desa maka total Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk dan dibina pada Tahun 2025 sebanyak 906 Lembaga Kemasyarakatan Desa.	
Total 2025			3.860.023.815,-	2.804.312.007,-					

viii. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam rangka pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap:

a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
b) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
f) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup,

h) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan

i) memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan arah kebijakan terhadap peningkatan pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup yaitu Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Adapun capaian dari indikator kinerja pada sasaran "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup" tahun 2024 sebagai berikut .

Tabel 3.94 Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2024		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	1	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*)**	69,58	70,35	101,10%
			- Indeks Kualitas Air (IKA)*)	56,90	54,44	95,67%
			- Indeks Kualitas Udara (IKU)*)	90,51	95,14	105,11%
			- Indeks Kualitas Lahan (IKL)*)	52,62	51.83	98,49%
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	2	**Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)*)**	25,94 Ha	25,40 Ha	97,92%
		3	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*)**	60,00	45,01	75,02%

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun 2024*

Keterangan :
*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
**) Indikator Kinerja Pendukung dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026

Gambaran capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagaimana yang disajikan dalam Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Capaian kinerja pada tingkat Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air" dengan indikator kinerja ; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 101,10%, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 95,67%, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah 105,11% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah 98,49%
2. Capaian kinerja pada tingkat Sasaran Strategis "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup" dengan indikator kinerja ; Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 97,92%, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah 75,02%.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berpijak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada Pasal 25 Ayat 3 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi; kebun raya, taman kehati, taman kota, hutan kota, taman hutan raya, sabuk hijau (green belt), median jalan, jalur dibawah tegangan listrik, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman rekreasi dan pepohonan lainnya yang relevan. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Tabel 3.95 Pengukuran Capaian Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Ha)	25,40	29,90	26,75	89,46%	38,45	69,57%

Target kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2024 berada pada nilai 29,90 Ha, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 26,75 Ha dan persentase capaian kinerjanya sebesar 89,46% dengan kriteria “TINGGI”. Pada tahun sebelumnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada pada nilai 25,40 Ha sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai 1,35 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD, Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada pada angka 38,45 Ha sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 26,75 Ha sehingga capaian kinerja yaitu 69,57%.

SASARAN STRATEGIS 14 :

Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

1) LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAHUN 2024

Rumusan :
Jumlah Luasan RTH Terkelola

Gambaran infografis diatas menunjukkan bahwa Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari tahun 2024 masih kurang 0,54 Ha dari target yang ditetapkan sebesar 29,90 Ha atau setara dengan 2,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan penghijauan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta evaluasi dan validasi pendataan lahan yang semakin baik disamping penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan-perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama Tahun 2024.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Haryono (2004:41), untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui:

1) Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk;
2) Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani;
3) Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Seiring dengan definisi sampah yang memiliki sifat membahayakan lingkungan, maka salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengelola sampah supaya tidak membahayakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana yang mengemban tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sebuah intrumen standar penilaian pengelolaan sampah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah. Dengan adanya instrumen ini, maka hasil penilaian diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan nilai kinerja pengelolaan sampah.

	Realisasi Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Tahun 2026 (%)
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS	45,01	63,00	45,39	72,05%	66,00	68,77%

Tabel 3.96 Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Karimun Tahun 2024

***Sumber** : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024*

Target kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada tahun 2024 berada pada nilai 63,00, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 45,39 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 72,05% dengan kriteria "SEDANG". Pada tahun sebelumnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) berada pada nilai 45,01 sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,38 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) berada pada angka 66,00 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 45,39 sehingga capaian kinerja yaitu 68,77%.

SASARAN STRATEGIS 14 :

Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

2) INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) 2024

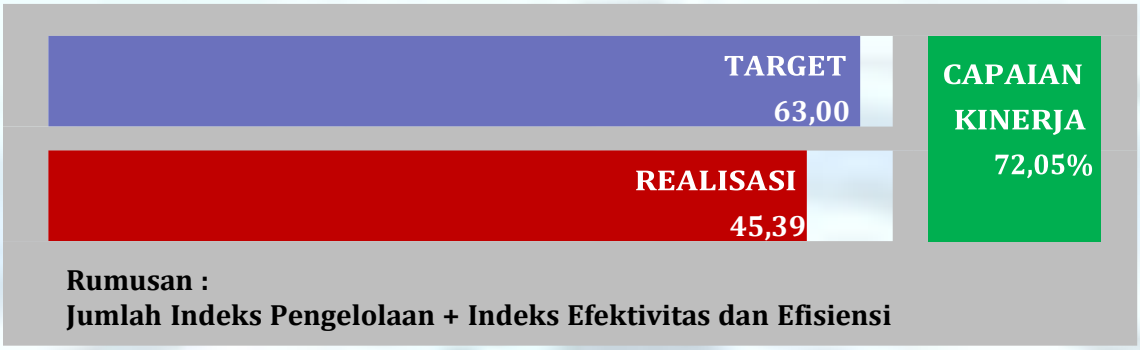

Rumusan :
Jumlah Indeks Pengelolaan + Indeks Efektivitas dan Efisiensi

Indikator kinerja pendukung dalam melakukan analisis perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah capaian volume penanganan dan pengurangan sampah. Target kinerja capaian penanganan sampah pada tahun 2024 berada pada nilai 72,05%, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 45,39% dan dengan kriteria "RENDAH". Pada tahun sebelumnya capaian penanganan sampah berada pada nilai 72,05% sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,38 poin. Selanjutnya target kinerja capaian pengurangan sampah pada tahun 2023 berada pada nilai 27,00%, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 14,83% dan persentase capaian kinerjanya sebesar 54,93% dengan kriteria "RENDAH". Pada tahun sebelumnya capaian pengurangan sampah berada pada nilai 21,05 sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 6,22 poin. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, capaian penanganan dan pengurangan sampah belum dilakukan penetapan, sehingga perlu dilakukan revisi perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026, disamping itu capaian pengelolaan dan pembatasan sampah juga perlu ditetapkan dalam perubahan RENSTRA yang akan datang.

Tabel 3.97 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024"

Tahun	Program	Indikator	Input		Out put		Outcome		Efesiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	target	realisasi	target	realisasi	
2024	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	*Luas Keanekaragaman Hayati*	4.016.892.529,-	3.576.759.962,-	40 Lokasi	34 Lokasi	9,3 Ha	6,3 Ha	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 40 lokasi hanya 34 lokasi yang terealisasi. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 6,3 Ha dengan realisasinya hanya 3 Ha pada pelaksanaannya belum optimal, karena belum adanyapenetapan terkait RTH yang akan di kelola.
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan	*Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan,*	23.383.000,-	9.019.000,-	16 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	85%	75%	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 16 Pelaku Usaha/ Kegiatan/ Perusahaan dengan

	Hidup (PPLH)	*izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daera h kabupaten/kot a*							realisasinya 12 Pelaku Usaha/ Kegiatan/ Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan LH dan tepat waktu. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 85% dengan realisasinya 75% bahwa pelaksanaan efisiensi program belum optimal.
	Program Pengelolaan Persampahan	*Persentas e Pengurangan Sampa hPersentase Penangana n Sampah*	11.989.531.499, -	10.113.508.438, -	17.200 Ton 44.800 Ton	14.194,43 Ton 50.607,25 Ton	28% 71%	12,44% 45,33%	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 17.200 Ton untuk pengurangan sampah dan 44.800 Ton untuk penanganan sampah, dengan realisasinya pengurangan sampah sebanyak 2.139,68 Ton dan Penanganan Sampah sebanyak 20.307,84 Ton. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 28% pengurangan sampah dan 71% penanganan sampah dengan realisasinya 12,44% untuk pelaksanaan pengurangan sampah dan

									45,33% untuk pencapaian penanganan sampah, capaian efisiensi masih belum optimal.
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	*Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan Kepada Masyarakat*	84.056.000,-	64.210.200,-	1 Laporan	1 Laporan	70	63	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 1 laporan dengan realisasi pencapaian output 1 lapora untuk dalam 1 dokumen tindak lanjut pelaporan. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan sebanyak 70 dengan realisasinya hanya 63 piagam penghargaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga belum optimalnya efisiensi program dengan minimnya ketersediaan anggaran.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dalam pemenuhan sasaran tersebut selama Tahun 2024, beberapa gambaran isu-isu strategis penting berupa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang menyebabkan kegagalan, keberhasilan dan alternative solusi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Faktor Penyebab Kegagalan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Secara umum dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2024, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan masih dijumpai yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Beberapa lokasi di sekitar taman digunakan sebagai tempat berjualan dan kurangnya ketertiban serta kedisiplinan tenaga pemelihara dalam bekerja, selainitu keterbatasan armada (*crane*) untuk menjangkau pohon-pohon tinggi.
2. Terbatasnya jumlah tenaga pemelihara RTHP dan taman seiring dengan meningkatnya jumlah dan luasan RTH Publik yang terbangun dan tajuk pohon perindang setiap tahunnya sehingga pemeliharaan kurang maksimal, di samping itu minimnya kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan dan keindahan RTH Publik.
3. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
4. Fasilitas penanganan dan pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih serta dukungan anggaran yang kurang memadai.
5. Ketergantungan atas kondisi TPA Sememal karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah, di samping itu sarana dan prasarana pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai.
6. Penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dan masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah dengan cara yang benar, seperti dilakukannya pemilahansampah sesuai jenisnya.

Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Faktor penyebab keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan yang bersifat kecil seperti pembersihan di RTH Publik Permukiman dan adanya pengajuan usulan dari warga sekitar untuk melakukan renovasi RTH

Publik serta optimalisasi fungsi RTH Publik berupa fungsi ekologis dan sosial.

2. Melaksanakan pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau selama 12 bulan danpemeliharaan taman dan pohon perindang jalur hijau serta penyulaman tanaman semusim yang dilakukan secara berkala
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di setiap kelurahan cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah.
4. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih serta pengembangan rumah kompos di beberapa titik setiap kelurahan, sehingga seusaipengembangannya nanti, kapasitasnya akan bertambah dua kali lipatnya.
5. Kapasitas Jumlah armada pada pengangkutan sampah masih mampu untuk melakukan penanganan dan pengangkutan sampah di setiap TPS/kontainer.
6. Seluruh wilayah di Pulau Karimun mendapatkan layanan kebersihan, seperti pengangkutan sampah dan terdapat Fasilitas Pendaurulangan di Kabupaten Karimun yaitu Bank Sampah Induk Al-Barokah dan Rumah Kompos.

Analisis Rencana Tindak Lanjut/Solusi terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023, maka dapat disusun rencana tindak lanjut/solusi dari faktor- faktor tersebut, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Rencana tindak lanjut/solusi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan, pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli penyelamatan sumber daya air.
2. Merubah cara pandang/*mindset* maysarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan pemberian informasi dengan menyebarkan spanduk, reklame dan pamphlet/brosur kepada masyarakat.
3. Pembinaan dengan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok pengelola sampah di setiap desa/kelurahan dan peningkatan peran kelompokmasyarakat dalam penanganan sampah.
4. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan.
5. Menambah luasan hutan kota, median jalan dan taman kota.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Luas Ruang

Terbuka Hijau (RTH) antara lain sebagai berikut :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan stakeholderterkait.
2. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan/ stakeholder/ masyarakat dalam peran sertanya terhadap pengelolaan lingkungan
3. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Karimun.
4. Penyusunan regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon.
5. Penguatan peran kecamatan, kelurahan dan desa dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD).

Profil Indeks Respon diperoleh dari inventarisasi respon Pemerintah Daerah dalam mencapai target Kualitas Lingkungan Hidup melalui Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau, Program Gambut Lestari dan Program Pantai Lestari. Inventarisasi respon Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan aspek manajemen, meliputi kebijakan dan peraturan, sumber daya manusia dan perencanaan perbaikan kualitas lingkungan, serta aspek teknis, meliputi implementasi kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis indeks respon tersebut, rata-rata alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sekitar 0.01% - 1.19% dari APBD.

Penyusunan nilai Kualitas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai Kualitas Lingkungan Hidup digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemarandan kerusakan lingkungan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan arah kebijakan terhadap peningkatan kualitas udara, tanah dan air yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Adapun capaian dari indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Udara,Tanah dan Air” tahun 2024 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.98 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	CapaianTahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	96,83	56,90	54,44	95,68%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	102,92	93,10	95,14	102,19 %
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	102,83	52,58	51,83	98,57%
	Re-rata Capaian	**100,86**			**98,81%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 pada umumnya mengalami penurunan jikadibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Penurunan terjadi pada semuaindikator kinerja, dimana Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu dari 96,83% menjadi 95,68%,Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu dari 102,92% menjadi 102,19% dan Indeks KualitasLahan (IKL) yaitu dari 102,83% menjadi 98,81%.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 56,90, dengan realisasi sebesar 54,44 atau tercapai sebesar 95,68% dan skala nilai peringkat kinerja pada klasifikasi **Tinggi**, capaian kinerja ini juga mengalami penurunan lebih rendah 5,00 point dibandingkan dengan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 dengan nilai 50,00,. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 93,10, realisasi sebesar 95,14 tercapai 102,19% atau skala nilai peringkat kinerja pada klasifikasi **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,62 point dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara pada tahun sebelumnya sebesar 94,19. Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 50,58 dengan realisasi sebesar 92,01 atau tercapai sebesar 102,83% atau skala nilai peringkat kinerja pada klasifikasi **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2022 tercapai 45,01, maka Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,00 point.

Penyebab terjadinya penurunan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah:

1) Menurunnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan belum mencapai target dan masih dibawah target nasional, disebabkan oleh :
   - Kenaikan nilai parameter BOD, COD dan pH yang cukup drastis karena banyak warga yang masih melakukan aktivitas pembuangan limbah domestik (*detergent* dan sisa makanan).
   - Masih banyak saluran limbah domestik yang langsung dialirkan ke danau tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
   - Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/*detergen* untuk mandi dan cuci.
2) Menurunnya nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) karena :

   Hal ini disebabkan semakin meningkatnya penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten

Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan- perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama Tahun 2023. Disamping itu peningkatan ruas jalan dan bangunan yang memungkinkan semakin sempitnya ruang hijau disetiap kawasan.

SASARAN STRATEGIS 15 :

Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air

1) INDEKS KUALITAS AIR (IKA) 2024

TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
56,90	58,44	95,68%

Rumusan :
Jumlah Nilai Indeks Mutu Air (PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021)

Telaah mendalam pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas air danau di Kabupaten Karimun masih lumayan memadai bahkan cenderung lebih baik dari kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Ketersediaan vegetasi terutama pada bagian *inlet* danau menjadi salah satu kunci tercapainya kondisi tersebut mengingat vegetasi dapat pula berperan sebagai filter bagi air yang meresap ke dalam tanah. Nilai tersebut memberikan pula peringatan bahwa kondisi ini akan terancam oleh pencemaran dari peningkatan beragam aktivitas antropogenik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu; Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 37,6 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 40,5 % dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan bobot 21,9 %. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pengambilan, penanganan dan pengujian kualitas sampel air danau urusan Lingkungan Hidup dilakukan 1 (satu) kali di tahun 2024 yaitu pada Bulan Maret Tahun 2024. Bulan Juni mewakili musim kemarau dan bulan Okober mewakili musim penghujan. Air danau yang diambil sampelnya adalah danau-danau yang dijadikan sebagai sumber air baku Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Karimun yaitu Danau/Embung Bati, Danau Pongkar dan Danau Sentani. Jumlah titik pantau/titik pengambilan sampel terdapat 3 titik dari masing-masing danau (*Intake*, *Inlet* dan *Outlet*).

Data hasil pengujian kualitas air pada segmen (*intake, inlet* dan *outlet*) di setiap danau yang dijadikan lokasi pemantauan, selanjutnya ditabulasikan, dihitung dan dianalisis dengan maksud untuk memperoleh nilai indeks pencemaran (*PIj*). Hasil perhitungan Indeks Pencemaran (*PIj*)

Air setiap danau di Kabupaten Karimun selama Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.99 Hasil Analisis Indeks Pencemaran (Pij) Air Tahun 2024

No	Nama Danau	Waktu Sampling	Titik Sampling	Titik Koordinat		Indeks Pencemaran (Pij)	Status Mutu Air
1	Danau Bati	21 Maret 2024	Intake	N :	1.04518	2.55	Cemar Ringan
				E :	103.38227		
			Inlet	N :	1.04435	2.77	Cemar Ringan
				E :	103.38125		
			Outlet	N :	1.04726	2.54	Cemar Ringan
				E :	103.38286		
2	Danau Pongkar	21 Maret 2024	Intake	N :	1.07784	0.81	Memenuhi
				E :	103.37923		
			Inlet	N :	1.08026	1.03	Cemar Ringan
				E :	103.37693		
			Outlet	N :	1.07952	0.86	Memenuhi
				E :	103.37946		
3	Danau Sentani	21 Maret 2024	Intake	N :	1.02511	1.83	Cemar Ringan
				E :	103.39616		
			Inlet	N :	1.02503	2.97	Cemar Ringan
				E :	103.39524		
			Outlet	N :	1.0247	2.57	Cemar Ringan
				E :	103.39698		

Sumber : Hasil Analisis Indeks Pencemaran (PIj) DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Dari hasil tabulasi Indeks Pencemaran (*PIj*) Air pada segmen (*intake, inlet* dan *outlet*) setiap danau yang dijadikan lokasi pemantauan di Kabupaten Karimun selanjutnya dikonversikan dengan faktor

perkalian antara persentase pemenuhan mutu air dan bobot indek untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil analisis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.100 Hasil Analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Standar Mutu Air	Jlh Titik Sampling	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Mutu Air
Memenuhi Baku Mutu	2	22.22%	70	15.56
Tercemar Ringan	7	77.78%	50	38.89
Tercemar Sedang	0	0.00%	30	0.00
Tercemar Berat	0	0.00%	10	0.00
Jumlah Total	**9**	**100%**		
Indeks Kualiatas Air (IKA) Kab. Karimun Tahun 2024				**54.44**

Sumber : Hasil Analisis Indeks Pencemaran (PIj) DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Hasil analisis pengukuran capaian kinerja terkait Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.101 Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2023 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Air(IKA)	55.00	56,90	54,44	95.68%	56,90%	96,66%

Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 berada pada angka indeks 56,90, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 54,44 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 95,68%, dengan kriteria "**TINGGI**". Pada tahun sebelumnya Indeks Kualitas Air (IKA) berada pada angka indeks 55,00,sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,56point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun , Indeks Kualitas Air berada pada angka 54,44 sehinggacapaian kinerja tahun ini masih diatas target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 56,90 diatas capaian target akhir yaitu 95,67%.

Telaah mendalam pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas air danau di Kabupaten Karimun masih lumayan memadai bahkan cenderung lebih baik dari kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Ketersediaan vegetasi terutama pada bagian *inlet* danau menjadi salah satu kunci tercapainya kondisi tersebut mengingat vegetasi dapat pula berperan sebagai filter bagi air yang meresap ke dalam tanah. Nilai tersebut memberikan pula peringatan bahwa kondisi ini akan terancam oleh pencemaran dari peningkatan beragam aktivitas antropogenik.

Peningkatan pengelolaan terhadap pencemaran danau dari limbah domestic dan sampah menjadi salah satu kunci perbaikan kualitas air. Pemerintah Kabupaten Karimun terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestic dan industri ke badan air, termasuk dengan kewajiban pembangunan IPAL untuk kawasan perumahan. Hasil upaya tersebut tampak pada nilai fecal coliform yang rendah dan memenuhi baku mutu untuk keseluruhan segmen danau yang dievaluasi. Pada pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun terus meningkatkan jangkauan pelayanan melalui penambahan armada. Hal tersebut akan meminimalisasi pembuangan sampah secara sembarangan termasuk ke badan air oleh masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 15 :

Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air

2) INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) 2024

TARGET	**93,10**
REALISASI	**95,14**
CAPAIAN KINERJA	**102,19%**

Rumusan :
100 - (50/0.9 X Ieu - 0.1)

Dengan hasil pemantauan NO2 dan SO2 paling tinggi di lokasi industri, kegiatan yang paling berkontribusi atas cemaran udara berasal dari perindustrian dansektor transportasi. Secara fungsional,

lokasi tersebut diperuntukan untuk kegiatan komersial dan perindustrian. Diperlukan pengawasan dan pemantauan berkala untuk memastikan sektor-sektor terkait dapat memenuhi kriteria emisi. Sementara, dari sektor transportasi hendaknya dilakukan standarisasi kendaraan laik jalan yang harus dipenuhi berdasarkan kriteria baku mutu emisi gas buangan dari kendaraan.

Terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2024 menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun-tahun berikutnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun sudah melampaui target yang ditetapkan namun masih perlu adanya komitmen pada upaya-upaya pengendalian pencemaran udara dan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Karimun dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dan dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan APBN dan APBD Kabupaten Karimun (pendampingan). Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara melakukan pemasangan alat pemantauan kualitas udara (*passive sampler*) pada 4 (empat) lokasi yang telah ditetapkan yaitu kawasan perkantoran, perumahan/pemukiman, industri dan transportasi selama 14 hari, selanjutnya diambil dan dikirim kembali.

Data hasil tabulasi pemantauan kualitas udara di Kabupaten Karimun selama Tahun 2023, serta perhitungan dan analisis kualitas udara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.102 Hasil Perhitungan Kualitas Udara (Rata-rata Konsentrasi NO2 dan SO2) Tahun 2024

No	Klasifikasi Lokasi	Lokasi Sampling	Waktu Sampling	Koordinat		Kadar NO2 (µg/m3)	Kadar SO2 (µg/m3)
				X	Y		
1	Transportasi	Jln. Yos Sudarso, Perumahan Dinas Bupati Karimun	09– 23 Juli 2024	0.989194	103.436806	3.79	5.12
			03 – 17 September 2024			6.78	9.02
2	Industri	PT. SAIPEM, Jln R. Haji Fisabilillah Desa Pangke	09– 23 Juli 2024	1.046000	103.329222	4.08	7.25
			03 – 17 September 2024			6.60	7.14
3	Pemukiman	Jln. Paya Cincin, Kel. Teluk Uma,	09– 23 Juli 2024	1.038083	103.400222	1.98	2.65
			03 – 17 September 2024			1.65	2.90

No	Klasifikasi Lokasi	Lokasi Sampling	Waktu Sampling	Koordinat		Kadar NO2 (µg/m3)	Kadar SO2 (µg/m3)
				X	Y		
		Kec. Tebing					
4	Perkantoran	Komplek Perkantoran Poros, Jln. Jend. Sudirman	09– 23 Juli 2024	1.033277	103.376222	3.05	4.46
			03 – 17 September 2024			5.20	4.88
Rata-Rata Kadar NO2 dan SO2						4.14	5.43

Sumber : Hasil Analisis Rata-rata Kadar NO_2 dan SO_2 DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Data perhitungan rata-rata kadar adalah Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2), selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada metode perhitungan program *European Union* sesuai dengan ketentuan yang masih digunakan oleh WHO yaitu perbandingan dengan *EU Directives*. Hasil analisis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.103 Hasil Analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Karimun Tahun 2024

Parameter	Rata-rata Pemantauan 2024	Referensi EU	Nilai Indeks
Rata-rata Kadar NO_2 (µg/m3)	4.14	40	0.10
Rata-rata Kadar SO_2 (µg/m3)	5.43	20	0.27
Indeks Udara (Index Annual model EU-Ieu)			0.187
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun 2024			95.14

Hasil analisis pengukuran capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) KabupatenKarimun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.104 Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2026 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	93.05	93.10	95,14	102,19%	94,71	100,45%

Target kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 berada pada angka indeks 93,10, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 95,14 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 102,19% dengan kriteria "**SANGAT TINGGI**". Pada tahun sebelumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada angka indeks 93,05 , sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penaikan dari tahun sebelumnya senilai 2,09.

point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun, Indeks Kualitas Udara berada pada angka 94,71 sehingga capaian kinerja tahun ini masih diatas target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 100,45% diatas capaian target akhir RPJMD Kabupaten Karimun yaitu 98,25%

Dengan hasil pemantauan NO2 dan SO2 paling tinggi di lokasi industri, kegiatan yang paling berkontribusi atas cemaran udara berasal dari perindustrian dan sektor transportasi. Secara fungsional, lokasi tersebut diperuntukan untuk kegiatan komersial dan perindustrian. Diperlukan pengawasan dan pemantauan berkala untuk memastikan sektor-sektor terkait dapat memenuhi kriteria emisi. Sementara, dari sektor transportasi hendaknya dilakukan standarisasi kendaraan laik jalan yang harus dipenuhi berdasarkan kriteria baku mutu emisi gas buangan dari kendaraan.

Terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2022 menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun-tahun berikutnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun sudah melampaui target yang ditetapkan namun masih perlu adanya komitmen pada upaya-upaya pengendalian pencemaran udara dan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Data perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak hanya dibatasi pada luasan hutan namun akan meliputi Tutupan hutan yang terdiri dari hutran lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder (bekas tebangan), hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder danhutan tanaman Tutupan belukar dan belukar rawa pada hutan Tutupan belukar dan belukar rawa pada fungsi lindung (wilayah dengan kelerengan >25%, sempadan sungai, danau dan sempadan pantai). Tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota, jalur hijau dll) kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Data yang digunakan sebagai dasar hitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) bersumber dari kombinasi data sekunder dan primer. Data untuk tutupan lahan berasal dari data sekunder (top down) interpretasi citra satelit tutupan lahan. Data primer berasal dari kegiatan survey luasan pada kawasan hijau di perkotaan dan pengumpulan data dari instansi terkait secara khusus untuk RTH mendetail pada kawasan perkotaan. Data tutupan lahan yang tersedia untuk perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun Tahun 2022 telah mewakili keseluruhan wilayah administratif.

Data hasil tabulasi pemantauan kualitas lahan dan luasan tutupan hutan, belukar dan tutupan lainnya di Kabupaten Karimun selama Tahun 2023, serta perhitungan dan analisis kualitas lahan yang bersumber dari data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.105 Hasil Analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kab. Karimun Tahun 2023

No	Parameter Perhitungan IKL	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Nilai
1	Luas Wilayah Ha)	93.045,26	1	93.045,26
2	Luas Hutan (Ha)	25.051,74	1	25.051,74
3	Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	4.492,30	0.6	2.695,38
4	Luas Belukar pada Fungsi Lindung)	779,18	0.6	467,51
5	Kebun Raya data LIPI	-	0.4	-
6	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	26,75	0.6	16,05
7	Taman KEHATI	-	0.6	-
8	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (Ha)	254,66	0.6	152,80
8	RHL	2.303,21	0.6	1.381,99
9	DKK	-	1	-
Luas Tutupan Lahan		**125.953,20**		**29.765,46**
Luas Wilayah		**93.045,26**		**93.045,26**
Nilai Tutupan Lahan (TL)				**0.319903032811656**
Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun 2024				**51.83**

Sumber : Hasil Analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Hasil analisis pengukuran capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) KabupatenKarimun Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.106 Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2023 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	52,01	52,58	51,83	98,57%	52,62	98,49%

Target kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 berada pada angka indeks 52,58 , realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 51,83 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 98,57% dengan kriteria “SANGAT TINGGI”. Pada tahun sebelumnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) berada pada angka indeks 52,01, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,18 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun, Indeks Kualitas Lahan berada pada angka 52,62 sehingga capaian kinerja tahun ini masih dibawah target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 98,49% dibawah capaian target akhir RPJMD Kabupaten Karimun yaitu 98,84%.

Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,18 point yang setara dengan 0,346%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan penghijauan dan

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta evaluasi dan validasi pendataan lahan yang semakin baik disamping penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan-perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah pada Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 15 :

Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air

2) INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL) 2024

TARGET 52,58	CAPAIAN KINERJA 98,57%
REALISASI 51,83	

Rumusan :
100 - (50/0.9 X Ieu - 0.1)

Tabel 3.107 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024"

Tahun	Program	Indikator	Input		Out put		Outcome		Efesiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	target	realisasi	target	realisasi	
2024	**Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkung**	*Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air yang tercema*	69.443.000,-	66.179.600,-	9 Sampel yang tidak me	7 Sampel yang tidak memenuhi baku mutu	66,67%	77,78%	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output

	an Hidup	*r*			me nu hi ba ku mu tu				keluaran target sebanyak 9 sampel saja yang tidak memenuhi baku mutu namun realisasinya 7 sampel yang tidak memenuhi baku mutu. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 66,67% dengan
									realisasinya 77,78% pada pelaksanaannya belum optimal, karena belum adanya pemeliharaan lingkungan terkait titik lokasi pengambilan sampel air untuk peningkatan mutu air.
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah	*Jumlah Limbah B3 yang Tekelola (Ton)*	3.125.000,-	3.125.000,-	4 La por an	4 laporan	5.800	5.600	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 4 Laporan dengan realisasinya 4 Laporan triwulan

	B3)								atas pemenuhan pengelolaan limbah B3. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 5.800 ton dengan realisasinya 5.600 ton, bahwa pelaksanaan efisiensi program optimal.
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	*Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH yang ditangani*	9.823.000,-	6.257.000,-	1 Laporan	1 laporan	100%	100 %	Efesiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari Penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 1 Laporan dengan realisasinya 1 Laporan triwulan atas pemenuhan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang teregistrasi. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 100% tindak lanjut Penanganan pengaduan yang Teregistrasi Dengan Realisasinya 100% pengaduan Yang terselesaikan dan Mendapatkan hasil capaian

									efisiensi yang optimal.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dalam pemenuhan sasaran tersebut selama Tahun 2024, beberapa gambaran isu-isu strategis penting berupa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang menyebabkan kegagalan, keberhasilan dan alternatif solusi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Faktor Penyebab Kegagalan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Secara umum dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun pada Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2023, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan masih dijumpai yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di danau) sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas air danau di Kabupaten Karimun.
2. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Karimun, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara perkotaan.
3. Pelayanan melalui OSS-RBA belum semuanya berlangsung dengan baik karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkannya, selain itu sebagian masyarakat masih mempunyai persepsi yang kurang tepat mengenai Dokumen Lingkungan, karena selama ini masyarakat menganggap dalam mengurus dokumen lingkungan sulit padahal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun siap melaksanakan pelayanan asistensi dan membuka konsultasi.
4. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal dan masih banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) belum memiliki kompetensi, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan dengan peninjauan lapangan secara langsung hanya bersifat monitoring dan hasil analisa tidak dapat maksimal.

Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Faktor penyebab keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Karimun pada Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran terkait pengujian kualitas air pada laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air diKabupaten Karimun. Pemantauan kualitas air dilakukan dari 3 danau yang ada di wilayah Kabupaten Karimun, yaitu Danau Bati, Pongkar dan Sentani.
2. Kebutuhan data kualitas air, udara dana lahan yang terus meningkat seiring denganformula baru perhitungan IKA, IKU dan IKL dari KLHK, sehingga mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk terus meningkatkan jumlah lokasi pemantauan.
3. Permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi yang disediakan DPMPTSP sudah dapat diakses oleh masyarakat dan berjalan dengan baik, sehingga dampak diberlakukannya OSS perizinan perusahaan tidak membutuhkan waktu yang lama dan adanya kepastian waktu serta tingginya kesadaran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang sudah berjalan mengajukan dokumen lingkungan.
4. Dengan adanya Permen LHK NO. 5 Tahun 2021 dan Permen LHK NO. 6 Tahun2021 tentang persyaratan Persetujuan Teknis (PERTEK) terkait Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3 dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan.
5. Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman dengan adanya dukungan anggaran terkait pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 yang diadakan rutin setaip tahun dan visitasi ke lokasi.
6. Adanya kewajiban dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan.

Analisis Rencana Tindak Lanjut/Solusi terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun padaUrusan Lingkungan Hidup selama tahun 2022, maka dapat disusun rencana tindak lanjut/solusi dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Rencana tindak lanjut/solusi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap penaatan izin usaha/kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti; usaha/kegiatan yang menjadi sumber penghasil air limbah baik

yang domestik maupun industri dan sampah serta limbah B3/medis yang dihasilkan oleh pemerintah/industri/pelakuusaha.

2. Pembinaan, pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli penyelamatan sumber daya air.
3. Merubah cara pandang/*mindset* maysarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan pemberian informasi dengan menyebarkan spanduk, reklame dan pamphlet/brosur kepada masyarakat.
4. Pembinaan dengan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan kelompokpengelola sampah di setiap desa/kelurahan dan peningkatan peran kelompok masyarakat dalam penanganan sampah.
5. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan.
6. Reklamasi kawasan (penanaman tanaman di bekas tambang, mangrove).

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu.
2. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik.
3. Penguatan peran kecamatan, kelurahan dan desa dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD).

ix. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Siap Tanggal dan Pulih

Kajian Resiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), Kerentangan (vulnerabilitiy) dan kapasitas (capacity) dimasing – masing provinsi dan Kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fonomena alam yang dapat menyebabkan berencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi,pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat resiko berdasarkan potensi kerugian diatas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya penguragan resiko bencana disuatu

daerah. Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan Indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada priode tertentu.

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumusan berikut :

Risk = Hazard x Vulnerabilitiy

Capaity

Dimana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan, gunung berapi dan lainnya. Vulnrability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuan prioritas yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan ;
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu ;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tetamtik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapan dan penanganan darurat bencana dan ;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Perbandingan antara target, realisasi dan capai pada indikator utama sasaran "Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang siap Tanggap dan Pulih" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.108 Evaluasi Pencapaian Sasaran

NO	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	99,87	120,40	82,94 %

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Karimun

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2024 ditingkat Kabupaten / Kota melalui https://inarisk.bnpb.go.id/admin. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal berikut:

1. Dari hasil perhitungan BNBP Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Karimun untuk tahun Tahun 2024 adalah 120,40,-
2. Berdasarkan Klasifikasi Kelas Resiko Bencana maka angka 120, 40 dapat dikategori sedang;
3. Jadi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah 120,40 dapat dikategorikan sedang;
4. Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Karimun berdasarkan Target yaitu : 99,87 dengan realisasi 120,40 maka capaiannya 82,94%

Tabel 3.109

Nilai IRB 2024 Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

No	Kabupaten/Kota	IRB 2024	Keterangan
1.	KARIMUN	120,40	Sedang
2.	BINTAN	123,17	Sedang
3.	NATUNA	112,40	Sedang
4.	LINGGA	100,92	Sedang
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	90,50	Sedang
6.	KOTA BATAM	108,89	Sedang
7.	KOTA TANJUNGPINANG	108,40	Sedang

Grafik Nilai IRB 2024 Kabupaten /Kota Di Provinsi Kepulauan Riau

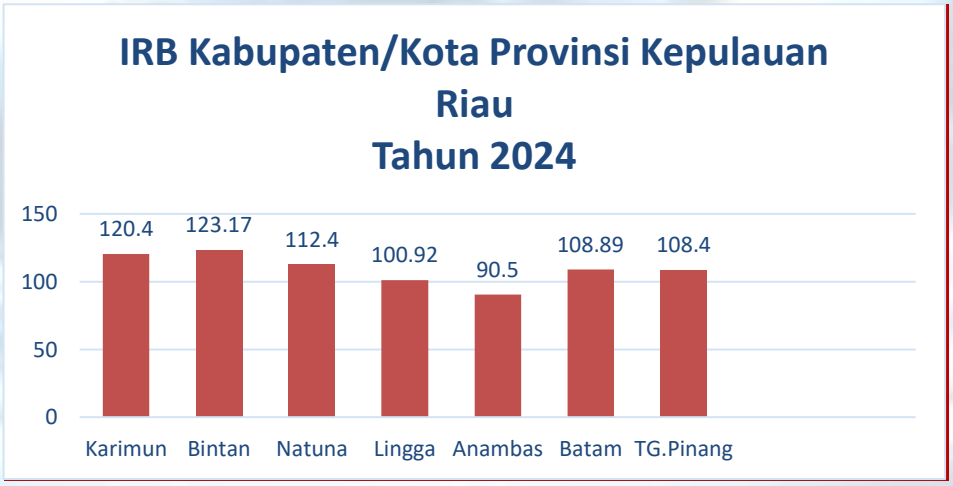

Tabel 3.110 Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

No	Skor Total	Kelas	Katagori Risiko Bencana
1.	< 13	1	Rendah
2.	13-144	2	Sedang
3.	> 144	3	Tinggi

Indeks Resiko Bencana (IRB Tahun 2024 ini berisi nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 ini berisi nilai IRB dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat Kabupaten / Kota tingkat seprovinsi Kepulauan Riau. Hasil perhitungan Indeks risiko bencana tahun 2024 menunjukkan 7 kabupaten/kota berada pada kelas risiko bencana sedang, karimun (skor 120,40), Bintan (skor 123,17), Natuna (skor 112,40), Lingga (skor 100,92), Kepulauan Anambas (skor 90,50), Kota Batam (skor 108,89), Kota Tanjung Pinang (skor 108,40).

IRB Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing – masing guna menurunkan risiko bencana sebagai upaya meningkatnya ketangguhan masyarakat.

Tabel 3.111 Analisis Efisiensi Sasaran 15

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2024	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	114.382.500	89.318.300	2 Dokumen	2 Dokumen	28.40% Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	82% Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	86.780.400	20.719.000	2 Dokumen	2 Dokumen		

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	78.505.900	35.778.900	1 Dokumen	1 Dokumen		
2025	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	24.145.600	2.225.000	1 Dokumen	1 Dokumen	28.40% Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	80% Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	37.040.000	6.155.000	2 Dokumen	2 Dokumen		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	144.623.600	10.895.000	2 Dokumen	1 Dokumen		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	81.672.200	22.422.000	1 Dokumen	1 Dokumen		

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Dalam menyelenggarakan urusan Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang siap Tanggap dan pulih dalam pemenuhan sasaran tersebut selama Tahun 2025, beberapa gambaran isu-isu strategis penting berupa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang menyebabkan kegagalan, keberhasilan dan alternatif solusi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Analisis Faktor Penyebab Kegagalan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kegagalan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, tujuan program / kegiatan tidak jelas (sasaran tidak terdefinisi). Komunikasi yang buruk atau salah komunikasi. Kurangnya pelacakan kemajuan (kurangnya pemantauan). Dengan memahami penyebab umum kegagalan, organisasi dapat secara proaktif mengurangi risiko dan menavigasi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkenaan dengan Alokasi pagu anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas BPBD-Damkar Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 mendapat pagu sebesar Rp. 94.022.600,- namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan :

1. Bahwa berdasarkan hasil rapat pemantauan situasi, koordinasi lintas sektor dari Perangkat Daerah Teknis terkait, disampaikan sepanjang Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa penyakit maupun wabah zonasi prioritas di wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam perencanaan sub kegiatan tersebut. Dengan demikian, tidak terpenuhinya kondisi objektif dan prasarat substantif pelaksanaan kegiatan, yaitu adanya kejadian darurat kesehatan masyarakat yang memerlukan respon cepat.
2. Bahwa sub kegiatan dimaksud bersifat kontijensi dan responsif, sehingga pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa yang nyata, terverifikasi dan berdampak signifikan. Dalam ketiadaan kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak efektif serta tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Analis Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Indikator keberhasilan merupakan komponen utama dalam menilai sejauh mana satu program/kegiatan mencapai tujuannya, kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang ditetapkan, kesesuaian faktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan dan membangun sistem monitoring untuk pembangunan selanjutnya.

- Analisis Rencana Tidak Lanjut/Solusi terhadap Pelaksana Program/Kegiatan

Rencana tindak lanjut adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Tindak lanjut kegiatan merupakan elemen penting alam manajemen program yang efektif. Hal ini melibatkan penyampaian informasi status secara berkala untuk menjaga agar para pemangku kepentingan tetapi mengetahu perkembangan kegiatan. Setelah kegiatan selesai, strategi tidak lanjut mencakup pemantauan dan evaluasi hasil untuk memastikan tujuan tercapai.

x. Terwujudnya Pemerintah yang Inovasi Berbasis Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin perasat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, terwujudnya pemerintahan yang inovatif berbasis digitalisasi menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintahan berbasis digital menekankan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan secara terintegrasi. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih akurat berbasis data (data-drive decision making). Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan transparan.

Inovasi dalam pemerintahan digital juga mendorong terciptanya budaya kerja yang adiktif, kolaboratif dan berorientasi hasil. Aparatur sipil negara dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian transformasi digital tidak hanya menyentuh aspek sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan mindset dan buaya kerja.

Melalui komitmen yang kuat, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem yang berkelanjutan diharapkan terwujudnya pemerintahan yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman secara berkelanjutan. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.112 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	0	0
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN					**0**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digitalisasi, salah satu indikaotr yang digunakan adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada periodi pelaporan target Indeks SPBE ditetapkan sebesar 2,50, dengan realisasi yang dicapai sebesar 0 %. Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 untuk Kabupaten Karimun tidak dilakukan penilaian oleh kemenpan RB karen adanya masa transisi kebijakan SPBE. SPBE dilaporkan bertaransformasi menjadi konsep Pemerintahan Digital (PEMDI), serta penyesuaian regulasi pada masa transisi pemerintahan.

Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan dilakukan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2022 yang memperbarui model evaluasi SPBE agar selaras dengan agenda transpormasi digital nasional.

Perubahan ini menekankan integrasi layanan digital, keamanan informasi serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektornik. Dengan adanya regulasi tersebut pelaksanaan dan penguatan indeks SPBE memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur. Evaluasi Indeks SPBE tidak hanya menjadi alat ukur administratif, tetapi juga instrumen strategi dalam mendorong percepatan transfomasi digital pemerintah serta mendukung agenda Reformasi Birokrasi berbasis digital secara berkelanjutan.

Berikut hasil analisis Pencapaian Sasaran "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" Tahun 2025:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan hasil pengukur kinerja tahun berjalan, capai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Target Indeks SPBE pada tahun ini di tetapkan sebesar 2,5, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 0. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja 0% Dari target. Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 untuk Kabupaten Karimun tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB karena adanya masa transisi kebijakan SPBE. SPBE dilaporkan bertransformasi menjadi Konsep Pemerintahan Digital (PEMDI), serta penyesuaian regulasi pada masa transisi pemerintahan dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.113 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun Berjalan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian %	Katagori
			2024	2025		
1	Indeks SPBE	2,5	2,33	0	0	-
	J U M L A H					

Berdasarkan data indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 2,50 dengan realisasi yang dicapai sebesar 2,33. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut tercapai 0, sehingga capaian kinerja yang diperoleh juga berada pada 0 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 belum terdapat realisasi atau penilaian terhadap indikator Indeks SPBE, sehingga kinerja belum dapat dihitung atau dibandingkan secara optimal dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum dilaksanakannya proses evaluasi atau penilaian SPBE pada tahun berjalan oleh instansi yang berwenang.

Meskipun demikian, capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai nilai 2,33 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan pemerintah daerah telah berjalan pada tingkat tertentu. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus mendorong penguatan penerapan SPBE melalui peningkatan integrasi sistem informasi, penguatan tata kelola teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital pemerintahan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.114 Rekap Target dan Relaisasi Indeks SPBE dari Tahun Ketahun

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Pertumbuhan (%)
2022	2,5	1,58	46,47	58,23
2023	1,58	2,01	127	-21,39
2024	2,3	2,33	101,3	-1,29
2025	2,5	0	0	0
JUMLAH	**8,88**	**5,92**	**274,77**	**35,44**

Berdasarkan data diatas data perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama periode tahun 2022 sampai dengantahun 2025, terlihat adanya dinamika capian kinerja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 2,5, dengan realisasi sebesar 1,58 sehingga capaian kinerja mencapai 46,47 persen dengan pertumbuhan sebesar 58, 23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE pada tahun tersebut masih berada pada tahapan awal penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 1,58 dengan realisasi mencapai 2,01, sehingga capaian kinerja mencapai 127 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pertumbuhan tercatata sebesar -21,39 persen yang menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan periode sebelumnya meskipun capaian kinerja tetap berada diatas target.

Selanjutnya pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 2,3 dengan realisasi sebesar 2,33 sehingga capaian kinerja mencapai 101,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE masih mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun pertumbuhan mengalami penurunan sebesar -1,29 persen. Sementara itu pada tahun 2025 ditetapkan target 2,5 namun realisasi masih tercatat 0, sehingga capaian kinerja dan pertumbuhan juga tercatat 0 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut belum terdapat hasil evaluasi atau penilaian resmi terkait indeks SPBE.

Secara keseluruhan, selama periode 2022-2025 jumlah target komunikatif sebesar 8,88 dengan total realisasi sebesar 5,92 sehingga total capaian mencapai 274,77 persen dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 35,44 persen. Data tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada beberapa tahun terakhir, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan konsisten implementasi guna mencapai target yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

Tabel 3.115 Bobot Perdomen Indeks SPBE

Domen SPBE	Bobot
Kebijakan SPBE	15
Tata Kelola SPBE	20
Manajemen SPBE	30
Layanan SPBE	35
Total Indeks SPBE	**100**

Tabel 3.116 Analisis Perdomen Indeks SPBE Katogori Indeks SPBE

Nilai Indeks	Kategori
1,00 – 1,80	Kurang
1,81-2,60	Cukup
2,61-3,40	Baik
3,41-4,20	Sangat Baik
4,21-5,00	Memuaskan

- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Untuk Indikator Nilai Indeks SPBE Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian indeks tercatat sebesar 1,58. Nilai ini meningkat menjadi 2,01 pada tahun 2023, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,43 poin atau sekitar 27,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 2,33, atau naik sebesar 0,32 poin dari capaian tahun 2023. Secara keseluruhan, tren capaian indeks SPBE dalam kurun waktu 2022–2024 menunjukkan arah perbaikan yang positif dan konsisten, meskipun peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 relatif lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya progres dalam upaya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital, namun masih diperlukan langkah percepatan dan penguatan strategi untuk mencapai kategori indeks yang lebih tinggi sesuai target nasional. Sementara di Tahun 2025 Nilai Indeks SPBE sebesar 0. Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 untuk Kabupaten Karimun tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB karena adanya masa transisi kebijakan SPBE. SPBE dilaporkan bertransformasi menjadi Konsep Pemerintahan Digital (PEMDI), serta penyesuaian regulasi pada masa transisi pemerintahan.

- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Sasaran Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator Indeks SPBE tidak memenuhi target akhir Renstra 2021-2026 karena Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 untuk Kabupaten Karimun tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB karena adanya masa transisi kebijakan SPBE. SPBE dilaporkan bertransformasi menjadi Konsep Pemerintahan Digital (PEMDI), serta penyesuaian regulasi pada masa transisi pemerintahan.

Berikut disampaikan perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah:

Tabel 3.117 Perbandingan Realisasi Tujuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026
Terwujudnya Transpormasi Digital	Indekss Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,5	3,4

Berdasarkan tabel di atas tujuan Terwujudnya Transformasi Digital di lingkungan pemerintah daerah diukur melalui Indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai mana diamanatkan dalam kebijakan nasional SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Penguatan Implementasinya melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan di tetapkan dalam dokumen Renstra untuk Indikator Indeks SPBE adalah sebesar 2,5, sedangkan realisasi yang tercatat masih sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun tersebut dapat diukur atau belum tersedia hasil evaluasi resmi dari pemerintah pusat. Sementara itu dalam target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026, nilai Indeks SPBE ditargetkan mencapai 3,4 yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah berbasis elektronik menuju kategori baik.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mendorong percepatan implementasi SPBE, antara lain melalui penguatan kebijakan internal, peningkatan integrasi sistem informasi pemerintah, pengembangan layanan digital yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks SPBE secara bertahap sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai pada akhir periode Renstra.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Berdasarkan hail evaluasi tahun berjalan, realisasi indeks SPBE tercatat sebesar 0. Apabila dibandingkan dengan standar nasional penilaian SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, nilai tersebut masih sangat jauh di bawah capaian tertinggi Tingkat Nasional yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan nilai Indeks SPBE 4,87 dengan peringkat tertinggi Nasional.

Dibandingkan dengan target peningkatan kualitas tata kelola digital secara nasional, capaian tahun ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah berjalan namun masih memerlukan penguatan pada beberapa domain penilaian, seperti tata kelola, manajemen risiko teknologi informasi, integrasi layanan digital. standar nasional SPBE mendorong instansi pemerintah untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi melalui transformasi digital yang terintegrasi, aman dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, meskipun capaian tahun ini menunjukkan progres yang cukup baik, masih diperlukan langkah strategis dan percepatan implementasi agar dapat sejajar atau melampaui rata – rata nasional serta mencapai katagori yang lebih tinggi pada evaluasi berikutnya.

Kedepan, penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM digital, optimalisasi pemanfaatan aplikasi terintegrasi serta evaluasi berkelanjutan terhadap indikator yang belum optimal menjadi kunci dalam meningkatkan posisi capaian daerah dibandingkan standar nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan serta upaya perbaikan kedepan**

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks SPBE tahun berjalan, capaian diperoleh menunjukkan adanya dinamika dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal.

Dari sisi keberhasilan, peningkatan nilai pada beberapa aspek didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong transportasi digital, penyusunan kebijakan internal SPBE serta memulai terintegrasinya beberapa aplikasi layanan pemerintahan. Selain itu, peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya digitalisasi proses bisnis juga berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola SPBE.

Apabila dibandingkan dengan tren seblumnya, fluktuasi nilai menunjukkan bahwa implementasi SPBE masih berada dalam tahap konsolidasi dan penguatan sistem. Oleh karena itu diperlukan langkah perbaikan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Faktor penghambat dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah:

1. Dokumen kebijakan SPBE belum lengkap;
2. Belum memiliki Arsitektur SPBE sesuai standar;
3. Keterbatasan anggaran TIK;
4. Minimnya Informasi Layanan Publik;
5. Rendahnya literasi Digital ASN.

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi atau perbaikan seperti penyusunan kebijakan yang lengkap untuk mendukung tata kelola SPBE, integrasi layanan, integrasi sistem serta penguatan SDM.

- **Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam melaksanakan seluruh Program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan, Untuk penyerapan Anggaran masih menggunakan Program dan Kegiatan di awal Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.118 Analisis Efisiensi Sasaran 16

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Anggaran	Tingkat Efisiensi Kinerja
1	2	3	4	5	6 = (100-5)	7 = (4-5)
1	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	0 %	81,82%	18,18% (Efisien)	-81,82%

Berdasarkan data diatas, Sarana Strategi Meningkatkan Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diukur melalui indikator kinerja Indeks SPBE. Pada tahun 2025, capaian kinerja yang diperoleh masih sebesar 0%, sementara tingkat penyerapan anggaran mencapai 81,82% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari sisi efisiensi anggaran, nilai 18,18 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tergolong efisien, karena masih terdapat sisi anggaran yang tidak terserap sepenuhnya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, tingkat anggaran belum mampu menghasilkan output atau capaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan.

Kondisi ini mengindikasi bahwa meskipun sebagian besar anggaran telah digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait SPBE, namun hasil evaluasi kinerja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan atau belum tersedia nilai evaluasi resmi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan serta penguatan koordinasi antara perangkat daerah dalam implementasi SPBE sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal dan mampu menghasilkan peningkatan nilai indeks SPBE pada periode berikutnya.

- **Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Untuk mencapai target sasaran strategis “Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)” dilakukan melalui 4 (empat) Program antara lain Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik , Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan total anggaran program sebesar Rp. 3.260.066.725,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.667.354.533,- atau 81,82% yang bermakna terjadi efisiensi anggaran sebesar 18,18%.

xi. Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Birokrasi yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berintegrasi, disiplin, serta bekerja berdasarkan sistem merit dan standar kinerja yang jelas. Sementara itu, birokrasi yang bersih mencerminkan komitmen kuat terhadap pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta penerapan prinsip transparansi dan

integrasi dalam setiap proses kerja.

Akuntabilitas menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif maupun substansi kepada masyarakat. Melalui penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan terciptanya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel, disusun sebagai arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat budaya kerja berorientasi hasil serta mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan sasaran ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bekerja secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh pemerintah daerah.

Adapun indikator pendukung sebagai ukuran keberhasilan dari capaian sasaran ini terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel adalah indikator nilai LPPD dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.119 Capaian Indikator

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LPPD	4,1000	3,1324	76,40
2	Indeks ReformasiBirokrasi	78,00	77,85	99,81
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	3,30	2,600	78,79
Rata-Rata Tingkat Capaian				**178,6**

Sumber : *Sekretariat Daerah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur sasaran terwujudnya birokrasi yang profesioanal, bersih dan akuntabel yaitu nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Manajemen Risiko Indeks.

Pada indikator Nilai LPPD target yang ditetapkan sebesar 4,1000 dengan realisasi sebesar 3,1324 atau mencapai 76,40%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam pemenuhan indikator kinerja makro, tata kelola pemerintahan serta konsistensi pelaporan. Sementara itu, pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari target sebesar 78,00 berhasil direalisasi sebesar 77,85 dengan tingkat capaian 99,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Hal ini

mencerminkan adanya konsisten dalam implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi meskipun masih diperlukan penyempurnaan untuk mencapai target secara optimal.

Adapun pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks, target sebesar 3,30 berhasil direalisasikan sebesar 2,600 dengan tingkat capaian 78,79%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif khususnya dalam indentifikasi, analisis dan pengendalian risiko pada proses bisnis organisasi.

Secara keseluruhan rata – rata tingkat capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, meskipun terdapat variasi capaian antara indikator. Ke depan diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah pada indikator nilai LPPD agar seluruh indikator dapat mencapai bahkan melampau target yang telah ditetapkan, sehingga sasaran terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.

Indikator persentase nilai LPPD dihitung dengan rumus realisasi Nilai LPPD dibagi Target Nilai LPPD dikali 100%. Persentase capaian nilai LPPD dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi nilai yang diperoleh dengan target nilai yang telah ditetapkan pada awal tahun, kemudian dikalikan 100 persen. Dengan kata lain realisasi nilai LPPD dibagi dengan target nilai LPPD, lalu hasilnya dikonversikan ke dalam bentuk persentase. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan dengan sasaran yang telah direncanakan. Apa bila hasil perhitungan mendekati atau melebihi 100 persen, maka kinerja dapat dikategorikan sangat baik atau melampaui target. Sebaiknya, apabila persentase capaian masih dibawah 100 persen, maka diperlukan evaluasi dan langka perbaikan terhadap aspek – aspek yang mempengaruhi penilaian LPPD.

Indikator persentase Indeks Reformasi Birokrasi dapat juga dihitungan dengan rumus jumlah perangkat daerah yang difasilitasi di bagi jumlah seluruh perangkat daerah yang menjadi sasaran dikali 100 persen. Dengan kata lain jumlah perangkat daerah yang telah difasilitasi dibagi dengan total perangkat daerah yang menjadi objek fasilitasi, lalu dikonversikan ke dalam bentuk persentase. Perhitungan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan pelaksanaan fasilitasi kinerja dan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan untuk persentasi capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks dihitung dengan cara membagi realisasi nilai yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan pada awal periode, kemudian dikalikan 100 persen. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat tingkat keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Apa bila hasil perhitungan melebihi 100 persen maka implementasi manajemen risiko dinilai telah melampaui target yang direncanakan. Sebaiknya apa bila masih di bawah 100 persen maka diperlukan penguatan pada proses identifikasi, analisis dan pengendalian risiko di lingkungan organisasi.

Berikut ini analisis pencapaian sasaran strategi terwujudnya Birokrasi yang profesional, Bersih dan Akuntabel Tahun 2025:

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel terlihat adanya dinamika capaian pada masing – masing indikator.

Pada indikator Nilai LPPD, capaian tahun 2024 sebesar 3,1324, sedangkan untuk tahun 2025 belum tersedia (N/A). Dengan belum tersedianya data tahun 2025, evaluasi tren peningkatan atau penurunan belum dapat dilakukan. Namun demikian capaian tahunan 2024 menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi terjadi sedikit penurunan dari 78,64 pada tahun 2024 menjadi 77,85 pada tahun 2025. Meskipun penurunannya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kembali pada area perubahan Reformasi Birokrasi, seperti manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar capai dapat kembali meningkat dan melampau hasil tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 3,041 pada tahun 2024 menjadi 2,600 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal belum berjalan optimal pada tahun 2025. Hal ini dapat di sebabkan oleh belum optimalnya identifikasi risiko, pemantauan tindak lanjut mitigasi risiko atau belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan manajemen risiko Untuk mengetahui dengan jelas tentang capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 3.120 Capaian Indikator Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

No	Indikator	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025
1	Nilai LPPD	3,1324	N/A
2	Indeks ReformasiBirokrasi	78,64	77,85
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	3,041	2,600

Sumber: Kabupaten Karimun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, dibandingkan tahun 2024, capaian tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsitensi dan keberlanjutan kinerja, khususnya pada aspek Reformasi Birokrasi dan manajemen risiko. Oleh karen itu diperlukan langkah evaluasi menyeluruh, penguatan komitmen pimpinan, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat kembali meningkat dan lebih stabil.

Selanjutnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara menyeluruh. Penilaian LPPD

dilakukan oleh pemerintah pusat melalui evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggara pemerintah daerah yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, capaian kinerja pembangunan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik serta akuntabilitas pelaporan kinerja daerah. Nilai LPPD menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan seuai dengan peraturan perundang-undangan – undangan yang berlaku. Semakin tinggi nilai LPPD yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas penyelenggaraan pemerintahan dareah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja.

Selain itu , hasil evaluasi LPPD juga menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Melaluai nilai LPPD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga dapat merumuskan langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 3.121 Bobot Komponen Penilaian LPPD Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	70%
2	Kesesuaian Materi LPPD	15%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD	15%
Total Komponen Pengungkit		100%

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (70%) merupakan komponen utama yang menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, program pembangunan serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kesesuaian materi LPPD (15%), menilai kelengkapan, kesesuaian format dan kualitas substansi laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman penyuluhan LPPD. Sedangkan untuk ketepatan waktu penyampaian LPPD (15%), menilai kedisiplinan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pembobotan tersebut, nilai akhir LPPD menjadi gambaran menyeluruh mengenai kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja, kepatuhan administrasi maupun akuntabilitas pelaporan.

Selanjutnya Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perubahan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui evaluasi terhadap beberapa komponen area perunbahan Reformasi Birokrasi seperti manajemen perubahan, penata peraturan perundang – undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja,

penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh, maka semakin baik pula tingkat implementasi Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta program Reformasi Birokrasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengetahui dengan jelas hasil komponen penilaian dari komponen pengungkit dan komponen hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.122 Komponen Penilaian Pengungkit dan Hasil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Strategi Pelaksanaan RB General	**10**	6,59	6,06
b.	Capaian Pelaksanaan RB General	**40**	26,86	26,95
c.	Capaian Sasaran Strategi	**50**	37,56	36,48
	Total RB General	**100**	**71,01**	**69,49**
d.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	**5**	0,26	0,44
e.	Capaian Indikator Dampak	**15**	7,37	7,44
	Total RB Tematik	**20**	**7,63**	**7,88**
	Nilai Hasil Evaluasi	**120**	**78,64**	**77,37**
	Predikat		**BB**	**BB**

Sumber : *Kemenpan-RB RI, Tahun 2024*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tercatat sebesar 78,64 dengan predikat BB, sedangkan pada tahun 2025 nilai yang diperoleh sebesar 77,37 dan masih berada pada predikat BB.

Dilihat dari komponen Reformasi Birokrasi General pada tahun 2024 total nilai yang diperoleh sebesar 71,01, sementara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 69,49. Peraturan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkungnya nilai pada komponen Strategi Pelaksanaan RB General dari 6,59 pada tahun 2024 menjadi 6,06 pada tahun 2025. Sementara itu, pada komponen Capaian Pelaksanaan RB General mengalami sedikit peningkatan dari 26,86 menjadi 26,95 namun pada komponen Capaian Sasaran Strategi terjadi penurunan dari 37,56 menjadi 36,48. Di sisi lain pada komponen Reformasi Birokrasi Tematik justru menunjukkan peningkatan Total nilai RB Tematik meningkat dari 7,63 pada tahun 2024 menjadi 7,88 pada tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai pada komponen Strategi Pelaksanaan RB Tematik dari 0,26 menjadi 0, 44 serta kenaikan pada Capaian Indikator Dampak dari 7,37 menjadi 7,44.

Secara keseluruhan, meskipun nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun predikat yang diperoleh masih tatap berada pada kategori BB. Hal ini

menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah masih berada pada kategori baik, meskipun masih diperlukan upaya penguatan pada aspek strategi pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis agar nilai Reformasi Birokrasi pada tahun – tahun mendatang dapat meningkat secara lebih optimal.

Kemudian Untuk mengetahui dengan jelas capaian pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.123 Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Indikator Penilai		Range Nilai	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	**0-5**	5	5
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	**1-5**	3,20	2,69
3.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	**0-3,5**	3,50	1,50
4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**0-100**	75,98	75,81
5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	**0-100**	0	0
6.	Tingkat Digitalisasi Arsip	**0-100**	40.52	59
7.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor) yang Sudah di Selesaikan	**1-5**	3	4
8.	Indeks Kualitas Kebijakan	**0-100**	44,27	87,27
9.	Indeks Reformasi Hukum	**0-100**	76,84	87,48
10.	Indeks Pembangunan Statistik	**1-5**	2,21	2,21
11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	**0-100**	76,93	86,33
12.	Indeks Sistem Merit	**0-410**	271	271
13.	Indeks Pelayanan Publik	**0-5**	4,37	4,28
14.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	**0-100**	90,48	90,48

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran terhadap berbagai indikator penilaian tata kelola pemerintah, terdapat beberapa dinamika capaian antara tahun 2024 dan tahun 2025. Secara umum, sebagian indikator menunjukkan peningkatan kinerja, sementara beberapa indikator lainnya mengalami penurunan maupun stagnan.

Pada indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, nilai yang diperoleh pada tahun 2024 dan 2025 tetap berada pada angka 5 dari rentang nilai 0-5. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birorkasi telah berjalan optimal dan konsisten. Namun demikian pada indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terjadi penurunan dari 3,20 pada tahun 2024 menjadi 2,69 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan khususnya dalam aspek manajemen risiko, pengendalian kegiatan serta monitoring dan evaluasi. Pada indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 3,50 pada tahun 2024 menjadi 1,50 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum berjalan optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Sementari itu, pada indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) relatif stabil yaitu dari 75,98 pada tahun 2024 menjadi 75,81 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja masih berada pada kategori baik dan cukup konsisten.

Untuk indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), nilai pada tahun 2024 dan 2025 masih berada pada angka 0, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan arsitektur SPBE belum sepenuhnya berjalan atau belum dilakukan penilaian secara optimal. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan antara lain Tingkat Digitalisasi Arsip yang meningkatkan dari 40,52 pada tahun 2024 menjadi 59 pada tahun 2025. Selain itu, tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPORAN) juga mengalami peningkatan dari 3 menjadi 4 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada Indeks Kualitas Kebijakan yang meningkat dari 44,27 pada tahun 2024 menjadi 87,27 pada tahun 2025 serta Indeks Reformasi Hukum yang meningkatkan dari 76,84 menjadi 87,48. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan serta penguatan aspek regulasi di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Tata Kelola Pengadaan juga mengalami peningkatan dari 76,98 pada tahun 2024 menjadi 86,33 pada tahun 2025 yang menunjukkan semakin baiknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Statistik tetap berada pada angka 2,21 yang menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan pada pengelolaan statistik sektoral.

Pada indikator Indeks Sistem Merit, nilai tetap berada pada angka 271 pada kedua tahun tersebut yang menunjukkan konsisten dalam penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Disisi pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik mengalami sedikit penurunan dari 4,37 pada tahun 2024 menjadi 4,28 pada tahun 2025, meskipun masih berada pada kategori baik. Sementara itu Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tetap stabil pada angka 90,48 pada kedua tahun tersebut, yang menunjukkan bahwa keputusan terhadap standar pelayanan publik masih terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penilaian indikator menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintah mengalami perkembangan positif pada beberapa aspek khususnya pada kualitas kebijakan, reformasi hukum, digitalisasi arsip, serta tata kelola pengadaan. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut seperti maturitas SPIP, pembangunan Zona Integritas serta implementasi arsitektur SPBE agar kinerja birokrasi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Kemudian Untuk mengetahui dengan jelas Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.124 Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Indikator Penilai		Range Nilai	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE)	**1-5**	2,33	2,33
2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	**0-100**	92,42	93,62
3.	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	**0-100**	90	72
4.	Opini BPK	**TMP-WTP**	WTP	WTP
5.	Tindak Lanjut Rekomendasi	**0-100**	84,09	84,53
6.	Indeks BerAkhlak	**0-100**	72,99	72,99
7.	Survei Penilaian Integritas	**0-100**	75,77	73,15
8.	Survei Kepuasan Masyarakat	**0-100**	83,88	93,17

Berdasarkan data diatas hasil pengukuran terhadap berbagai indikator penilaian kinerja pemerintah, terdapat beberapa perubahan capaian antara tahun 2024 dan tahun 2025. Secara umum, sebagian indikator menunjukkan peningkatan kinerja, sementara beberapa indikator lainnya mengalami penurunan maupun tetap stabil. Pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), nilai yang diperoleh pada tahun 2024 dan tahun 2025 berada pada angka yang sama yaitu 2,33 dari rentang nilai 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE masih berada pada tingkat yang relatif stabil, namun masih memerlukan upaya peningkatan untuk mencapai tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih optimal. Untuk indikator Capaian Indikator Kinerja Utama Makro terjadi peningkatan dari 92,42 pada tahun 2024 menjadi 93,62 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian indikator pembangunan daerah yang bersifat makro. Namun demikian, pada indikator capaian Indikator Kinerja Non Makro terjadi penurunan dari 90 pada tahun 2024 menjadi 72 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa pencapaian beberapa indikator kinerja sektor atau program tertentu masih perlu mendapat perhatian dan penguatan dalam pelaksanaan. Pada indikator Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Hal ini mewujudkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik, transparan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mengalami sedikit peningkatan dari 84,09 pada tahun 2024 menjadi 84,53 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pada indikator Indeks BerAKHLAK nilai yang diperoleh pada tahun 2024 dan tahun 2025 tetap berada pada angka 72,99 yang menunjukkan konsistensi dalam penerapan nilai – nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagai budaya kerja dilingkungan pemerintahan. Sementara itu pada indikator Survey Penilaian Integritas terjadi

penurunan dari 75,77 pada tahun 2024 menjadi 73,17 pada tahun 2025. Penurunan menunjukkan perlunya penguatan kembali budaya integritas, transparansi dan upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Di sisi lain, indikator Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 83,88 pada tahun 2024 menjadi 93,17 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat mengalami peningkatan yang cukup baik.

Secara keseluruhan, hasil capaian indikator menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah masih berada pada kondisi yang cukup baik dengan beberapa indikator yang mengalami peningkatan khususnya pada capaian indikator makro dan kepuasan masyarakat. Namun demikian, beberapa aspek seperti capaian indikator non makro serta peningkatan integritas masih perlu menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya dengan melakukan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana aksi di level perangkat daerah. Kemudian Pemerintah Kabupaten Karimun mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN pada setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.125 Jumlah Pegawai yang Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	NAMA OPD	JUMLAH WAJIB LHKPN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TIKDA LAPOR	%
1	2	3	4	5	6
1	Pimpinan Tertinggi	1	1	0	100
2	Wakil Pimpinan	1	1	0	100
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	80	80	0	100
4	Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun	7	7	0	100
5	Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	45	45	0	100
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	10	10	0	100
7	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	23	23	0	100
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	18	18	0	100
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupatan Karimun	8	8	0	100
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun	8	8	0	100
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun	11	11	0	100
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun	29	29	0	100
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun	87	87	0	100
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun	30	30	0	100
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	8	0	100

No	NAMA OPD	JUMLAH WAJIB LHKPN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TIKDA LAPOR	%
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Karimun				
16	Dinas Sosial Kabupaten Karimun	5	5	0	100
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun	11	11	0	100
18	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun	11	11	0	100
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	8	8	0	100
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karimun	8	8	0	100
21	Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	32	32	0	100
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun	9	9	0	100
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun	7	7	0	100
24	Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun	8	8	0	100
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun	8	8	0	100
26	Dinas Perikanan Kabupaten Karimun	16	16	0	100
27	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun	14	14	0	100
28	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun	11	11	0	100
29	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	10	10	0	100
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	11	11	0	100
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun	14	14	0	100
32	RSUD M. Sani Kabupaten Karimun	17	17	0	100
33	RSUD Tanjung Batu Kabupaten Karimun	6	6	0	100
34	Perumda Bumi Berazam Jaya	2	2	0	100
35	Badan Usaha Kepelabuhanan - PT. Karya Karimun Mandiri	5	5	0	100
36	Kecamatan	271	271	0	100
JUMLAH		**850**	**850**	**0**	**100**

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun 2024*

Pelaporan Laporan harga kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik. Dari total 850 wajib lapor, seluruhnya telah menyampaikan laporan LHKPN dengan jumlah laporan sebanyak 850, sehingga tidak terdapat pengawai yang tidak melaporkan (0 pegawai). Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100%.

Capaian ini merata di seluruh perangkat daerah, melalui dari unsur pimpinan tertinggi dan wakil pimpinan, sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, Hingga BUMD. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kewajiban pelaporan LHKPN yang tercermin dari tidak adanya keterlambatan maupun ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif inspektorat dan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta monitoring secara berkala terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN. Selain itu,

meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi faktor pendukung utama

Secara keseluruhan, capaian 100% ini mencerminkan tata Kelola pemerintah yang semakin baik, khususnya dalam aspek transparan dan pencegahan korupsi. Kedepan, Upaya yang perlu dilakukan Adalah mempertahankan tingkat kepatuhan ini secara konsisten serta terus meningkatkan kualitas pelaporan agar lebih akurat, lengkap dan tepat waktu.

Tabel 3.126 Jumlah Pegawai yang Menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	NAMA OPD	JUMLAH ASN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TIKDA LAPOR	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	162	152	11	93,21
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun	50	42	8	84,00
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	58	58	0	100
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	59	55	4	93,22
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	134	125	9	93,28
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	67	67	0	100
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun	47	36	1	97,87
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun	41	35	6	85,37
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun	49	48	1	97,96
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun	2.428	2.428	0	100
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun	573	573	0	100
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun	87	87	0	100
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun	28	28	0	100
14	Dinas Sosial Kabupaten Karimun	28	28	0	100
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun	36	36	0	100
16	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun	38	36	2	94,74
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	42	43	1	97,67
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karimun	29	29	0	100,00
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	69	51	18	73,91
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun	46	45	1	97,83
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun	37	37	0	100
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun	31	30	1	96,77
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun	33	33	0	100

No	NAMA OPD	JUMLAH ASN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TIKDA LAPOR	%
1	2	3	4	5	6
24	Dinas Perikanan Kabupaten Karimun	46	46	0	100
25	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun	14	14	0	100
26	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun	67	67	0	100
27	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	32	32	0	100
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	37	37	0	100
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun	76	74	2	97,37
30	RSUD M. Sani Kabupaten Karimun	305	256	49	83,93
31	RSUD Tanjung Batu Kabupaten Karimun	90	87	3	96,67
32	Kecamatan Karimun	47	47	0	100
33	Kecamatan Tebing	39	39	0	100
34	Kecamatan Meral	51	49	2	96,08
35	Kecamatan Meral Barat	37	28	9	75,68
36	Kecamatan Buru	24	24	0	100
37	Kecamatan Kundur	33	33	0	100
38	Kecamatan Kundur Barat	29	29	0	100
39	Kecamatan Kundur Utara	22	22	0	100
40	Kecamatan Ungar	19	18	1	94,74
41	Kecamatan Belat	10	8	2	80,00
42	Kecamatan Moro	31	31	0	100
43	Kecamatan Durai	15	14	1	93,33
44	Kecamatan Selat Gelam	11	11	0	100,00
45	Kecamatan Sugie Besar	7	7	0	100,00
JUMLAH		**5.232**	**5.100**	**132**	**97,48**

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun 2024*

Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari total 5.232 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5.100 ASN telah menyampaikan laporan, sementara 132 ASN belum melaporkan sehingga tingkat kepatuhan secara keseluruhan mencapai 97,48%. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian pelaporan mencapai 100% di antaranya Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta beberap dinas seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta sejumlah kecamatan. Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas aparatur.

Masih terdapat beberapa OPD dengan tingkat kepatuhan yang relatif lebih rendah. Di antaranya Adalah Dinas Perhubungan dengan capaian 73,91%, Kecamatan Meral Barat 75,68%, Kecamatan Belat 80,00% seta RSUD M.Sani 83,93. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ASN yang belum memenuhi kewajiban pelaporan

yang dapat disebabkan oleh faktor administratif, kurangnya pemahaman atau keterbatasan dalam proses pelaporan

Secara umum, capaian sebesar 97,48% mengindikasikan bahwa kesadaran aparatur dalam melaporkan LHKAN sudah sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait serta adanya sistem monitoring yang cukup efektif. Diperlukannya Upaya peningkatan kepatuhan secara menyeluruh melalui penguatan sosialisasi, pendampingan teknis serta penegakan disiplin bagi ASN yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan. Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN dapat memenuhi kewajiban LHKPN secara tepat waktu dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintah yang transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyampaian laporan harta kekayaan, baik dari pejabat maupun ASN nya terlaporkan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun patuh dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Manajemen risiko merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermen). Penerapan manajemen risik bertujuan untuk mengidentifikasikan, menganalisis serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi hambatan serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya menerpakan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan sehingga setiap potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis dapat diantisipasi sejak dini. Pelaksanaan manajemen risiko dilingkungan pemerintah Kabupaten Karimun juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efektivitas pengelolaan pemerintah. Melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengelola berbagai potensi risiko secara tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu penerapan manajemen risiko juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Penerapan manajemen risiko dilingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Manajemen risiko menjadi suatu pendekatan sistimatis dalam mengidentifikasi, menganalisis serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Melalui penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah diharapkan mampu

menganstisipasi berbagai kemungkinan hambatan maupun permasalahan yang dapat muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengambil langkah – langkah mitigasi yang tepat guna meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya manajemen risiko yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengelola potensi risiko secara lebih baik sehingga pencapaian kinerja organisasi dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten mencakup seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Manajemen risiko diterapkan secara terintegrasi dalam setiap tahapan kegiatan organisasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi berbagi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Risiko yang dimaksud dapat berkaitan dengan aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, ruang lingkup manajemen risiko juga mencakup proses analisis dan penilaian tingkat risiko, penetapan langkah – langkah pengendalian atau mitigasi risiko serta pemantauan secara berkala terhadap efektivitas pengelolaan risiko yang telah dilakukan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengelola potensi risiko secara sistematis dan terstruktur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Melalui penerapan manajemen risiko yang menyeluruh, pemerintah kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Penerapan manajemen risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penting dalam SPIP yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam kerangka SPIP, manajemen risiko menjadi bagian dari proses pengendalian internal yang membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, pemerintah daerah dapat mengantisipasi berbagai hambatan maupun ketidakpastian yang berpotensi mengganggu pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, manajemen risiko juga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan

berorientasi pada kinerja. Penerapan manajemen risiko membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas kinerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, integrasi antara manajemen risiko, SPIP dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu langka strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Mulai tahun 2024 Indikator "Nilai MRI" digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan sasaran kinerja daerah yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel. Penerapan Manajemen Risiko merupakan upaya pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko bertujuan untuk melindungi aset organisasi, meminimalkan kerugian, memanfaatkan peluang baru, menjaga stabilitas dan keberlanjutan, mengurangi dampak negatif dari risiko serta mengubah risiko menjadi peluang. Pemerintah Kabupaten Karimun sudah memiliki pedoman dalam mengelola risiko yaitu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan turunannya yaitu SK Bupati nomor 363 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pengelolaan risiko sudah dilakukan mulai level Strategis Pemda, Strategis Perangkat Daerah Maupun Operasional Perangkat Daerah.

Tabel 3.127 Komponen Penilaian Pengungkit dan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Areal Komponen Penilaian		Bobot (%)	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	**PERENCANAAN**	**40,00**	**1,400**	**1,000**
	Kualitas Perencanaan	40,00	1,400	1,000
2.	**KAPABILITAS**	**30,00**	**0,731**	**0,747**
	Kepemimpinan	5,00	0,122	0,109
	Kebijakan Manajemen Risiko	5,00	0,138	0,150
	Sumber Daya Manusia	5,00	0,125	0,125
	Kemitraan	2,50	0,056	0,056
	Proses Manajemen Risiko	12,50	0,291	0,306
3.	**HASIL**	**30,00**	**0,909**	**0,853**
	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75	0,516	0,516
	Outcomes	11,25	0,394	0,338
	TOTAL	**100,00**	**3,041**	**2,600**

Sumber : *Kemenpan-RB RI, Tahun 2025*

Berdasarkan dari data di atas hasil penilaian penerapan manajemen risiko, nilai indeks manajemen risiko pada tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan total nilai sebesar 2,600 pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dilingkungan pemerintahan daerah masih berada pada Tingkat yang sama, meskipun terdapat beberapa perubahan nilai pada masing –

masing area penilaian.

Pada area perencanaan yang miliki bobot sebesar 40% nilai yang diperoleh pada tahun 20224 sebesar 1,400 sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 1,000. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada aspek kualitas perencanaan yang menunjukkan bahwa proses perencanaan manajemen risiko masih melakukan penguatan khususnya dalam hal integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Sementara itu, pada area kebijakan dengan bobot 30% terjadi sedikit peningkatan dari 0,731 pada tahun 2024 menjadi 0,747 pada tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti kebijakan manajemen risiko yang meningkat dari 0,138 menjadi 0,150 serta proses manajemen risiko yang meningkat dari 0,291 menjadi 0,306. Namun demikian pada komponen kepemimpinan mengalami sedikit penururnan dari 0,122 menjadi 0,109 sedangkan sumberdaya manusia dan kemitraaan relative tetap ada nilai yang sama. Pada area hasil yang miliki bobot sebsar 30%, nilai diperolah pada tahun 2024 sebesar 0,909 sendangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,853. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai pada komponen outcomes dari 0,394 pada tahaun 2024 menjadi 0,338 pada tahun 2025, meskipun pada komponen aktivitas penanggulangan risiko nilai tetap stabil pada angka 0,516.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat dinamika pada masing – masing area penilaian, nilai total indeks manajemen risiko tetap berada pada angka 2,600 pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek perencanaan dan peningkatan hasil implementasi manajemn risiko agar dapat dapat memberikan dampakyang lebih optimal terhadap perencanaan tujuan organisasi dan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) menunjukkan bahwa target yang ditatapkan sebesar 4,00, sedangkan realiasi yang diperoleh sebsear 2,600. dengan demikian, Tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut Adalah sebesar 65,00%. Untuk lebih jelas dapat dilihat dapat tabel dibawah ini:

Tabel 3.128 Nilai MRI Kabupaten Karimun Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)	4,00	2,600	65,00

Capaian ini menunjukkan. Capaian ini menjunkkan bahwa implementasi manajemen risiko di lingkungan organisasi telah dilaksanakan, namun masih belum sepeuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko masih memerlukan pengautan, khusunya dalam aspek perencanaan, penguatan kapasitas organisasi serta peningkatan hasil dari penerapan manajemen risiko pada masing – masing perangkat daerah. Meskipun demikian, Upaya penerapan manajemen risiko telah memberikan dasar bagi penguatan system pengendalian internal pemerintah serta peningkatan kualitas tata Kelola pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan Langkah-langkah perbaikan dan penguatan secara berkelanjutan,

seperti peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap manajemen risiko, penguatan kebikakan dan proses pengelolaan risiko, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko agar capaian indikator pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat secara lebih optimal.

Berikut adalah rincian penilaian MRI Kabupaten Karimun tahun 2025 :

Tabel 3.129 Nilai MRI Kabupataen Karimun Tahun 2025

Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)		Bobot (%)	Sekor	Tahun 2025
1.	**PERENCANAAN**	**40,00**		**1,000**
	Kualitas Perencanaan	40,00	2,500	1,000
2.	**KAPABILITAS**	**30,00**		**0,747**
	Kepemimpinan	5,00	2,188	0,109
	Kebijakan Manajemen Risiko	5,00	3,000	0,150
	Sumber Daya Manusia	5,00	2,500	0,125
	Kemitraan	2,50	2,250	0,056
	Proses Manajemen Risiko	12,50	2,450,	0,306
3.	**HASIL**	**30,00**		**0,853**
	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75	2,750	0,516
	Outcomes	11,25	3,000	0,338
	TOTAL	**100,00**		**2,600**

Komponen penilaian MRI terdiri dari Kualitas Perencanaan Kepemimpinan, Kebiijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko dan Outcome. Dari data pengukuran diatas dilakukan analisis penyebab keberhasilan pengelolaan MRI di Kabupaten Karimun yaitu semakin meningkatnya kesadaran setiap perangkat daerah sebagai Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam mengelola risiko di perangkat daerahnya masing-masing, pelaksanaan penilaian risiko di reviu oleh Inspektorat, pengelolaan risiko juga di monitor secara berkala setiap triwulannya serta melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Bupati Karimun melalui Unit Manajemen Risiko Kabupaten, hal-hal tersebut cukup mempengaruhi pencapaian di level Kabupaten. Agar pengelolaan risiko perangkat daerah terus mengalami peningkatan, mulai tahun 2025 Inspektorat Daerah juga telah melakukan evaluasi kematangan manajemen risiko perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Pembandingan dengan nilai tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena penilaian MRI Kabupaten baru dimulai di tahun 2025 ini.

- **Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta upaya perbaikan ke depan**

Analisa penyebab keberhasilan ke depan terkait Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Manajemen Risiko Adalah :

1. Nilai LPPD;
    - Peningkatan koordinasi dan singkronisasi data antara perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peningkatan Kualitas perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan daerah yang terukur dan sesuai indikator kinerja;
- Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pelaporan LPPD agar lebih akurat dan sesuai pedoman;
- Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam memastikan pelaksanaan urusan pemerintah berjalan optimal.

2. Indeks Reformasi Birokrasi;
   - Penguatan implementasi program Regormasi Birokrasi pada seluruh area perubahan;
   - Peningkatan kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
   - Penguatan pengawasan internal serta peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   - Peningkatan kualitas pelayanan public melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
   - Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.
3. Nilai Manajemen Risiko Indeks;
   - Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam penerapan menajemen risiko;
   - Integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan perangkat daerah;
   - Penyusunan peta risiko organisasi secara lebih komprehensif pada setiap perangkat daerah;
   - Penguatan system monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko;
   - Peningkatan peran pimpian dalam mendorong budaya sadar risiko dilingkungan organisasi.

Analisa penyebab kegagalan ke depan terkait Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Manajemen Risiko Indeks diantaranya :

1. Nilai LPPD;
   a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data antara perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   b. Belum optimalnya pemenuhan indikator kinerja pada beberap urusan pemerintahan daerah;
   c. Keterabatasan pemahaman aparatur terhadap pedoman penyusunan LPPD;
   d. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggara pemerintah dareah;
   e. Keterlambatan penyampaian data dan laporan dari perangkat daerah yang menjadi bahan penyusunan LPPD.

2. Indeks Reformasi Birokrasi;
   a. Belum optimalnya implementasi program Reformasi Birokrasi pada seluruh area perubahan;
   b. Kurangnya komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi Birokrasi;
   c. Belum maksimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
   d. Masih terbatasnya inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan public;
   e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum berjalan secara optimal.
3. Nilai Manajemen Risiko Indeks;
   a. Belum masyarakatnya penerapan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah;
   b. Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai proses identifikasi, analisis dan mitigasi risiko;
   c. Belum terintegasi manajemen risiko secara optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;
   d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko;
   e. Belum terbentuknya budaya sadar risiko (risk awarness) secara menyeluruh di lingkungan organisasi.

Upaya perbaikan kedepan terkait Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Manajemen Risiko Indeks Adalah ;

1. Nilai LPPD;
   a. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi data antara perangkat daerah daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   b. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan LPPD sesuai dengan pedoman yang berlaku;
   c. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. Mendorong perangkat daerah untuk lebih konsisten dalam pemenuhan indikator kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
   e. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan.
2. Indeks Reformasi Birokrasi;
   a. Mengoptimalkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada seluruh area perubahan secara berkelanjutan;
   b. Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
   c. Memperkuat Komitmen Pimpinan dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   d. Mendorong pengembangan inovasi pelayanan public guna meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

3. Nilai Manajemen Risiko Indeks.
   a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur mengenai penerapan manajemen risiko melalui pelatihan dan sosialisasi;
   b. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah;
   c. Menyusun peta risiko organisasi secara lebih komprehensif pada setaiap perangkat daerah;
   d. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko;
   e. Mendorong terbentuknya budaya sara risiko dilingkungan organisasi guna mendukung penguatan sistem pengendalian internal pemerintah.

- **Analisas atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Manajemen Risiko Indeks menunjukkan bahwa pemanfaatan sumbner daya yang tersendia, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana pendukung telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tata Kelola pemerintahan. Meskipun demikian Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu terus ditingkatkan agar capai kinerja dapat lebih optimal.

Pada indikator Nilai LPPD, penggunaan sumber daya dfokuskan pada proses pengumpulan data, penyusunan laporan serta koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka pemenuha nindikator penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemanfaatan sumber daya tersebut telah mendukung proses penyusunan laporan, namun masih diperlukan peningkatan efektivitas koordinasi dan pemanfaatan system informasi agar proses pengumpulan dan pengengolahan data dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

Pada indikator indeks Reformasi Birokrasi, penguatan sumber daya diarahkan pada pelaksanaan berbagai program reformasi birokrasi seperti penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan serta pengembangan inovasi dalam tata Kelola pemerintahan. Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut telah memberikan kotribusi terhadap peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam pengolahan program agar hasil yang diperlukan dapat lebih maksimal.

Sementara itu, pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks, Pengutan sumber daya difokuskan pada kegiatan sosialisasi, penyusunan peta risiko di lingkungan perangkat daerah. Pemanfaatan sumber daya tersebut telah mendukung implementasi manajemen risiko, namun masuh perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia serta integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada ketiga indikator tersebut dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antara perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan Langkah – Langkah tersebut, diharpkan pemanfaatan sumber daya dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung peningkatankinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

- **Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Menejemen Risiko Indeks menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung lainnya, telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tata kelila pemerintah. Penggunaan sumber daya tersebut diarahkan pada kegiatan koordinasi antar perangkat daerah, penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan program Reformasi Birokrasi serta penerpaan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada indikator Nilai LPPD, efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari pemanfaatan aparatu perangkat daerah dalam proses pengumpulan data penyusunan laporan serta koordinasi dalam pemenuhan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui optimalisasi pemanfaatan system informasi dan peningkatan koordinasi atanra perangkat daerah sehingga proses penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan terintegrasi.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sumber daya yang tersedia telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program reformasi birokrasi, seperti peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan system pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan public. Pemanfaatan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi dalam mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan. Namun demikian, efisiensi penggunaan optimalisasi pelaksanaan program reformasi birokrasi serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sementara itu, pada indikator Nilai Manajemen Risiko Indeks, penggunaan sumber daya difokuskan pada kegiatan sosialisasi, penyusunan dokumen manajemen risiko serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko di lingkungan perangkat daerah. Upaya tersebut telah mendukung penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari system pengendalian internal pemerintah. Ke depan, efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksaan program kegiatan, serta optimalisasi pemanfaata teknologi informasi dalam pengelolaan risiko organisasi.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dayal mendukung pencapaian ketiga indikator tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber

daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimalisasi. Dengan demikian, diharapkan penggunaan sumber daya yang tersedia dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

fesiensi penggunanan sumber daya yang mendukung indikator ini dapat dilihat dari program dan kegiatan selama tahun 2024 yang terlaksana dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 dengan ukuran efesiensi berdasarkan input/ dana, out put / keluaran dan outcome / hasil yang realisasikan. Data pendukung efesiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.130 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Out put		Outcome		*Efesiensi*
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	realisasi	target	realisasi	
2024	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kinerja dan Reforasi Birokrasi	171.851.000	131.489.949	2 Dokumen	4 Dokumen	100% lDokumen disipkan tepat waktu	100% /4 Dokumen disiaokan tepat waktu	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	79.580.000	60.980.000.-	1 Dokumen	1 Dokumen	100% lDokumen disipkan tepat waktu	100% /1 Dokumen disiaokan tepat waktu	
	MR								
2025	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kinerja dan Reforasi Birokrasi	94.178.000,-	54.864.559,-	2 Dokumen	4 Dokumen	100% lDokumen disipkan tepat waktu	100% /4 Dokumen disiaokan tepat waktu	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	37.381.500,-	21.600.000.-	1 Dokumen	1 Dokumen	100% lDokumen disipkan tepat waktu	100% /1 Dokumen disiaokan tepat waktu	
	MR								

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Karimun, 2025

xii. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis meningkatnya kualitas palayanan public merupakan salah satu Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsive, transparan dan berorientasi pada Keputusan Masyarakat. Pelayanan public yang berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan terpenuhinya kebutuhan Masyarakat

secara cepat, tepat dan professional. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upya perbaikan dan inovaasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam system palayanan serta penguatan standar palayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi secara berkala melalui pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat guna mengetahui layanan yang diberikan serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Melakukan sasaran strategi ini dihasilkan penyelenggaraan pelayanan public dapat semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan public, Masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih muda diakses, cpat, serta seuai denga kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kuapasan maysarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan administratif, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten karimun. Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Karimun. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima. Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan publik dengan memperhatikan indikator indeks pelayanan publik atau kualitas pelayanan public. Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 telah menargetkan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,51 Adapun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.131 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Inidkator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
		Target	Realisasi	
Indeks Pelayanan Publik	4,37	4,00	4,28	107,00

Sumber : *Menpan RB, Tahun 2025*

Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik, pada tahun 2024 realisasi yang dicapai sebesar 4,37. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 4,00 dan hingga akhir tahun realisai diperoleh mencapai 4,28. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 107,00 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public telah

berjalan dengan baik. Berbagai Langkah perbaikan dan peningkatan pelayanan, seperti penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan serta penguatan sistem pelayanan kepada Masyarakat, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, capaian Indeks Pelayanan Publik yang melampaui target juga menunjukkan adanya komitmen dari perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Kedepan, capaian ini perlu terus dipertahankan dan tingkatkan melalui pengembangan inovasi pelayanan, optimalisasai pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan pelayan public yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui dengan jelas hasil penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing lokusnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.132 Nilai indeks Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Oleh Kementerian PAN RB Tahun 2025

NO	NAMA ULE	NILAI IPP ULE	NILAI IPP KABUPATEN	KATEGORI
1	Disdikbud	4,43	4,28	A-
2	Disdukcapil	4,71		
3	Dinsos	4,86		
4	DPMPTSP	4,59		
5	Dispuspan	4,2		
6	Disnakerprind	4,43		
7	Dinkes	4,67		
8	RSUD M. Sani	4,65		
9	Dinas PUPR	4,04		
10	Bapenda	4,75		
11	Satpol PP	3,13		
12	UPT Puskesmas Tanjung Balai	4,11		
13	UPT Puskesmas Tebing	4,8		
14	UPT Puskesmas Meral	4,43		
15	UPT Puskesmas Meral Barat	4,37		
16	UPT Puskesmas Tanjung Batu	4,42		
17	UPT Puskesmas Tanjung Berlian	4,72		

Sumber : *Mempan RB, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa data Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Layanan Elektronik (ULE) pada beberapa perangkata daerah dan unit pelayanan di Kabupaten Karimun, terlihat bahwa Sebagian besar unit layanan telah menunjukkan kinerja pelayanan public yang baik. Nilai IPP Kabupaten secara keseluruhan tercatat sebesar 4,28 dengan kategori A-, yang menggambarkan bahwa kualitas pelayanan public telah berada pada kategori sangant baik.

Beberapa perangkat dareah memperoleh nilai PP yang cukup tinggi, di antaranya Dinas Sosial

(Dinsos) dengan nilai 4,86 UPT Puskesmas Tebing sebesar 4,80, Bapenda sebesar 4,75, UPT Puskesmas Tanjung Berlian sebesar 4,72, serta Disdukcapil sebesar 4,71. Nilai yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa unit – unit layanan tersebut telah mampu memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara optimal, baik dari aspek standar pelayanan, kemudahan prosedur, maupun kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sementara itu, beberapa perangkat daerah juga memperoleh nilai yang cukup baik seperti DPMPTSP 94,59), Dinkes (4,67), Disnakperindag (4,43), serta beberapa UPT Puskesmas lainnya yang rata-rata berada pada kisaran nilai di atas 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan public di bebagai sektor, baik Pendidikan, Kesehatan, perizinan, maupun administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

Namun demikian masih terdapat unit layanan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, seperti Satpol PP dengan nilai 3,13 yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek palayanan yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pelayanan , kecepatan layanan maupun peningkatan kepuasan Masyarakat. Capaian nilai IPP pada berbagai unit layanan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Kedepan, peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dilakukan melalui penguatan standar pelaanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan serta pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, adapun realisasi dan capaian yang mendukung sasaran 16 (enam belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.105 dibawah ini:

Tabel 3.133 Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 16 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	94	102.17 %

Dari tabel 3.105 diatas dapat dilihat bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan kependudukan didapat dengan hasil realisasi sebesar 94%. Hasil ini menggambarkan bahwa realisasi capaian yang didapat bermakna baik sekali dengan capaian 102,17 %. Pencapaian realisasi nilai IKM ini didapat dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan cara memberikan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jasa layanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan Indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 3.134 Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00-78,60	C	Cukup
3	2,51 - 3,25	78,61-88,30	B	Baik
4	3,26 - 4,00	88,31-100	A	Sangat Baik

Adapun kuesioner yang diberikan adalah berisi pertanyaan yang terkait 9 (unsur) pelayanan dengan hasil kuesioner dari masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.89 dibawah ini :

Tabel 3.135 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan berdasarkan masing-masing Unsur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Kinerja Baik	Peringkat
U1	Persyaratan	2,249	Sangat Baik	7
U2	Prosedur	2,243	Sangat Baik	8
U3	Waktu Pelayanan	2,208	Sangat Baik	9
U4	Biaya/Tarif	2,370	Sangat Baik	3
U5	Produk Layanan	2,278	Sangat Baik	6
U6	Kompetensi Pelaksana	2,297	Sangat Baik	4
U7	Prilaku pelaksana	2,283	Sangat Baik	5
U8	Penanganan,pengaduan saran dan masukan	2,381	Sangat Baik	1
U9	Sarana dan Prasarana	2,326	Sangat Baik	2

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2025*

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata interval IKM 3,78 atau Sangat Baik merupakan Unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan.

Dari tabel 3,81 diatas dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah Biaya/Tarif,Penanganan,Pengaduan,saran dan masukan serta Sarana dan Prasarana(rata-rata 3,93) sedangkan unsur dengan nilai rata-rata (NRR) terendah adalah Persayaratan, Prosedur dan Waktu Pelayanan (rata-rata 3,72). Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun umumnya sangat Baik dan merasa sangat puas dengan

unsur-unsur pelayanan tersebut.akan tetapi unsur- unsur dengan NRR posisi 3 terendah perlu ditingkatkan Kembali kualitas pelayanannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan dari 9 (Sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 3,63 mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Proses menciptakan pelayanan public yang berkualitas maka ke-9 unsur pelayanan diatas harus ditingkatkan Kembali khususnya Waktu Pelayanan selain itu ada 3 (tiga) unsur lainnya yang juga harus ditingkatkan pada unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yang langsung berhubungan dengan Masyarakat antara Lain:

- Sarana Prasarana (NRR 3,75)
- Persyaratan (NRR 3,74)
- Prosedur Pelayanan (NRR 3,68)

Segi lama waktu pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu pelayanan dalam hal kependudukan di Kabupaten Karimun menunjukkan nilai baik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan pada tabel 3.108 dibawah ini :

Tabel 3.136 Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Kepedudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata –rata lama waktupelayanan	5 hari	3 hari	166,66%

Dari tabel 3.90 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM dalam hal pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang bernilai baik didukung pula dengan rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan dengan realisasi selama 3 (Tiga) hari dari target yang telah ditentukan selama 3 (tiga) hari.

Dari realisasi rata-rata lama waktu pelayanan Kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) hari, berdasarkan nilai interval lama pelayanan berada pada interval 2-5. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan berdasarkan rata-rata lama waktu pelayanan adalah baik dengan kinerja unit pelayanan baik. Adapun interval nilai kinerja unit pelayanan berdasarkan lama waktu pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.91 dibawah ini :

Tabel 3.137 Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL LAMA PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	0-1	A	Sangat Baik
2	2-5	B	Baik
3	6-14	C	Kurang Baik
4	> 15	D	Tidak Baik

Tabel 3.110 Capaian Rata-rata Lama Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

NOMOR	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET (HARI)	RATA-RATA LAMA PELAYANAN (HARI)	CAPAIAN (%)
1	Akta Kelahiran	5	3	166,67%
2	Akta Perkawinan	5	3	166,67%
3	Akta Perceraian	5	3	166,67%
4	Akta Kematian	5	3	166,67%
5	Akta Pengesahan Anak	5	3	166,67%
6	Kartu Keluarga	5	3	166,67%
JUMLAH	**1+2+3+4+5+6**		**18**	**1.000,02%**
RATA- RATA	**(1+2+3+4+5+6)/6**		**3**	**166,67%**

Baiknya pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun serta pengawasan dari masyarakat. Semakin ketatnya aturan yang mewajibkan seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat aparatur semakin sadar akan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat yang profesional. Agar kualitas pelayanan bisa tetap terjaga atau agar lebih baik lagi, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di indonesia antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia, inovasi dalam bidang pelayanan publik, perbaikan regulasi tentang pelayanan publik, perbaikan sistem pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam cara suatu layanan diberikan kepada pelanggan, pengguna, atau masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti:

1. Efisiensi : Layanan diberikan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Efektivitas : Layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
3. Kepuasan Pelanggan : Pelanggan merasa puas dengan proses dan hasil layanan.
4. Profesionalisme : Penyedia layanan bertindak dengan kompeten, ramah, dan penuh tanggung jawab.
5. Inovasi : Adanya penggunaan teknologi atau metode baru untuk mempermudah dan meningkatkan mutu layanan.
6. Aksesibilitas : Layanan lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
7. Konsistensi : Kualitas layanan tetap terjaga, tidak bergantung pada situasi tertentu.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun capaian realisasi yang mendukung sasaran 17 (tujuh belas) dengan indikatorIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.111 dibawah ini:

Tabel 3.138 Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.51	3.56	101.42 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik. Tareget yang ditetapkan sebesar 3,51 berhasil dilampaui dengan realisasasi sebesar 3,56, sehingga tingkat capaian mencapai 101,42%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi yang direncanakan. Nilai IKM yang melampaui 100% mengindikasikan adanya peningkatan persepsi positif masyarakt terhadap kinerja pelayanan, baik dari aspek prosedur, waktu layanan, kompetensi petugas maupun sarana dan prasarana pendukung.keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam peningkatan mutu pelayanan publik serta efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan. Ke depan, capaian ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui inovasi layanan, digitalisasi proses serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masarakat. Selengkapnya nilai capaian sasaran indikator sesuai hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun menyelenggarakan Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran keputusan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperlukan melalui SKM, antara lain :

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.56, setelah dikonversi dengan nilai dasar 25 maka indeks sebesar 89,07 sehingga mutu layanan masuk kategori " SANGAT BAIK (A)".
b. Survei dilaksanakan terhadap 560 (lima ratus enam puluh) responden yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berdasarkan karakteristik umur adalah masyarakat berusia di antara umur 20 tahun sampai dengan 30 tahun (43,57%), jenis kelamin perempuan (77,32%), pendidikan terakhir S1 (51,43%) dan pekerjaan utama PNS (34,82%).
c. Nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.
d. Unsur Penanganan Pengaduan (U8) memperoleh nilai tertinggi (3,90) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini merupakan hasil dari kecepatan dan ketepatan respon dari petugas pelayanan terhadap kebutuhan bantuan dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan oleh pengguna layanan.
e. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) memperoleh nilai terendah (3,42). Hal ini disebabkan oleh penerbitan izin yang harus menunggu rekomendasi dari OPD teknis sehingga waktu penerbitan menjadi lebih lama.

Grafik 3.13 ***Jawaban Responden per Unsur Pelayanan***

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut:

1. Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses pengurusan dokumen perizinan dan nonperizinan dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan pembuatan dokumen tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan agar proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat dan tidak terbelit- belit.
3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
4. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah banner/spanduk/leaflet/ brosur serta menggunakan media sosial, seperti Website, FB, Instagram, WhatsApp, sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh masyarakat.
5. Memastikan kemudahan proses pengurusan izin sehingga pengguna layanan tidak perlu mengurus izin melalui calo yang menyebabkan pengguna layanan membayar biaya/tarif yang seharusnya tidak diperlukan.
6. Terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan.

7. Responden yang mengisi kuesioner sebagian besar adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah mengurus surat izin praktik, sehingga untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebaiknya karakteristik responden lebih beragam terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha atau wiraswasta yang mengurus dokumen perizinan usaha dan lain-lain.
8. Memprioritaskan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terutama fasilitas jaringan internet melalui Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layananyang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 3.14

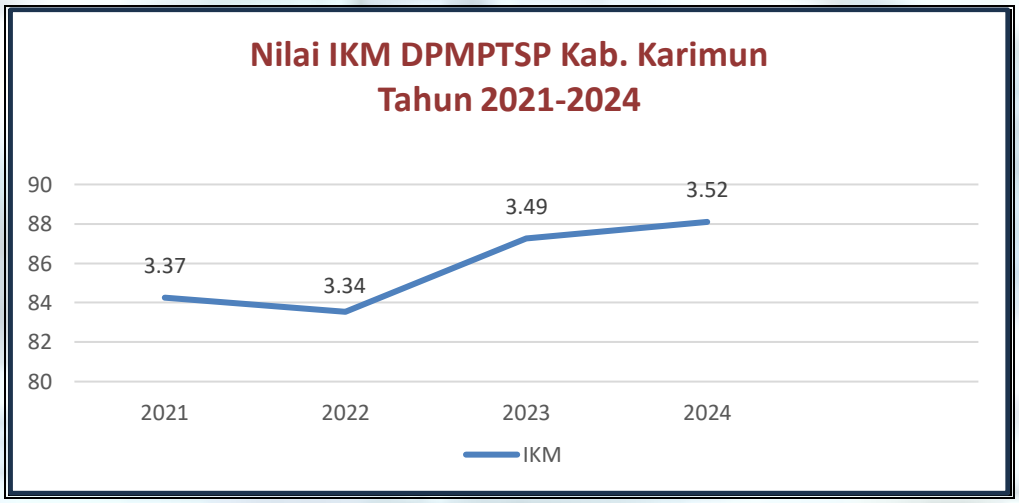

Fluktuasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi layanan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin, inovasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap masukan adalah kunci untuk menjaga tren tetap positif .

Kenaikan nilai IKM ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya :

- ✓ Penerbitan rekomendasi dari OPD teknis sudah semakin cepat, proses penerbitan rekomendasi teknis oleh OPD teknis sudah menggunakan system online dengan SOP Pelayanan yang baku, sehingga batas waktu pengurusan rekomendasi teknis telah ditetapkankan standardnya:
- ✓ Pemahamanan Masyarakat tentang alur proses perizinan pada aplikasi OSS maupun Aplikasi si Cantik

Clouds semakin meningkat, hal ini merupakan dampak dari gencarnya sosialisasi terhadap pelaku usaha sebagai pembinaan bagi pelaku usaha

- ✓ Petugas layanan lebih responsif dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan inovasi pelayanan yakni pantau sicantik mami, dimana petugas layanan turun ke pulau pulau untuk mensosialisasikan maupun membantu Masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengalami penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya (2021) namun masih dalam kategori Baik.

c. RSUD Muhammad Sani

Pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun capaian realisasi yang mendukung sasaran 17 (tujuh belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023dapat dilihat pada tabel 3.79 dibawah ini:

Tabel 3.139 Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2025

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	90,05	113%

Data capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 80, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai 90,05. Dengan demikiann, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 113 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Tingginya nilai indeks kepuasan maysarakat ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Keberhasilan dalam melampaui target ini juga menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan dan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayaran publik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun telah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan teknis anggaran berbasis kinerja tahun 2025 digunakan yaitu RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Bahwa Pendapatan sebesar Rp. 1.231.570.328.985,38 dan Belanja Daerah Sebesar Rp. 1.202.669.968.414,43 . Berpedoman pada Proyeksi indikator Makro LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2023 ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 diarahkan :

1. Meningkatkan Sumber Penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proposional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelola APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dana Perimbangan;
4. Menigkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.140 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan Daerah**	**1.261.374.051.671,00**	**1.231.585.650.476,38**	**97,63**	**1.317.275.580.458,97**
	Pendapatan Asli Daerah	403.112.004.485,00	404.259.897.258,60	97,41	372.697.795.861,97
	Transfer Pemerintah Pusat	783.645.231.000,00	752.220.082.767,00	95,98	867.763.371.421,00
	Transfer Dana Perimbangan	730.968.534.000,00	699.953.956.027,00	95,75	807.313.889.521,00
	Transfer Pemerintahan Antar Daerah	62.731.363.728,00	72.672.578.404,00	115,84	76.814.413.176,00
	Bantuan Keuangan	5.821.000.000,00	1.192.000.000,00	20,47	0,00
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	00,00	2.433.092.046,78	0	00,00

***Sumber** : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan data realisasi Pendaptan Daerah Tahun 2025, diketahui bahwa target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.261.374.051.671,00, dengan realisasi sebesar Rp. 1.231.585.650.476,38, atau 97, 63 persen dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp. 1.317.275.580.458,97, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mengalami sedikit penurunan, meskipun secara umum kinerja pendapatan daerah masih tergolong baik karena mampu mencapai hampir seluruh target yang direncanakan.

Dari komponen Pendapatan Daerah (PAD), target yang ditetapkan sebesar Rp. 403.112.004.485,00 dengan realisasi sebesar Rp. 404.259.897.258,60 atau 97,41 persen dari target. Realisasi PAD ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp. 372.697.795.861,97, sehingga menggambarkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selanjutnya pada komponen Transper Pemerintahan Pusat, target sebesar Rp. 783.645.231.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.220.082.767,00 atau 95,98 persen dari target. Nilai ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2024 yang mencapai Rp. 867.763.371.421,00 yang menunjukkan adanya penurunan penerimaan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2025.

Pada Transfer Dana Perimbangan, target sebesar Rp. 730.968.534.000,00 dengan realisasi Rp. 699.953.956.027,00 atau 95,75 persen, yang juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 807.313.889.521,00. Sementara itu, Transfer Pemerintah Antar Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan target Rp. 62.731.363.728,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.672.578.404,00 atau 115, 84 persen, meskipun masih sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 76.814.413.176,00..

Adapun bantuan keuangan memiliki target sebesar Rp. 5.821.000.000,00 namun realiasi hanya mencapai Rp. 1.192.000.000,00 atau 20,47 persen, yang menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber ini belum optimal. Selain itu, terdapat lain-lainnya Pendapatan yang sah dengan realisasi sebesar Rp. 2.433.092.046,78, meskipun tidak terdapat target pada komponen tersebut. Capaian pendapatan daerah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat realisasi mendekati target yang telah ditetapkan. Peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya yang cukup efektif dalam mengoptimalkan porensi pendapatan daerah, meskipun adanya upaya yang terdapat ketergantungan yang cukup besar terdapat pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Oeleh karen itu, upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD perlu terus dilakukan dimasa yang akan datang.

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut untuk meningkatkan Akuntabilitas meningkatkan perencanaan anggaran serta efektifitas danefesiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok

fungsi masing-masing opd.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proprosi belanja untuk kepentingan publik eksistensi penyelengaraan pemerintahan. Dalam penggunaanya belanja tetap mendepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas program strategi daerah. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Dana tranfer yang masing-masing Untuk meningkatkan Pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.141 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.082.283.388.424,77	1.001.941.238.828,50	92,57
2	Belanja Modal	119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05
3	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,61
4	Belanja Transfer	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,57
Total		**1.303.038.063.243,18**	**1.202.671.783.413,96**	**92,29**

***Sumber** : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan data diatas, total anggaran belanaj dialokasikan sebesar Rp. 1.303.038.063.243,18 dengan realisasi sebesar Rp. 1.202.671.783.413,96, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai 92,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan sebagian besar anggaran ygn telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana.

Pada komponen Belanja Oprasional, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.082.283.388.424,77 dengan realisasi sebesar Rp. 1.001.941.238.828,50 atau 02,57 persen. Belanja oprasional merupakan komponen belanja terbesar dalam struktur belanja daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya yang baik dengan oprasional penyelenggaraan pemerintah.

Selanjutnya pada Belanja Modal, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 119.311.487.550,09 dengan realisasi sebesar Rp. 105.057.610.836,46 atau 88,05 persen. Belanja modal digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengadaan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang bangi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan serta peningkatan sarana dan prasaran pelayanan publik. Untuk belanja Tidak Terduga, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.989.018.533,34 dengan realisasi sebesar Rp. 1.572.746.671,00 atau 52,61 persen. Persentase realisasi yang relatif lebih rendah pada komponen ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk kondisi darurrat atau kejadian yang tidak terduga selama tahun anggaran relatif tidak terlalu besar. Sementara itu pada Belanja Transfer, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 98.454.168.734,98 dengan realisasi sebesar Rp. 94.100.187.078,00 atau 95,57 persen. Belanja trasfer merupakan belanja yang dialokasikan

kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat realisasi belanja daerah sebesar 92,29 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan Transaksi Keuangan yang bertujuan Untuk menutupi Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Kebijakan Daerah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam Rangka Akurasi, Efesiensi, efektifitas dan Profittabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam Bentuak Giro/ Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalsasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluaskemitraan.

Tabel 3.142 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pembiayaan			
1	Penerimaan Daerah	44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	100,20
2	Pengeluaran Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
Total		41.664.011.572,18	41.755.490.538,18	100,21

***Sumber** : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025*

Berdasarkan data Pembiayaan Daerah, diketahui bahwa pada tahun anggaran berjalan pemerintah daerah mengalokasikan pagu pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 44.164.011.572,18 dengan realisasi sebesar Rp. 44.255.490.538,18 atau 100,20 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan daerah sedikit melampaui pagu anggaran yang direncanakan, sehingga memberikan tambahan dukungan terhadap struktur pembiayaan daerah. Sementara itu , pada komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan seluruhnya telah direalisasikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau 100,00

persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah telah dilaksanakn sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan , total pembiayaan daerah memiliki pagu sebesar Rp. 41.664.011.572,18 dengan realisasi sebesar Rp 41.755.490.538,18, sehingga tingkat capaian mencapai 100,21 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan dalam mendukung keseimbangan antara pedapata dan belanja daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut :
   1) Peraturan perundangan yang bersifat dinamis sehingga perlu pengembangan;
   2) Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan OPD;
   3) Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran;
   4) Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b) Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut:
   1) Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif;
   2) SIPD belum sempenuhnya mengakomodir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

c) Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut:
   1) Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal dibanding tahun ini supaya cukup waktu untuk pembahasan, evaluasi dan penyempurnaan;
   2) Perlu diberikan kesamaan presepsi mengenai indikator kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;
   3) Perlu adanya kebijakan dari Kabuapten Karimun terhadap seluruh OPD agar penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Karimun tepat pada waktunya.

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu, efesiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efesiensi biaya dilakukan dengan menggunakan Perbandingan Jika menurut kepada jumlah kucuran dana yang diberikan untuk tiap tahun anggaran, maka akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik belanja Operasional maupun belanja Modal yang diberikan untuk menopang kinerja BPKAD Kabupaten Karimun sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel 3.143 Anggaran Belanja Operasional

Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2025	%
1.095.223.926.705,47	1.082.283.388.424,77	92,57

***Sumber** : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025*

Dengan jumlah 45 orang ASN dan 36 orang Pegawai Kontrak yang 80 % latar belakang disiplin ilmunya adalah manajemen dan Ekonomi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator kinerja utama harus benar- benar diperhitungkan. Namun naik turunnya anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN BPKAD Kabupaten Karimun menurun, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan BPKAD Kabupaten Karimun dalam memenuhi target indikator kinerja utama, dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan sumber daya manusi di BPKAD tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber daya anggaran.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan regulasi, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-17 (Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah). Data perbandingan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 realisasi belanja tercatata sebesar Rp. 1.095.223.926.705,47, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.082.283.388.424,77 dengan tingkat realisasi sebesar 92,57 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran anggaran pada tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat realisasi sebesar 92,57 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 telah berjalan cukup optimal karena sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran daerah masih berada pada tingkat ygn cukup baik dalam mendkung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran yang tinggi juga menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas pelaksanaan belanja daerah guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 8).

Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur Pendapatandaerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024.

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2024 Rp. 705.757.174.927,- terealisasi Rp. 623.695.363.189 atau 88,37% terdapat efisiensi sebesar Rp. 82.061.811.738,-Disisi yang lain target Pendapatan Daerah Rp. 403.112.004.485,00,- terealisasi Rp. 341.870.142.537,47 atau 92.33 %

Tabel 3.144 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) dengan Kinerja Keuangan Tahun 2025 (Triwulan I s/d Triwullan III)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Nilai Investasi	24,500 Triliun	24,800 Triliun	101,22	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	75.130.000,-	65.755.400 -,	87,52	Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Satu Pintu
						101,22	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Dalam Miliar Rp)	2780.95	N/A	-	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.822.559.425,-	2.267.548.831,-	80,34	Dinas Pangan dan Pertanian
							2. Program Pengolahan Perikanan Tangkap	4.297.013.000,-	4.137.937.000.59,-	96,30	Dinas Perikanan
							3. Program Pengolahan Perikanan Budidaya	615.896.874,-	611.278.325,-	99,25	
							4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.700.000.00,-	25.141.450,-	19,69	
						96,69	**Rata-Rata Capaian**	**7.041.905.607,-**	**5.292.691.517,-**	**295,58**	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
							Program				
3.	Meningkatnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah	1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,68 %	33,39%	110,20	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.807.719.850,--	1.339.389.066,-	74,09.	Badan Pendapatan Daerah
						110,20	**Rata-Rata Capaian Program**	**1.807.719.850,--**	**1.339.389.066,-**	**74,09**	
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	1.	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	37,95 %	42,26%	111,36	1. Program Pengelolaan Sumber daya Air. 2. Pengelolaan dan Pengembangan Siste Drainase	2.413.481.585,00,-	-,-	94.59	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
						111,36	**Rata-Rata Capaian Program**	**1.101.723.974,-**	**1.042.069.274,-**	**94.06**	
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	1.	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	40,00	39,73	99,33	1. Program PenyelenggaraanJalan	92.928.544.069,98,-	-'	-	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
		2.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,69	0,54	78,26	2. Program PengelolaanPelayaran	138.717.000,-	96.455.000,-	69,53	Dinas Perhubungan
		3	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,93	0,87	93,55	3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-	-	88.60	
						271,13	**Rata-Rata Capaian Program**	**119.168.475.070,-**	**107.649.146.158,-**	**90,33**	
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	71,05 Tahun	75,05 Tahun	104,97	1. Program Pemenuhan UpayaKesehatan Perorangan dan	58.356.057.939,-	50.856.506.403,-	87,15	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
							Upaya Kesehatan Masyarakat				
							2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	45.000.000,-	15.814.900,-	35,14	Dinas Kesehatan
							3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	231,884,000,-	327.162.267,-	70,88	
							4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.723.695.950,-	2.575.250.950,-	69,16	
						104,97	**Rata-Rata Capaian Program**	**62.356.637.889,-**	**53.774.734.520,-**	**262,33**	
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,30 Tahun	12,63 Tahun	94,96	1. Program Pengelolaan Pendidikan	126.637.021.660,00	14.144.804.570,00	11,170	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Rata – Rata Lama Sekolah	9,99 Tahun	9,06 Tahun	90,69	2. Program PendidikDan Tenaga Kependidikan	85.174.629.326,00	9.652.419.296,63	11,33	
						185,65	**Rata-Rata Capaian**	**211.811.650.986,00,-**	**23.797.223.866,63,-**	**22,502**	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
							Program				
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	91,75	91,61	99,85	1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	100.000.000,-	0,-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Perlindungan Perempuan	225.998.000,-	163.411.197,-	72,31	
							3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	95.000.00,-	6.641.000,-	100	
							4. Program PerlindunganKhusus Anak	204.114.000,-	151.365.640,-	150,69	
						99,85	**Rata-Rata Capaian Program**	**530.112.000,-**	**321.417.837,-**	**323**	
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22 %	0,52 %	234,62	1. Program Pengendalian Penduduk	454.200.000 ,-	121.444.267,-	26,74	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)	1.756.130.000	1.513.856.572 ,-	86,20	
							4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.172.168.000 ,-	1.150.975.503 ,-	98,19	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
						234,62	**Rata-Rata Capaian Program**	**3.382.498.000**	**2.786.276.342**	**295,29**	
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	70	69,50	62,20	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	359.189.500,-	105.077.500,-	29,25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						62,20	**Rata-Rata Capaian Program**	**359.189.500,-**	**105.077.500,-**	**29,25**	
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam PelestarianNilai Budaya Daerah	1.	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	40,00 %	45 %	112,50	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 424.777.100	Rp 327.032.600	76,99 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	70.198.000,-	69.148.000,-	98,50 %	
							3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	
						112,50	**Rata-Rata Capaian Program**	**494.975.100**	**396.180.600**	**80,04**	
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1.	Persentase PPKS Mandiri	2,59 %	2,35 %	90,73	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	286,163,000,-	133,872,936,-	46,78	Dinas Sosial
							- Program Rehabilitasi Sosial	598,012,600,-	419,825,673,-	70,20	
						90,73	**Rata-Rata Capaian Program**	**884.175.600 ,-**	**553.698.609 ,-**	**116,99**	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga KerjaDi Daerah	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50 %	6,31`%	97,08 %	1. Program Pelatihandan Produktivitas Tenaga Kerja	1.437.737.300 ,-	1,437,737,300,-	89,89	Dinas Tenaga Kerja dan Periindustrian
							2. Program Penempatan Tenaga Kerja	380.825.200 ,-	. 270.722.700 ,-	166	
							3. Program Hubungan Industrial	225.006.800 ,-	185.907.513,-	175,53	
						97,08	**Rata-Rata Capaian Program**	**2.281.006.200 ,-**	**1.933.466.800 ,-**	**431,71**	
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	33,97 Ha	N/A	89,46 %	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,599,392,000,-	1,437,737,300,- ,-	96,34	Dinas Lingkungan Hidup
							2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (Pplh)	48.021.500,-	46.015.584,-	95,82	
		2.	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	50,00	N/A	72,05	2. Program Pengelolaan Persampahan.	2,288,015,775.00	2,178,270,085.00	95,20	Dinas Lingkungan Hidup
							3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.425.000,-	98.201.000,-	80,21	
						161,51	**Rata-Rata Capaian Program**			**91.89**	
15.	Meningkatnya	1.	Indeks Kualitas Air	55,00	72,56	95,68	1. Program	193.746.000,-	175.557.000,-	90,61	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
	Kualitas Udara, Tanah dan Air						Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.				
		2.	Indeks Kualitas Udara	95,20	73,94	76,72	2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).	51.711.420,-	49.528.500,-	95,78	
		3.	Indeks Kualitas Lahan	52,62	69, 00	131,13	3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	25.096.500,-	24.242.500,-	96,60	
						339,78	**Rata-Rata Capaian Program**			**94.33**	
16.	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	1.	Nilai LPPD	4,1000	N/A	-	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	37.381.500	21.600.000	57,78	Bagian Tata Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
		2.	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00	77,37	99,19	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.187.000,00	34.807.800,-	36,96	Bagian Organisasi
		3	Nilai Manajemen Risiko Indek	3,30	2.600	78,79	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	374.985.900,-	603.378.300, -	160,91	Baperlitbang
						177,98	**Rata-Rata Capaian Program**	**506.554.400,-**	**659.786.100,-**	**255,65**	
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4,28	107,00	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	11.256.000,,-	. 11.230.000-,	99.76	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani
							2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.016.907.554,-	5.535.731.942,-	24,05	
							3. Program Pendaftaran Penduduk	1.626.205.210,-	354.972.500,-	21,83	
							4. Program Pencatatan Sipil	79.400.000,-	7.278.000,-	9,17	
							5. Program Pengelolaan Informasi Admin istrasi Kependudukan	32.800.000,-	9.283.000,-	28,30	
							6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	155.403.000,-	59.836.936,-	38,50	
						107,00	**Rata-Rata Capaian Program**	**199.459.000,-**	**80.349.936,-**	**121,85**	

Tabel 3.145 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) dengan Kinerja Keuangan Tahun 2025 (Triwulan IV)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,06	100.89	Pengelolaan Pendidikan (SD)	126.637.021.660,-	14.144.804.570-,	11,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,63	12,63	100.00	Pengelolaan Pendidikan (SMP)	85.174.629.326,00,-	9.652.419.296,63-,	11,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						200.89	**Rata-Rata Capaian Program**	**211.811.650.986,-**	**23.797.223.867,-**	**22,50**	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup	72.61	75,05	103.36	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.356.057.939,-	50.856.506.403,-	87,15	Dinas Kesehatan
							2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	45.000.000,-	15.814.900,-	35,14	
							4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	231,884,000,-	327.162.267,-	70,88	
							5. Program Pemberdayaan	3.723.695.950,-	2.575.250.950,-	69,16	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
							Masyarakat Bidang Kesehatan				
		2.	Prevalensi Stunting	19.4	7.36	37.94					
						141.30	**Rata-Rata Capaian Program**	**62.356.637.889,-**	**53.774.734.520,-**	**262,33**	
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1.	Indeks Ketimpangan Gender	0,390	0.488	79,918	1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	100.000.000,-	0,-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Perlindungan Perempuan	225.998.000,-	163.411.197,-	72,31	
							3. Program Pemenuhan HakAnak (PHA)	95.000.00,-	6.641.000,-	100	
							4. Program Perlindungan Khusus Anak	204.114.000,-	151.365.640,-	150,69	
						79,918	**Rata-Rata Capaian Program**	**530.112.000,-**	**321.417.837,-**	**323**	
4.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	1.	"Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)"	65.6	71.33	108.73					Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						108.73	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
5.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	69.5	62.20	89.50	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	359.189.500,-	105.077.500,-	29,25	Dinas Pemuda dan Olah Raga
						89.50	**Rata-Rata Capaian Program**	**359.189.500,-**	**105.077.500,-**	**29,25**	
6.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	1.	Indeks Infrastruktur	0,2694	N/A	-					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
						-	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
7.	Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal	1.	Rasio Konektifitas	0,30	0.298	99.33	Program Pengelolaan Pelayaran	138.717.000,-	96.455.000,-	69,53	Dinas Perhubungan
						99.33	**Rata-Rata Capaian Program**	**138.717.000,-**	**96.455.000,-**	**69,53**	
8.	Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)	37,50	38,20	101.87	PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal	75.130.000,-	65.755.400 -,	87,52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
						101.87	**Rata-Rata Capaian Program**	75.130.000,-	65.755.400 -,	87,52	
9.	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	2.563,22	N/A	-	1. Program Pengolahan Perikanan Tangkap	4.297.013.000,-	4.137.937.000.59,-	96,30	Dinas Perikanan
							2. Program Pengolahan Perikanan Budidaya	615.896.874,-	611.278.325,-	99,25	
							3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.700.000.00,-	25.141.450,-	19,69	
							4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.822.559.425,-	2.267.548.831,-	80,34	Dinas Pangan dan Pertanian
						-	**Rata-Rata Capaian Program**	**7.041.905.607,-**	**5.292.691.517,-**	**295,58**	
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	1.	Persentase Keluarga Miskin yang Ditangani	40.60	42.71	105.20	1. Program Perlindungan DanJaminan Sosial	286,163,000,-	133,872,936,-	46,78	Dinas Sosial
							2. Program Rehabilitasi Sosial	598,012,600,-	419,825,673,-	70,20	
						105.20	**Rata-Rata Capaian Program**	**884.175.600 ,-**	**553.698.609 ,-**	**116,99**	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
11.	Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.48	6.31	115.15	1. Program Pelatihandan Produktivitas Tenaga Kerja	1.437.737.300 ,-	1,437,737,300,-	89,89	Dinas Tenaga Kerja dan Periindustrian
							2. Program Penempatan Tenaga Kerja	380.825.200 ,-	. 270.722.700 ,-	166	
							3. Program Hubungan Industrial	225.006.800 ,-	185.907.513,-	175,53	
						115.15	**Rata-Rata Capaian Program**	**2.281.006.200 ,-**	**1.933.466.800 ,-**	**431,71**	
12.	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	1.	Indeks Ketahanan Pangan	77,18	72,00	93,28					Dinas Pangan dan Pertanian
						93,28	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
13.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1.	Indeks Desa	69,35	N/A	-					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						-	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
14	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,60	71.97	97.79					Dinas Lingkungan Hidup
						97.79	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	
15.	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	1.	Indeks Risiko Bencana	99.87	153.17	153.37	Penanggulangan Bencana	287.481.400	41.697.000	60,82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
						153.37	**Rata-Rata Capaian Program**	**287.481.400**	**41.697.000**	**60,82**	
16.	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	N/A	-	Pengelolaan Aplikasi Informatika	186.572.000,00	119.957.700,00	64,30	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
	Digital										
						-	**Rata-Rata Capaian Program**	**186.572.000,00**	**119.957.700,00**	**64,30**	
17.	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP	76.20	75.91	99.62					Inspektorat Daerah
							Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.086.725.500,00	871.963.574,00	41,79	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
							Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	50.000.000,00	-	41,79	Bagian Organisasi Setda Kab.Karimun
		2.	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4.28	107.00	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	11.256.000,,-	11.230.000-,	99.76	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.016.907.554,-	5.535.731.942,-	24,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							3. Program Pendaftaran Penduduk	1.626.205.210,-	354.972.500,-	21,83	
							4. Program Pencatatan Sipil	79.400.000,-	7.278.000,-	9,17	
							5. Program Pengelolaan Informasi Admin istrasi Kependudukan	32.800.000,-	9.283.000,-	28,30	
							6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.403.000,-	59.836.936,-	38,50	Bagian Organisasi Setda Kab.Karimun

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
							Kabupaten/Kota.				
											RSUD M.SANI
		3.	Nilai Maturitas SPIP	3,35	3,20	95.52					Inspektorat Daerah
						302.14	**Rata-Rata Capaian Program**	**75.130.000,-**	**65.755.400,-**	**87,52%**	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui pelaporan kinerja berbasis outcome. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan pengukuran yang terstruktur, evaluasi dilakukan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Bupati Karimun untuk tahun 2024.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 25 IKU yang diukur, rata-rata capaian kinerja IKU Kabupaten Karimun telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi , yakni 96, 94%, dengan rincian 72% masuk dalam kategori sangat tinggi, 16% dalam kategori tinggi, dan 12% dalam kategori sedang. Ini menandakan bahwa sebagian besar target yang telah direncanakan berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, Secara lebih rinci, terdapat beberapa indikator yang berhasil melampaui target yang ditetapkan, seperti nilai investasi yang mencapai 162,38%, rasio Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan berprestasi sebesar 125%, dan indeks pelayanan publik sebesar 124,50%. Selain itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan kinerja positif adalah rasio KK yang terlayani infrastruktur dasar (111,51%), indeks reformasi birokrasi (109,42%), serta indeks kualitas udara (102,19%).

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih berada di bawah target yang diharapkan. Misalnya, indeks kinerja pengelolaan sampah yang hanya mencapai 72,05%, laju pertumbuhan penduduk yang berada pada angka 69,41%, dan rasio panjang jalan dalam kondisi baik yang hanya mencapai 58,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pencapaian pada sektor-sektor tersebut.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dengan mayoritas indikator berada dalam kategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui reformasi birokrasi dan kebijakan strategis.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, masih diperlukan perbaikan dalam aspek yang belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala, perencanaan yang lebih matang, serta peningkatan koordinasi antar instansi perlu terus dilakukan guna memastikan pencapaian target pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. Masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak juga diharapkan agar penyusunan LKjIP tahun berikutnya semakin akurat dan komprehensif.

LAMPIRAN :
Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024

PERINTAH KABUPATEN KARIMUN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Gedung C Lantai II
TANJUNG BALAI KARIMUN
Website : http://www.kab-karimun.go.id
Email :itda_karimun@yahoo.com

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Karimun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tg. Balai Karimun, 18 Maret 2025

INSPEKTUR

ASEP ZAINAL ARIFIN, SE,CGCAE
PEMBINA Tk.I
NIP.19661102 199303 1 001